2024

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar



BADAN POM
Badan Pengawas Obat dan Makanan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Ringkasan / Ikhtisar Eksekutif
Highlight Kinerja

I Pendahuluan
Latar Belakang
Gambaran Umum Organisasi
Struktur Organisasi
Isu Strategis

II Perencanaan Kinerja
Rencana Strategis
Rencana Kerja Tahun 2024
Rencana Kinerja Tahun 2024
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Metode Pengukuran

III Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja Organisasi

Evaluasi Tahun ke -5

Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pemanfaatan Informasi Kinerja

Realisasi Anggaran

IV Penutup

Lampiran

Kata Pengantar

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.

Memasuki tahun kelima periode Renstra BBPOM Makassar 2020-2024, BBPOM Makassar sebagai bagian dari Unit Kerja Badan POM telah ikut berperan dalam mewujudkan akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan kinerja.



Sejalan dengan Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024, kebijakan belanja Badan POM diarahkan untuk menjadi momentum transisi menuju adaptasi kebiasaan baru secara bertahap. Selain itu kebijakan harus menjadi instrumen untuk menyelesaikan permasalahan di sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dihadapi Indonesia kebijakan belanja Badan POM TA 2024 diarahkan antara lain untuk peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan,

peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, serta pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan kualitas pelayanan publik dengan melakukan penguatan pengawasan premarket dan post-market obat dan makanan yang komprehensif berbasis risiko. Juga peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan melalui penguatan koordinasi pengawasan obat dan makanan dari hulu ke hilir, peningkatan efektivitas penegakan hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Balai Besar POM di Makassar menyusun Laporan Kinerja Tahun 2024. Laporan ini menguraikan rencana kinerja, pencapaian kinerja, realisasi anggaran, efisiensi, inovasi, dan achievement Balai Besar POM di Makassar. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Tahun 2024, Balai Besar POM di Makassar mencapai Nilai Kinerja Organisasi sebesar 101,07.

Hasil pengukuran kinerja ini diharapkan dapat digunakan dalam monitoring dan mengevaluasi perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan tahun 2024. Disamping itu, laporan ini berfungsi sebagai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* sesuai Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi serta sebagai sarana evaluasi mandiri (Self evaluation) atas pencapaian Kinerja BBPOM di Makassar dalam upaya penyempurnaan kinerja pelaksanaan kegiatan Tahun 2024 yang merupakan tahun kelima Rencana Strategis BBPOM di Makassar periode 2020-2024.

Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 berdasarkan Reviu Rencana Strategi BBPOM Makassar 2020-2024, terutama dalam hal dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta kebijakan kegiatan di tahun berjalan yaitu tahun 2024 serta secara umum untuk tahun mendatang

Semoga kerja sama yang baik selama ini dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan upaya Balai Besar POM di Makassar meningkatkan kualitas layanan yang lebih baik lagi.

Tentunya diharapkan melalui kerja sama yang baik ini, akan mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.

Terima kasih kepada seluruh jajaran Balai Besar POM di Makassar, khususnya pada para pegawai yang ada di garda terdepan. Terus jaga integritas dan profesionalisme. Tetap nyalakan semangat untuk berbuat terbaik bagi bangsa kita dan mari kita kawal Obat dan Makanan aman, bermutu di provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 untuk percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Tahun 2024 ini dapat bermanfaat sebagai bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar dan umpan balik bagi

organisasi untuk mendorong peningkatan kinerja, serta dapat menjadi gambaran bagi generasi mendatang tentang bagaimana Balai Besar POM dalam berkarya dan berkinerja.

Makassar, 26 Februari 2025

K e p a l a



Dra. Hariani, Apt.

Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar



Kamis, 11 Desember 2024 Balai Besar POM di Makassar memperoleh prestasi membanggakan dengan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini. Pencapaian ini merupakan langkah lanjutan dari keberhasilan BBPOM di Makassar yang sebelumnya meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2022. Dengan predikat WBBM, BBPOM di Makassar telah menunjukkan konsistensi dan dedikasinya dalam membangun Zona Integritas (ZI) menuju reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima







Jumat, 27 Desember 2024 Luasnya cakupan pengawasan dan besarnya jumlah sampel dan parameter uji yang menjadi tanggung jawab Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Makassar, mendorong untuk senantiasa meningkatkan kapabilitas laboratorium. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah membangun kerjasama yang lebih kuat dengan lembaga pemerintah, industri, dan akademisi untuk mendukung peningkatan kapabilitas laboratorium. BBPOM di Makassar menginisiasi terbentuknya jejaring laboratorium pengawas obat dan makanan yang akan melibatkan beberapa laboratorium pengujian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Laboratorium diikuti oleh 32 laboratorium yang ada di provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya Perjanjian Kerjasama antar laboratorium pengujian di Sulawesi Selatan, diharapkan tercipta kolaborasi dan sinergime melalui kerjasama untuk mendukung peningkatan kapabilitas laboratorium pengawas obat dan makanan melalui pertukaran pengetahuan dan akses ke teknologi baru, memperkuat jaringan pengawasan obat dan makanan, serta berperan aktif dalam pengawalan keamanan pangan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan kerja sama di bidang lainnya.

Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar

Jumat, 08 November 2024. Dalam melakukan penanganan terhadap isu maraknya peredaran kosmetik ilegal dan diduga mengandung bahan berbahaya di wilayah Sulawesi Selatan, Badan POM dalam hal ini Balai Besar POM di Makassar bersinergi bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan untuk melakukan penindakan dan pemberantasan peredaran kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya

Agar diketahui bahwa produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya seperti mercury dan produk obat bahan alam yang mengandung bahan kimia obat sintetis seperti Bisacodyl dapat berdampak terhadap Kesehatan. Dampak yang ditiimbulkan terhadap pemakaian kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yaitu Merkuri (Hg) yang lebih dikenal dengan Air Raksa termasuk logam berat berbahaya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia.

Berdasarkan hasil Pengawasan dan Penindakan yang dilakukan ditemukan beberapa modus pelanggaran dan kejahatan di bidang kosmetik yaitu merek produk dari kosmetik telah terdaftar/ternotifikasi di Badan POM, namun pelaku usaha membuat sendiri/meracik sendiri/memproduksi sendiri kembali secara illegal yang tidak sesuai standar keamanan, manfaat, dan mutu.











Sabtu, 02 November 2024 Talkshow inspiratif bertajuk "Cerdas Memilih Skincare Aman dan Legal" Balai Besar POM di Makassar memberikan edukasi kepada Pharmasist yang berkecimpung dalam industri kosmetik, 'Sebagai Penanggung jawab harus membekali diri kita dengan kompetensi di seluruh aspek di bidang regulasi, komposisi, labeling dan iklan dari produk yang kita produksi/distribusikan. Komitmen untuk terus mengedukasi masyarakat agar lebih selektif dalam memilih skincare aman untuk digunakan serta memproduksi kosmetik yang bebas dari bahan berbahaya sesuai dengan regulasi yang ada.

Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar

Jumat, 25 Oktober 2024, Kunjungan kerja Kepala Badan POM di Balai Besar POM Makassar pada kegiatan pameran UMKM yang berkomitmen pentingnya pengawasan terhadap produk-produk berbahaya dan keakuratan informasi pada produk kosmetik yang beredar di masyarakat serta mendampingi UMKM agar produk mereka memenuhi standar keamanan dan mendapatkan nomor izin edar. Dengan memberikan pendampingan untuk mendapatkan nomor izin edar, dengan menaikkan derajat UMKM menjadi menengah.









Senin, 28 Oktober 2024 Balai Besar POM di Makassar turut mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Makassar untuk memperluas pasar hingga ke tingkat internasional. Dalam kegiatan "Export Assistance" yang diselenggarakan Bea Cukai dan Bank Mandiri di Mandiri Export House, Kepala BBPOM di Makassar, Hariani, memberikan materi seputar proses registrasi dan persyaratan ekspor produk yang harus dipenuhi UMKM untuk memastikan produk mereka layak masuk pasar global.

Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar







Jumat, 06 September 2024, Balai Besar POM di Makassar bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi Pedang Puang Basok 2024.





Kamis, 26 September 2024, PARENTING KIE (Pantau dan Reduksi Stunting melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi) Balai Besar POM di Makassar melaksanakan KIE Tematik Stunting berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PMDPPKBPPPA)



Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar

Kamis, 08 Agustus 2024, Sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum di Provinsi Sulawesi Selatan, perwakilan Balai Besar POM di Makassar, menghadiri kegiatan Pemusnahan Barang Bukti hasil dari perkara tindak pidana umum, berupa narkotika, sabu, ganja, ekstasi dan obat daftar Gn bagian dari inovasi Pedang Puang Basok 2024.









Senin, 19 Agustus 2024, kegiatan KIE merupakan kegiatan bermitra dengan Anggota DPR-RI Komisi IX untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat mengenai Keamanan Obat dan Makanan. KIE juga bertujuan meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan melindungi masyarakat dari makanan dan obat yang tidak memenuhi ketentuan

Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar

Senin, 22 Juli 2024, Mal Pelayanan Publik (MPP) adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan serta dapat meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di Indonesia









Selasa, 23 Juli 2024, Sebagai bentuk komitmen BPOM dalam melaksanakan amanat pemerintah untuk menyediakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, nyaman dan aman melalui pelaksanaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi di Mal Pelayanan Publik, setiap UPT BPOM di daerah akan melaksanakan pelayanan publik di MPP di setiap kabupaten/kota yang telah memiliki MPP.







Kamis, 13 Juni 2024, Dalam rangka menjalin sinergi dan kolaborasi lintas sektor antar laboratorium di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, BBPOM di Makassar menginisiasi pembentukan Jejaring Laboratorium pemerintah yang ada di wilayah Propinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian dalam Forum Focus Group Discussion (FGD)

Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar







Kamis-Sabtu, 02-04 Mei 2024, Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat, dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, Badan POM mengembangkan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas. Salah satu strategi implementasi program penyelenggaraan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas adalah program Pengawasan Keamanan Pangan di pasar

Badan POM menginisiasi 3 (tiga) program keamanan pangan yang merupakan Program Prioritas Nasional (ProPN) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yaitu program Desa Pangan Aman (Desa PAMAN), program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), serta Pangan Jajanan Anak Sekolah Aman (PJAS).

Balai Besar POM di Makassar melaksanakan kegiatan advokasi program tersebut kepada lintas sektor Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah intervensi ProPN pada tahun 2024







Highlight

Laporan Kinerja
Balai Besar POM di Makassar







Sebagai bentuk komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada Masyarakat dan pemangku kepentingan terkait, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar menggelar Deklarasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

BAB I

Pendahuluan



Bab I

Pendahuluan

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

1.1. Latar Belakang

Tahun 2024 merupakan tahun kelima yang penuh tantangan, tidak hanya di bidang ekonomi, namun di seluruh aspek kehidupan., Tahun 2024 juga merupakan tahun kelima masa Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2020-2024 yang memiliki visi Presiden "Terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Visi tersebut diterjemahkan lebih lanjut dalam 7 Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN periode 2020-2024.

Pencapaian visi Presiden tersebut dapat terwujud apabila segenap jajaran pemerintahan menjalankan tugas dan fungsinya secara tepat dan optimal, yang direfleksikan dari pencapaian kinerja dalam mendukung agenda prioritas nasional. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024. Dukungan Balai Besar POM di Makassar terhadap 7 Agenda Pembangunan sesuai RPJMN periode 2020-2024 dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) Balai Besar POM di Makassar.

Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan bahwa sistem Pengawasan Obat dan Makanan belum berjalan dengan optimal akibat berbagai tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian aspek keamanan, mutu, dan khasiat obat dan makanan sepanjang *product life cycle* yang merupakan satu kesatuan siklus mata rantai yang tidak dapat dipisahkan. Siklus ini dimulai dari pencegahan (sertifikasi dan pembinaan), pengawasan *post market*, hingga tindak lanjut hasil pengawasan berupa pembinaan, sanksi administratif, atau penindakan. Keseluruhan siklus ini berkesinambungan untuk memastikan produksi, distribusi, konsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat sekaligus juga memperkuat industri obat dan makanan

Sejalan dengan proses produksi yang lebih intensif, distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur *offline* tetapi juga *online*. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BBPOM di Makassar harus terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Badan POM mengemban tugas strategis sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Obat dan Makanan. Dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya diwilayah kerja Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar POM di Makassar dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Dalam pengantar Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, Presiden mengingatkan jajaran pemerintah untuk menuntaskan semua program dan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2024, “Target-target pembangunan atau sasaran-sasaran pembangunan pada tahun 2024 itu kita ingin dekatkan pada target yang sudah disusun di dalam kerangka RPJMN 2019-2024,” . Sejalan dengan Pidato Presiden RI pada penyampaian keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025 beserta Nota Keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI, 16 Agustus 2024 antara lain :

Sebagai bangsa yang tangguh, Indonesia mampu menghadapi tantangan yang sangat berat selama 10 tahun terakhir, mulai dari pandemi COVID-19, gejolak geopolitik global, perang dagang dan berbagai ancaman krisis, serta perubahan iklim yang menimbulkan banyak bencana. Alhamdulillah, walau diterpa banyak tantangan dan ketidakpastian, kondisi politik dan ekonomi kita tetap stabil, bahkan mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Strategi kebijakan jangka pendek akan difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, menguatkan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah. Makan Bergizi Gratis (MBG) diarahkan untuk meningkatkan gizi anak sekaligus memberdayakan UMKM, dan meningkatkan ekonomi masyarakat kecil di daerah. Program Makan Bergizi Gratis dilakukan secara bertahap, diselaraskan dengan kesiapan teknis dan kelembagaan, serta tata kelola yang akuntabel.

Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp197,8 triliun, atau 5,5 persen dari belanja negara untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan *stunting* dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Arsitektur APBN 2025 adalah pilar penting untuk menjaga keberlanjutan melalui penguatan berbagai program unggulan yang berkesinambungan dari pemerintah sekarang ke pemerintah yang akan datang. APBN 2025 dirancang untuk menjaga "Stabilitas, Inklusivitas, dan Keberlanjutan" untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Sesuai dengan arahan presiden tersebut, Badan POM memastikan DIPA Badan POM sangat mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional, dan Badan POM akan terus mengawal implementasinya, dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Maju.

Pada TA 2024, Badan POM memiliki 16 Proyek Prioritas Nasional (Pro-PN) pada Satker pusat dan 9 proyek Prioritas Nasional pada lingkup Balai Besar/Balai POM termasuk BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT dari Badan POM. Kepala Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk mengawal seluruh pelaksanaan kegiatan di terutama Pro-PN, baik realisasi anggaran dan fisik maupun kemajuan pencapaian target serta memastikan agar hingga akhir tahun 2024 kinerja Pro-PN mencapai target, sesuai dengan Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2024.

Balai Besar POM di Makassar sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBN sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Laporan Kinerja Tahun 2024 di Balai Besar POM Makassar disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Balai Besar POM di Makassar atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2024 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Balai Besar POM Makassar. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Balai Besar POM Makassar, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Balai Besar POM Makassar

Selain itu, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengawas Obat dan Makanan.



1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 05018/KBPOM/2001 Tahun 2001 dan beberapa kali mengalami perubahan sampai terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 tanggal 04 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM, Balai Besar POM di Makassar merupakan UPT BPOM yaitu satuan kerja bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Kedudukan Balai Besar POM di Makassar berada di bawah dan bertanggung jawab oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI nomor 22 Tahun 2020 merupakan langkah strategis penguatan kelembagaan BPOM yang diperlukan dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Terdapat 2 UPT BPOM di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (terdiri dari 24 Kabupaten/Kota) dengan masing-masing wilayah kerja sebagai berikut :

a. Balai Besar POM di Makassar, cakupan pengawasan meliputi 17 kabupaten/kota (Kota Makassar, Kabupaten Bone, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Selayar, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Barru, Kabupaten Takalar, Kota Pare-Pare
b. Balai POM di Kota Palopo, cakupan pengawasan meliputi 7 kabupaten/kota (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Enrekang)

Tugas

Melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fungsi

a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
c. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
e. Pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
f. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 tahun 2024 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka Balai Besar POM di Makassar telah melaksanakan sistem kerja berdasarkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Permenpan RB nomor 7 tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan hal tersebut, maka ada 2 pejabat yaitu pejabat pimpinan tinggi pratama (Kepala Balai Besar POM di Makassar) dan pejabat administrator (Kepala Bagian Tata Usaha). Untuk pembagian kerja dari Kepala UPT, maka dibentuk ketua tim dan anggota tim yang merupakan pejabat fungsional. Terdapat 25 orang ketua tim kerja di Balai Besar POM di Makassar dalam rangka mengawal pencapaian 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPT.

Struktur Organisasi
Balai Besar POM di Makassar



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi BBPOM di Makassar

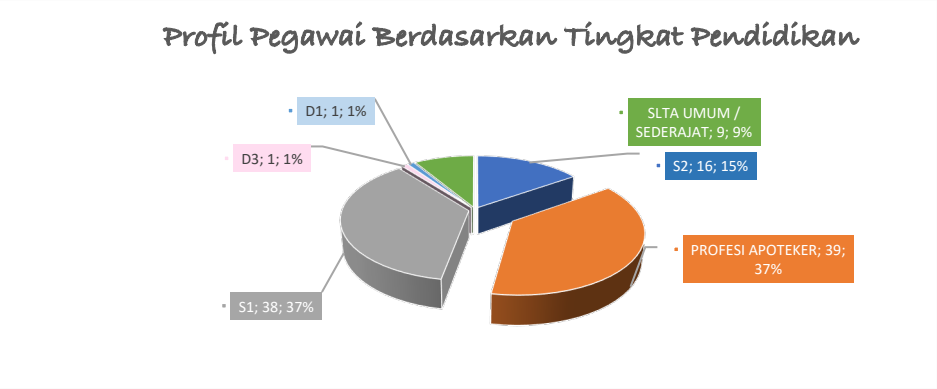
1.4. Analisis Lingkungan Strategis

INTERNAL

Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah SDM ASN yang dimiliki BBPOM di Makassar untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan per 31 Desember 2024 adalah sejumlah 104 orang yang tersebar di Bagian, Sub Bagian, Bidang dan Seksi Balai Besar POM di Makassar Jumlah SDM tersebut belum memadai dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BBPOM di Makassar telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja.



*Keterangan: data Nominatif Pegawai 2024

Gambar 1.2

Profil Pegawai Berdasarkan Pendidikan BBPOM di Makassar

BBPOM di Makassar harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan, meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi maupun Jabatan Fungsional. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir(*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di wilayah Sulawesi Selatan. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Sarana Prasarana

BBPOM di Makassar memiliki 4 (empat) gedung bangunan dengan total luas bangunan sebesar 4.929 m2 diatas total luas tanah 19.662 m

Sarana Transportasi

BBPOM di Makassar untuk memenuhi kebutuhan operasional kegiatan didukung sarana transportasi sebanyak, 6 unit mobil operasional, 3 unit mobil laboratorium keliling dan 1 unit mobil increnator

Sarana Komunikasi

(Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), 0411-871115

Anggaran

Sesuai Surat Pengesahan DIPA No. SP DIPA - 063.01.2.432923/2024, Pagu anggaran pada DIPA awal yang diterbitkan per 24 November 2023 sebesar **Rp. 51.666.112.000**. dimana mengalami

- Revisi 1 (Revisi kewenangan DJA, tema Revisi Anggaran dalam Hal Pagu Anggaran Berubah)
  Surat Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan no B-PR.05.03.21.01.24.14 tanggal 10 januari 2024 Hal Penyampaian data Pergeseran Anggaran antar Satker TA 2024 Menindaklanjuti adanya pembahasan antara Pimpinan dan Kapoksi Komisi IX DPR RI dengan Badan POM terkait program pemberdayaan masyarakat tahun 2024, didapatkan kesepakatan adanya penambahan output jumlah peserta dan jumlah titik pelaksanaan KIE bersama tokoh masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian berupa perpindahan dan penambahan anggaran pada Rincian Output BDC.001 "Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE, pengurangan sebesar Rp 1.579.456.000
  (Sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1082/MK.02/ Hal Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, melalui Surat Sestama Nomor B-PR.05.01.2.21.01.24.10 tanggal 09 Januari 2024 perihal Revisi Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024 untuk BBPOM Makassar sebesar 5.162.722.000

  Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (Selfblocking) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (Automatic Adjustment) TA 2024 terdapat *Automatic Adjustment* TA 2024) tanggal 31 Januari 2024 dengan pagu 50.086.656.000 jumlah yang ditidak dapat dicairkan 5.162.722.000
  52 Belanja Barang Rp. 962.722.000
  53 Belanja Modali Rp. 4.200.000.000

- Revisi 2 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA)
  tanggal 20 Februari 2024 dengan pagu 50.086.656.000 dengan catatan pada Halaman IVa
  jumlah yang ditidak dapat dicairkan 5.162.722.000
  52 Belanja Barang Rp. 962.722.000
  53 Belanja Modal Rp. 4.200.000.000

- Revisi 3 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA)
  tanggal 22 April 2024 dengan pagu 50.086.656.000

- Revisi 4 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA) tanggal 24 April 2024 dengan pagu 50.086.656.000

- Revisi 5 (revisi Kanwil Perbendaharaan dalam rangka mengajukan revisi hal III DIPA) tanggal 31 Mei 2024 dengan pagu 50.086.656.000

- Revisi 6 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan) tanggal 16 Agustus 2024, Hal Usulan Revisi anggaran Satuan Kerja di Badan POM dalam rangka memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai TA. 2024 dengan pagu 49.286.656.000

- Revisi 7 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran) tanggal 06 September 2024, Hal Revisi anggaran dalam rangka buka blokir Automatic Adjustment (AA) Badan POM TA 2024 dengan pagu 49.286.656.000

- Revisi 8 (revisi kewenangan Direktorat Jenderal Anggaran) tanggal 05 November 2024, Hal Usulan Revisi anggaran untuk memenuhi kebutuhan Belanja Pegawai TA, optimalisasi sisa kontrak dan revisi informasikinerja berupa perubahan Target Output pada RO N dan Non PN dengan pagu 49.286.656.000

- Revisi 9 (revisi Kanwil Perbendaharaan) tanggal 27 November 2024, Hal Penghematan / Self Blocking angagaran Belanja Perjalanan Dinas dengan pagu 49.286.656.000

- Revisi 9 (revisi Kanwil Perbendaharaan) tanggal 27 November 2024, Hal Penghematan / Self Blocking angagaran Belanja Perjalanan Dinas dengan pagu 49.286.656.000

- Revisi 10 (revisi Kanwil Perbendaharaan) tanggal 27 Desember 2024, Hal Pemutakhiran ADK dengan pagu 49.286.656.000

-

Realisasi anggaran per 31 Desember 2024 adalah Rp 45.027.676.125 (91,36 %), dari pagu sebesar 49.286.656,000.

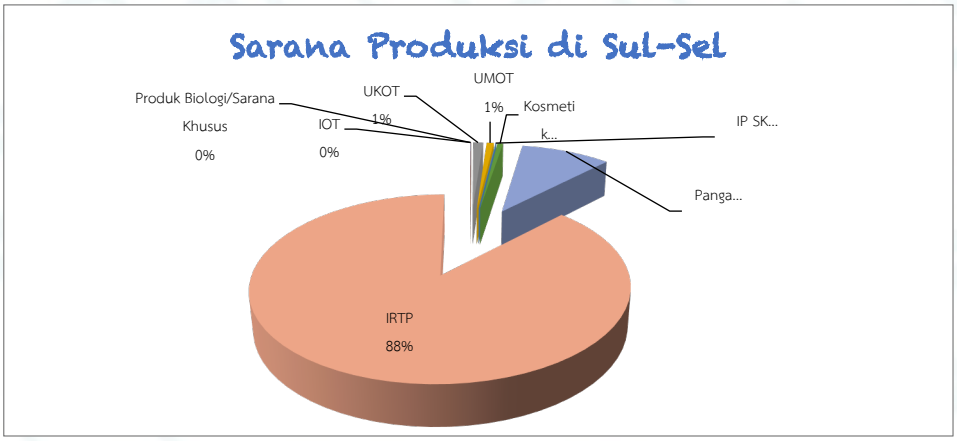
EKSTERNAL

KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 24 kabupaten/kota dan Balai POM di Kota Palopo (7 kabupaten/kota) yang dikoordinasikan oleh Balai Besar POM di Makassar.

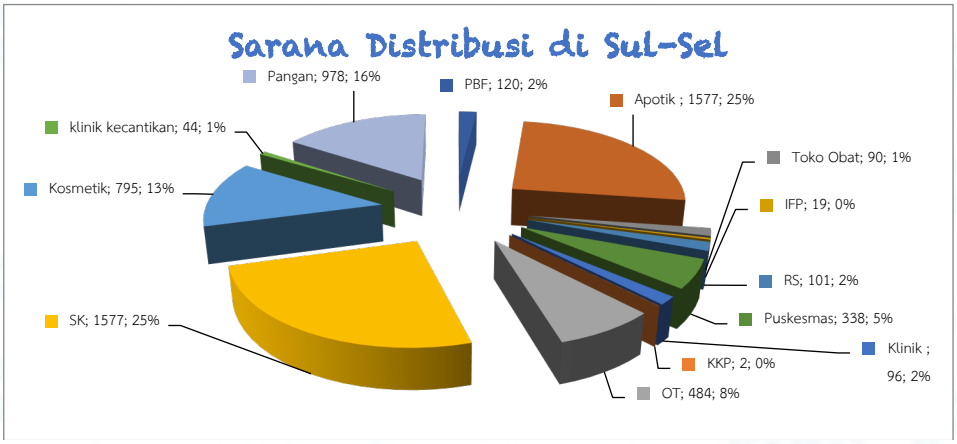
Jumlah Sarana Produksi dan Distribusi yang diawasi

Sarana produksi produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya. Jumlah sarana produksi dan distribusi yang diawasi di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana pada gambar 3. tersebut di bawah ini



Gambar 1.3

Sarana Produksi di wilayah Kerja BBPOM di Makassar



Gambar 1.4

Sarana distribusii di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

1.5. Isu Strategis

Dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar 2020-2024, Balai Besar POM di Makassar telah melakukan identifikasi potensi dan permasalahan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi Balai Besar POM di Makassar dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Namun demikian, masih

terdapat beberapa isu-isu strategis terkini yang belum tertuang di dalam Renstra Balai Besar POM di Makassar tersebut yang perlu dianalisis lebih lanjut karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

Beberapa isu strategis yang dapat berpengaruh pada kinerja Balai Besar POM di Makassar antara lain:

a. Pandemi Covid-19

Potensi:

1) Balai Besar POM di Makassar di perlukan perannya dalam pengawalan mutu dan keamanan produk serta integritas sepanjang rantai suplai vaksin Covid-19 hingga penggunaan di masyarakat.
2) Peran BBPOM di Makassar dalam mengawal pengembangan fitofarmaka maupun obat tradisional lain yang dapat menjadi alternatif dalam pengobatan Covid-19.
3) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi informasi tentang keamanan dan mutu produk obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan yang digunakan dalam penanganan Covid-19.

Permasalahan:

1) kapasitas SDM BBPOM di Makassar terbatas untuk melakukan pengawalan dalam rangka memastikan keamanan dan mutu vaksin sampai didaerah pelosok dan kapasitas SDM pada sarana distribusi(GFK) dan pada sarana pelayanan kesehatan masih belum memadai serta sarana dan prasarana penyimpanan kurang.
2) keterbatasan pengetahuan pelaku usaha dan informasi masyarakat dalam pengembangan obat tradisional dalam rangka penanganan covid-19
3) Meningkatnya produksi dan peredaraan obat-obatan seperti suplemen, vitamin dan obat-obat untuk penyembuhan Covid-19 sehingga perlu peran BPOM dalam intensifikasi pengawasan baik *pre/postmarket* obat-obatan tersebut.

b. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Potensi:

BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM diharapkan peran sertanya dalam mendukung *Major Project* Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Reformasi SKN, BBPOM di Makassar mendukung 4 (empat) area reformasi yaitu:

1) **Area ke-4 "Pengendalian Penyakit dan Imunisasi"**

Penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, sampling dan pengujian obat COVID-19, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan peningkatan *Monitoring* Efek Samping Obat Tradisional (MESOT).

Kasus Gangguan Ginjal Akut pada Anak

Dalam penanganan kasus cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) yang ditemukan dalam sirup obat sejak Oktober 2022, BPOM telah melakukan langkah- langkah antisipatif, seperti intensifikasi surveilans mutu produk, penelusuran dan pemeriksaan terhadap sarana produksi dan distribusi, hingga

pemberian sanksi administratif, termasuk melakukan verifikasi pemastian mutu terhadap sirup obat yang beredar. Upaya - upaya penindakan juga terus dilakukan terhadap sarana produksi dan distribusi jika terdapat unsur pidana bidang kesehatan. Balai Besar POM di Makassar turut berkontribusi dalam penanganan kasus Gangguan Gagal Ginjal dengan melakukan pemeriksaan sarana produksi, pengujian sampel melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana produksi. Pengujian terhadap sampel EG DEG tidak hanya dilakukan pada sampel obat sirup, namun juga pada produk bahan tambahan pangan dengan bahan utama pelarut sorbitol, polietilen glikol.

Generasi Stunting Mengancam Masa Depan Bangsa

Stunting merupakan manifestasi dari malnutrisi atau gizi buruk sebagai akibat dari kebutuhan pangan yang tidak tercukupi pada anak-anak. Stunting ditandai dengan gangguan pertumbuhan anak sehingga memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya. Kondisi ini dapat berdampak pada pertumbuhan fisik yang tidak optimal dan juga berisiko menimbulkan gangguan kesehatan dan perkembangan kecerdasan anak- anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Karena itu, saat ini keamanan pangan dan akses pangan yang bernutrisi dan berkualitas menjadi prioritas dari World Health Organization (WHO) dan menjadi fokus tema dari Hari Pangan Sedunia Tahun 2018, yaitu Our Actions are Our Future, a Zero Hunger World by 2030 is possible.

BPOM mempunyai peran strategis dalam upaya percepatan penurunan stunting melalui program keamanan pangan melalui pengawasan fortifikasi pangan, intervensi keamanan pangan di desa (desa pangan aman), Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman/Germas SAPA, dan Pangan Jajanan Anak Sekolah /PJAS dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Balai Besar POM di Makassar melakukan pengawasan post-market dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, pengawasan iklan dan penandaan, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat.

Pengawasan Obat Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM berperan serta dalam mendukung Major Project Reformasi Sistem Kesehatan Nasional. Dalam Mengantisipasi dampak yang dapat merugikan masyarakat dari penerapan JKN, Balai Besar POM di Makassar meningkatkan peran dalam memberikan jaminan obat yang aman, bermutu dan bermanfaat serta mengantisipasi adanya penggunaan obat palsu dan pendistribusian obat dari jalur ilegal melalui pengawasan/inspeksi pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi, Penguatan farmakovigilans obat dan vaksin, intensifikasi pengawasan distribusi dalam rangka menjaga mutu vaksin, perluasan cakupan dan peningkatan Monitoring Efek Samping Obat Tradisional (MESOT), melakukan sampling dan pengujian laboratorium obat-obat publik di sarana instalasi farmasi/gudang farmasi Kabupaten/Kota, puskesmas, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan lainnya.

Implementasi Inpres 3 tahun 2017 dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dengan diterbitkannya Instruksi Presiden No. 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, diharapkan dapat memperkuat kinerja BPOM dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan sinergisme kemitraan dengan Kementerian maupun lintas sektor terkait di daerah. Perlu adanya landasan hukum yang kuat dalam koordinasi pelaksanaan di daerah, untuk itu peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi, pembinaan, pengawasan dan tindaklanjut perlu disiapkan. Tindaklanjut oleh instansi terkait atas rekomendasi yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Makassar sangat berpengaruh terhadap peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan. Sebagai upaya untuk implementasi Inpres 3, maka Badan POM memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke 20 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang dimanfaatkan untuk pemeriksaan dalam rangka pengkajian ijin fasilitas kefarmasian dan penyelenggaran bimtek tenaga kefarmasian difasilitas pelayanan keferamasian dalam pemenuhan stadart dan persyaratan, KIE, sampling, bimtek keamanan pangan untuk pelaku usaha IRTP, pengawasan sarana IRTP, pengkajian ulang sertifikat produksi IRTP, inventarisasi sarana IRTP, monitoring tindak lanjut pengawasan sarana. BBPOM Makassar melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan DAK di Provinsi Sulawesi Selatan.

2) **Area ke-5 "Kemandirian Farmasi dan Alat Kesehatan"** dukungan/ pengawalan dalam produksi Obat Tradisional yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam penanganan Covid-19; Pengawalan pengembangan produksi Fraksionasi Plasma Konvalesen darah dalam rangka penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB) di Unit transfusi darah

3) **Area ke-6 "Ketahanan Kesehatan (*Health Security*)"** khususnya dalam hal Penguatan Jejaring, mekanisme rujukan dan akreditasi laboratorium serta Peningkatan kapasitas SDM dan pemenuhan sarana prasarana laboratorium. Kontribusi Balai Besar POM di Makassar dalam area ini antara lain: penguatan kapasitas dan kemampuan uji Laboratorium Balai Besar POM di Makassar; peningkatan kapasitas SDM penguji serta implementasi *Grand Design* Penguatan laboratorium Balai Besar POM di Makassar; pemenuhan sarana prasarana laboratorium POM untuk peningkatan kualitas uji (obat dan makanan); peningkatan jejaring laboratorium Obat dan Makanan.

Keamanan pangan di masyarakat desa, baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha pangan desa

Pembangunan ekonomi desa/kelurahan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi kabupaten/kota dan merupakan subsistem dari pembangunan ekonomi provinsi yang berlanjut sebagai penopang perkembangan ekonomi secara nasional. Kurang lebih 80 % penduduk berada di perdesaan, maka pembangunan ekonomi harus melibatkan langsung atau tidak langsung penduduk perdesaan. Oleh sebab itu pengembangan ekonomi perdesaan menjadi hal yang wajib untuk dilakukan. Dengan berkembangnya ekonomi desa akan menurunkan angka kemiskinan. Untuk itu Badan POM menginisiasi program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), sebagai salah satu prasyarat peningkatan kesehatan

keluarga secara mandiri. Program ini sarat dengan keterpaduan dan koordinasi karena melibatkan semua pihak terkait baik jajaran pemerintahan daerah maupun tatanan masyarakat termasuk pelaku usaha sebagai pilar ekonomi di perdesaan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat desa melalui kader- kader yang selama ini telah terbentuk, seperti PKK dan karang taruna. Hingga tahun 2021 Balai Besar POM di Makassar baru dapat mengintervensi 25 desa dari 3.051 desa yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kecilnya jumlah desa yang diintervensi ini disebabkan karena keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan kerjasama dengan lintas sektor terkait agar dapat ikut serta menggalakkan sosialisasi tentang keamanan pangan di seluruh desa. Masyarakat sebagai sub sistem pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran penting dalam memilih. dan menggunakan produk sehingga kesehatannya tetap terjaga serta partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan informasi produk-produk yang kemungkinan dapat merugikan kesehatan menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas Balai Besar POM di Makassar sehingga masyarakat terhindar dari produk yang tidak memenuhi syarat.

4) **Area ke-8 "Optimalisasi Teknologi Informasi dan Pemberdayaan Masyarakat"** melalui Digitalisasi pelayanan Kesehatan dan pengaktifan kader Kesehatan. Pada area ini BPOM dapat berkontribusi melalui penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan yang *real time* dan terintegrasi dalam rangka mendukung Satu Data Indonesia, digitalisasi pengawasan *pre-market* dan *post-market*, patrol siber, penguatan KIE kepada masyarakat, dan program ke komunitas.

Tren Penjualan Produk Obat dan Makanan Secara Online

Produksi terhadap komoditi Obat dan Makanan yang lebih intensif serta distribusi produk obat dan makanan semakin masif tidak hanya melalui jalur offline tetapi juga online. Dinamika lingkungan strategis pengawasan obat dan makanan ini perlu diantisipasi dengan tepat sehingga BPOM terus melakukan upaya perbaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan karena hal ini juga menjadi peluang untuk penjualan produk-produk obat, suplemen makanan, obat tradisional, kosmetika dan makanan illegal (tidak memiliki ijin edar, kadaluwarsa).

Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, untuk mencegah tindak kejahatan obat dan makanan sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Untuk itu, penertiban peredaran produk ilegal yang dipasarkan secara online juga menjadi salah satu fokus pengawasan BPOM. Balai Besar POM di Makassar yaitu melakukan sampling produk Obat dan Makanan yang dijual secara on-line, sebagai upaya perlindungan masyarakat dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak aman.

UMKM di Sulawesi Selatan

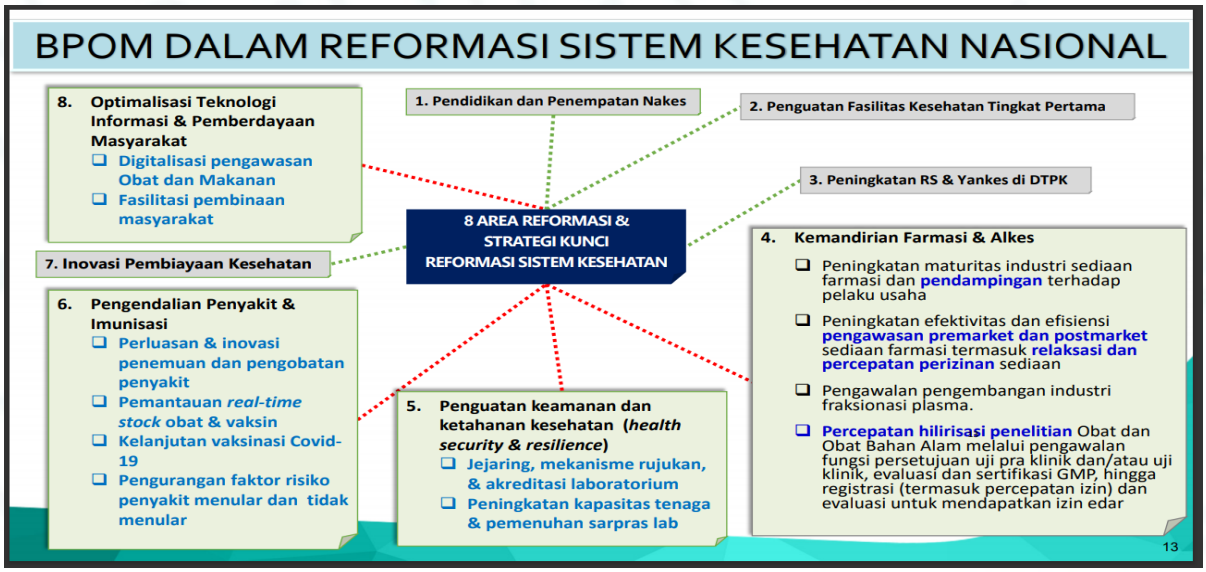
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, sektor industri pengolahan merupakan sektor pendukung utama perekonomian Sulawesi Selatan dengan konstribusi terbesar yaitu sekitar 30% pada tahun 2019. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri pengolahan menunjukkan peningkatan pertumbuhan di atas 4% untuk lima tahun terakhir, di mana industri pengolahan pangan

memberikan kontribusi terbesar yaitu Rp 21,97 triliun dengan pertumbuhan 4,26 %, termasuk di dalamnya UMKM di bidang pangan.

Melihat data tersebut, tampak bahwa sektor UMKM merupakan sektor andalan di Sulawesi Selatan sehingga peran UMKM dalam proses pembangunan di Sulawesi Selatan patut diberi perhatian lebih. Jangkauan pemasaran komoditas hasil olahan makanan dan minuman adalah pasar lokal Sulawesi Selatan, antar daerah di luar Sulawesi Selatan (ekspor antar daerah), serta sebagian kecil diekspor ke luar negeri. Sebagai salah satu upaya penguatan daya saing produk, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat baru sekitar 525.000 UMKM di Sulawesi Selatan yang memanfaatkan teknologi digital dalam membangun usaha. Angka tersebut hanya 35 persen dari total 1,5 juta UMKM yang ada di Sulsel. jumlah ini menunjukkan bahwa belum maksimalnya peran teknologi digital di sektor UMKM Sulsel, padahal digitalisasi sangat diperlukan dalam pengembangan UMKM di era sekarang. Penerapan teknologi digital di sektor UMKM yang ada di Sulsel masih terkendala, rata-rata kendalanya karena tidak semua pelaku UMKM mengetahui teknologi. Selain itu, tingkat inovasi dan kreatifitas para pelaku UMKM juga belum maksimal. Oleh karena itu, akan mulai mendorong peningkatan kualitas UMKM dengan melakukan berbagai penyuluhan, dimulai dari cara membuat kemasan yang menarik. Tahap modernisasi akan mengacu pada beberapa aspek, mulai dari kemasan hingga branding produk. Selanjutnya skema digitalisasi, dimana pelaku UMKM akan diarahkan untuk menjual produknya di media sosial atau e-commerce yang tersedia. Sehingga penjualannya bisa meluas menjangkau semua wilayah. Hal ini mendorong BBPOM di Makassar untuk turut serta membantu mewujudkan UMKM yang dapat menghasilkan produk yang berdaya saing sehingga dapat meningkatkan perekonomian rakyat dengan membuat inovasi program pendampingan Pedang Puang Baso (Pendampingan Pelaku UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik) yaitu Kegiatan pendampingan dengan memberikan fasilitas dan informasi yang tajam kepada UMKM sehingga dapat mengangkat dan meningkatkan daya saing produk yang dihasilkan dengan adanya legalitas berupa nomor izin edar produk.

Reformasi Birokrasi (WBK/WBBM)

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang professional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Balai Besar POM di Makassar merupakan Unit Pelaksana Teknis Badan POM yang telah memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2022 serta untuk tahun 2024 Balai Besar POM di Makassar berkomitmen untuk dapat meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani).



Gambar 1.5.. Delapan Area Reformasi Sistem Kesehatan Nasional

Permasalahan:

1) Kesadaran *stakeholder* dan masyarakat dalam melaporkan kasus efek samping obat dan makanan yang dibutuhkan dalam penguatan farmokovigilans masih relatif rendah.
2) Kemampuan laboratorium pengujian obat dan makanan dalam penerapan teknologi dan metode pengujian tidak sebanding dengan kemajuan teknologi yang diterapkan dalam industri obat dan makanan sehingga pengujian terhadap beberapa produk belum bisa dilakukan
3) Kemampuan Laboratorium pengujian obat dan makanan masih belum dapat menjangkau seluruh wilayah cakupan BBPOM di Makassar
4) Masih terbatasnya kapasitas BPOM dari sisi pemenuhan sumberdaya yang diperlukan untuk menyempurnakan sistem informasi yang andal.

Potensi

1. Sumber daya alam melimpah (hasil laut, perkebunan, pertanian) yang melimpah sebagai sumber bahan baku produk lokal spesifik UMKM di Sulawesi Selatan dalam rangka peningkatan daya saing produk.
2. Keterbukaan / komitmen pemerintah daerah untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam pelaksanaan program prioritas nasional dan program pengawasan obat dan makanan.

Permasalahan:

- Produk pangan olahan luar negeri yang masuk ke wilayah Sulwesi-Selatan melalui jalur illegal seperti melalui Kalimantan Utara.
- Produk kosmetik racikan yang dibuat dengan mencampur produk kosmetik jadi kemudian diedarkan secara online.
- Kurangnya pemahaman masyarakat dan lintas sektor terkait tentang pembagian kewenangan pengawasan produk obat dan makanan

  Terbatasnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan aplikasi pendaftaran produk secara online sehingga memanfaatkan pihak ketiga dalam prosesnya.

Agar pelaksanaan Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024 dapat lebih terarah dan efektif, maka perlu ditetapkan fokus perencanaan tahunan agar seluruh elemen organisasi dapat berkomitmen mendukung fokus tersebut. Fokus Renstra 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut:



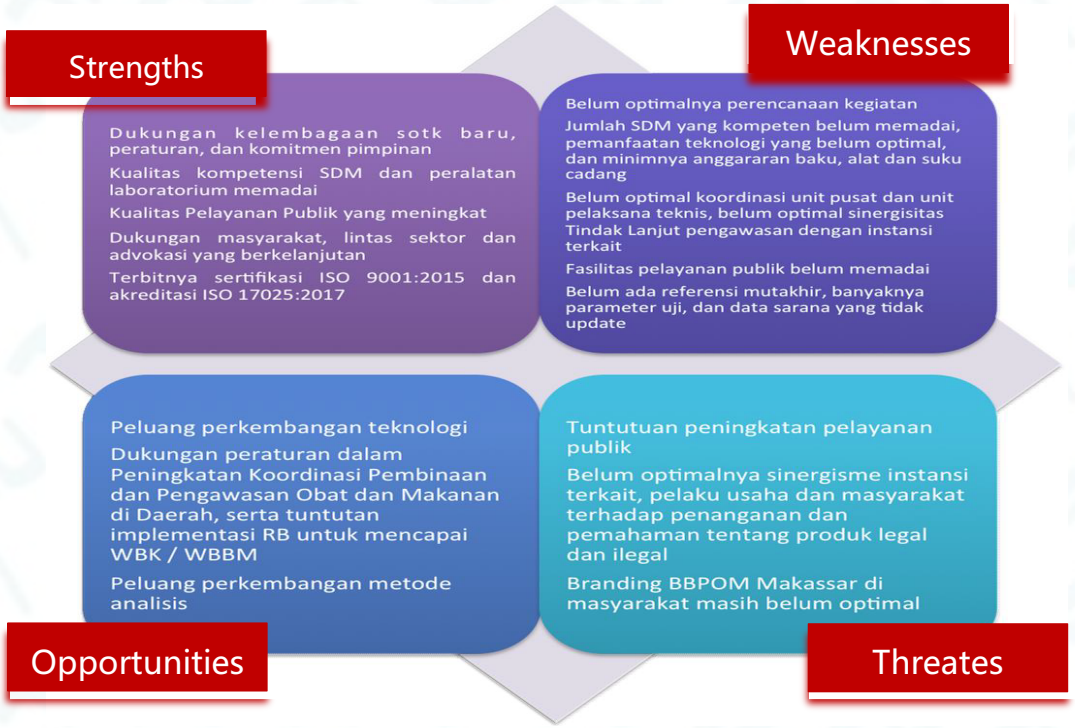
Gambar 1.6

Roadmap Strategi BBPOM di Makassar 2020-2024

- Tahun 2024 :

  Peningkatan integrasi pengawasan premarket-postmarket termasuk penegakan hukum, pusat-balai, fungsionalisasi UPT (pemenuhan people, process, infrastructure), serta pembenahan database pengawasan Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas riset/kajian dan pemanfaatan TIK secara optimal.

BBPOM di Makassar dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar melakukan identifikasi lingkungan internal dan eksternal untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan organisasi serta kondisi-kondisi elemen eksternal menggunakan analisis SWOT Strengths (kekuatan), Weaknesses (kelemahan), Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman). Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Identifikasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), kesempatan (opportunities), dan ancaman (threats) telah memberikan pandangan bagi BBPOM di Makassar terkait permasalahan yang timbul dari keadaan lingkungan dalam dan luar BBPOM di Makassar tertuang dalam tabel berikut ini:



Gambar 1.7. Hasil Analisis SWOT

BAB II

Perencanaan Kinerja



Bab II

Perencanaan Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan Fungsi Pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Makassar berkomitmen melaksanakan dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar periode 2020-2024 telah mengacu pada Rencana Strategis Badan POM periode 2020-2024 dimana Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020, maka telah dilakukan reviu terhadap Renstra BBPOM di Makassar Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Penyelarasan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan yang karenanya merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan kapasitas BPOM sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPOM di Makassar 2020-2024.

Renstra BBPOM di Makassar sebagai bagian dari UPT Badan POM periode 2020-2024 merupakan dokumen indikatif yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan BBPOM di Makassar yang disusun dengan mengacu pada Nawacita dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maka Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, mutu, manfaat/khasiat Obat dan Makanan tersebut sesuai persyaratan yang telah ditetapkan. Untuk itu, Balai Besar POM di Makassar telah menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasarannya, yang sesuai dengan visi dan misi Badan POM.



Visi

"Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong"

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Balai Besar POM di Makassar untuk mewujudkan Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta

dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejalan dengan itu, maka pengertian Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing mencakup aspek sebagai berikut::

Aman

Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu

Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya Saing

Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri

Visi BPOM disusun sesuai dengan Visi Presiden RI 2019 – 2024 yaitu *Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong*

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi sebagai berikut :

Misi

1. ***Membangun SDM Unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan Kualitas Manusia Indonesia***
2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***
3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***
4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

Penjelasan misi :

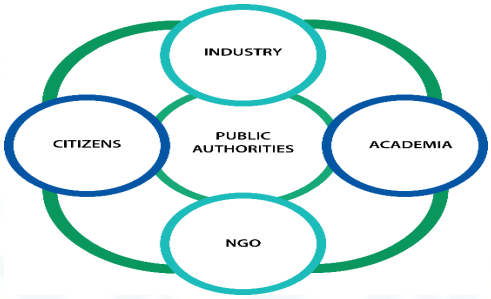
1. ***Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia***

   Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia.** Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus BPOM ke depan.

   Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, BPOM melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.

   Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

   Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 2.1 *Penta Helix* Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: *https://pentahelix.eu*.

2. ***Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.** Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sector industry itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen tergadap total ekspor dan 60 persen tenaga kerja industry ada di lima sector tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kepasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industry non migas pada tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan regulatory, sehingga BPOM berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan regulatory (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan

dalam beberapa tahapan: ***1) Standardisasi Obat dan Makanan; 2) Registrasi Obat dan Makanan; 3) Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk; 4) Pengujian Secara Laboratorium; 5) Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan.***

4. ***Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan***

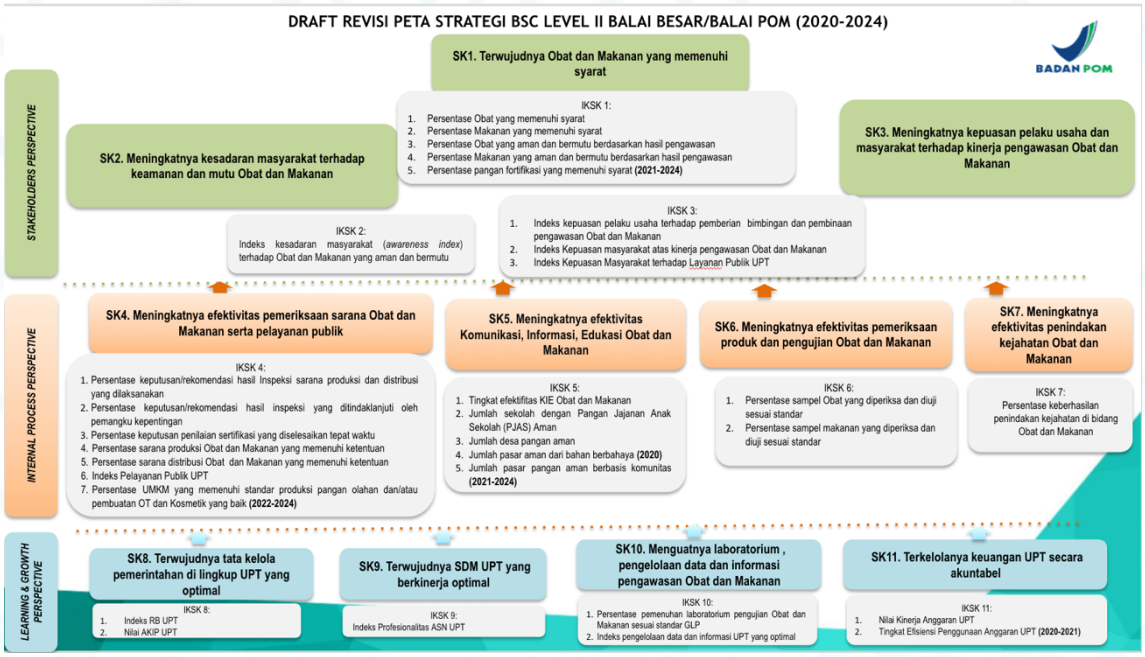
   Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.** Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

Misi Balai Besar POM di Makassar merupakan langkah utama yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar POM di Makassar. Pengawasan pre- dan post-market berstandar internasional didukung dengan perkuatan dari aspek laboratorium terakreditasi sesuai ISO:IEC 17025 tahun 2017 yang diterapkan dalam rangka memperkuat Balai Besar POM di Makassar menghadapi tantangan globalisasi. Dengan penjaminan mutu produk obat dan makanan yang konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermutu dan berdaya saing , diharapkan Balai Besar POM di Makassar mampu melindungi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan khususnya, dan Indonesia pada umumnya dengan optimal.

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2) Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan.
3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan public yang prima

Berdasarkan pertimbangan dari 3 (tiga) perspektive dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Stakeholder Perspective ; Internal Process Perspective dan Learning and Growth Perspective*, maka sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama dalam peta strategi level II Balai Besar POM di Makassar berdasarkan **Reviu Renstra 2020-2024** dimana Tidak ada perubahan peta strategi Balai Besar POM di Makassar yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama Balai Besar POM di Makassar Tahun 2020-2024 karena masih sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Makassar, namun demikian dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja IKU Balai Besar POM di Makassar. Adapun sasaran strategis dan IKU Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam peta strategi BPOM sebagai berikut :



Gambar 2.2 Peta Strategis Level II BBPOM di Makassar

Sumber: Reviu Rencana Stretegis BBPOM di Makassar 2020 - 2024, 2022

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar POM di Makassar maka Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 menggunakan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja berdasarkan Reviu Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

SASARAN STRATEGIS KEGIATAN DI BALAI POM MAKASSAR

Sasaran Strategis berdasarkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar peiode 2020-2024

Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja BBPOM di Makassar

Perspective	Sasaran Strategis		Indikator	
Stakeholder	SS.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSS.1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSS.1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS.1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSS.1.5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat
	SS.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.2.1	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar
	SS.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.3.1	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.2	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
			IKSS.3.3	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
Internal Process	SS.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.4.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSS.4.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSS.4.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSS.4.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSS.4.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

			IKSS.4.6	Indeks Pelayanan Publik
			IKSS.4.7	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan. Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
			IKSS.4.8	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota
	SS.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.5.1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
			IKSS.5.2	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman
			IKSS.5.3	Jumlah desa pangan aman
			IKSS.5.4	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
	SS.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar .	IKSS.6.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
			IKSS.6.2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	SS.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS.7.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Learning and Growth	SS.8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	IKSS.8.1	Indeks RB BBPOM di Makassar
			IKSS.8.2	Nilai AKIP BBPOM di Makassar
			IKSS.8.3	Nilai Pengelolaan Kearsipan
	SS.9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS.9.1	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar
	SS.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS.10.1	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
			IKSS.10.2	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal
	SS.11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS.11.1	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar
			IKSS.11.2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

IKSS.11.3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
IKSS.11.4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Stakeholder Perspective :

1. **Sasaran Strategis 1 :**

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Komoditas/produk yang diawasi BBPOM di Makassar tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

Pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control)* untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post-market* dilakukan secara terpadu, konsisten, dan terstandar.

Kedua, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.

Ketiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

1) **Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 98,20 pada akhir tahun 2024;**
2) **Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 93,30 di tahun 2024;**

3) **Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan , dengan target sebesar 92,80 pada akhir tahun 2024;**
4) **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 95,50 pada akhir tahun 2024.**
5) **Persentase Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 87,00 pada akhir tahun 2024.**

Indikator ini sekaligus sebagai salah salah ukuran keberhasilan tujuan BPOM "Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat".

2. **Sasaran Strategis 2**

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BBPOM di Makassar bertugas melakukan pengawalan terhadap kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan *Risk Management Program* oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

Selain itu, dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai Besar POM di Makassar melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE).

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya adalah :

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 85,00 pada akhir tahun 2024.

3. **Sasaran Strategis 3**

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sebagai salah satu Lembaga pemerintah non kementerian, BBPOM di Makassar berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik BBPOM di Makassar, mencakup berbagai hal yang terkait

dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik BBPOM di Makassar bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional.

Sesuai dengan prinsip 3 (tiga) pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai Besar POM di Makassar perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai Besar POM di Makassar perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis ini maka indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah:

1) **Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target sebesar 97,70 pada akhir tahun 2024;**
2) **Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan, dengan target sebesar 80,00 pada akhir tahun 2024;**
3) **Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 95,50 pada akhir tahun 2024.**

Internal Process Perspective:

4. **Sasaran Strategis 4**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila BBPOM di Makassar mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. BBPOM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator :

1) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diilaksanakan, dengan target sebesar 95 pada akhir tahun 2024;**

2) **Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75 pada akhir tahun 2024;**
3) **Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu , dengan target sebesar 98 pada akhir tahun 2024;**
4) **Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71,20 pada akhir tahun 2024;**
5) **Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 80 pada akhir tahun 2024.**
6) **Indeks Pelayanan Publik, dengan target sebesar 4,70 pada akhir tahun 2024.**
7) **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 100,00 pada akhir tahun 2024.**
8) **Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 95,00 pada akhir tahun 2024**

5. **Sasaran Strategis 5**

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) :

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/ bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini.

Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar akan meningkat efektivitasnya apabila mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai Besar POM di Makassar perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Hal ini sejalan dengan Inpres No.3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) **Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 96,70 pada akhir tahun 2024;**
2) **Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, dengan target sebesar 124 pada akhir tahun 2024;**
3) **Jumlah desa pangan aman, dengan target sebesar 31 pada akhir tahun 2024;**
4) **Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya, dengan target sebesar 22 pada akhir tahun 2024.**

6. **Sasaran Strategis 6**

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BBPOM di Makassar mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BBPOM di Makassar, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikatornya sebagai berikut:

1) **Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2024**
2) **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 100 pada akhir tahun 2024.**

7. **Sasaran Strategsi 7**

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BBPOM di Makassar melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu

Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 97,00 pada akhir tahun 2024.

Learning and Growth Perspective

8. Sasaran Strategis 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BBPOM Makassar berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BBPOM Makassar akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitusionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM BBPOM di Makassar agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BBPOM di Makassar untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Makassar, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BBPOM di Makassar. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Indeks Reformasi Birokrasi BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 91,51 pada akhir tahun 2024;**
2) **Nilai AKIP BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 82,45 pada akhir tahun 2024.**
3) **Nilai Pengelolaan Kearsipan, dengan target sebesar 89,47 pada akhir tahun 2024.**

9. Sasaran Strategis 9

Terwujudnya SDM BBPOM di Makasssar yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan

kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 86,85 pada akhir tahun 2024.

10. Sasaran Strategis 10

Menguatnya laboratorium , pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium serta sistem operasional teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan di era *internet of things.*

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

1) **Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP, dengan target sebesar 85,44 pada akhir tahun 2024**.
2) **Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal, dengan target sebesar 3,00 pada akhir tahun 2024.**

11. Sasaran Strategis 11

Terkelolanya keuangan BBPOM di Makassar secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan BBPOM di Makassar dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar, dengan target sebesar 96,03 pada akhir tahun 2024;
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, dengan target sebesar 81,56 pada akhir tahun 2024;
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dengan target sebesar 49,00 pada akhir tahun 2024;
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan target sebesar 60,00 pada akhir tahun 2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahun 2024

Pada akhir tahun 2024, Balai Besar POM di Makassar telah menyusun dokumen rencana kinerja tahunan tahun 2024 mengacu pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Makassar tahun 2020-2024. Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 34 indikator kinerja. Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 1 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 2.2

Rencana Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,20
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,30
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,80
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,70
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	95,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,20

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,70
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	124
		Jumlah desa pangan aman	31
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	91,51
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82,45
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	89,47
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	86,85
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,44
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	3,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	90,03
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81,56
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	49,00
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka BBPOM di Makassar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan

kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 merupakan tahun kelima pelaksanaan Renstra Tahun 2020-2024. Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah :

1. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabiltas, transparansi, dan kinerja aparatur :
2. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan pemberian *reward* (penghargaan) dan *punishment* (sanksi);
4. untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja;
5. penetapan sasaran kerja pegawai.

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024

Sebelum perubahan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,20
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,30
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,80
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50
		Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,70
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	95,50
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,20

		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,00
		Indeks Pelayanan Publik	4,70
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,70
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	124
		Jumlah desa pangan aman	31
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal	Indeks RB BBPOM di Makassar	91,51
		Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82,45
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	89,47
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	77
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,44
		Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	3,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	90,03
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81,56
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	49,00
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60,00

Kegiatan	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp 49.286.656.000

Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 sesuai pada Tabel 2.3 inilah yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar tahun 2024.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. PK disusun berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun sumber dana (anggaran). Dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja dalam PK harus didukung oleh kegiatan dan anggaran, serta dipantau secara berkala. Untuk itu perlu disusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK). RAPK memuat target kinerja per bulan dan anggaran per indikator kinerja yang dilengkapi dengan detil aktivitas pendukung. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar selalu dimonitoring dan dievaluasi setiap bulannya melalui aplikasi BOC dan setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan bulan berikutnya

Sebagai bentuk *continuous improvement*, setiap tahun dilakukan reviu berkala terhadap keberhasilan pencapaian target kinerja yang ditetapkan, sebagai dasar penetapan PK dan RAPK yang selanjutnya dituangkan dalam kertas kerja sebagai Lampiran PK dan RAPK.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target indikator kinerja, PK level organisasi harus didukung dengan PK level individu (SKP). Tatacara penyusunan dan penetapan PK level individu diatur dalam Peraturan BPOM tentang Penerapan Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPOM.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM Makassar Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	762.312.600
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	598.629.000
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	508.208.400
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	399.086.000
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	42.285.000
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	48.168.000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	32.112.000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	142.834.000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	292.690.000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.642.720.000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	461.661.000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	111.224.000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	134.618.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	3.913.239.000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	8	15	30	44	52	57	66	76	85	94	124	1.017.105.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	4	9	14	19	27	40	52	64	72	80	88	31	1.091.866.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	13	20	43	59	70	81	82	91	95	99	22	604.009.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	2.143.676.400
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.3	8	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.429.117.600
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12	15	25	35	40	45	50	60	70	75	80	97	1.475.332.000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.44	4.262.500.000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	409.070.000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	76.404.000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.7	296.174.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	148.636.000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.5	48.278.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.51	20.174.689.000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.45	354.045.000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.47	30.672.000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.85	510.094.000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	25	35	58	0	0	0	0	0	0	0	0	90.03	1.604.807.000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.56	4.982.405.000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1.791.140.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	126.305.000
														Total	51.666.112.000

Makassar, 15 May 2024

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Dra. Hariani, Apt

2.5. Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 120%	
Baik	=100%	
Cukup	70% ≤ x < 100%	
Kurang	<70%	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan *monitoring* kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS :

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	90 ≤ NPSS ≤ 100	
Butuh Perbaikan	70 ≤ NPSS < 90	
Kurang	50 ≤ NPSS < 70	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar ≥ 100%.	▲
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar 70% - <100% (70 ≤ x < 100).	▲
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar <70% (x < 70).	▼

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Mekanisme pelaksanaan pengukuran kinerja yang dilakukan di BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut:

a. Adanya penunjukan 1 (satu) orang petugas penanggungjawab data di BBPOM di Makassar yang disahkan dalam SK Kepala BPOM
b. Kepala BBPOM di Makassar menunjuk perwakilan penanggungjawab data di setiap bidang dengan menerbitkan SK Kepala BBPOM di Makassar
c. Penanggung jawab data di setiap bidang meng-*input* data kinerja pada kertas kerja sesuai Indikator Kinerja secara rutin setiap bulan dan mengirimkan data pada Group Whatsup Monev Makassar diverifikasi oleh penanggungjawab data Balai. Verifikasi data kinerja juga dilakukan saat rapat evaluasi kinerja setiap bulan.
d. Apabila terjadi kesalahan data, pemilik data menyampaikan perbaikan data kepada penaggungjawab data balai, lalu mengisi form perubahan data dan melakukan input perubahan data.
e. Data kinerja yang telah terverifikasi digunakan sebagai bahan untuk meng-*input* data setiap bulan pada Aplikasi SMART DJA, monev Bappenas dan aplikasi *e-performace* dan aplikasi BOC.
f. Data Capaian Kinerja Per Bulan dan Data Realisasi Anggaran secara Real Time, dapat diakses informasinya melalui Makassar.pom.go.i pada menu Dasikuka atau pada tautan https://sites.google.com/view/dasikuka
g. Pengelolaan data kinerja sebagai bahan informasi yang terintegrasi secara elektronik melalui sistem informasi melalui pemanfaatan aplikasi *e-performance* yang sedang dikembangkan dengan menggunakan *Balance Score Card* (BSC) serta pengukuran kinerja secara *cascading* dari level eselon 2 hingga individu untuk mendukung keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi penguatan akuntabilitas. Pengukuran ini pun akan diintegrasikan dengan aplikasi Simakin (Aplikasi Manajemen Kinerja) pada aplikasi SIASN aplikasi BOC, yang merupakan pengukuran kinerja hingga level individu secara periodik triwulanan dimana penilaian pengukuran kinerja ini menjadi tolak ukur dalam pemberian *reward* dan *punishment* atas prestasi kerja pegawai dalam penetapan persentase pemberian tunjangan kinerja pada triwulan berikutnya.
h. Evaluasi kinerja terkait pencapaian indikator kinerja yang dilakukan secara rutin setiap bulan untuk memonitor pelaksanaan kegiatan guna mengetahui permasalahan dan kendala yang dihadapi sejak dini dalam rangka upaya pencapaian target akhir tahun.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja



Bab III
Akuntabilitas Kinerja

16 Dari 34 indikator untuk penilaian Kinerja Tahun 2024 pada 11 sasaran strategis, dinyatakan "Sangat Baik" terhadap target yang telah ditetapkan, sedangkan 6 indikator dinyatakan "Baik" ; 11 indikator dinyatakan "Cukup " serta 11 indikator dinyatakan "Tidak Dapat Disimpulkan"

3.1. Capaian Kinerja

Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruh sasaran strategis. Kinerja Tahun 2024 merupakan kinerja Tahun kelima Renstra BBPOM di Makassar 2020-2024. Capaian kinerja Tahun 2024 sebesar 101,07 % dihitung dari rata-rata capaian dari seluruh sasaran kinerja berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis NPSS. Nilai NPSS Tahun 2024 lebih tinggi dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2022 sebesar 101,07.

Gambar 3.1 Dashboard Peta Strategi BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective			
	Capaian Perspective sakeholder	**95,80**	**95,80**
Internal Process Perspective			
	Capaian Internal Process Perspective	**99,14**	**99,14**
Learning & Growth Perspective			
	Capaian Learning & Growth Perspective	**108,27**	**108,27**
	NPS TOTAL	**101,07**	**101,07**

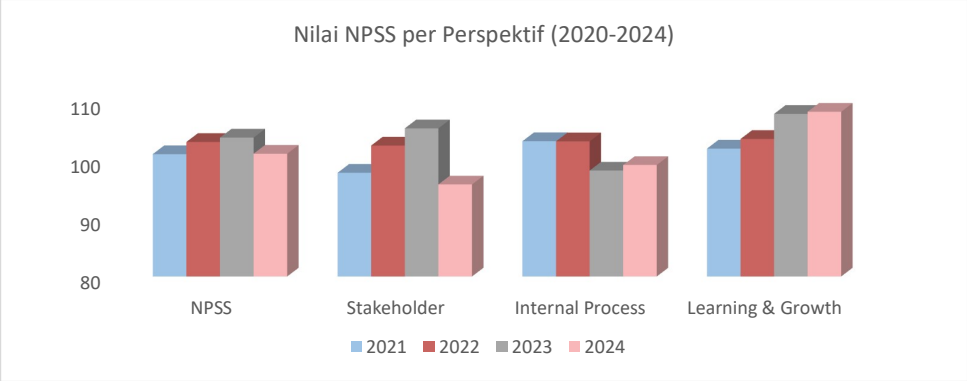
diperoleh nilai NPSS di Tahun 2024 sebesar 101,07 % dengan kategori Istimewa yaitu NPS perspektif stakeholder sebesar 95,80 % ; NPS perspektif sebesar internal proses 99,14 dan NPS perspektif *learning & growth* sebesar 101,07 %. Dengan demikian disimpulkan bahwa di BBPOM di Makassar **telah berhasil** mencapai target yaitu 101,07 dengan kategori kinerja organisasi istimewa.

NPSS BBPOM di Makassar tahun 2024 bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut:

Tabel Nilai NPSS Tahun 2020-2024

Tahun	NPSS	Stakeholder	Internal Process	Learning & Growth	Predikat
2021	101	97,8	103,22	101,96	**Istimewa**
2022	103,09	102,48	103,19	103,61	**Istimewa**
2024	103,84	105,43	98,18	107,92	**Istimewa**
2024	101,07	95,80	99,14	108,27	**Istimewa**

Grafik Nilai NPSS Tahun 2020-2024



Terdapat peningkatan dari 2020 hingga 2024, menunjukkan bahwa kinerja keseluruhan NPSS dari tahun 2020 sampai dengan 2024 meningkat secara konsisten, namun terjadi penurunan dari Tahun 2024 ke Tahun 2024 dan seluruhnya dari Tahun 2020 - 2024 predikat Istimewa

Perspektif Stakeholder:
Kinerja pada Perspektif ini menunjukkan fluktuasi pada periode **2021-2024**, nilai stakeholder meningkat secara konsisten, yang menunjukkan adanya peningkatan kepuasan atau keterlibatan stakeholder, namun, pada tahun **2024**, terjadi penurunan yang cukup signifikan (dari 105,43 ke 95,80).

Perspektif Internal Process:
Nilai pada Perspektif ini cukup stabil dengan fluktuasi kecil Tahun **2021-2022**, nilai **stabil** tanpa perubahan yang signifikan; Tahun **2022-2024**, terjadi **penurunan tajam** sebesar **5,01 poin**, yang bisa mengindikasikan adanya masalah dalam efisiensi atau efektivitas proses internal; Tahun **2024-2024**, terjadi sedikit **pemulihan**, yang menunjukkan adanya upaya perbaikan meskipun belum kembali ke level sebelumnya.

Perspektif Learning & Growth:
Tren secara keseluruhan meningkat dari tahun ke tahun, menandakan adanya **peningkatan kapasitas SDM, inovasi, atau pengembangan organisasi** yang konsisten; **Peningkatan tertinggi terjadi di 2022-2024**, menunjukkan adanya inisiatif yang signifikan

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara : Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024; Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun sebelumnya.; Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra; Membandingkan realisasi kinerja dengan kinerja unit kerja lain yang sejenis atau dengan sektor swasta yang melakukan fungsi sejenis atau dengan standar nasional/internasional jika ada (Benchmark Kinerja). Khusus untuk UPT di lingkungan BPOM, unit pembanding ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian klasifikasi UPT.; Analisis

penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).; Analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja; Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal); Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja.

Dari 34 indikator yang dievaluasi pada 11 sasaran strategis, terdapat 16 indikator mencapai target dengan kategori " **Sangat Baik**" , 6 indikator dengan kategori **"Baik"** dan 11 indikator kategori "**Cukup**" dan 1 Indikator kategori "**Tidak Dapat disimpulkan** "

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 belum seluruhnya tercapai terhadap 11 sasaran strategis Tahun 2024. Pada 11 sasaran strategis yang dievaluasi 8 sasaran strategis kategori " Sangat Baik" dan. 3 sasaran strategis kategori " Cukup", dengan Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) masing-masing sasaran strategis sebagai berikut seperti tergambar pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Capaian sasaran kegiatan BBPOM di Makassar Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	% Capaian	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	94,18	CUKUP
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	93,04	CUKUP
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	100,18	SANGAT BAIK
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	102,14	SANGAT BAIK
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	100,15	SANGAT BAIK
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	109,97	SANGAT BAIK
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	84,30	CUKUP
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	101,14	SANGAT BAIK
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	100,46	SANGAT BAIK
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	112,65	SANGAT BAIK
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	111,03	SANGAT BAIK

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stekholders Perspective* pada sasaran pertama sampai dengan ketiga yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 94,18 berada pada kategori "**Sangat Baik**"; Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 93,04 berada pada kategori **"Cukup"** ; Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar 100,18 berada pada kategori "**Sangat Baik**" .

Persepctive *Internal Proses* Sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan public di wilayah kerja BBPOM di Makassar yaitu dengan nilai 102,14; sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar yaitu 100,15; Sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" yaitu 109,97 ; dan Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar", dengan nilai 84,30. Dimana empat, sasaran strategis pada perspektif ini Sasaran stratrgis keempat, kelima dan keenam bearada pada kategori "**Sangat Baik**".

Pada learning and growth perspective terdapat empat sasaran strategis sasaran strategis Delapan, Sembilan, Sepuluh dan Sebelas masing-masing "Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal" 101,14; Sasaran strategis "Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal" 100,46; sasaran strategis "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan" 112,65; sasaran sstrategis kesebelas "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel' dengan nilai 111,03, dimana seluruh Sasaran Strategis pada learning and growth perspective berada pada kategori **"Sangat Baik".**

Bila dibandingkan dengan pencapaian kinerja 2 Balai lain dengan beban kerja yang setara yaitu BBPOM di Manado,, BBPOM Palembang dan. BBPOM Lampung, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.2. Perbandingan Pencapaian Sasaran Strategis

SASARAN KEGIATAN	MAKASAR		MANADO		PALEMBANG		LAMPUNG	
	SS	NSS	SS	NSS	SS	NSS	SS	NSS
NPSS	**101,07**		**105,14**		**103,09**		**107,27**	
Stakeholder Perspective	**95,80**		**100,45**		**99,16**		**101,29**	
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	94,18		100,69		99,08		98,20	
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	93,04		100,77		97,90		104,80	
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	100,18		99,87		100,51		100,88	
Internal Process Perspective	**99,14**		**107,58**		**104,18**		**110,08**	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	102,14		108,07		105,07		99,37	
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	100,15		101,22		100,02		100,97	
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	109,97		120,00		120,00		120,00	
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	84,30		101,01		91,64		120,00	
Learning and Growth Perspective	**108,27**		**107,41**		**105,93**		**110,42**	
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Makassar yang optimal	101,14		99,36		99,02		99,65	
Terwujudnya SDM yang berkinerja optimal	100,46		96,06		96,67		96,71	
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	112,65		112,27		110,69		111,61	
Terkelolanya Keuangan secara Akuntabel	111,03		110,61		108,10		120,00	

Berdasarkan tabel diatas, Stekholders Perspective dengan nilai tertinggi pada BBPOM di Lampung dengan capaian 101,29 dibandingkan BBPOM di Makassar; BBPOM Manado dan BBPOM di Palembang . Pada Sasaran Strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Lampung 101,29 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kedua yaitu Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Lampung 104,80 kategori "Sangat Baik"; serta Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Lampung 100,88 kategori "Sangat Baik", secara rata-rata sasaran strategis satu, dua dan ketiga yang tertinggi adalah

BBPOM di Lampung 101,29 dan BBPOM Manado 100,45 berada pada kategori "Sangat Baik" selanjutnya BBPOM Palembang 99,16 dan BBPOM Makassar 95,80 berada pada kategori "Cukup".

Persepctive *Internal Proses* dengan nilai tertinggi pada BBPOM di Lampung dengan capaian 110,08 dibandingkan BBPOM Makassar, BBPOM Manado dan BBPOM di Palembang. Pada Sasaran Strategis keempat yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Manado 108,07 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kelima yaitu Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Manado 101,22 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis keenam yaitu Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Lampung 120 kategori "Tidak dapat disimpulkan", serta Sasaran Strategis ketujuh yaitu Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan lingkup BBPOM dengan nilai Tertinggi pada BBPOM Lampung 120 kategori "Tidak Dapat Disimpulkan", secara rata-rata sasaran strategis empat, lima, enam dan tujuh yang tertinggi adalah BBPOM di Lampung 110,08; BBPOM Manado 107,58 dan BBPOM Palembang 104,18 berada pada kategori "Sangat Baik" selanjutnya BBPOM Makassar 99,18 berada pada kategori "Cukup".

Pada learning and growth perspective, nilai tertinggi pada BBPOM di Lampung dengan capaian 110,42 tertinggi dibandingkan BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Palembang. sasaran Strategis kedelapan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan BBPOM yang optimal dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassarg 101,14 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kesembilan yaitu Terwujudnya SDM BBPOM yang berkinerja optimal dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 100,46 kategori "Sangat Baik"; Sasaran Strategis kesepuluh yaitu Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Makassar 112,65 kategori "Sangat Baik"; serta Sasaran Strategis kesebelas yaitu Terkelolanya Keuangan BBPOM secara Akuntabel dengan nilai Tertinggi pada BBPOM di Lampung 120,00 kategori "Tidak Dapat Disimpulkan", secara rata-rata sasaran strategis delapan, Sembilan, Sepuluh dan Sebelas pada BBPOM di Lampung, BBPOM Makassar, BBPOM Manado dan BBPOM Palembang berada pada kategori "Sangat Baik".

Sesuai perhitungan NPS total diperoleh bahwa NPS tertinggi adalah BBPOM Lampung 107,27; BBPOM di Manado 105,14; BBPOM di Palembang 103,09 dan BBPOM di Makassar 101,07 Kategori Istimewa.

Tabel 3.3
Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) BBPOM di Makassar Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Terhadap Target Tahunan	Capaian Penyesuaian
Stakeholder Perspective							
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,2	93,20	94,91	94,91
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,3	89,00	95,39	95,39

		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,8	87,85	94,67	94,67
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	96,32	100,86	100,86
		IKSS5	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	87	74,03	85,09	85,09
			Capaian SS1			**94,18**	**94,18**
SS2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar	85	79,08	93,04	93,04
			Capaian SS2			**93,04**	**93,04**
SS3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,7	97,72	100,02	100,02
		IKSS8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80	81,31	101,64	101,64
		IKSS9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	95,5	94,44	98,89	98,89
			Capaian SS3			**100,18**	**100,18**
			Capaian Perspective sakeholder			**95,80**	**95,80**
Internal Process Perspective							
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	100,00	105,26	105,26
		IKSS11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	83,81	111,75	111,75
		IKSS12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99,00	101,02	101,02
		IKSS13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,2	76,70	107,72	107,72

		IKSS14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	82,81	103,51	103,51
		IKSS15	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,79	101,91	101,91
		IKSS16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100,00	100,00	100,00
		IKSS17	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95	81,66	85,96	85,96
			Capaian SS4			**102,45**	**102,14**
SS5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	96,27	100,60	100,60
		IKSS19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	124	124,00	100,00	100,00
		IKSS20	Jumlah desa pangan aman	31	31,00	100,00	100,00
		IKSS21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22	22,00	100,00	100,00
			Capaian SS5			**100,15**	**100,15**
SS6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,93	99,93	99,93
		IKSS23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	100,00	120,00
			Capaian SS6			**99,97**	**109,97**
SS7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	IKSS24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97	81,77	84,30	84,30
			Capaian SS7			**84,30**	**84,30**
			Capaian Internal Process Perspective			**96,72**	**99,14**
Learning & Growth Perspective							
SS8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS25	Indeks RB BBPOM di Makassar	91,51	90,25	98,62	98,62
		IKSS26	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82,45	81,9	99,33	99,33
		IKSS27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	89,47	94,35	105,45	105,45

Capaian SS8						**101,14**	**101,14**
SS9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	IKSS28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	86,85	87,25	100,46	100,46
Capaian SS9						**100,46**	**100,46**
SS10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,44	89,96	105,29	105,29
		IKSS30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	3	3,00	100,00	120,00
Capaian SS10						**102,65**	**112,65**
SS11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	IKSS31	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar	90,03	90,80	100,86	100,86
		IKSS32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81,56	95,00	116,48	116,48
		IKSS33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	49	95,59	195,08	120,00
		IKSS34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	64,06	106,77	106,77
Capaian SS11						**129,80**	**111,03**
Capaian Learning & Growth Perspective						**108,51**	**108,27**
NPS TOTAL						**100,34**	**101,07**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa BBPOM di Makassar pada *Stekholders Perspective* , capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 95,80 kategori "Cukup" dan terdapat tiga sasaran strategis, sasaran strategis pertama yaitu Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar 94,18 terdapat lima indikator kinerja utama yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat = 94,91 ; Persentase Makanan yang memenuhi syarat = 95,39; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan = 94,67 ; Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan =100,86 ; Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat = 95,09 dimana hanya satu dari lima indikator kinerja utama pada Sasaran Strategis pertama di Tahun 2024 berada pada kategori "**Sangat Baik**" yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Sasaran Strategis kedua Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar hanya terdapat satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks kesadaran masyarakat

(awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dengan persentase capaian 93,04 Kategori **"Cukup".**

Sasaran Strategis ketiga yaitu Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar terdiri dari tiga Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan 100,02 dan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar 101,64 keduanya berada pada kategori **"Sangat Baik"** sedangkan Indikator Kinerja Utama Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan 98,89 kategori **"Cukup".**

Persepctive *Internal Proses*, capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 99,14 kategori **"Cukup"** dimana terdapat empat sasaran strategis, pada. Sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar berada pada kategori **"Sangat Baik"** yaitu dengan nilai 102,45 terdapat tujuh indikator kinerja utama yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan = 105,26; Indikator Kinerja Utama Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = 111,75 Indikator Kinerja Utama, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu = 101,02; Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 107,72; Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan = 103,51 ; Indeks Pelayanan Publik = 101,91; Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik = 100 dan kategori **"Sangat Baik",** sementara Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota = 85,96 Kategori **"Cukup".**

Sasaran Strategis kelima "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" berada pada kategori **"Sangat Baik"** yaitu dengan nilai 100,15 terdapat empat indikator yaitu Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan = 100,60 berada pada kategori **"Sangat Baik"**; sementara Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman = 100; Jumlah desa pangan aman = 100; Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya = 100 berada pada kategori **" Baik"**.

Sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar" berada pada kategori **"Cukup"** yaitu dengan nilai 99,97 sementara untuk Capaian Penyesuaian adalah 109,97 Kategori **"Sangat Baik"** terdapat dua indikator yaitu Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = 99,93 kategori **"Cukup"** dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = 100, sementara untuk capaian penyesuaian adalah = 120 kedua indikator Kinerja Utama berada pada kategori **"Cukup"**.

dan Sasaran strategis ketujuh "Meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar", yaitu indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan = 84,30 kategori **"Cukup"**

Pada learning and growth perspective, capaian kinerja pada perspektif ini adalah sebesar 108,51 kategori "Sangat Baik" dan terdapat empat sasaran strategis. Sasaran strategis kedelapan "Terwujudnya tatakelola

pemerintahan BBPOM Makassar yang optimal", yaitu indikator Indeks RB BBPOM di Makassar = 98,62 kategori "Cukup"; Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP BBPOM di Makassar = 99,,33 kategori **"Cukup"** dan indicator Nilai Pengelolaan Kearsipan = 105,45

Sasaran Strategis kesembilan Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal terdapat satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dengan persentase capaian 100,46 Kategori "**Sangat Baik**".

sasaran strategis kesepuluh "Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan yaitu dengan nilai 102,65 sementara untuk Capaian Penyesuaian adalah 112,65 Kategori "**Sangat Baik**" terdapat dua indicator Kinerja Utama yaitu Indikator kinerja utama Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP = 105,29 kategori **"Sangat Baik"** ; Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal = 100 dan capaian penyesuaian = 120 kategori **"Sangat Baik"** dan Sasaran strategis kesebelas "Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel" yaitu 111,03 kategori **"Sangat Baik"** yaitu indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar = 100,86; Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa = 116,48; Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara = 120 serta Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri = 106,77 seluruh indicator Kinerja pada Sasaran Strategis kesebelas kategori **"Sangat Baik".**

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui bahwa 23 dari 34 Indikator Kinerja yang diperjanjikan oleh Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2024, memiliki Realisasi kinerja 100 % dan lebih dari 100 % dari yang telah ditargetkan kategori "Baik" dan "Sangat Baik".

Tabel 3.4

Capaian Kinerja BBPOM di Makassar Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	98,2	93,20	94,91
		2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,3	89,00	95,39
		3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,8	87,85	94,67
		4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,5	96,32	100,86
		5 Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	87	74,03	85,09
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85	79,08	93,04
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap	7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,7	97,72	100,02

	kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80	81,31	101,64
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	95,5	94,44	98,89
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	10	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	100,00	105,26
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	83,81	111,75
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99,00	101,02
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,2	76,70	107,72
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	82,81	103,51
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,7	4,79	101,91
		16	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	100	100,00	100,00
		17	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	95	81,66	85,96
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	18	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95,7	96,27	100,60
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	124	124,00	100,00
		20	Jumlah desa pangan aman	31	31,00	100,00
		21	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22	22,00	100,00
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,93	99,93
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100,00	120,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97	81,77	84,30
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB BBPOM di Makassar	91,51	90,25	98,62
		26	Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82,45	81,90	99,33
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	89,47	94,35	105,45
9	Terwujudnya SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	86,85	87,25	100,46

10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85,44	89,96	105,29
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	3	3,000	120,00
11	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	90,03	90,80	100,86
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81,56	95,00	116,48
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	49	95,59	120,00
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	64,06	106,77

Pembahasan dan Analisa Capaian Kinerja

Pembahasan dan analisa capaian kinerja masing-masing Sasaran Strategis Balai Besar POM di Makassar dapat dijelaskan sebagai berikut:



Sasaran 1

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar

\

Tahun 2024, BBPOM di Makassar belum berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan nilai NPSS 94,18 dengan kategori "Cukup". Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan 5 Indikator sebagai berikut :

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat
2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat
3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan
4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan
5. Persentase Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Target 98,2 Realisasi 93,20 Capaian 94,91 %

Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Target 93,30 Realisasi 89,00 Capaian 95,39 %

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target 92,80 Realisasi 87,85 Capaian 94,67 %

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Target 95,50 Realisasi 96,32 Capaian 100,86 %

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Target 87,00 Realisasi 74,03 Capaian 85,09 %

Pada sasaran strategis pertama "Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar " empat indikator nilai capaiannya dibawah dari target mencapai kurang dari 100 % yaitu indikator pertama, kedua, ketiga dan indikator kelima yaitu indikator persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat ; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan serta indikator kelima yaitu Persentase Pangan Fortifikasi kategori "Memenuhi Ekspektssi" capaiannya dibawah 100 %.. indikator nilai capaiannya diatas dari target mencapai lebih dari 100 % yaitu Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan .



1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Persentase Obat yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar antara lain adalah persentase Obat yang Memenuhi Syarat.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 94,91 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Obat MS} = \frac{\text{Jumlah sampel Acak Obat MS}}{\text{Total sampel Acak Obat yang diperiksa dan di uji}} \times 100\,\%$$

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan obat memenuhi syarat yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan label/penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2024, Persentase Obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat Tahun ke-n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji Tahun ke-n. Obat meliputi obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetika**.** Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di Tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi : (1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); (2) Produk kedaluarsa; (3) Produk rusak; (4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kategori poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kategori poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kategori poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kategori poin 5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2024 adalah 94,91 % dengan realisasi sebesar 93,20 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat **dibawah dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Cukup" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2024

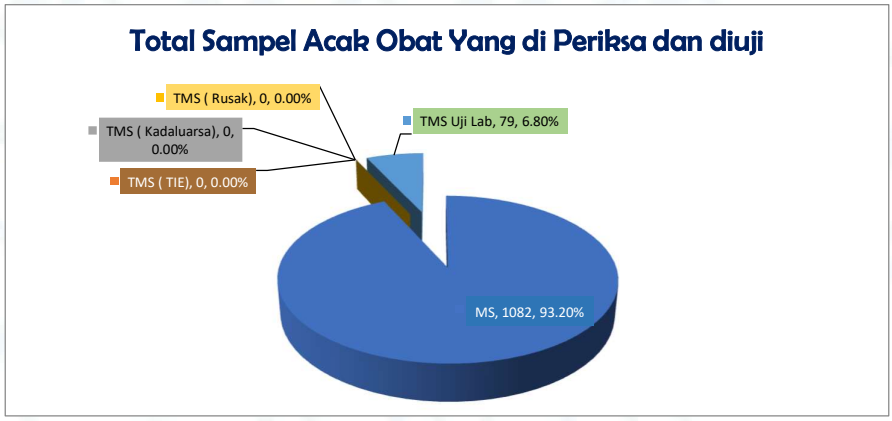
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase obat yang memenuhi syarat	98,20	93,20	94,91	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah sampel acak produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 1.082 sampel terhadap total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 1.161 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2024, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data

Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di Tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5)Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa adalah 1.161 sampel terdiri atas 372 sampel obat, 238 sampel Obat tradisional, 17 Obat Kuasi, 63 sampel suplemen Kesehatan dan 471 sampel kosmetik, dari 1.161 sampel tersebut terdapat 79 sampel Obat tidak memenuhi syarat yang terdiri atas:

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : `0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat (Hasil Uji) : 79 Sampel (3 Obat, 11 Obat Tradisional, 1 Obat Kuasi; 8 Suplemen Kesehatan, 56 Kosmetik)



Gambar 3.2

Jumlah Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2024

Jumlah sampling Obat sampai dengan Tahun 2024 adalah 1.161 dimana tidak ada sampel Obat TIE/Ilegal/Palsu sehingga jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar sama dengan jumlah sampling yaitu sebesar 1.161 sampel yang selesai diperiksa dan diuji di Tahun 2024.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	80,8	88,09	109,02	Sangat Baik
Tahun 2021	89	95,45	107,25	Sangat Baik

Tahun 2022	90	96,67	107,41	Sangat Baik
Tahun 2024	91	98,18	107,89	Sangat Baik
Tahun 2024	98,20	93,20	94,91	Cukup

Dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi melebihi target, dengan capaian di atas 107%, sehingga masuk dalam kategori "*Sangat Baik*". Pada tahun 2024, terjadi penurunan kinerja di mana realisasi 93,20 tidak mencapai target 98,20, dengan capaian hanya 94,91% kategori "Cukup"

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

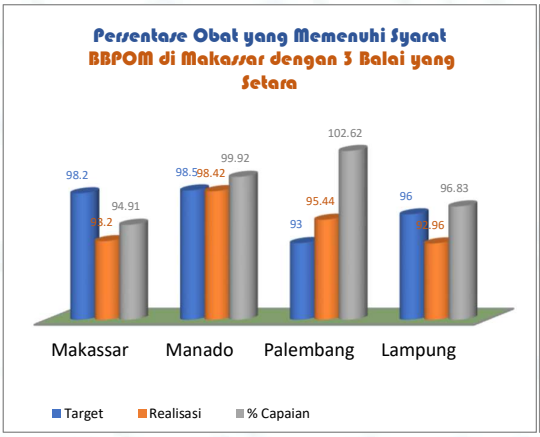
Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

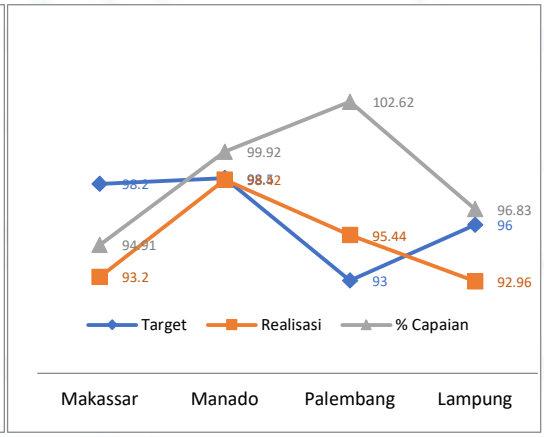
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase obat yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	98,20	93,20	94,91	Cukup
BBPOM di Manado	98,50	98,42	99,92	Cukup
BBPOM di Palembang	93,00	95,44	102,62	Sangat Baik
BBPOM Lampung	96,00	92,96	96,83	Cukup

Target indikator persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 pada angka yang berbeda adapun hasil capaian realisasi persentase obat yang memenuhi syarat BBPOM Palembang telah mencapai target dengan nilai 102,62 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, dan BBPOM di Lampung 4dengan nilai kategori yang sama yaitu "Cukup" ketiga Balai ini belum mencapai target.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 sebagai berikut :





Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain:

- Realisasi persentase obat memenuhi syarat pada Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 93,20 %. Pelaksanaan sampling obat oleh Balai Besar POM di Makassar.
- Jumlah sampel acak Obat Balai Besar POM di Makassar adalah 1.161 sampel, terdiri atas 1.082 sampel memenuhi syarat dan 79 sampel yang tidak memenuhi syarat (0 TIE/Ilegal/Palsu; 0 TMK Kedaluarsa, 0 TMK Rusak, 79 TMS Uji Laboratorium)

  Total 79 sampel Obat TMS uji terdiri atas 3 obat. 11 obat tradisional, 1 Obat Kuasi, 8 suplemen Kesehatan, 56 kosmetik.

  sampel yang tidak memenuhi syarat, sebagai berikut :

  1. Kosmetik 56 sampel, yang terdiri atas :
  - TMK : 53 sampel
  - TMS hasil uji : 2 sampel
  - TMK dan TMS uji : 1 sampel
  2. Obat Tradisional : 11 sampel, yaitu TMK Penandaan
  3. Suplemen Kesehatan : 8 sampel, yang terdiri atas :

     TMK : 1 Sampel

     TMS hasil uji : 7 Sampel
  4. Obat kuasi : 1 sampel TMK Penandaan
  5. Obat : 3 sampel yang TMS hasil uji

- Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) penadaan sebanyak 53 sampel Kosmetik atau 4,56 % memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tidak tercapainya target dari persentase obat yang memenuhi syarat.
- Sampling Obat Acak dilaksanakan mengacu Pedoman Sampling dan sesuai Renlak
- Komoditi Obat Acak yang disampling telah memenuhi ketentuan penandaan dan mutu produk
- Capaian Indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Tahun 2024 belum mencapai target dengan kriteria "Cukup". Dari 1.161 sampel obat acak yang disampling terdapat 79 dengan kesimpulan akhir 79 Hasil uji tidak memenuhi Syarat diantaranya terdapat 67 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan Penandaan
- sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan terdiri dari komoditi Obat sebanyak Obat Tradisional 11 sampel, Obat Kuasi 1 sampel, Saplemen Kesehatan 1 sampel dan Kosmetik 54 sampel dengan rincian Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Hasil Uji sebanyak 79 sampel (obat 3 sampel, Obat tradisional 11, Obat Kuasi 1 sampel suplemen Kesehatan 8 sampel, kosmetik 56 sampel. Penyumbang terbanyak hasil uji tidak memenuhi syarat adalah sampel Kosmetik sebanyak 79 sampel
- dengan parameter uji mikrobiologi yaitu enterobacteraceae dan ALT sedangkan penyumbang terbanyak tidak memenuhi ketentuan penandaan adalah sampel kosmetik dengan rincian TMK penandaan antara lain alamat produsen tidak lengkap, tidak ada kode produksi/nomor batch, klaim berlebihan, tidak mencantumkan expired date.
- Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Makassar, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Jayapura, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo, BPOM di Manokwari, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau, Loka POM di Merauke, dan Loka POM di Sorong,

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator persentase obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir Tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 93,2 % dengan capaian 94,91 % pada Tahun 2024. Indikator persentase obat yang memenuhi syarat kategori Tidak efisen dengan tingkat efisiensi (-0,04) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 94,91 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,95 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
94,91	759.336.600	741.001.863	98,87	0,96	-0,04	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding

yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium. Serta dilakukak pengurangan anggaran perlengkapan sampling, transport, uang harian, dan penginapan perjalanan dinas untuk menambahkan alokasi media mikrobiologi dan baku pembanding

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu sertak aspek kesesuaian penandaannya.
- Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses pengujian parameter uji wajib dan/atau pilihan sesuai dengan pedoman sampling
- Inovasi Pedang Puang Basok yang memastikan pengawalan dan pendampingan pelaku usaha obat tradisional dan kosmetik.
- Kompetensi penguji ditingkatkan melalui Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul, yang dilaksanakan oleh PPPOMN dan PPSDM
- Kompetensi petugas sampling juga ditingkatkan dengan mengikuti workshop yang diselenggarakan ditwas terkait
- Terlaksananya monev Region Makassar 14-15 Desember 2024 yang menyepakati rekomendasi untuk peningkatan kinerja Region dan Perencanaan 2024
- Sampel TMK Penandaan terhitung sebagai sampel TMS, sedangkan jumlahnya cukup banyak. Untuk kosmetik, sampel TMK Penandaan sejumlah 94,6% dari total sampel TMS, sedangkan untuk Obat tradisional dan Obat Kuasi, sampel TMS karena TMK penandaan mencapai 100% (Semuanya memenuhi syarat hasil uji namun TMK penandaan)

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Pengawasan Ketat Post-Market (Setelah Produk Beredar)

Inspeksi dan Sampling Obat Secara Berkala

- Melakukan **pengambilan sampel obat** dari apotek, rumah sakit, dan distributor untuk diuji di laboratorium BPOM.
- Meningkatkan jumlah **inspeksi mendadak (sidak)** terhadap industri farmasi dan distributor.

Peningkatan Frekuensi dan Teknologi Pengujian Mutu Obat

- Memanfaatkan **alat uji laboratorium berteknologi tinggi** untuk mendeteksi **bahan aktif, stabilitas, dan kandungan cemaran** dalam obat.
- Melakukan pemantauan berbasis **Artificial Intelligence (AI) dan Big Data** untuk mendeteksi pola ketidaksesuaian produk lebih cepat.

Penindakan Terhadap Obat Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Jika ditemukan obat yang tidak memenuhi syarat :

- **Menginstruksikan penarikan produk dari pasar** (recall).
- **Menerbitkan public warning** terhadap produk yang tidak sesuai standar.
- **Menindak tegas produsen/distributor yang melanggar**, termasuk sanksi administratif dan hukum.

Mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.

Banyaknya sampel yang masih TMK Penandaan menunjukkan pelaku usaha belum paham atau kurang peduli terhadap aturan label dan penandaan, dalam rangka hal tersebut rekomendasi perbaikan kedepan agar :

- Pada saat pengajuan notifikasi tidak ada evaluasi Label dan Penanndaan pada komoditi Kosmetik
- Mengoptimalkan evaluasi label dan penandaan pada saat pemeriksaan sarana produksi utamnya pada komoditi Kosmetik

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim tahun 2024, target IKU Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai, terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak untuk TMS Uji adalah dari sampel Obat dan penyumbang terbanyak untuk TMK penandaan adalah dari sampel kosmetik. TMK Penandaan dan TMS Uji untuk sampel targeted mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Aman dan bermutu

Pada tahun 2024 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan.



2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Persentase Makanan yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Acak Makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Acak Makanan yang dipeiksa dan diuji

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar belum berhasil mewujudkan makanan yang memenuhi syarat, hal ini ditunjukkan dengan belum dicapainya target persentase makanan yang memenuhi syarat sebesar 89,00 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ Makanan\ MS = \frac{Jumlah\ Sampel\ Acak\ Makanan\ \ MS\ yang\ diperiksa}{Total\ Sampel\ Acak\ Makanan\ yang\ diperiksa\ dan\ diuji} \ X\ 100\ \%$$

Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel acak memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel acak yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012) Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di Tahun berjalan.

Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2) Produk kedaluwarsa
3) Produk rusak
4) Tidak memenuhi ketentuan label
5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

e. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kategori poin 1 hingga poin 5 (kategori pada poin c). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kategori poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kategori poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kategori poin 5.

f. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2024 adalah 95,39 % dengan realisasi sebesar 89,00 % Makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar telah memenuhi syarat.

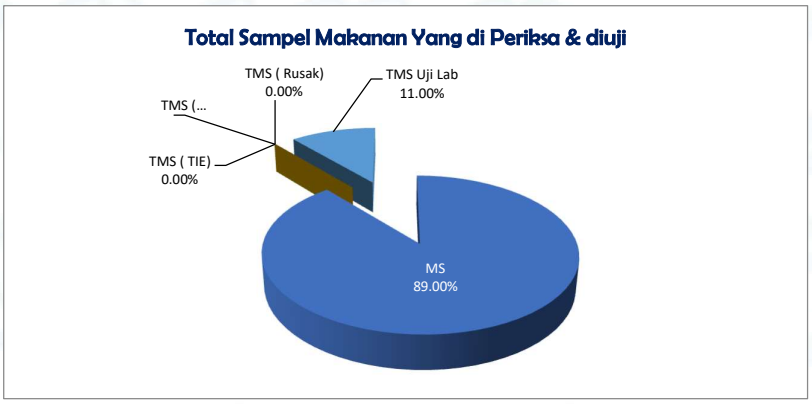
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93,30	89,00	95,39	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel acak produk Makanan MS yang diperiksa dan di uji 534 sampel terhadap total sampel acak makanan yang diperiksa dan diuji sebanyak 600 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2024. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012). Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di Tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Makanan mencakup sampel Balai dan Loka. Kategori Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; (5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel makanan yang diperiksa adalah 600. Dari 600 sampel tersebut terdapat 66 sampel makanan tidak memenuhi syarat yang terdiri atas :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal palsu : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel
- Tidak Memenuhi Syarat Uji Laboratorim : 66 Sampel



Grafik 3.3

Jumlah Sampel makanan yang memenuhi syarat Tahun 2024

Jumlah sampling Makanan sampai dengan Tahun 2024 adalah 600 : tidak terdapat sampel Makanan TIE/Ilegal/Palsu/ kedaluarsa dan 66 TMS uji Laboratorium, jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar 600 dan seluruh sempel yaitu 600 sampel yang selesai diperiksa dan diuji dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat 534 sampel.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.11.. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	78	85,86	110,08	Sangat Baik
Tahun 2021	85,50	86,04	100,63	Sangat Baik
Tahun 2022	87	93,83	107,85	Sangat Baik
Tahun 2023	88,50	93,28	105,40	Sangat Baik
Tahun 2024	93,30	89,00	95,39	Cukup

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa persentase makanan yang memenuhi syarat selalu melampaui target dari tahun 2020 hingga 2022, dengan kategori *Sangat Baik*. Namun, pada tahun 2024, meskipun target meningkat menjadi **93,30**, realisasi turun menjadi **89,00**, sehingga capaian hanya **95,39%** dan masuk kategori *Cukup*.

Terdapat perbedaan target Renstra dari 90 % menjadi 93,30 % pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi mencapai 93,28 % sehingga dijadikan baseline di tahun 2024 serta berdasarkan hasil reviu dari Biro Perencanaan dan Keuangan, perhitungan trend realisasi target dari tahun 2020-2023, proyeksi realisasi target akhir tahun 2024 adalah sebesar 97,26, sehingga rekomendasi target akhir tahun 2024 sebesar 93,3 (masih di bawah trend realisasi) karena perlu memperhatikan catatan pada evaluasi AKIP bahwa penetapan target harus mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

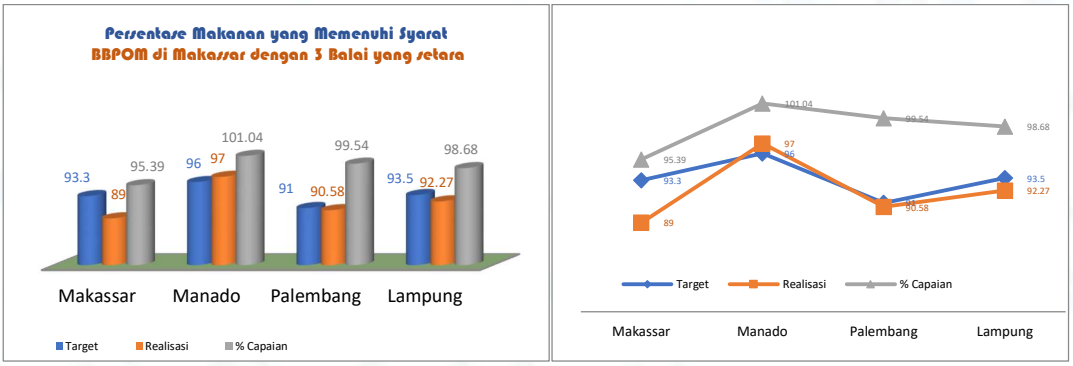
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Persentase Makanan yang memenuhi syarat (target Nasional = 87)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	93,30	89	95,39	Cukup
BBPOM di Manado	96,00	97,00	101,04	Sangat Baiak
BBPOM di Palembang	91,00	90,58	99,54	Cukup
BBPOM Lampung	93,50	92,27	98,68	Cukup

Target indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 pada angka yang berbeda adapun hasil capaian realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM Manado telah mencapai target dengan nilai 101,04 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Makassar, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung dengan nilai kategori yang sama yaitu "Cukup" ketiga Balai ini belum mencapai target.

BBPOM Manado berhasil melampaui target **101,04%**, kategori *Sangat Baik*), sementara BBPOM Makassar, Palembang, dan Lampung belum mencapai target, meskipun mendekati (kategori *Cukup*) menunjukkan bahwa pengawasan dan kepatuhan terhadap standar di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan**.** Capaian Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar; BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 diatas dari target nasional = 87).

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 **belum mencapai target yaitu 95,39 % dengan kriteria "Cukup"** Dari pemeriksaan 600 sampel acak makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar, dengan hasil 534 sampel MS (memenuhi syarat), 66 sampel TMS (tidak memenuhi syarat) terdiri dari:

* TMK Penandaan: 36 sampel (55 %)
* TMK Penandaan dan TMS Uji: 8 sampel (12 %)
* TMS Uji : 22 sampel (33 %).

Banyaknya sampel yang TMK Penandaan merupakan persentase terbesar dalam menyumbang jumlah total TMS (55% dari total TMS), karena untuk sampel acak, sampel TMK penandaan tetap dihitung sebagai TMS, meskipun hasil uji MS.

Sampel yang tidak memenuhi syarat hasil uji, antara lain : 1 TMS uji Koliform; 1 TMS Pseudomonas; 3 TMS Angka Kapang Khamir; 9 TMS hidroksi- metilfurfural. (HMF); 1 TMS Nitrit; 5 TMS Mineral Besi (Fe); 2 TMS pH; 7 TMS Asam Benzoat; 1 TMS Pewarna

Sesuai Pedoman Sampling, bahwa pada sampel acak dilakukan evaluasi penandaan sehingga hasil penandaan mempengaruhi kesimpulan hasil uji akhir.

TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan pada sampel makanan acak yang disampling dikarenakan pencantuman label pada produk tidak sesuai yang dengan label yang telah disetujui saat registrasi produk, misalnya: mencantumkan klaim, tidak mencantumkan kode produksi dan tanggal kadaluwarsa. TMK Penandaan tidak hanya pada sampel produk pangan MD tetapi juga pada sampel produk pangan dengan nomor ijin edar PIRT.

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase makanan yang memenuhi syarat kategori cukup antara lain:

- Fasilitas penyimpanan Makanan di sarana distribusi telah tersedia dan penyimpanannya sesuai dengan kondisi penyimpanan yang direkomendasikan.
- Pembinaan kepada sarana produksi dan sarana distribusi pangan yang secara terus menerus dilakukan oleh petugas / inspektru balai untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk
- Adanya keputusan Kepala Badan POM tentang Pedoman sampling Tahun 2024 yang telah ditetapkan.
- Meningkatknya monitoring pelaksanaan Corrective Action Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pada hasil pengawasan.
- Pengawasan terhadap produk makanan yang beredar lebih intensif, disertai dengan pembinaan terhadap sarana distribusi pangan dan ritel, mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir Tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 89 % dengan capaian 95,39 % pada Tahun 2024. Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi (- 0,02) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 95,39 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,65 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
95,39	588.617.400	574.807.715	97,65	0,96	-0,04	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium. Serta dilakukak pengurangan anggaran perlengkapan sampling, transport, uang harian, dan penginapan perjalanan dinas untuk menambahkan alokasi media mikrobiologi dan baku pembanding.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat antara lain :

- Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar.
- Banyaknya sampel yang TMK Penandaan merupakan persentase terbesar dalam menyumbang jumlah total TMS (55% dari total TMS), karena untuk sampel acak, sampel TMK penandaan tetap dihitung sebagai TMS, meskipun hasil uji MS.
- Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile;
- Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku
- Penerapan Sistem Manejemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten

- Melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Laik Higiene Sanitasi di Kabupaten Kepulauan Selayar
- Pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium Region Makassar tanggal 11-12 Desember 2024, bertempat di Grand Town Hotel Kabupaten Maros. Pertemuan ini dihadiri oleh peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tergabung dalam Laboratorium Region Makassar, yaitu BBPOM Makassar selaku penyelenggara kegiatan, BBPOM di Jayapura, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo, BPOM di Manokwari, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau, Loka POM di Merauke, dan Loka POM di Sorong, juga lintas sektor dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Maros yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan obat dan makanan yang unggul dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan perlunya komunikasi yang intens dari seluruh tim region Makassar agar pelaksanaan regionalisasi laboratorium berjalan dengan lancar.
- Sinergi dan Kerjasama BBPOM Makassar dengan Laboratorium di Sulawesi Selatan sebagai salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang lebih kuat dengan lembaga pemerintah, industri, dan akademisi untuk mendukung peningkatan kapabilitas laboratorium. BBPOM di Makassar menginisiasi terbentuknya jejaring laboratorium pengawas obat dan makanan yang akan melibatkan beberapa laboratorium pengujian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Pengawasan Ketat Post-Market (Setelah Produk Beredar)

Inspeksi dan Sampling Obat Secara Berkala

- Melakukan pengambilan sampel pangan dan distributor untuk diuji di laboratorium BBPOM.
- Meningkatkan jumlah inspeksi mendadak (sidak) terhadap industri Pangan Olahan dan IRTP.

Peningkatan Frekuensi dan Teknologi Pengujian Mutu Makanan

- Memanfaatkan **alat uji laboratorium berteknologi tinggi** untuk mendeteksi **bahan aktif, stabilitas, dan kandungan cemaran** dalam Makanan.
- Melakukan pemantauan berbasis **Big Data** untuk mendeteksi pola ketidaksesuaian produk lebih cepat.

Penindakan Terhadap Makanan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Jika ditemukan makanan yang tidak memenuhi syarat :

- **Menginstruksikan penarikan produk dari pasar** (recall).
- **Menerbitkan public warning** terhadap produk yang tidak sesuai standar.
- **Menindak tegas produsen/distributor yang melanggar**, termasuk sanksi administratif dan hukum.

Mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

Pengadaan sampel Makanan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel Makanan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.

Banyaknya sampel yang masih TMK Penandaan menunjukkan pelaku usaha belum paham atau kurang peduli terhadap aturan label dan penandaan, dalam rangka hal tersebut rekomendasi perbaikan kedepan agar :

- Pada saat pengajuan notifikasi tidak ada evaluasi Label dan Penanndaan pada komoditi Pangan

- Mengoptimalkan evaluasi label dan penandaan pada saat pemeriksaan sarana produksi

BBPOM Makassar selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pa da saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya. Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tercapai

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2024, target Persentase Makanan yang memenuhi syarat tercapai, namun pada laporan kinerja interim triwulan II dan III tahun 2024 target Persentase Makanan yang memenuhi syarat tidak tercapai hal ini disebabkan karena penambahan sampel pada bulan April sebanyak 22 sampel TMK penandaan serta bertambah hingga mencapai 44 sampel TMK penandaan sampai dengan bulan Desember 2024 dimana terhadap 44 sampel tersebut 8 diantaranya selain TMK penandaan juga TMS uji Laboratorium. Sedangkan 22 sampel yang TMS uji Laboratorium dan 8 sampel selain TMK Label juga TMS Uji Laboratorium sehingga total TMS uji Laboratorium adalah sebanyak 30 sampel, uraian TMS uji Laboratoriumnya antara lain :

- TMS Uji Koliform = 1 Sampel
- TMS Uji Nitrit = 1 Sampel
- TMS Uji Mineral Besi (Fe) = 5 Sampel
- TMS Uji pH = 2 Sampel
- TMS Uji Pseudomonas = 1 Sampel
- TMS Uji Asam Benzoat = 7 Sampel
- TMS Uji Pewarna = 1 Sampel
- TMS Uji Angka Kapang Khamir= 3 Sampel
- TMS Uji HMF= 9 Sampel



3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pemeriksaan dan pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted Obat yang dipeiksa dan diuji

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar belum berhasil mewujudkan obat dan makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 87,85 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\%\ Obat\ aman\ \&\ Bermutu = \frac{Jumlah\ sampel\ Targeted\ Obat\ MS}{Total\ sampel\ Targeted\ Obat\ diperiksa\ \&\ diuji} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan obat aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan yaitu: (1) memiliki nomor izin edar/legal; (2) tidak kedaluwarsa; (3) tidak rusak; (4) memenuhi ketentuan penandaan; (5) memenuhi syarat berdasarkan pengujian

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 adalah 94,67 % dengan realisasi sebesar 87,85 % Obat yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

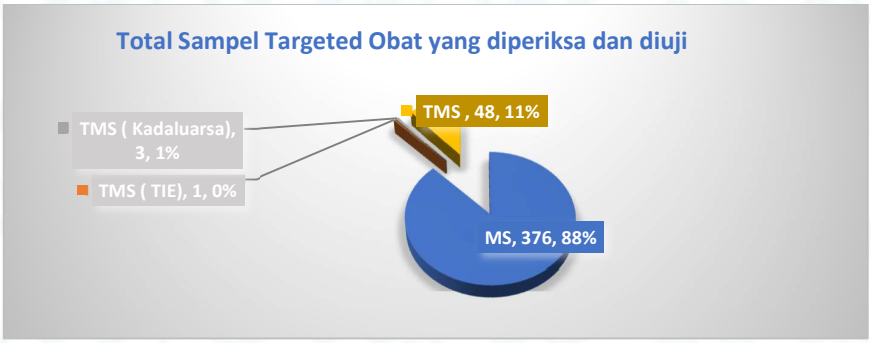
Tabel 3.16
Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92,80	87,85	94,67	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk Obat Memenuhi Syarat yang diperiksa dan di uji sebanyak 376 sampel terhadap sampel targeted obat yang diperiksa dan diuji sebanyak 428 sampel. Jenis Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2024, yaitu Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di Tahun berjalan. Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Jumlah keseluruhan Sampel Obat yang diperiksa dan diuji adalah 428 sampel terdiri atas 75 sampel obat, 101 sampel 0bat tradisional, 7 sampel obat kuasi, 28 sampel suplemen Kesehatan dan 213 sampel kosmetik, 4 sampel Rokok, dari 428 sampel tersebut terdapat 52 Sampel Sampel Obat yang tidak memenuhi syarat :

- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori TIE/Ilegal/Palsu : 1 Sampel
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori Kadaluarsa : 3 Sampel obat
- Tidak Memenuhi Ketentuan kategori rusak : 0 Sampel obat
- Tidak Memenuhi Syarat (Uji Laboratorim) : 52 Sampel (3 Obat, 5 Obat tradisional; 0 Obat Kuasi; 1 Suplemen Kesehatan; 41 kosmetik; 2 rokok)



Grafik 3.6 Jumlah Sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji Tahun 2024

cara sampling pada sampel obat yaitu target produk Obat yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2024, Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan jumlah sampel Targeted memenuhi syarat sampai dengan triwulan n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 Tahun 2017). Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kategori Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di Tahun berjalan.

Kategori Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu; 2) Produk kedaluwarsa; 3) Produk rusak ; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian; d. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kategori poin 1 hingga poin 5 (kategori pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kategori poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kategori poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kategori poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets dan Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.16. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	80,60	83,42	103,50	Sangat Baik
Tahun 2021	87,00	92,58	106,41	Sangat Baik
Tahun 2022	88,,00	92,60	105,23	Sangat Baik
Tahun 2023	89,00	92,71	104,14	Sangat Baik
Tahun 2024	92,80	87,85	94,67	Cukup

Target tahunan meningkat secara konsisten dari 80,60% (2020) menjadi 92,80% (2024), Realisasi juga mengalami peningkatan dari 83,42% (2020) menjadi 92,71% (2023), namun menurun menjadi 87,85% (2024) di bawah target nasional 92% pada tahun 2024.. Persentase Capaian menunjukkan kinerja yang sangat baik dari 2020 hingga 2023, dengan nilai di atas 100%., capaian tertinggi pada tahun 2021 (106,41%). Namun, pada 2024 terjadi penurunan drastis menjadi 94,67%, yang juga menurunkan kategori kinerja dari "Sangat Baik" menjadi "Cukup"

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan , BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024

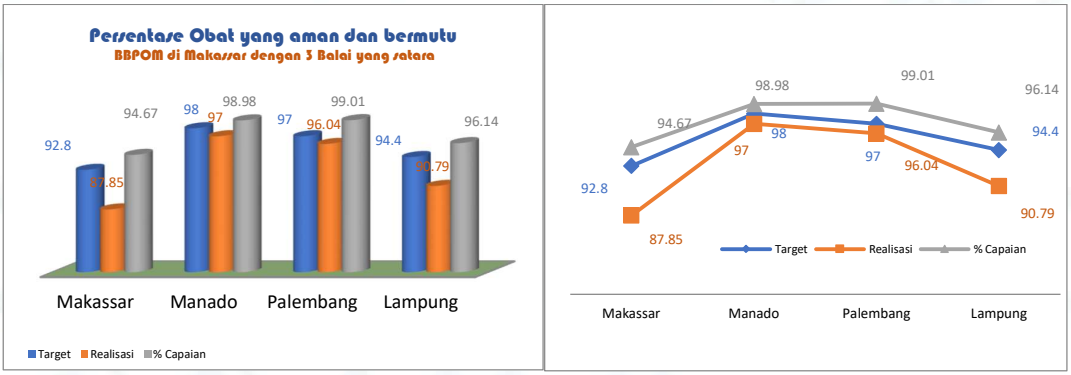
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Target Nasional = 92)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	92,80	87,85	94,67	Cukup
BBPOM di Manado	98,00	97,00	98,98	Cukup
BBPOM di Palembang	97,00	96,04	99,01	Cukup
BBPOM Lampung	94,40	90,79	96,14	Cukup

Target indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 pada angka yang berbeda adapun hasil capaian realisasi tertinggi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di BBPOM Manado meskipun belum mencapai target dengan nilai 98,98 kategori “Cukup” lebih tinggi

apabila dibandingkan dengan BBPOM di Makassar, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung dengan kategori yang sama yaitu "Cukup" keempat Balai ini belum mencapai target.

Capaian indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 diatas dari target nasional = 92, kecuali BBPOM di Makassar 87,85

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Capaian Persentase Obat yang Aman dan Bermutu tahun 2024 tidak mencapai target dengan kategori Cukup. Dari 428 sampel obat targeted yang disampling terdapat 48 sampel Tidak Memenuhi Syarat Uji (Obat Tradisonal 4 sampel; Suplemen 1 sampel; kosmetik (41-37) sampel; obat dan 2 sampel rokok), 37 sampel tidak memenuhi ketentuan penandaan (kosmetik 37 sampel) dan 4 sampel Tidak Memenuhi Ketentuan (Obat 3 sampel kedaluarsa; Obat Tradisonal 1 sampel Tanpa Ijin Edar)

Dengan adanya regionalisasi laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Makassar, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tergabung dalam Laboratorium Region Makassar, yaitu BBPOM di Jayapura, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo, BPOM di Manokwari, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau, Loka POM di Merauke, dan Loka POM di Sorong.. Begitu pula dengan sampel yang disampling oleh BBPOM di Makassar, diuji di laboratorium regionalisasi sesuai dengan pembagian parameter uji regionalisasi.

Dari target 428 sampel targeted yang harus disampling dan diuji, realisasinya sebesar 428 (100,00%) sampel yang disampling dan diuji, realisasi sesuai dari target dengan pemenuhan sampel untuk verifikasi dan ruang lingkup pengujian pada sampel obat.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir Tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 87,85 % dengan capaian 94,67 % pada Tahun 2024. Indikator persentase Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi (- 0,03) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 94,67 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,59 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
94,67	506.224,400	494.001.242	97,59	0,97	-0,03	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori baik antara lain :

- Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling Melakukan Monitoring Dan Evaluasi Implementasi *Sampling* Obat Program Nasional/JK
- Pengawasan Intensif Tindak Lanjut Perintah Penarikan Obat yang Tidak Memenuhi Syarat
- Penyebaran informasi kepada masyarakat sebagai bentuk Tindak Lanjut Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat.
- Peningkatan kegiatan sosialisasi tentang peraturan terkait Obat kepada pelaku usaha dan masyarakat, termasuk penyebaran informasi kepada stakeholder dan masyarakat tentang adanya *Public Warning* Obat yang diterbitkan oleh Badan POM.
- Kegiatan yang menunjang pencapaian IKU persentase obat yang memenuhi syarat antara lain: melakukan intervensi ke sarana produksi obat, obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten

dalam menerapkan CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

- Kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan. Untuk pengujian laboratorium, selain dilakukan pengujian terhadap sampel BBPOM di Makassar, juga dilakukan pengujian terhadap sampel regionalisasi dari BBPOM di Jayapura, BPOM Kendari, BPOM Manokwari, BPOM Mamuju, BPOM Palopo, Loka POM Kota Bau-Bau, Loka POM di Kota Sorong, Loka POM di Kabaputen Marauke, Loka POM di Kabupaten Mimika.
- Kompetensi penguji ditingkatkan melalui Bimtek Pendampingan Pengujian Unggul, yang dilaksanakan oleh PPPOMN dan PPSDM
- Kompetensi petugas sampling juga ditingkatkan dengan mengikuti workshop yang diselenggarakan ditwas terkait

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi obat tradisional dan kosmetik pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPOB, CPOTB dan CPKB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya serta kegiatan Bimtek dan edukasi ke pelaku usaha untuk menyesuaikan label dan penandaan agar dapat Memenuhi ketentuan yang berlaku

Pengadaan sampel obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel obat, obat tradisional, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan. Dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan triwulan I = 96,41 %, triwulan II = 96,80 dan triwulan III = 94,24 tahun 2024, target IKU Obat yang aman dan bermutu tidak tercapai, terdapat sampel dengan TMK penandaan dan TMS Uji dimana penyumbang jumlah terbanyak untuk TMS Uji adalah dari sampel kosmetik sebanyak 4 sampel dan penyumbang terbanyak untuk TMK penandaan adalah dari sampel kosmetik sebanyak 37 sampel. Sampel TMK Penandaan

untuk sampel targeted mempengaruhi hasil akhir dari perhitungan persentase obat yang Aman dan bermutu dan terhitung sebagai sampel TMS, sedangkan jumlahnya cukup banyak. Untuk kosmetik, sampel TMK Penandaan sejumlah 90,2% dari total sampel TMS

Pada tanggal 12 Desember 2024 dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui Bimtek bagi Pelaku Usaha Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka percepatan proses sertifikasi dan registrasi izin edar, sebagai rangkaian kegiatan inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan pelaku usaha pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik) Tahun 2024 serta

agar dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan pada label produk.



4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan Jumlah Sampel Targeted makanan mencakup (makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman) yang Memenuhi Syarat setelah tahap pengujian dibagi dengan Total sampel Targeted makanan yang dipeiksa dan diuji

Salah satu Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah berhasil mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 96,32% , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{makanan aman \& bermutu} = \frac{\text{Jumlah sampel Targeted makanan MS}}{\text{Total Sampel targeted makanan diperiksa dan diuji}} \times 100\ \%$$

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan Kategori Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

cara sampling pada sampel makanan yaitu target produk makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan Tahun 2024, Persentase makanan yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan jumlah sampel targeted memenuhi syarat sampai dengan tahun n dibandingkan dengan total sampel targeted yang diperiksa dan diuji sampai dengan triwulan n. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 Tahun 2012). Aman dan

Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kategori Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di Tahun berjalan.

Kategori Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kategori MS/TMS.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

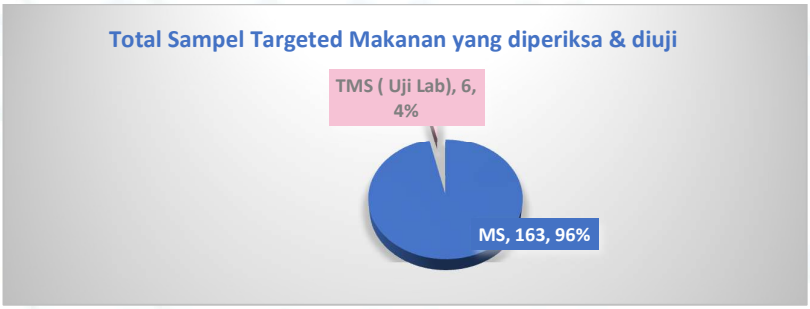
Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 adalah 100,86% dengan realisasi sebesar 96,32% makanan yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

Tabel 3.21
Capaian Kinerja Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,50	96,32	100,86	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel targeted produk makanan MS yang diperiksa dan di uji sebanyak 157 sampel terhadap total sampel makanan targeted yang diperiksa dan diuji sebanyak 163 sampel. Jenis makanan yang disampling mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2024, yaitu Sampling dilakukan terhadap makanan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling di Tahun berjalan. Kategori Makanan Tidak aman dan bermutu adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Jumlah keseluruhan Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji adalah 163 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dari 163 sampel tersebut terdapat 6 sampel makanan tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan



Gambar 3.8
Jumlah Sampel targeted makanan yang diperiksa dan diuji Tahun 2024

Jumlah sampling makanan targeted sampai dengan Tahun 2024 adalah 163 dimana tidak ada sampel Kosmetik TIE/Ilegal/Palsu sehingga jumlah sampel yang masuk Laboratorium sebesar 163 dan sebesar 163 sampel yang selesai diperiksa dan diuji Tahun 2024.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.22. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	78	77,42	99,26	Cukup
Tahun 2021	77	79,02	102,62	Sangat Baik
Tahun 2022	78	92,18	118,18	Sangat Baik
Tahun 2023	80	95,45	119,31	Sangat Baik
Tahun 2024	95,50	96,32	100,86	Sangat Baik

- Target tahunan meningkat secara bertahap, dari 77–78 pada tahun 2020–2022, lalu naik signifikan ke 95,5 pada 2024.
- Realisasi meningkat dari tahun 2020 = 77,42 ke tahun 2024 = 96,32 menunjukkan adanya peningkatan nyata dalam efektivitas pengawasan mutu makanan sampel targeted.
- Persentase Capaian
    - Tahun 2020 menunjukkan kategori “Cukup” dengan % capaian 99,26% (hampir memenuhi target).
    - Mulai 2021 hingga 2024, capaian selalu di atas 100%, sehingga masuk dalam kategori “Sangat Baik”.
    - Puncaknya terjadi pada 2023 (119,31%), dengan realisasi jauh melebihi target.
- Peningkatan konsisten baik dari segi target, realisasi, dan % capaian.
- Penyesuaian target di tahun 2024 cukup signifikan (naik 15,5 poin dari tahun sebelumnya), namun masih mampu dicapai dengan baik, menandakan kesiapan dan kapabilitas sistem pengawasan.
- Terdapat perbedaan target Renstra dari 81,00% menjadi 95,50% pada tahun 2024 dikarenakan pada tahun 2023 terdapat kenaikan realisasi mencapai 95,45% dari target 80% sehingga dijadikan baseline di tahun 2024

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman

dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

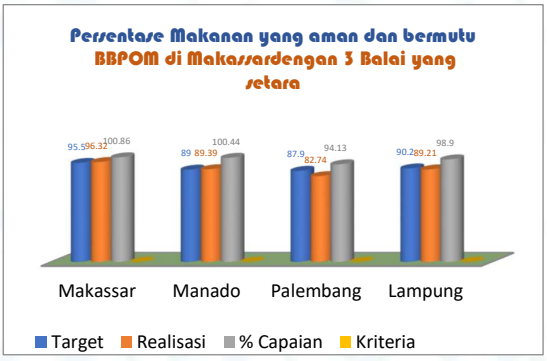
Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

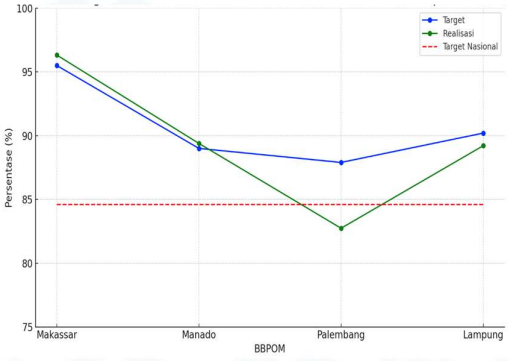
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (Target Nasional = 84,60)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	95,50	96,32	100,86	Sangat Baik
BBPOM di Manado	89,00	89,39	100,44	Sangat Baiak
BBPOM di Palembang	87,90	82,74	94,13	Cukup
BBPOM Lampung	90,20	89,21	98,90	Cukup

Secara keseluruhan, pengawasan mutu makanan oleh BBPOM di beberapa wilayah Indonesia menunjukkan kinerja positif. Meskipun terdapat perbedaan capaian antar wilayah, semua realisasi kinerja berada di atas target nasional (84,60), menandakan bahwa secara nasional standar keamanan dan mutu makanan telah terjaga dengan baik.

- BBPOM Makassar dan BBPOM Manado memperoleh kategori “Sangat Baik”, karena capaian melampaui target masing-masing., dengan capaian tertinggia yaitu BBPOM Makassar 100,86%
- BBPOM di Palembang dan BBPOM di Lampung kategori “Cukup”, meskipun kedua Balai ini sudah melebihi target nasional, namu capaian masih belum memenuhi target.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2024 sebagai berikut :





Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024.

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Makassar dan yang terendah adalah BBPOM di Palembang. Realisasi BBPOM di Makassar, BBPOM di Lampung, dan BBPOM di Manado telah melebihi target nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori Sangat baik antara lain :
Capaian Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan pengawasan hingga tahun 2024 telah mencapai target yaitu 100,86% dengan kategori Sangat Baik dari pemeriksaan 163 sampel targeted makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Makassar, dengan hasil 157 sampel MS (memenuhi syarat) dan 6 sampel tidak memenuhi syarat hasil uji.
Sesuai Pedoman Sampling, bahwa sampel targeted tidak dilakukan evaluasi penandaan sehingga kesimpulan hasil uji tergantung dari hasil uji laboratorium. Hasil TMS tersebut terdapat pada:

- 1 sampel (TMS pH)
- 5 sampel TMS Koliform
- 1 sampe TMS Escheria coli
- 1 sampel TMS Staphylococcus aureus
- 2 sampel TMS Siklamat
- 1 sampel TMS Pewarna

Upaya lain yang telah dilakukan adalah bahwa BBPOM di Makassar :

- Tetap konsisten untuk melakukan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pengawasan rutin sehingga sarana produksi tetap konsisten untuk menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) untuk menghasilkan produk pangan yang sesuai standar keamanan dan mutu serta aspek penandaannya.
- Tercapainya target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasrkan hasil pengawasan karena terselesaikannya pekerjaan pengujian laboatorium, dan tidak terdapat penambahan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dari bulan sebelumnya.
- Sarana produksi dan distribusi Pangan Targetted telah sesuai ketentuan sehingga mutu dan keamanan produk terjamin

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 96,32% dengan capaian 100,86 % pada tahun 2024. Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,03) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,86% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,65%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100,86	392.411.600	383.205.144	97,65	1,03	0,03	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan reagen, media mikrobiologi dan baku pembanding yang kebutuhannya meningkat karena regionalisasi laboratorium.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat antara lain :

- Dari proses sampling : melakukan proses perecanaan sampling sesuai dengan pedoman prioritas sampling
- Proses pengujian : melakukan proses perncanaan pengujian sesuai dengan pedoman sampling
- Peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* terkait pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi makanan.
- Pengawasan yang dilakukan terhadap sarana distribusi disertai dengan pembinaan dan pemberian sanksi administratif bagi sarana yang mengedarkan Makanan tanpa izin edar dan substandar, mampu mengurangi peredaran Makanan tanpa izin edar dan substandar.
- Melaksanakan Bimtek Keamanan Pangan Laik Higiene Sanitasi di Kabupaten Kepulauan Selayar
- Pertemuan dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Regionalisasi Laboratorium Region Makassar tanggal 11-12 Desember 2024, bertempat di Grand Town Hotel Kabupaten Maros. Pertemuan ini dihadiri oleh peserta dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tergabung dalam Laboratorium Region Makassar, yaitu BBPOM Makassar selaku penyelenggara kegiatan, BBPOM di Jayapura, BPOM di Kendari, BPOM di Mamuju, BPOM di Palopo, BPOM di Manokwari, Loka POM di Mimika, Loka POM di Bau-Bau, Loka POM di Merauke, dan Loka POM di Sorong, juga lintas sektor dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Maros yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitasnya dalam mewujudkan obat dan makanan yang unggul dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada dan perlunya komunikasi yang intens dari seluruh tim region Makassar agar pelaksanaan regionalisasi laboratorium berjalan dengan lancar.

- Sinergi dan Kerjasama BBPOM Makassar dengan Laboratorium di Sulawesi Selatan sebagai salah satu strategi yang dapat dilakukan dengan membangun kerjasama yang lebih kuat dengan lembaga pemerintah, industri, dan akademisi untuk mendukung peningkatan kapabilitas laboratorium. BBPOM di Makassar menginisiasi terbentuknya jejaring laboratorium pengawas obat dan makanan yang akan melibatkan beberapa laboratorium pengujian di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Sampel selesai uji sesuai Timeline.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Pengawasan Ketat Post-Market (Setelah Produk Beredar)

Inspeksi dan Sampling Obat Secara Berkala

- Melakukan pengambilan sampel pangan dan distributor untuk diuji di laboratorium BBPOM.
- Meningkatkan jumlah inspeksi mendadak (sidak) terhadap industri Pangan Olahan dan IRTP.

Peningkatan Frekuensi dan Teknologi Pengujian Mutu Makanan

- Memanfaatkan alat uji laboratorium berteknologi tinggi untuk mendeteksi bahan aktif, stabilitas, dan kandungan cemaran dalam Makanan.
- Melakukan pemantauan berbasis Big Data untuk mendeteksi pola ketidaksesuaian produk lebih cepat.

Penindakan Terhadap Makanan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Jika ditemukan makanan yang tidak memenuhi syarat :

- Menginstruksikan penarikan produk dari pasar (recall).
- Menerbitkan public warning terhadap produk yang tidak sesuai standar.
- Menindak tegas produsen/distributor yang melanggar, termasuk sanksi administratif dan hukum.

Pengadaan sampel Makanan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel Makanan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.

BBPOM Makassar selalu mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya.

Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Makanan Yang Memenuhi Syarat tercapai

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I tahun 2024, target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tercapai, namun pada laporan kinerja interim triwulan II target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasandan capaian hanya 99,63%, selanjutnya triwulan ke III tahun 2024 target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

tercapai hal ini disebabkan karena penambahan sampel pada bulan Juli sd Desember 2024 sebanyak 38 sampel TMS Hasil uji hanya bertambah 1 sampel



5. Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat dihitung berdasarkan Jumlah Sampel pangan fortifikasi adalah pangan yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat, pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan pedoman sampling pada Tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat ketentuan perundang-undangan

Indikator yang digunakan untuk mengukur Sasaran Strategis Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar antara lain adalah Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar belum berhasil mewujudkan pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM Makassar, hal ini ditunjukkan belum dicapainya target Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebesar 87 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\%\ \text{Pangan fortifikasi MS} = \frac{\text{Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji}} \times 100\ \%$$

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada Tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan, Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian

Pengambilan keputuan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan..

Terdapat beberapa kategori untuk menentukan Kategori pangan fortifikasi Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan fortifikasi yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2024 adalah 85,09% dengan realisasi 74,03% pangan fortifikasi yang beredar di wilayah kerja BBPOM di Makassar aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.

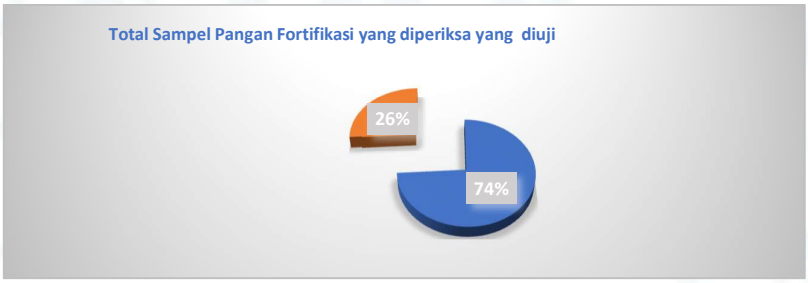
Tabel 3.27

Capaian Kinerja Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87	74,03	85,09	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan sampel pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 57 sampel terhadap total sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji sebanyak 77 sampel. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Jumlah keseluruhan Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji adalah 77 sampel yang selesai diperiksa dan diuji, dari 77 sampel tersebut terdapat 20 sampel pangan fortifikasi tidak aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, yaitu Tidak Memenuhi uji laboratorium : 20 Sampel.



Gambar 3.10

Jumlah Sampel pangan fortifikasi yang diperiksa dan diuji Tahun 2024

Jumlah sampel pangan fortifikasi sampai dengan Tahun 2024 yang diperiksa adalah 77 sampel dan sebesar 77 sampel yang selesai diperiksa dan diuji,

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.28. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	-	-	-	-

Tahun 2021	75	60	80	Cukup
Tahun 2022	76	80	105,26	Sangat Baik
Tahun 2023	77	88,42	114,83	Sangat Baik
Tahun 2024	87	74,03	85,09	Cukup

Perbandingan realisasi capaian kinerja indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di BBPOM Makassar Tidak tersedia data target maupun realisasi di Tahun 2020; Tahun 2021 Kategori *Cukup* dengan realisasi hanya 60 dari target 75 (80%); Tahun 2022 Mengalami peningkatan signifikan, kategori *Sangat Baik* dengan realisasi 80 dari target 76 (105,26%); Tahun 2023 Capaian terbaik dalam periode Renstra 2020-2024, dengan realisasi 88,42 dari target 77 (114,83%) kategori *Sangat Baik*; namun di Tahun 2024 terjadi penurunan ke kategori *Cukup* dengan capaian 85,09%, realisasi 74,03 dari target yang lebih tinggi yaitu 87.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

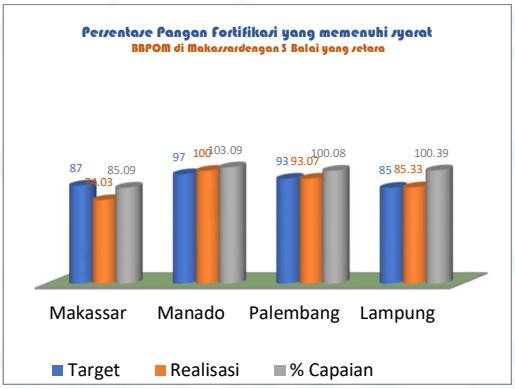
Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat pada BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

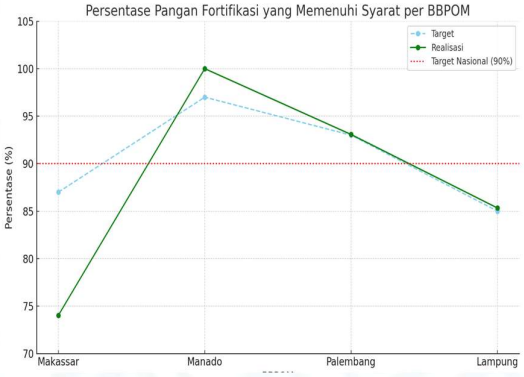
Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat (Target Nasional = 90)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	87	74,03	85,09	Cukup
BBPOM di Manado	97,00	100	103,09	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	93,00	93,07	100,08	Sangat Baik
BBPOM Lampung	85	85,33	100,39	Sangat Baik

Target indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung masing-masing pada angka yang berbeda. Hasil capaian Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tertinggi pada BBPOM Manado yaitu 100, BBPOM Palembang 93,07 dan BBPOM Lampung 85,33, sehingga 3 dari 4 BBPOM berhasil mencapai kategori "Sangat Baik", menunjukkan bahwa BBPOM Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM Lampung mampu menjamin mutu pangan fortifikasi sesuai dengan standar. BBPOM Makassar menjadi satu-satunya wilayah yang masih berada dalam kategori "Cukup",

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja kerja kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2024 sebagai berikut :





Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024.

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa realisasi Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat tahun 2024 yang tertinggi adalah BBPOM di Manado dan yang terendah adalah BBPOM di Makassar Realisasi BBPOM di Manado dan BBPOM di Palembang telah melebihi target nasional, sementara BBPOM di Makassar belum mencapai target dan BBPOM di Lampung telah mencapai target namun masih dibawah target Nasional.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Capaian Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat tahun tahun 2024 belum mencapai target dengan kritera **Cukup**. Sampai dengan triwulan IV tahun 2024 jumlah sampel pangan fortifikasi yang masuk ke Fungsi Pengujian sebanyak 77. Dari 77 sampel yang selesai diuji terdapat 57 sampel MS (Memenuhi Syarat) dan 20 sampel TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Sampel TMS tersebut terdiri atas:

- 19 Sampel tidak memenuhi syarat Fortifikan /KIO3
- 1 sampel T tidak memenuhi syarat Fortifikan /Vitamin A,

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat kategori “Cukup” antara lain :

- Sesuai Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan dan Kemasan Pangan Tahun 2024, sampling pangan fortifikasi di peredaran untuk pemilihan tempat sampling kabupaten/kota dilakukan secara acak sesuai daftar kabupaten/kota dari ditentukan oleh pusat
- Pelaksanaan pengujian sampel fortifikasi
- Terjadinya kelangkaan Fortifikan KIO3 di peredaran

- Tidak Terdapat penambahan sampel uji Fortifikan

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 74,03% dengan capaian 85,09% pada tahun 2024. Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi - (0,14) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 105,26 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,41 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
85,09	25.609.000	25.416.300	99,25	0,86	-0,14	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran tidak efisien karena capaian indikator lebih rendah daripada realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran Kegiatan Pembelian reagen dan medi mikrobiologi. .

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan kinerja

kegiatan yang menunjang IKU persentase pangan fortigfikasi yang memenuhi syarat adalah :

- Pengujian laboratorium sampel pangan fortifikasi
- Pengadaan sampel pangan fortifikasi. Tahun 2024

telah dilakukan sampling Pangan Fortifikasi sebanyak 77 sampel dan seluruhnya telah selesai diperiksa dan diuji.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Mengoptimalkan intervensi ke sarana produksi pangan pada saat pemeriksaan rutin agar konsisten dalam menerapkan CPPOB sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan dan mutu serta aspek kesesuaian penandaannya; Pengadaan sampel Makanan serta kegiatan Pengujian laboratorium sampel Makanan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan.

Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian agar pelaksanaan sampling produk pangan Fortifikasi dan kegiatan Pengujian laboratorium sampel pangan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan.

'Koordinasi dengan Badan POM terkait kelangkaan KIO3 di peredaran yang menyebabkan produsen kesulitan untuk mendapatkan KIO3

Telah dilakukan upaya penanggulangan diantaranya FGD Monitoring dan Sinergi Pengawasan Pangan Fortifikasi sebagai kolaborasi antara praktisi, K/L, Asosiasi, NGO pada tanggal 18 Desember 2024.

Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan sampling dan pengujian pangan secara rutin sehingga IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat tercapai

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan I, II dan III tahun 2024, target Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat belum tercapai, hal ini disebabkan karena sejak bulan Maret sebanyak 19 Sampel pangan fortifikasi TMS Fortifikan /KIO3 yang berkontribusi terhadap 24,68% hasil uji TMS terhadap IKU Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat.



Sasaran 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sasaran Strategis Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan Indikator :

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan bermutu

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Variabel

1. **Pengetahuan**
2. **Sikap**
3. **Perilaku**

KLIK

Metodologi

Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *Multistage random sampling*
dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 8 %, dan Jumlah sampel ditetapkan dengan metode Probability Proportional to Size (PPS)
Penetapan populasi/responden adalah

- **Daftar sampel blok sensus (DSBS) tiap provinsi dilengkapi dengan informasi klasifikasi daerah (perkotaan dan perdesaan).**
- **Daftar sampel rumah tangga (DSRT) di blok sensus terpilih berdasarkan hasil pemutakhiran terakhir**

yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari 3.487 Blok Sensus (34.870 DSRT) yang tersebar di 34 propinsi dan 514 kabupaten/kota. Kategori inklusi sampel studi adalah individu rumah tangga yang berumur 17-65 Tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (*Awareness, Interest, Desire, Action*) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

Kajian yang bertujuan untuk mengukur nilai indeks kesadaran dan kepuasan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat pada skala Nasional, Regional. Design metodologi yang digunakan pada kajian ini adalah *Stratified two stage sampling*) dengan perhitungan besar sampel/populasi menggunakan *Margin of Error* 8 %, dengan tahapan ;

- Memilih blok sensus secara ***systematic sampling***dari blok sensus terpilih Susenas Maret 2024, di setiap strata provinsi (urban/rural)
- Memilih 10 ruta secara ***systematic***padasetiap blok sensusterpilih berdasarkan daftar populasi ruta Susenas Maret 2024 dengan ***implicit stratification*** tingkat pendidikan kepala rumah tangga
- Memilih 1(satu) responden ART usia 17-65 Tahun secara acak dari setiap ruta terpilih sampel

Adapun cakupan Survei :

- 34 Provinsi
- 506 Kabupaten/Kota
- 1597 Kecamatan
- 1817 Desa/Kelurahan
- 1822 Blok Sensus
- 18.220 Rumah Tangga

Waktu Penelitain : Januari – Desember 2024, waktu pengumpulan data Juli – September 2024. **Analisis Data**: Perhitungan Indeks, Analisis Deskriptif, Analisis Lanjutan (Anova dan Korelasi), Analisis SEM & Analisis Kualitatif

Kategori responden adalah kepala/anggota rumah tangga berusia 17-65 Tahun,sehat jasmani dan rohani dan menggunakan Obat dan Makanan**.**. Pengumpulan data dilakukan dengan metode teknologi *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis online dan offline yaitu teknik interview/pencacahan terhadap responden dengan memanfaatkan teknologi informasi. Wawancara dilakukan menggunakan *tools* kuesioner, monitoring data secara realtime dilakukan melalui dashboard survei **surveiskkm.pom.go.id.**

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai bagian dari pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu.

Masyarakat adalah konsumen terhadap 5 komoditi yang menjadi lingkup pengawasan BPOM yaitu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah

- pengetahuan (Knowledge)
  menggali sejauh mana pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu, sejauh mana sumber informasi dan pengaruh sosialisasi/KIE dari BPOM terhadap pengetahuan responden.
- sikap (Attitude)
  untuk menggali sikap dan persepsi masyarakat terkait Obat dan Makanan.
- perilaku masyarakat
  untuk mengetahui perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memilih/membeli/menggunakan/mengonsumsi Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. **Perilaku yang di ukur adalah perilaku melalui pengakuan verbal.**

Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan

Tabel 3.34

Kategori Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024

Kategori	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	<45	45	0,3
Kurang Baik	45 – 60	15	12,82
Cukup Baik	60 – 75	15	64,4
Baik	75 – 90	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90	10	0,79

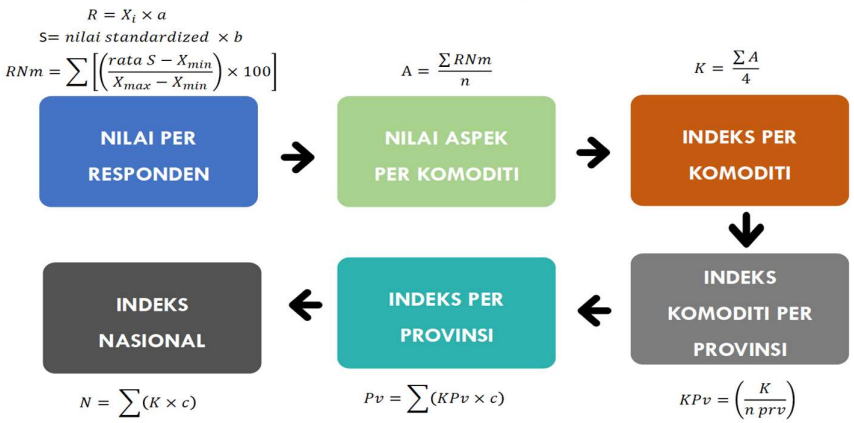
Perhitungan indeks diukur dengan mempertimbangkan bobot berikut :

a = Bobobt penduduk (BPS)

b = Bobot pertanyaan

c = Bobot Komoditi

Alur perhitungan



R = Responden; S =Standardized; RNm = Nilai responden normalisasi; A = Aspek;
K = Komoditi; KPv = Komoditi per Provinsi Pv = Provinsi; N = Nasional

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Persentase Capaian indikator Indeks kesadaran masyarakat *(Awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2024 adalah 93,04% dengan realisasi sebesar 79,08 % Indeks kesadaran masyarakat *(Awareness index)* terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar **dibawah dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Cukup".**

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Kesadaran Masyarakat (Awarness index) terhadap Obat dan makanan aman bermutu	85	79,08	93,04	Cukup

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	-	-	-	-
Tahun 2021	75	60	80	Cukup
Tahun 2022	81	79,41	98,04	Cukup
Tahun 2023	83	83,85	101,02	Sangat Baik
Tahun 2024	85	79,08	93,04	Cukup

Indikator kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan menunjukkan **fluktuasi capaian** selama lima tahun terakhir. Meskipun pernah mencapai kategori **"Sangat Baik"** pada tahun 2023, hasil tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan signifikan yang perlu ditindaklanjuti.

Persentase capaian Indikator kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan tahun (2020–2024)

- 2021–2022: Ada peningkatan signifikan dari 80% ke 98,04%.
- 2022–2023: Capaian optimal, indeks mencapai 101,02% dari target.
- 2023–2024: Penurunan kembali ke bawah target meskipun target hanya naik 2 poin (dari 83 ke 85), realisasi justru turun sekitar 5 poin.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

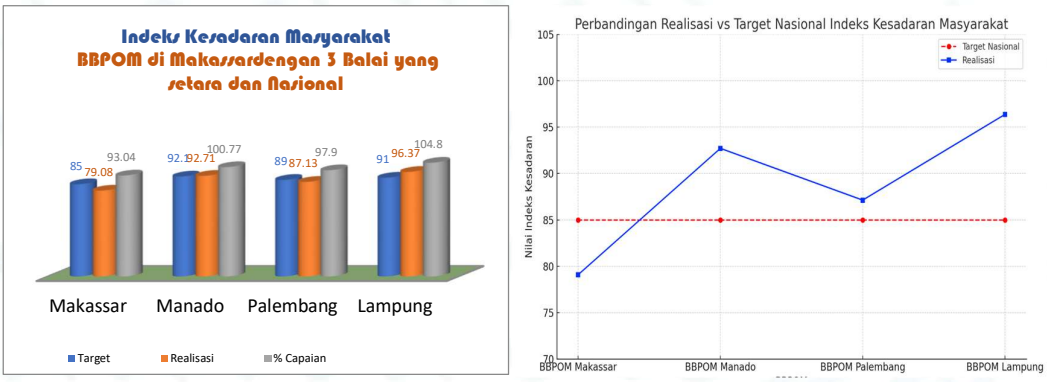
Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu (Target Nasional = 85)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	85	79,08	93,04	Cukup
BBPOM di Manado	92,10	92,71	100,77	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	89,00	87,13	97,90	Cukup
BBPOM Lampung	91,00	96,37	104,80	Sangat Baik

Target indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Manado lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Balai lainnya. Hasil realisasi Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM Lampung dan BBPOM di Manado telah mencapai target dengan nilai masing-masing 96,37 dan 92,71 dan capaian 104,80 dan 100,77 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Palembang dan BBPOM Makassar dengan kategori “Sangat Baik”.



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024.

BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung telah melampaui Target Nasional (85)., Hanya BBPOM Makassar yang belum mencapai target nasional, perlu perhatian khusus dalam peningkatan kinerja edukatif.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu kategori "cukup" antara lain:

Berdasarkan hasil survey kesadaran (*awareness*) masyarakat yang dilaksanakan Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 secara nasional didapatkan bahwa nilai pengetahuan masyarakat adalah 92,85 (Kategori Sangat Baik); nilai sikap masyarakat adalah 90,46 (Kategori Sangat Baik) dan nilai perilaku masyarakat adalah 80,97 (Kategori Baik).

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat telah memiliki pengetahuan dan sikap yang baik dalam memilih obat dan makanan yang aman, namun perlu upaya untuk mengubah perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan aman dan bermutu.

Hasil pengukuran indeks per komoditi adalah 1) Obat 90,44 2) Obat Tradisional 86,80; 3) Suplemen Kesehatan 86,04; 4). Kosmetik 87,29; dan 5) Pangan Olahan 88,59. Indeks kesadaran masyarakat per komoditi seluruhnya berada pada kategori Baik dengan total realisasi Nasional dari target 85 , realisasi adalah 88,09..

Dari survey diketahui bahwa :

- pengetahuan masyarakat cenderung meningkat, terutama terkait variable kedaluwarsa dan informasi label tetapi perlu peningkatan pengetahuan terkait produk dengan NIE.
- Tingkat persepsi masyarakat terhadap informasi KLIK pada produk memiliki nilai yang tinggi (Sikap yang positif), hal ini menunjukkan bahwa masyarakat menganggap penting adanya infromasi yang terdapat pada produk.

- Perilaku masyarakat cenderung meningkat pada semua variable, tetapi perlu peningkatan pada perilaku membaca informasi pada label/kemasan produk.

Pengetahuan masyarakat tentang BPOM sebagai lembaga yang mengawasi Obat dan Makanan semakin meningkat dari Tahun ke Tahun. Tren ini menunjukkan bahwa program yang dilakukan oleh BPOM dalam menjalankan fungsi pengawasan obat dan makanan semakin diketahui oleh masyarakat.

Beberapa variabel yang ditanyakan saat survey kesadaran masyarakat antara lain adalah :

1) pengetahuan masyarakat terhadap obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan. Pertanyaan yang diajukan antara lain tentang :
   - pengetahuan masyarakat terkait logo obat,
   - pengetahuan masyarakat terkait makanan/minuman yang mengandung bahan berbahaya untuk dikonsumsi,
   - pengetahuan masyarakat terkait obat tradisional yang mengandung BKO,
   - pengetahuan masyarakat terkait kosmetik yang mengandung merkuri,
   - pengetahuan masyarakat terkait cara membuang sisa obat yang benar.
2) Dari hasil survey tersebut diketahui bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu misalnya dengan memperhatikan izin edar, kemasan dan tanggal kedaluwarsa. Namun masih banyak juga yang belum mengetahui produk yang tidak terdaftar di BPOM atau membeli produk yang memiliki NIE. Masyarakat telah memperhatikan bagaimana menyimpan produk dengan aman dan menggunakan sesuai petunjuk yang ada di label. Namun masih juga ditemui masyarakat yang belum mengetahui adanya produk Obat dan Makanan berbahaya yang beredar. Masyarakat juga tidak mengetahui logo obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter.
3) sikap masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu pengetahuan masyarakat 89,32 selanjutnya sikap masyarakat 88,16 dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 76,51. Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek. Karena itu harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat yang nantinya akan berdampak pada perilaku masyarakat terutama pada Membeli produk yang terdaftar di BPOM serta membaca informasi label/kemasan produk. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Makassar dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan perilaku masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Masyarakat Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Makassar tetap melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Sulawesi selatan agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu.

Kendala : Kegiatan pemberdayaan masyarakat dan publikasi melalui media secara umum lancar sesuai anggaran yang tersedia. Hanya saja masih ada beberapa daerah yang belum pernah mendapatkan paparan publikasi dari BBPOM Makassar.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 79,08% dengan capaian 93,04% pada tahun 2024. Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01).

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
93,04	68.740.000	63.026.675	91,69	1,01	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024, anggaran Penyebaran Informasi Melalui Media hanya berkisar 280 juta, namun demikian, dilakukan upaya simplifikasi penyebaran informasi melalui Penyebaran Informasi melalui infografis, Kegiatan talk show / KIE di Media Cetak dan Elektronik, kegiatan Kolaborasi Pengawasan Obat dan Makananaman hingga ke pelosok Sulawesi selatan dengan biaya murah dengan jangkauan informasi lebih luas.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu kategori Cukup antara lain :

- Pelaksanaan KIE tidak menjangkau keterwakilan masyarakat dari seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Masyarakat.
- Belum optimal dalam mengiklankan postingan dalam media sosial.
- Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan (Kotler & Keller, 2009) Konsep pengukurannya adalah Kesadaran (Awareness) bertujuan untuk menggali sejauh mana kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "pengetahuan" dari masyarakat. Ketertarikan (Interest) bertujuan untuk menggali ketertarikan masyarakat untuk mengetahui dan mempelajari tentang keamanan produk. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. Keinginan (Desire) bertujuan untuk menggali keinginan masyarakat untuk mendapatkan produk yang aman. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "sikap" dari masyarakat. Tindakan (Action) bertujuan untuk menggali tindakan masyarakat saat memilih dan

mengkonsumsi produk Obat dan Makanan dengan benar. Dalam hal ini yang dikaji adalah segi "perilaku" dari masyarakat. Respondennya sebanyak 550 orang tersebar di Provinsi Sulawesi Selatan. Pencapaian indikator ini ditunjang oleh pengukuran diatas, untuk mengetahui sejauh mana efektivitas KIE dan pengawasan obat dan makanan untuk mencapai kesadaran masyarakat terkait obat dan pangan aman.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

	Obat	Obat Tradisional	Suplemen Kesehatan	Kosmetik	Pangan Olahan	Nlalai	
Indeks Kesadaran Masyarakat	**83,30**	**76,30**	**77,29**	**74,74**	**81,37**		
Pengetahuan Masyarakat	89,91	84,37	86,32	77	91,12	86,37	Baik
sikap	86,98	85,56	85,54	85,40	86,15	86,08	Baik
Perilaku	73	58,98	60,02	61,82	66,82	64,78	Cukup Baik

Dari hasil survey juga diketahui bahwa pengetahuan masyarakat merupakan indikator pembentuk indeks kesadaran yang nilainya paling tinggi yaitu 86,37 (Baik) dan yang paling rendah adalah faktor perilaku yaitu 64,78 (Cukup Baik). Perubahan perilaku memang tidak dapat terjadi dalam jangka pendek, harus ada upaya terus menerus untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat. Hal ini harus menjadi bahan pertimbangan BBPOM Makassar dalam melakukan kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat. Metode yang dipilih dan waktu pelaksanaan merupakan faktor yang mempengaruhi keberhasilan kegiatan peningkatan pengetahuan masyarakat. Penggunaan media sosial meskipun dirasa paling efektif untuk beberapa segmen masyarakat ternyata tidak mampu menyentuh semua segmen masyarakat. Terutama Sulawesi Selatan yang sebagian besar tinggal di pedesaan ternyata tidak banyak memanfaatkan dan menggunakan media sosial. Pertemuan dan tatap muka secara langsung apalagi yang melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama tetap mempunyai manfaat yang tidak dapat digantikan oleh media sosial. Karena itu BBPOM di Makassar tetap melibatkan tokoh masyarakat sebagai penyambung lidah BBPOM di Makassar dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang obat dan makanan yang aman dan bermutu serta mendukung berbagai program pemerintah terkait pengawasan obat dan makanan.

Selain melalui media sosial yang sedang menjadi sumber informasi utama bagi kaum milenial, selama tahun 2024, BBPOM Makassar juga melakukan sosialisasi dan pemberian informasi dengan memanfaatkan semua komunitas yang telah dibentuk untuk menyebarkan infografis tentang Obat dan Makanan yang aman dan bermutu terutama pada saat menjadi narasumber berdasarkan undangan dari lintas sektor, perguruan tinggi, asosiasi, maupun berbagai komunitas lainnya

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2024 telah tercapai dengan capaian 93,04%. Namun nilai perilaku masih rendah yaitu 64,78 (kategori Cukup Baik) sehingga diperlukan upaya untuk melakukan pemberian informasi yang semakin intensif dan pemilihan media yang tepat untuk melakukan penyebaran

informasi di seluruh wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu dengan adanya KIE bersama Tokoh Masyarakat yang meningkat di tahun 2024 diharapkan mampu membangun kepercayaan masyarakat kepada BBPOM Makassar dan Badan POM yang pada akhirnya diharapkan dapat merubah perilaku Masyarakat terkait *awareness* Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Kerjasama dengan Penerintah Daerah harus semakin dieratkan dengan memanfaatkan berbagai fasilitas yang dimiliki oleh Pemerntah Daerah. Pemerintah Daerah merupakan penguasa wilayah yang memahami dengan baik kondisi di daerah masing masing. , selain itu juga telah dilakukan penguatan sistem informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market.

- Capaian kinerja terkait Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi publik terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi kinerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Penacapain kinerja untuk indikator Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.





Sasaran 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Capaian indkator Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar adalah sebagai berikut :

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
Target 97,70 Realisasi 97,72 Capaian 100,02

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
Target 80 Realisasi 81,31 Capaian 101,64

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar
Target 95,50 Realisasi 94,44 Capaian 98,89

1. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM

Aspek Pengukuran

1). **Aspek bimbingan dan pembinaan**
2). **Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan**
3). **Aspek penanganan saran dan masukan**
4). **Aspek manfaat**
5). **Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan.**
6). **Aspek pengetahuan dan pemahaman**

Kepuasan adalah perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan (Kotler, 1997).Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (regulatory assistance)

Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan (KBP) terhadap pelaku usaha adalah bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan regulasi (*regulatory assistance*).

Jenis KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) dikelompokkan menjadi :

- Pendampingan
  Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan terhadap pelaku usaha secara intensif dalam serangkaian aktivitas tatap muka langsung atau online dan/atau kunjungan lapangan, individual, serta berdampak langsung terhadap proses perizinan/ sertifikasi yang sedang dijalani pelaku usaha.
- Desk

Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan terhadap pelaku usaha secara intensif, individual, tatap muka secara langsung atau online, dan berdampak langsung terhadap proses perizinan / sertifikasi yang sedang dijalani pelaku usaha.

- Bimbingan Teknis

  Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan terhadap beberapa pelaku usaha dalam jumlah tertentu atau kelompok dengan materi bimbingan umumnya bersifat teknis untuk membantu mengatasi masalah yang sama.

- Sosialisasi.

  Layanan KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) yang dilakukan kepada pelaku usaha secara luas dengan peserta relatif banyak biasanya mengenai isu terbaru, dan keikutsertaannya lebih bersifat sukarela

Pelaku usaha yang dimaksud meliputi: Produsen, Distributor, Importir, Eksportir, Pelayanan (Apotek, RS, dll.), Lainnya (ritel, stockiest, depot dll.)

Pengukuran kepuasan mengacu pada konsep *Service Quality* (ServQual).

Kepuasan terdiri dari 5 aspek: *Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, & Responsiveness.*

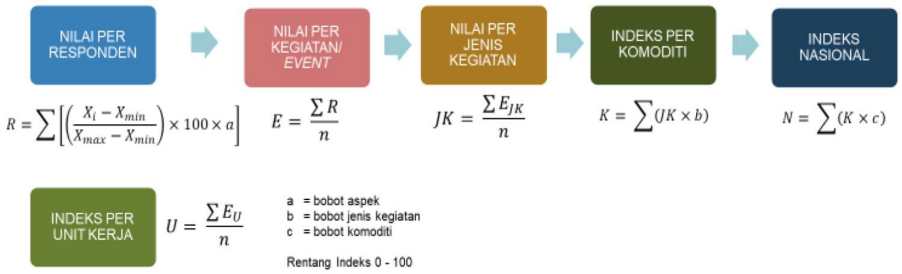
Survei terdiri dari 10 pertanyaan yang mewakili tiap aspek, menggunakan skala Likert 1-4 dalam bentuk simbol bintang.

Survei dilakukan secara online (***surveiprkom.pom.go.id***)saat kegiatan bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha.

Skala Kepuasan:

- Tidak Puas (0 -25)
- Kurang Puas (26 -50)
- Puas (51 -75)
- Sangat Puas (76 -100)

Rumusan Perhitungan Indeks



Bobot aspek: *Reliability* 0,30; *Responsiveness* 0,20 *Assurance* 0,17; *Empathy* 0,17; *Tangible* 0,16
Bobot jenis kegiatan: Pendampingan 0,326; Desk 0,303; Bimtek 0,260, Sosialisasi 0,110
Bobot komoditi: Obat 0,233; OT 0,187, SK 0,178; Kosmetik 0,173; Pangan Olahan 0,230

R = Nilai Responden; E = Nilai Event/kegiatan; JK = Indeks Jenis Kegiatan; U = Indeks Unit Kerja; K = Indeks Komoditi; N = Indeks Nasional

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Persentase Capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 adalah 100,02 % dengan realisasi sebesar 97,70% Indeks kepuasan

pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan **diatas dari** target 97,70 yang ditentukan dengan kategori **"Sangat Baik"**.

Tabel 3.40

Target Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97,70	97,72	100,02	Sangat Baik

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori *Customer Satisfaction* dan konsep *Service Quality* (ServQual) meliputi aspek *reliability*, *assurance*, *responsiveness*, *empathy*, dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti, dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100 dengan kategori kepuasan sebagai berikut: 0-25 (Tidak Puas), 26-50 (Kurang Puas), 75-100 (Sangat Puas). Survei dilakukan secara *online* menggunakan aplikasi berbasis *web* dan juga terhubung dengan BPOM *Operation Center* (BOC). Penghitungan indeks dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan, dan komoditi.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	83	82,50	99,40	Cukup
Tahun 2021	83,5	87,30	104,55	Sangat Baik
Tahun 2022	84,60	90,60	107,09	Sangat Baik
Tahun 2023	85,6	97,60	114,02	Sangat Baik
Tahun 2024	97,70	97,72	100,02	Sangat Baik

Terdapat tren peningkatan signifikan dalam kepuasan pelaku usaha selama lima tahun terakhir. Sejak 2021**,** seluruh capaian berada dalam kategori Sangat Baik**,** mencerminkan efektivitas dan kualitas bimbingan/pembinaan yang terus meningkat. Tahun 2024 menjadi tahun stabilisasi pada standar tinggi, dengan target yang berhasil dipenuhi dengan tepat.

Tahun 2023 menjadi Puncak Kinerja, Realisasi 97,60 dengan target 85,6 menghasilkan capaian tertinggi selama periode 2020-2024 yaitu 114,02%**.** Pencapaian ini menandakan kepercayaan pelaku usaha terhadap pengawasan dan pembinaan semakin tinggi.

Tahun 2024 merupakan Target Tinggi**.** Target tahun ini dinaikkan secara signifikan menjadi **97,70**.serta Realisasi 97,72**,** sangat presisi, dengan capaian 100,02%

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini**.**

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (Target Nasional = 96,50)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	97,70	97,72	100,02	Sangat Baik
BBPOM di Manado	99,30	99,45	100,15	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	99,00	98,85	99,85	Cukup
BBPOM Lampung	97,30	98,02	100,74	Sangat Baik

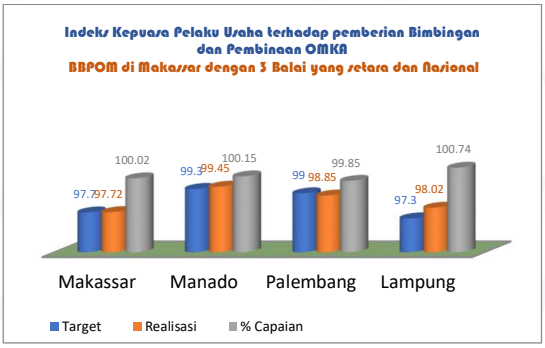
Secara umum, seluruh BBPOM menunjukkan performa memuaskan dalam bimbingan dan pembinaan pelaku usaha terkait pengawasan obat dan makanan. Realisasi BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado dan BBPOM di Lampung berada **di atas target nasional**, dan mayoritas berada pada kategori **"Sangat Baik"**. Evaluasi terhadap standar kategorisasi juga perlu dilakukan agar penilaian lebih adil dan objektif.

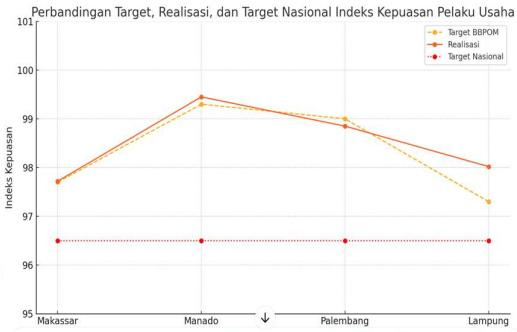
Hasil Nasional tahun 2024 adalah 96,3 (Sangat Puas) atau capaian target sebesar 107,0 %. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha per komoditi yaitu: (1) Obat 96,3, (2) Obat Tradisional 95,9, (3) Suplemen Kesehatan 95,7, (4) Kosmetik 96,5, dan (5) Pangan Olahan 96,5.

Target kinerja indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung dan Nasional masing-masing berada pada angka yang berbeda, adapun hasil capaian realisasi kinerja Indeks kepuasan pelaku usaha

terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar dengan nilai 100,02 lebih rendah dibandingkan BBPOM Lampung dan BBPOM Manado, serta capaian BBPOM di Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan Capaian Nasional. Keempat BBPOM yaitu : BBPOM Makassar, BBPOM Manado, BBPOM Palembang, dan BBPOM Lampung) menunjukkan **realisasi di atas target nasional**, yang berarti pelayanan bimbingan dan pembinaan secara umum telah diterima dengan **baik oleh pelaku usaha**.

Berikut ini perbandingan capaian indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung serta Nasional Tahun 2024 sebagai berikut:





Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori "Sangat Baik" antara lain:

Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan (IKEPU) dilakukan memalui survei dengan mengukur kepuasan pelaku usaha yang telah mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari BBPOM Makassar dalam 4 kategori jenis kegiatan berupa pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi. Pelaku usaha yang menjadi target responden survei adalah produsen, distributor, importir, eksportir dan sarana pelayanan kefarmasian.

Metodologi pengukuran menggunakan kerangka teori customer statisfaction dan konsep service Quality (ServQual) meliputi aspek *realibility, assurance, responsiveness, empathy* dan *tangible*. Pertanyaan kuesioner terdiri atas data diri responden, 10 pertanyaan inti dan saran/masukan. Jawaban pertanyaan menggunakan skala Likert 1-4 yang kemudian dikonversi menjadi indeks skala 0-100, survei dilakukan secara online menggunakan aplikasi berbasis web dan juga

terhubung dengan BPOM Operation Center (BOC). Perhitungan dilakukan secara berjenjang dengan mengikutsertakan bobot aspek kepuasan, jenis kegiatan dan komoditi.

Adapun jumlah KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan) di BBPOM Makassar adalah sebanyak 6 kali dengan jumlah 78 responden. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Nasional adalah 96,3 (Sangat Puas) atau capaian target 107,0 sedangkan Indeks kepuasan pelaku usaha per komoditi sebagai berikut :

- Obat = 96,30 %
- Obat Tadisional = 95,90 %
- Suplemen Kesehatan = 95,70 %
- Kosmetik = 96,50 %
- Pangan Olahan = 96,50 %

BBPOM di Makassar selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan pelayanan prima. Terhadap pelaku usaha yang diberikan layanan dalam rangka membantu pemenuhan terhadap regulasi, berupa kegiatan pendampingan, desk, bimbingan teknis dan sosialisasi, dan telah dibuatkan inovasi inovasi yang menunjang pelayanan publik serta meningkatkan ekspektasi dari pelaku usaha. Untuk Tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Sampai dengan Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah memberikan 4 KBP (Kegiatan Bimbingan dan Pembinaan).

1. Meningkatkan monitoring, evaluasi dan tindaklanjut atas hasil survei maupun hasil pengukuran indeks.
2. Menindaklanjuti saran/ masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM.
3. Melakukan identifikasi/ pemetaan responden survei IKEPU untuk meminimalkan irisan dengan surveilainnya.
4. Melakukan inovasi atau perbaikan untuk mengatasi isu kecukupan waktu , layanan pasca KBP, video/ infografis materi, media komunikasi dengan pelaku usaha, teknik komunikasi sesuai karakteristik pelaku usaha dengan mempertimbangkan tingkat literasi, dan cakupan pelaku usaha yang mendapatkan KBP.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 97,72 % dengan capaian 100,02 % pada tahun 2024. Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,00) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,02 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,93 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori

100,02	189.235.000	189.099.877	99,93	1,00	0,00	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Untuk pencapaian target Indikator Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dilakukan revisi anggaran meliputi penambahan kegiatan pertemuan Bimtek bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan Bimtek bagi Pelaku Usaha Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik / Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan kategori Sangat Baik antara lain :

- melakukan bimbingan dan pembinaan secara intensif dan berkelanjutan terhadap sarana pelaku usaha Obat dan Makanan yang memiliki nilai grading yang rendah.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara intensif dan berkelanjutan terhadap pelaku usaha yang berisiko.
- BBPOM di Makassar tetap melakukan Kegiatan bimbingan dan pembinaan sampai dengan triwulan ke IV meliputi Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan *Desk Consultation* Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (IP CPPOB) untuk UMK Pangan Olahan dalam rangka Pedang Puang Baso' yaitu pendampingan UMK Pangan Olahan.
- Pendampingan UMKM obat tradisional yang meliputi bimbingan teknis Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik secara Bertahap (CPOTB Bertahap) untuk UKOT dan UMOT, *Desk Consultation* denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Pendampingan bagi UMKM kosmetik juga telah dilakukan melalui inovasi Jatim Glowing dengan berbagai kegiatan seperti bimbingan teknis Pemenuhan Aspek Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB), *Desk Consultation* denah dan penyelesaian temuan pemeriksaan sarana (CAPA). Untuk mendukung percepatan penerbitan ijin edar maka Balai Besar POM di Makassar bekerja sama dengan Direktorat Pangan Olahan Badan POM menyelenggarakan *Desk* Registrasi Pangan Olahan. Kegiatan pendampingan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha untuk memahami proses bisnis di Badan POM terkait penerbitan izin edar obat tradisional, kosmetik, dan pangan olahan.
- Program yang menunjang keberhasilan kinerja adalah intensitas dan frekuensi bimbingan dan pembinaan yang diberikan terhadap pelaku usaha. Untuk kegiatan pendampingan dan desk, pelaku usaha akan lebih puas jika didampingi secara personal. Sedangkan untuk kegiatan bimbingan teknis dan sosialisasi, pelaku usaha perlu diingatkan sesering mungkin untuk partisipasinya mengisi survei.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Kegiatan pengukuran Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha dengan metode desk research, yaitu analisis kuantitatifmenggunakan data sekunder dari SIPT tahun 2023 melalui verifikasi grading Kedeputian 1, 2, dan 3, antara lain :

1. Data hasil pemeriksaan sarana produksi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan (MD) yang memenuhi ketentuan (GMP);
2. Data hasil pemeriksaan sarana distribusi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan yang memenuhi ketentuan (GDP);
3. Data hasil pemeriksaan sarana pelayanan (khusus obat, narkotika, psikotropika, dan prekusor) yang memenuhi ketentuan;
4. Data hasil pengawasan iklan dan penandaan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan;
5. Data industri pangan olahan yang menerapkan Program Manajemen Risiko (PMR).

Pemilihan sampel sarana yang diperiksa dilakukan dengan metode purposive, belum menggunakan teknik sampling probability sehingga hasil yang diperoleh **belum dapat mewakili populasi seluruh pelaku usaha Obat dan Makanan**.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan belum dilakukan pemilihan sampel pada iklan Obat dan Penandaan Obat, dimana hasil serta belum dilakukan pemilihan sampel pada pelayanan untuk komoditi Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan, kosmetik dan Pangan Olahan.

	Produksi	Distribusi	Pelayanan	Iklan	Penandaan	Nilai Indeks	
Obat	100	88,68	85,83	-	-	96,01	Nilai IKEPU 87,19 (Baik)
Obat Tradisional	85,71	75,26		100	100	88,50	
Suplemen Kesehatan	100	96,77		-	-	98,76	
Kosmetik	84,62	68,24		-	-	81,01	
Pangan Olahan	71,84	72,24		88,89	57,69	72,49	

Capaian IKPU secara nasional adalah

IKPU Nasional Tahun 2024

No.	Komoditi	Realisasi Tahun 2024	Kedeputian	Realisasi Tahun 2024	Target Tahun 2024	% Capaian vs Target
1	Obat	75,11	Kedeputian 1	75,11	91,00	82,54%
2	Obat Tradisional	85,26	Kedeputian 2	87,83	88,00	99,80%
3	Suplemen Kesehatan	94,43				
4	Kosmetik	83,79				
5	Pangan Olahan	76,80	Kedeputian 3	76,80	80,50	95,41%
Indeks Nasional		**82,41**		**82,41**	**86,00**	**95,83%**

Target IKPU Nasional

2020	2021	2022	2023	2024
82	83	84	85	86

Keterangan:
Sangat Baik : > 90 -100
Baik : > 66,67- 90
Cukup : > 33,33-66,67
Kurang : 0 – 33,33

Capaian Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di BBPOM Makassar

- Suplemen Kesehatan dan Obat menunjukkan kinerja Sangat Baik**,** dengan nilai indeks di atas 90.
- Kosmetik dan Pangan Olahan berada di kategori Baik**,** namun perlu perhatian khusus karena indeksnya relatif lebih rendah dibanding komoditi lainnya.

- Nilai IKEPU Obat sebesar 87,19 termasuk dalam kategori Baik.

Sementara, Secara nasional, Indeks Nasional mencapai 82,41, atau sebesar 95,83% dari target nasional 2024 (86,00).

- Berdasarkan kategori, capaian ini masuk dalam klasifikasi Baik.
- Komoditi dengan pencapaian tertinggi : Obat Tradisional (99,80% dari target).
- Komoditi dengan pencapaian terendah : Obat (82,54% dari target), menunjukkan perlunya intervensi peningkatan kinerja di sektor ini.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2024 telah tercapai dan target periode akhir renstra telah tercapai. Untuk terus meningkatkan upaya *branding* Balai Besar POM di Makassar, telah dikembangkan inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan Pelaku UMK Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik) Inovasi ini berdampak pada :

- Kemudahan proses pendaftaran izin edar bagi pelaku usaha
- Keringanan biaya bagi pelaku UMK sebesar 4-5 Juta per pengujian sampel
- Pelaku usaha berkomitmen menerapkan CPPOB/CPOTB/CPKB

Diharapkan hal ini dapat menaikkan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan BBPOM di Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan program inovasi pedang Puang Basok antara lain :

1. Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Balai Besar POM di Makassar bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi Pedang Puang Basok 2024, yang dilaksanakan di Helios Hotel Kabupaten Bone pada tanggal 6 September 2024 yang diikuti oleh 75 Pelaku Usaha produk Produk Pangan yang berdomisili di Kabupaten Bone. Selain itu hadir pula stakeholder terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pendaftaran pangan olahan dan memberikan pelayanan prima terkait permasalahan pendaftaran pangan olahan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk, memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi pelaku usaha yang ada dalam wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar)
2. Bimtek bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka percepatan proses sertifikasi dan registrasi izin edar, sebagai rangkaian kegiatan inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan pelaku usaha pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik) Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung 12 Desember 2024 di hotel Melia Makassar ini dihadiri oleh kurang lebih 50 pelaku usaha di wilayah Kota Makassar. Sebagai wujud komitmen dalam mendukung UMK, BPOM melaksanakan pendampingan, penyederhanaan registrasi, serta pengawasan keamanan dan mutu produk.

   Dalam bimtek ini, para peserta diberikan pengetahuan mengenai Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Cara Produksi Obat tRadisional yang baik (CPOTB) melalui e-sertifikasi, Registrasi Pangan Olahan

berbasis risiko, serta pentingnya menjaga keamanan dan mutu produk yang dihasilkan. Diharapkan dengan bekal pengetahuan yang baru ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produknya, sehingga lebih aman dikonsumsi dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku.

Dengan terselenggaranya bimtek ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri UMKM khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasaran.

Meskipun target Renstra pada tahun 2024 telah tercapai bahkan terlampaui namun BBPOM Makassar tetap harus mencari dan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Makassar.

UMKM merupakan pilar utama perekonomian Indonesia, namun dihadapkan dengan tantangan dalam pembiayaan, kompetensi SDM, dan digitalisasi pemasaran sehingga Pendampingan kepada pelaku usaha utamanya UMKM tetap harus merupakan prioritas karena mereka menduduki proporsi terbesar pelaku usaha dan masih memerlukan pendampingan dari BPOM agar mereka dapat memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan yang mengalami transformasi dari manual menjadi digital bukan merupakan hal yang mudah diikuti oleh UMKM yang pada umumnya mempunyai kemampuan literasi digital yang kurang memadai. Untuk itu BBPOM Makassar tetap diharapkan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para UMKM sebagai kekuatan nyata dan penyokong ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM

Indikator Pembentuk

- ***tangibles,***
- ***realibility,***
- ***responsiveness,***
- ***assurance dan***
- ***emphaty***

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM.

Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles, realibility, responsiveness, assurance dan emphaty*.
Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks:

- Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*realibility*), tindakan (*responsiveness*), memberikan perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.

Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 pada tingkat nasional diperoleh nilai 83,97 (Kategori Puas) dengan target yaitu 83 (101,16%). Realisasi indeks kepuasan masyarakat tahun ini telah mencapai target dengan peningkatan sebesar 3,00 poin dari tahun 2024 yaitu 80,00. Hasil kepuasan per komoditi adalah 1) Obat 85,15; 2) Obat Tradisional 83,03; 3) Suplemen Kesehatan 83,13; 4) Kosmetik 83,37; Pangan Olahan 84,29. Keseluruhan indeks kepuasan berdasarkan komoditi membentuk indeks nasional dengan kategori Puas.
Berdasarkan variabel pembentuk indeks maka kepuasan terhadap tindakan BPOM merupakan nilai variabel yang tertinggi, sedangkan variabel dengan nilai yang terendah adalah pemberian informasi terkait keamanan dan mutu produk yang dilakukan oleh BPOM.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Persentase Capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan pada Tahun 2024 adalah 80,00 % dengan realisasi sebesar 81,31 % Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diatas dari target yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.33
Capaian Kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	80,00	81,31	101,64	Sangat Baik

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	69	73,94	107,16	Sangat Baik
Tahun 2021	75,50	70,84	93,83	Cukup
Tahun 2022	77	73,84	95,90	Cukup
Tahun 2023	78,5	77,96	99,31	Cukup
Tahun 2024	80,00	81,31	101,64	Sangat Baik

Perbandingan target realisasi kinerja indikator indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM Makassar

Tahun 2020 **:** Realisasi melampaui target dengan capaian 107,16%**,** kategori Sangat Baik. Ini menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap pengawasan obat dan makanan.

Tahun 2021 hingga 2023**:** Capaian turun dibanding tahun sebelumnya dan meskipun realisasi mendekati target, kategori hanya "Cukup"**.**

- 2021: Penurunan cukup tajam (capaian 93,83%).
- 2022: Sedikit membaik (capaian 95,90%).
- 2023: Hampir mencapai target (capaian 99,31%).

Tahun 2024: Performa kembali membaik signifikan dengan capaian 101,64%**,** sehingga kategori kembali menjadi Sangat Baik**.**

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini **:**

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan Target Nasional = 83	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	80,00	81,31	101,64	Sangat Baik
BBPOM di Manado	87,35	86,79	99,36	Cukup
BBPOM di Palembang	80,01	80,6	100,74	Sangat Baik

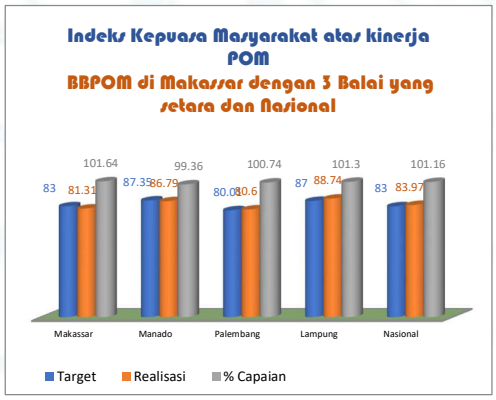
BBPOM Lampung	87	88,74	101,30	Sangat Baik
Nasional	83	83,97	101,16	Sangat Baik

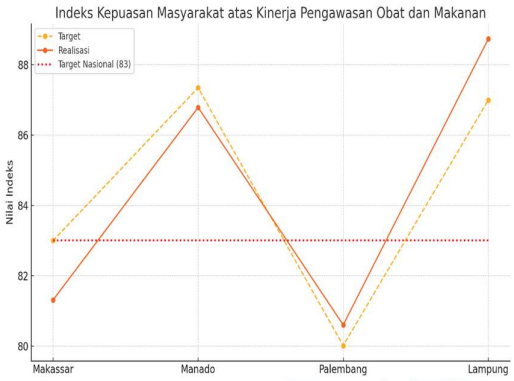
BBPOM Makassar, BBPOM Palembang, dan BBPOM Lampung meraih kategori **Sangat Baik**, dengan capaian di atas 100%. BBPOM Manado berada pada kategori Cukup, meskipun capaian persentasenya mendekati 100% (99,36%).. BBPOM Lampung berada pada realisasi yang paling tinggi (101,30%) terhadap target (87), diikuti oleh BBPOM Makassar dan BBPOM Palembang.

Hal ini memperlihatkan bahwa:

- Kualitas layanan di BBPOM Makassar, BBPOM Palembang, dan BBPOM Lampung sudah memuaskan masyarakat**.**
- Ada sedikit ketidaksesuaian antara target dan realisasi di satu BBPOM (Manado), yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti ekspektasi masyarakat yang lebih tinggi atau kendala teknis dalam layanan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2024 sebagai berikut :





Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan kategori "Sangat Baik" antara lain:

a. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2021 mengalami penurunan untuk semua komoditi. Sementara Indeks kepuasan untuk semua kategori produk

mengalami kenaikan di Tahun 2022 (+/-8 poin) dan di tahun 2024 Indeks kepuasan untuk semua kategori produk mengalami kenaikan (4,12 poin).

b. Berdasarkan evaluasi Badan POM Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan obat dan makanan pada Tahun 2024 adalah 77,96% Perhitungan indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan evaluasi Badan POM. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan Indeks Kesadaran Masyarakat dari tahun 2022.

c. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 pada tingkat nasional sebesar 80,45 (Kategori Puas) dengan target yaitu 80 (100,57%), nilai ini mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 4,07 poin (76,39).

d. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2023 pada tingkat nasional sebesar 80,45 (Kategori Puas) dengan target yaitu 80 (100,57%), nilai ini mengalami peningkatan dari Tahun 2022 yaitu sebesar 4,07 poin (76,39).

e. Pada tahun 2024, target indeks Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan meningkat dari 78,5 (tahun 2023) menjadi 80,0. Realisasi juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 77,96 menjadi 81,31. Ini mencerminkan tidak hanya peningkatan ekspektasi terhadap kinerja pengawasan, tetapi juga kemampuan BBPOM di Makassar dalam memenuhi bahkan melebihi target; Perubahan dari kategori "Cukup" pada 2023 ke "Sangat Baik" pada 2024 menunjukkan adanya peningkatan persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan pengawasan obat dan makanan. Ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti peningkatan kualitas komunikasi risiko, pelayanan yang lebih cepat, serta responsif terhadap keluhan publik.

f. Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM terhadap Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan :
   - Kepuasan terhadap upaya pengawasan BPOM
   - Kepuasan terhadap tindakan BPOM
   - Kepuasan terhadap kemampuan BPOM melindungi masyarakat
   - Kepuasan terhadap perhatiannya BPOM atas jaminan keamanan Obat dan Makanan

g. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pengawasan BPOM berdasarkan 5 (lima) komoditi
   - Obat dengan nilai sebesar 81,63 kategori Puas.
   - Obat Tradisional dengan nilai sebesar 81,19 kategori Puas.
   - Suplemen Kesehatan dengan nilai sebesar 81,25 kategori Puas.
   - Kosmetik dengan nilai sebesar 80,83 kategori Puas.
   - Pangan Olahan dengan nilai sebesar 81,16 Puas.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 81,31% dengan capaian 101,64 % pada tahun 2024. Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,03) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,86% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,65%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
101,64	203.441.000	158.629.784	77,97	1,30	0,30	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada realisasi anggaran tahun 2024. Pada tahun 2024 dialokasikan anggaran penyebaran Informasi Produk Obat dan Makanan sebesar 196.667.000,- namun tidak tereaalisasi sebesar 41.340.778 yang semula direncanakan untuk kegiatan Penyebaran Informasi media luar ruang melalui videotron, namun dialihkan untuk penyebaran informasi KIE Non Medsos antara lain didominasi oleh Leaflet dan Billbord.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan antara lain penyebaran informasi obat dan makanan, Penyuluhan Bersama Laboratorium Keliling, Penyebaran Informasi, Sosialisasi Melalui Media, koordinasi lintas sektor, serta Peningkatan Kompetensi petugas layanan publik.

Komunikasi, Informasi, Edukasi kepada masyarakat dilakukan oleh BBPOM di Makassar melalui berbagai media baik media sosial, media cetak, media elektronik. Pemberian layanan informasi melalui tatap muka langsung telah dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Selama tahun 2024 BBPOM di Makassar telah melakukan pemberian informasi sebanyak 7.133 melalui berbagai media antara lain secara langsung, melalui *WhatsApp, website, Instagram, Twitter, Facebook, Youtube,* radio, televisi dan pameran.

Melalui :

1. KIE Langsung jumlah peserta 444 terdiria dari : 219 Penyebaran Informasi; 225 Penyuluhan)
2. KIE Media social, jumlah Follower : Jumlah Follower Instagram: 5367; Facebook: 452; Youtube: 664; X: 195; Tiktok: 11.
3. KIE Non Media social: Jumlah 37 terdiri dari : Media Luar Ruangan (Billboard 16); Media Cetak (Leaflet 15); Media Elektronik (Radio 3 dan Televisi 3).

Selain itu BBPOM Makassar juga menjadi narasumber dan memberikan berbagai materi informasi sesuai dengan permintaan *stakeholder*.

antara lain Bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan, Sosialisasi Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro, Sosialisasi Sertifikasi Halal dan Izin Edar BPOM, Pemenuhan Komitmen SPP-IRT UMKM, Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil, dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi Bimtek Pengendalian dan Jaminan Mutu Pangan bagi Usaha Mikro, Kegiatan peningkatan kesadaran akan keamanan pangan bagi pedagang pasar rakyat, Sosialisasi PJAS Aman, Pelatihan Medication Safety dan Pelaporan Insiden Kesalahan Terkait Obat, dan Pemenuhan Komitmen Pelaku Usaha IRTP, Pelatihan Lanjutan "Advance Training" Packing dan Perijinan, dll. Beberapa topik kegiatan dilaksanakan lebih dari satu kali dengan peserta yang berbeda.

Namun demikian, masyarakat masih mengeluhkan aplikasi yang sering eror dan timeline pelayanan yang sering tidak dipenuhi. BBPOM Makassar harus lebih jujur kepada masyarakat sehingga tidak ada kerugian di pihak

pelanggan. Yang diperlukan pelanggan adalah kepastian layanan sehingga mereka dapat melakukan perencanaan selanjutnya.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Badan POM sebagai organisasi pelaksana layanan publik yang telah menerapkan Reformasi Birokrasi dan Quality Management System berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan membangun berbagai aplikasi menggunakan system informasi sehingga layanan dapat diberikan secara transparan, akuntabel, menghindarkan dari KKN, meningkatkan kecepatan, efektifitas dan efisiensi serta dapat dijangkau oleh seluruh pengguna layanan. Namun demikian ternyata tidak semua masyarakat menyukai layanan yang *nir kontak* ini. Ada sebagian masyarakat terutama yang *literacy* digitalnya tidak memadai lebih menyukai layanan tatap muka dengan membawa berbagai dokumen. Kelemahan aplikasi digital juga sangat tergantung pada jaringan internet. Hal ini banyak dikeluhkan oleh penerima layanan publik BPOM dan menurunkan kepuasan pelanggan.

Sebagai alternatif solusi jika dimungkinkan BBPOM Makassar akan melaksanakan antara lain :

- Meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan secara umum, terutama pemberian informasi kepada masyarakat, peningkatan frekuensi pengawasan dan penindakan di area rural dan perbatasan melalui pengawasan berbasis komunitas dan meningkatkan penindakan produk ilegal di pasar offline dan online.
- Meningkatkan kegiatan public relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media.
- Meningkatkan kerja sama dengan media dalam publikasi aktivitas pengawasan termasuk adanya contact person khusus.
- Meningkatkan enggagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja.
- Menjalin kerja sama dengan pelaku usaha dalam mempromosikan BPOM dan menyampaikan informasi Obat dan Makanan kepada konsumen.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target IKU tahun 2024 telah tercapai dan target periode akhir renstra telah tercapai. Untuk terus meningkatkan upaya *branding* Balai Besar POM di Makassar, telah dikembangkan inovasi Pedang Puang Basok antara lain :

- Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Balai Besar POM di Makassar bekerjasama dengan Kedeputian Bidang Pengawasan Pangan Olahan melaksanakan Bimbingan Teknis Bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik. Kegiatan ini merupakan bagian dari inovasi Pedang Puang Basok 2024, yang dilaksanakan di Helios Hotel Kabupaten Bone pada tanggal 6 September 2024 yang diikuti oleh 75 Pelaku Usaha produk Produk Pangan yang berdomisili di Kabupaten Bone. Selain itu hadir pula stakeholder terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pendaftaran pangan olahan dan memberikan pelayanan prima terkait permasalahan

pendaftaran pangan olahan, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas produk, memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi pelaku usaha yang ada dalam wilayah pengawasan Balai Besar POM di Makassar)

- Bimtek bagi Pelaku Usaha Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) dalam rangka percepatan proses sertifikasi dan registrasi izin edar, sebagai rangkaian kegiatan inovasi Pedang Puang Basok (Pendampingan pelaku usaha pangan olahan, obat tradisional dan kosmetik) Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung 12 Desember 2024 di hotel Melia Makassar ini dihadiri oleh kurang lebih 50 pelaku usaha di wilayah Kota Makassar. Sebagai wujud komitmen dalam mendukung UMK, BPOM melaksanakan pendampingan, penyederhanaan registrasi, serta pengawasan keamanan dan mutu produk. Dalam bimtek ini, para peserta diberikan pengetahuan mengenai Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) Cara Produksi Obat tRadisional yang baik (CPOTB) melalui e-sertifikasi, Registrasi Pangan Olahan berbasis risiko, serta pentingnya menjaga keamanan dan mutu produk yang dihasilkan. Diharapkan dengan bekal pengetahuan yang baru ini, para pelaku usaha dapat meningkatkan kualitas produknya, sehingga lebih aman dikonsumsi dan memenuhi persyaratan regulasi yang berlaku. Dengan terselenggaranya bimtek ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri UMKM khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasaran.

Meskipun target Renstra pada tahun 2024 telah tercapai bahkan terlampaui namun BBPOM Makassar tetap harus mencari dan menemukan berbagai cara untuk meningkatkan kinerja pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM Makassar. Pendampingan kepada pelaku usaha utamanya UMKM tetap harus merupakan prioritas karena mereka menduduki proporsi terbesar pelaku usaha dan masih memerlukan pendampingan dari BPOM agar mereka dapat memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan. Layanan yang mengalami transformasi dari manual menjadi digital bukan merupakan hal yang mudah diikuti oleh UMKM yang pada umumnya mempunyai kemampuan literasi digital yang kurang memadai. Untuk itu BBPOM Makassar tetap diharapkan memberikan bimbingan dan pendampingan kepada para UMKM sebagai kekuatan nyata dan penyokong ekonomi Negara

Adapun rekomendasi untuk meningkatkan Kepuasan Masyarakat yang ditujukan kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Mayarakat antara lain :

1. Membuat tim public relation yang terdiri dari tim internal BPOM dan tenaga ahli yang bertugas merumuskan informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan membangun citra positif BPOM.
2. Memperbanyak pengembangan kompetensi public relation bagi pegawai di unit kerja Pusat dan UPT.



3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini Permen PAN No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik)

Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor). Data hasil survei diolah oleh Inspektorat Utama melalui aplikasi SAPA APIP.

Pada Tahun 2024, telah diperoleh hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dari aplikasi SAPA APIP sebesar 91,90. Data ini diperoleh pada akhir triwulan III dan tidak berubah sampai akhir Tahun 2024 dengan kategori Sangat Baik.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Persentase Capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2024 adalah 98,89 % dengan realisasi sebesar 94,44 % Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar **di bawah dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Cukup" .**

Tabel 3.33

Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	95,50	94,44	98,89	Cukup

Pada Tahun 2024, target dan capaian dihitung Tahunan untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM. Tahun 2024 realisasi untuk indikator ini adalah 94,44 dibawah dari target Tahun 2024 adalah 95,50.

Survei Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar pada tahun 2024 untuk 9 (sembilan) jenis layanan yang dilakukan, dengan jumlah responden sebagai berikut:

Tabel 3.4 Jumlah Responden Per- Jenis Layanan Tahun 2024

No	Jenis Layanan	Populasi/Responden	Sampel
1	Penertbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan	4	1
2	Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan	4	1
3	Sertifikasi Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB)	21	6
4	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional Yang Baik (CPOTB)	14	4
5	Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik (CPKB)Pengujian Obat dan Makanan	16	4
6	Penerbitan Rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika	5	2
7	Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB)	87	21
8	Pengujian Obat dan Makanan	33	9
9	Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan	488	93
	Total	**672**	**141**

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar (berdasarkan hasil SKM) tahun 2024 yang diperoleh dari per unsur pelayanan adalah **93,04** dengan rincian sebagai berikut:

Unsur Pelayanan		Tahun 2024
U1	Persyaratan	93,60
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	94,69
U3	Waktu Penyelesaian	93,20
U4	Biaya/Tarif	93,36
U5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	93,12
U6	Kompetensi Pelaksana	95,77
U7	Perilaku Pelaksana	96,50
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	94,93
U9	Sarana dan Prasarana	94,81
	Total	**94,44**

Hasil SKM diolah melalui aplikasi SAPA APIP yang dikelola bersama antara Inspektorat Utama dan Biro Hukum dan Organisasi. Dengan hasil SKM yang diperoleh BBPOM di Makassar adalah 94,44 menunjukkan realisasi dibawah target tahun 2024 dengan capaian 100,58%, kategori **Sangat Baik**.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	89	93,31	104,84	Sangat Baik
Tahun 2021	90	92,04	102,27	Sangat Baik
Tahun 2022	93	91,90	98,82	Cukup
Tahun 2023	93,50	94,90	101,50	Sangat Baik
Tahun 2024	95,50	94,44	98,89	Cukup

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik untuk tahun

- **2020–2021**: Kinerja sangat baik, dengan capaian di atas 100%. Realisasi meningkat seiring peningkatan target.
- **2022**: Terjadi penurunan kategori ke "Cukup", karena realisasi (91,90) tidak memenuhi target (93), dengan % capaian di bawah 100%.
- **2023**: Performa kembali membaik. Realisasi (94,90) melebihi target (93,50) sehingga capaian mencapai 101,50% (kategori: "Sangat Baik").
- **2024**: Meskipun realisasi meningkat menjadi 94,44, target yang juga meningkat ke 95,50 menyebabkan % capaian turun ke 98,89%, sehingga masuk kategori "Cukup".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM pada BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2024

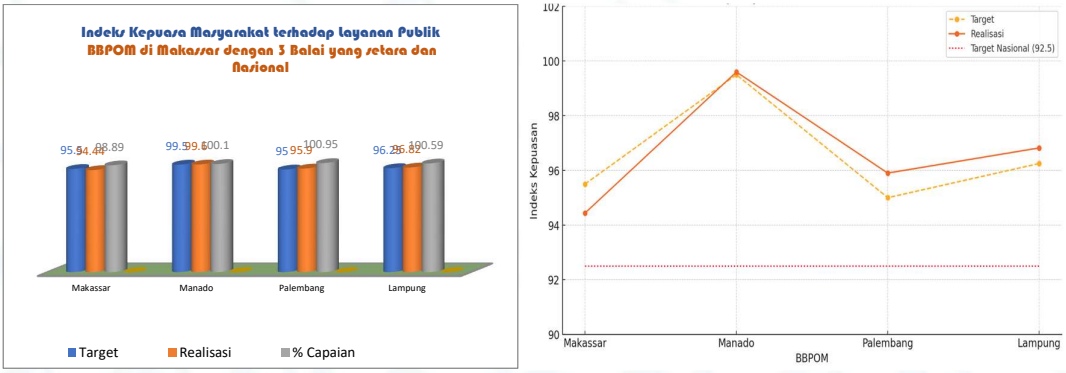
Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM (Target Nasional = 92,5)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori

BBPOM di Makassar	95,50	94,44	98,89	Cukup
BBPOM di Manado	99,50	99,60	100,10	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	95,00	95,90	100,95	Sangat Baik
BBPOM Lampung	96,25	96,82	100,59	Sangat Baik

Target indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung memiliki angka yang berbeda.

BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung berhasil melampaui target dan berada pada kategori Sangat Baik**,** namun BBPOM Makassar menjadi satu-satunya yang tidak memenuhi target, meskipun tetap di atas rata-rata nasional, menunjukkan perlunya peningkatan mutu pelayanan**.**

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

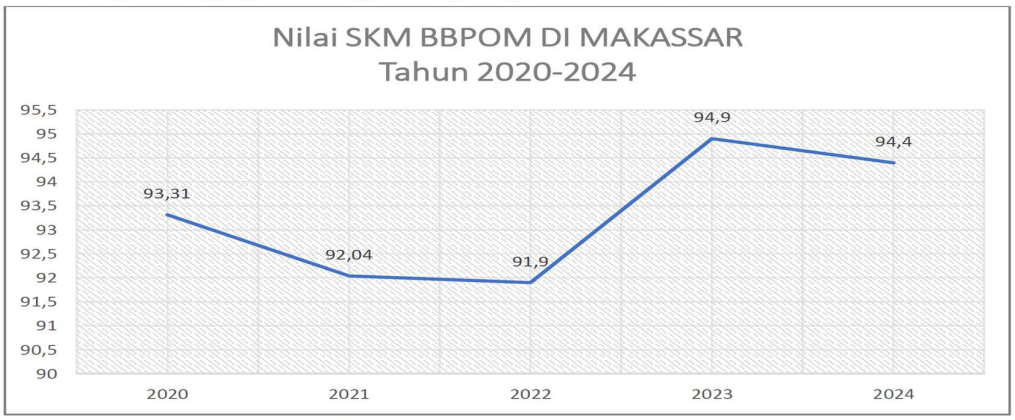
Capaian Kinerja Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM kategori "Cukup" antara lain:

Berdasarkan evaluasi Mandiri BBPOM di Makassar Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar pada Tahun 2024 adalah 94,44%. Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik diukur berdasarkan 9 unsur pelayanan terhadap 9 jenis layanan publik BBPOM di Makassar.

- Tahun 2024, layanan tatap muka mulai dilakukan secara penuh dan para pelaku usaha mulai memanfaatkan layanan ini dengan datang langsung ke kantor BBPOM Makassar dan para petugas pemberi layanan publik dapat memberikan layanan.
- Pelaksanaan pelayanan publik di BBPOM di Makassar, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik nilai SKM 94,40. Nilai SKM BBPOM di Makassar, menunjukkan konsistensi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dengan mutu sangat baik dari tahun 2020 hingga 2024.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Waktu Penyelesaian dan Biaya/Tarif.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu Perilaku Pelaksana, Kompetensi Pelaksana dan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu kinerja penyelenggaraan pelayanan publik BBPOM di Makassar dari tahun 2020 hingga 2024 kategori sangat baik tetapi berdasarkan nilai indeks yang diperoleh pada tahun 2024 mengalami penurunan 0.5 poin dibandingkan tahun 2023.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 94,44 % dengan capaian 98,89 % pada tahun 2024. Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,02).

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
98,89	43.871.000	28.721.775	65,47	1,51	0,51	Efisien

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa penggunaan sumber daya/anggaran efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada persentase realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dimana tidak terdapat realisai anggaran pada kegaiatan ini serta efisiensi penggunaan anggaran pada kegiatan operasional ULPK semula ditargetkan penggunaan anggaran sebesar Rp. 26.504.000 namun hingga akhir tahun realisasi anggaran hanya 45,17% atau hanya Rp. 11.973.099 selain itu terdapat tambahan kegiatan yang diikuti oleh BBPOM Makassar yaitu menjadi peserta pada kegiatan Pencanangan dan Pemagangan Replikasi Inovasi Pendampingan dan Pemberdayaan UMKM di Yogyakarta.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar antara lain :

Sampai dengan Tahun 2024 BBPOM telah menyelesaikan 778 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikandan terhadap Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh BBPOM di Makassar terhadap penerima layanan informasi, penerima layanan Surat Keterangan Impor/Ekspor (SKI/SKE), dan penerima layanan pengujian sampel pihak ketiga (lintas sektor) menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai Besar POM di Makassar sebesar 94,44. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa mutu layanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 mendapat kategori A (Sangat Baik).

Dalam melaksanakan tugas Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) selama Tahun 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Pelaksanaan pelayanan publik di Balai Besar POM secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM 94,44 Meskipun demikian, nilai SKM Balai Besar POM di Makassar menunjukkan penurunan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari Tahun 2020 hingga 2024 walaupun tetap dalam kategori sangat baik.
- Capaian kinerja BBPOM di Makassar secara umum menunjukkan tren positif, namun fluktuatif.
  2020–2021: Kinerja sangat baik, dengan capaian di atas 100%. Realisasi meningkat seiring peningkatan target.
  2022: Terjadi penurunan kategori ke “Cukup”, karena realisasi (91,90) tidak memenuhi target (93), dengan % capaian di bawah 100%.
  2023: Performa kembali membaik. Realisasi (94,90) melebihi target (93,50) sehingga capaian mencapai 101,50% (kategori: “Sangat Baik”).
  2024: Meskipun realisasi meningkat menjadi 94,44, target yang juga meningkat ke 95,50 menyebabkan % capaian turun ke 98,89%, sehingga masuk kategori “Cukup”.
- Unsur pelayanan yang termasuk tiga unsur terendah dan menjadi prioritas perbaikan yaitu Sistem mekanisme dan prosedur, persyaratan serta sarana dan prasarana.
- Sedangkan tiga unsur layanan dengan nilai tertinggi yaitu, kompetensi petugas, perilaku petugas serta penanganan pengaduan saran dan masukan.
- Kurang sosialisasi Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPOM di Makassar
- Meningkatkan layanan kepada pelanggan dengan percepatan waktu layanan.

- Demi kenyamanan konsumen yang membutuhkan layanan publik, Balai Besar POM di Makassar terus meningkatkan sarana dan prasarana di ruang layanan seperti menyediakan perangkat scanner dan fotocopy, charging station, area bermain anak, dan minuman kopi serta teh untuk pelanggan.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagian besar layanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan izin edar produk, yang mana proses separuhnya ada di pusat. Prosedur, persyaratan, dan kelengkapan lainnya untuk setiap jenis layanan juga berpedoman pada regulasi yang telah ditetapkan dari pusat. Selain itu, layanan BBPOM di Makassar mayoritas menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pusat.

Untuk itu, BBPOM di Makassar berkomitmen untuk beradaptasi dengan regulasi terkini dengan konsisten dan berkesinambungan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, melakukan telaah apabila memungkinkan untuk dilakukannya penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mempertimbangkan analisis resiko dan masukan dari masyarakat/pelaku usaha, menambah personil yang berperan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah (fasilitator) untuk mengatasi kendala pemenuhan persyaratan dan penggunaan aplikasi, serta menambah kapasitas pendampingan kepada pelaku usaha. Kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan juga dijalin misalnya layanan jemput bola pendampingan kepada UMKM dalam rangka penerbitan nomor izin edar. Layanan dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di masing masing Kabupaten/Kota sehingga pendampingan oleh BBPOM Makassar lebih efektif.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa target tahun 2020, 2021 dan 2023 telah tercapai. BBPOM di Makassar harus terus berupaya lebih keras dan bekerja cerdas sehingga pelayanan publik kepada masyarakat bisa dilakukan dengan lebih baik. Pemberian layanan konsultasi, pendampingan hingga layanan jemput bola, serta sosialisasi tentang layanan/persyaratan, dll akan dikembangkan lebih mudah, lebih insentif dan dapat dilakukan melalui media sosial dan media lainnya. Dari hasil survei juga terlihat bahwa

Produk. Spesifikasi dan Jenis Pelayanan mendapatkan nilai terendah yaitu 93,12. Selanjutnya Waktu Penyelesaian yang mendapatkan nilai 93,20 adalah nilai terendah kedua. Begitu juga Biaya/Tarif termasuk tiga unsur terendah dengan nilai 93,36

kompetensi dan perilaku pemberi layanan perlu mendapatkan perhatian khusus. Sedangkan tindak lanjut pengaduan masyarakat akan diupayakan setuntas mungkin sehingga masyarakat puas. Sarana pengaduan masyarakat juga telah diperbanyak melalui berbagai media dan platform sehingga masyarakat dapat melakukan pengaduan, memberikan saran dan masukan dengan lebih bebas. Website ini juga menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai informasi baru tentang pendaftaran produk dan layanan publik lainnya.



Sasaran 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan dan pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	2 Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
5 Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	6 Indeks Pelayanan Publik

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
Target 95 Realisasi 100 Capaian 105,26 %

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
Target 75 Realisasi 83,81 Capaian 111,75 %

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
Target 98 Realisasi 99 % Capaian 101,02 %

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 71,20 Realisasi 76,70 % Capaian 107,72 %

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
Target 80 Realisasi 82,81 Capaian 103,51 %

Indeks Pelayanan Publik
Target 4,70 Realisasi 4,79 Capaian 101,91

Persentase UMKM yang memenuhi standar
Target 100 Realisasi 100 Capaian 10o %

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kab/Kota

Target 95 Realisasi 81,86 Capaian 85,96

Pada sasaran strategis keempat Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 8 indikator antara lain :



1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian 100 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah Tindak lanjut Hasil Pengawasan yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan yang diberikan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Jumlah rekomendasi yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah 300 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan adalah 333 dengan realisasi 100%. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diatas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 95, dengan capaian 105,26% kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.58
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	100	105,26	Sangat Baik

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah 105,25% dengan kategori "Sangat Baik".

Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras ataur ekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindaklanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT
- Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- Pelaku usaha;
- Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keseluruhan jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan pada Tahun 2024 adalah 363 keputusan/rekomendasi, dari 363 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan tersebut keseluruhan jumlah rekomendasi yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 341, Tindak lanjut = 341
  - Obat 110 keputusan/rekomendasi, 110 Tindak lanjut

- Obat Tadisional; 9 keputusan/rekomendasi, 9 Tindak lanjut
- Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Kosmetik; 51 keputusan/rekomendasi, 51 Tindak lanjut
- Pangan; 171 keputusan/rekomendasi, 171 Tindak lanjut

- Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 17, Tindak lanjut = 17
  - Obat 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 9 keputusan/rekomendasi, 8 Tindak lanjut
  - Pangan; 5 keputusan/rekomendasi, 5 Tindak lanjut
- Rekomendasi hasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 3, Tindak lanjut = 3
  - Obat 3 keputusan/rekomendasi, 3 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
- Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT= 2, Tindak lanjut =2
  - Obat 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.59.. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	87	68,19	78,37	Caukup
Tahun 2021	89	100	112,36	Sangat Baik
Tahun 2022	91	100	109,89	Sangat Baik
Tahun 2023	93	95,24	102,41	Sangat Baik
Tahun 2024	95	100	105,26	Sangat Baik

Perbandingan capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM Makassar

Tahun 2020 adalah tahun terendah, kemungkinan karena faktor eksternal (pandemi).

Tahun 2021–2022 menjadi periode, dengan capaian tertinggi yang menunjukkan percepatan reformasi sistem.

Tahun 2023–2024 menunjukkan stabilisasi capaian, tetap sangat baik tetapi dengan kenaikan yang lebih moderat.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.7

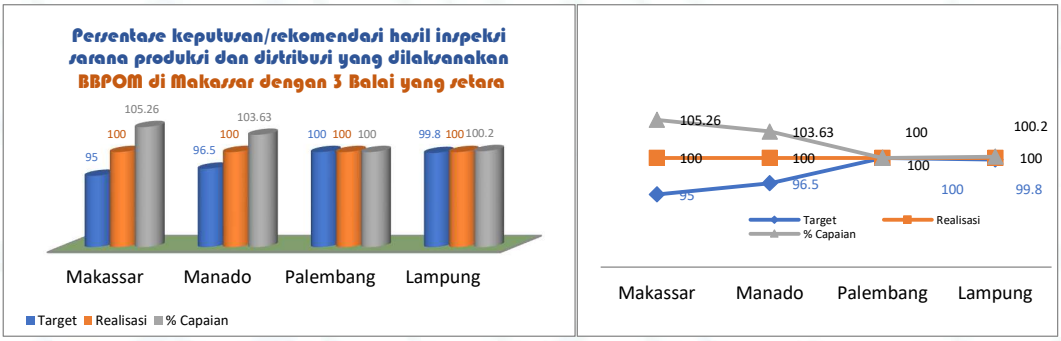
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (Target Nasional = -)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	95	100	105,26	Sangat Baik
BBPOM di Manado	96,50	100	103,63	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	100	100	100	Baik
BBPOM Lampung	99,80	100	100,20	Sangat Baik

Target Kinerja BBPOM: Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang dilaksanakan, Target Nasional Tidak ditentukan secara eksplisit. Kinerja secara keseluruhan sangat positif, mencerminkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan inspeksi dan pengambilan keputusan atau rekomendasi hasilnya.

- BBPOM Makassar, BBPOM Manado, dan BBPOM Lampung berada pada kategori "Sangat Baik" karena capaian melebihi target. BBPOM Palembang meski mencapai target 100%, dikategorikan "Baik" karena tidak melampaui target yang ditentukan. Kinerja secara keseluruhan sangat positif, mencerminkan komitmen tinggi dalam pelaksanaan inspeksi dan pengambilan keputusan atau rekomendasi hasilnya.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM Manado, dan BBPOM Lampung dan BBPOM Palembang tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja BBPOM di Makassar "Sangat Baik" disebabkan pada 363 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan sebanyak 363 jumlah rekomendasi yang dilaksanakan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pelaku usaha dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).
- Memasuki Tahun terakhir perode Renstra 2020-2024 sehingga telah tersedia baseline data untuk menentukan target yang mampu dicapai BBPOM di Makassar, perlu dilakukan review terhadap target pada Tahun penyusunan Renstra selanjutnya .
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian masih banyak pelaku usaha yang kesulitan dalam pelaksanaannya terutama untuk perbaikan temuan yang membutuhkan anggaran dengan alasan tidak adanya anggaran.
- Perlu strategi khusus dalam menetapkan jenis dokumen yang dihitung sebagai tindak lanjut ataupun rekomendasi yang diberikan seperti surat perintah pengawasan dari Badan POM berupa pengawasan sarana dari pusat atau tindak lanjut yang disampaikan oleh UPT Badan POM.
- Memperkuat monitoring dan pengawalan terhadap rekomendasi yang diberikan baik tindak lanjut yang disampaikan oleh Badan POM, UPT Badan POM dan Lintas sector untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- Melakukan komunikasi yang baik dengan pemilik sarana dan pihak yang terkait dalam pengawasan.
- Memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada pemilik sarana pada saat melakukan pengawasan.
- Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha dalam menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian pada saat pemeriksaan.
- Kompetensi petugas pemeriksaan yang sudah sesuai standar.

- Pengaturan jadwal pendampingan terhadap penyelesaian temuan hasil pengawasan mengharuskan petugas menyesuaikan dengan jadwal pengawasan rutin yang padat.

e. Analisis Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 100 % dengan capaian 105,26 % pada tahun 2024. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,05) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 105,26% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 100 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
105,26	3.430.000	3.430.000	100	1,05	0,05	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yaitu penambahan trip biaya perjalanan dinas Pengawalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2024 adalah:

- Telah dilakukannya pemeriksaan sarana dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap 326 sarana,.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk pencapaian target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi adalah meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi serta melaksanakan rapat evaluasi secara rutin setiap bulan membahas capaian IKU serta kendala dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti.
2. Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM terkait produk yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) .

3. Selama Tahun 2024 dilakukan inspeksi rutin sarana produksi dan distribusi obat dan makanan sebanyak 301 sarana dan pengawasan terhadap iklan dan penandaan obat dan makanan di BBPOM Makassar dengan keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan sebagai berikut :
   - Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 293, Tindak lanjut = 293
   - Rekomendasihasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 7, Tindak lanjut = 6
   - Rekomendasihasi inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat/UPT lain = 1, Tindak lanjut = 1
   - Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT = 0, Tindak lanjut = 0
4. Melakukan pembinaan secara intens dengan pelaku usaha melalui kegiatan pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviu Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi publik terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Pencapaian kinerja untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/ rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi / distribusi.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar belum berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan belum tercapainya target Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian 83,81 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Nilai Rasio} = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang Tindak lanjuti oleh pemangku kepentingan}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan}}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Jumlah tindaklanjut rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada Tahun 2024 adalah 233 keputusan dibandingkan dengan Jumlah rekomendasi yang diberikan oleh pemangku kepentingan adalah 278 dengan realisasi 83,81 % rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan, di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 75 %.

Capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada Tahun 2024 adalah 111,75 % dengan kategori tidak "Sangat Baik".

Tabel 3.64
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	83,81	111,75	Sangat Baik

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

1) Pelaku usaha;
2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/ respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan/ rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Dasar penerbitan keputusan/ rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan

Keseluruhan jumlah Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan pada Tahun 2024 adalah 278 keputusan/rekomendasi diwilayah kerja BBPOM di Makassar, dari 278 Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan tersebut hanya 249 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha = 273, Tindak lanjut = 228
  - Obat 89 keputusan/rekomendasi, 65 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 7 keputusan/rekomendasi, 7 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 50 keputusan/rekomendasi, 50 Tindak lanjut
  - Pangan; 127 keputusan/rekomendasi, 106 Tindak lanjut
- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor = 5, Tindak lanjut = 5
  - Obat 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut
  - Obat Tadisional; 1 keputusan/rekomendasi, 1 Tindak lanjut
  - Suplemen Kesehatan; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Kosmetik; 0 keputusan/rekomendasi, 0 Tindak lanjut
  - Pangan; 2 keputusan/rekomendasi, 2 Tindak lanjut

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.65. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	55	51,91	94,39	Cukup
Tahun 2021	60	74,89	124,82	Tidak Dapat Disimpulkan
Tahun 2022	65	72,81	112,02	Sangat Baik
Tahun 2023	70	58,42	83,46	Cukup
Tahun 2024	75	83,81	111,75	Sangat Baik

Perbandingan capaian kinerja kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM Makassar

Tahun 2020: Realisasi berada di bawah target, dengan capaian 94,39% (kategori "Cukup").

Tahun 2021: Realisasi melampaui target secara signifikan, namun kategori "Tidak Dapat Disimpulkan" menunjukkan adanya ketidakpastian atau kendala dalam penilaian.

Tahun 2022 dan 2024: Realisasi kembali melampaui target dengan capaian di atas 110% (kategori "Sangat Baik").

Tahun 2023: Terjadi penurunan realisasi hingga di bawah target, menyebabkan capaian turun menjadi 83,46% (kategori "Cukup").

Secara umum, tren realisasi menunjukkan peningkatan meskipun sempat menurun pada tahun 2023. Terdapat **fluktuasi** dari tahun ke tahun, terutama pada 2021 dan 2023., Kategori **"Sangat Baik"** dicapai pada 2022 dan 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

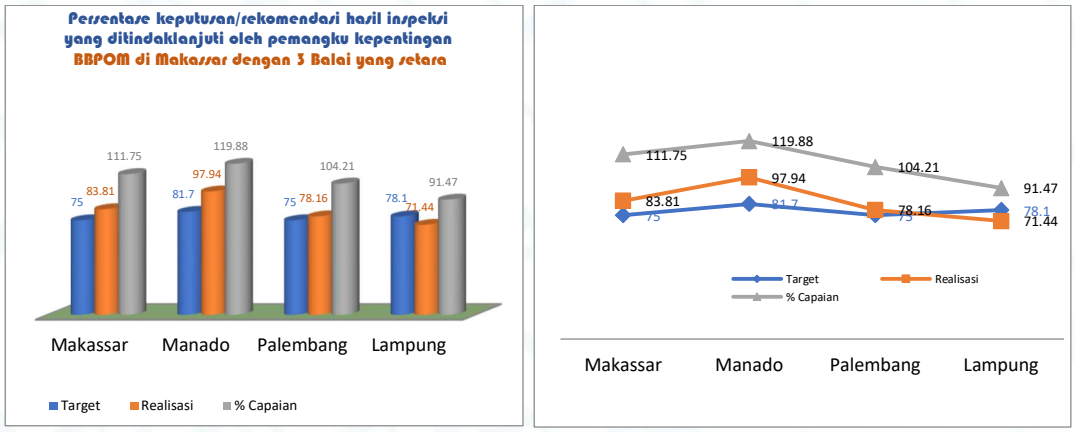
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	75	83,81	111,75	Sangat Baik
BBPOM di Manado	81,70	97,94	119,88	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	75,00	78,16	104,21	Sangat Baik
BBPOM Lampung	78,10	71,44	91,47	Cukup

Target indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM Makassar, BBPOM Manado dan BBPOM Palembang pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Manado lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Balai lainnya. Hasil capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 83,81 kategori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Manado, sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan capaian 119,88 kategori "Sangat Baik.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Analisis Penyebab Capaian Kinerja dan Alternatif Solusi

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Cukup disebabkan menurunnya Jumlah tindaklanjut yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Hal ini terjadi karena :

- Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu rekomendasi perbaikan temuan pada saat pemeriksaan yang harus ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dalam bentuk corretive action preventive action (CAPA).
- Dalam melaksanakan tindakan perbaikan (CAPA) terhadap temuan ketidaksesuaian untuk sarana pemerintah (PKM, RS dan GFK/IFK) yang membutuhkan anggaran untuk perbaikan sarana atau penambahan peralatan dibutuhkan kebijakan di level yang lebih di atas sehingga menyulitkan perbaikan secara utuh.
- Masih adanya lintas sektor yang tidak *aware* merespon temuan hasil pengawasan BPOM.
- Pengaturan jadwal pendampingan terhadap penyelesaian temuan hasil pengawasan mengharuskan petugas menyesuaikan dengan jadwal pengawasan rutin yang padat.

Pada tahun 2024, realisasi persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pelaku usaha diperoleh hasil sebesar 83,51% telah dilakukan sosialisasi pada saat pemeriksaan sarana kepada pelaku usaha terkait CAPA yang harus dibuat, menanyakan melalui telepon maupun whatsApp ke sarana/pelaku usaha terkait feedback (CAPA) dari hasil pemeriksaan yang dilakukan petugas BBPOM Makassar serta telah dilaksanakan Desk CAPA. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh lintas sektor memperoleh hasil 100,0% karena telah dilaksanakannya Bimtek keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan industry rumah tangga Bersama Dinas Kesehatan di Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Barru dimana salah satu komponen penilaiannya Surat Tindak Lanjut dari Balai Besar POM dan feedbacknya sehingga Dinas Kesehatan memberikan feedback terhadap semua surat tindak lanjut yang telah dikirimkan oleh Balai Besar POM di Makassar . Dari hasil tersebut diatas, capaian persentasi rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (pelaku usaha dan lintas sector) masih tetap memenuhi dari target yang ditetapkan.

Alternatif Solusi

- Memberikan layanan konsultasi terhadap sarana dalam pembuatan CAPA.
- Meningkatkan monitoring terhadap sarana dalam perbaikan tindakan ketidaksesuaian (CAPA).
- Meningkatkan koordinasi dengan stokeholder terkait.
- Secara intens melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait dalam hal menindak lanjuti temuan hasil pengawasan.
- Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi hasil pengawasan dengan lintas sektor.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 83,81% dengan capaian 111,75% pada tahun 2024. Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi (0,12) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 111,75 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 100%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
111,75	1.950.000	1.950.000	100,00	1,12	0,12	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran belum Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi terhadap indikator ini yaiitu revisi anggaran pengurangan biaya perjadin kegiatan Pengawalam Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yaitu mengurangi jumlah trip perjadin. Dapat disimpulkan anggaran 2024 telah mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan kategori Sangat Baik antara lain :

1. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana maksimal.
2. Penggunaan _aplikasi Smart POM yang berfungsi untuk mempercepat rekomendasi hasil pemeriksaan dan feedback lintas sector (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten) atas temuan hasil pemeriksaan oleh petugas Balai Besar POM di Makassar belum optimal.
3. Melakukan pembinaan secara intens dengan pelaku usaha melalui kegiatan pengawalan tindak lanjut hasil pengawasan.
4. Secara intens melakukan koordinasi dengan kepala dinas terkait dalam hal menindak lanjuti temuan hasil pengawasan.

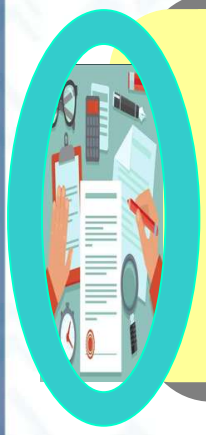
g. Upaya Peningkatan Kinerja

Berdasarkan evaluasi kinerja triwulan sebelumnya, untuk meningkatkan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan diwilayah kerja BBPOM Makassar, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi ke pelaku usaha serta melakukan monitoring terhadap *feedback* yang diberikan pelaku usaha atas hasil pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar.
2. Advokasi dan Koordinasi secara intensif dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam penggunaan Anggaran Dana Alokasi Khusus bidang obat dan makanan, untuk kabupaten/kota yang mendapatkan DAK non Fisik bidang obat dan makanan pada triwulan IV Tahun 2024.
3. Meneruskan hasil tindak lanjut atas pemeriksaan sarana oleh petugas Balai Besar POM di Makassar ke Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten dengan menggunakan aplikasi smart POM serta melakukan evaluasi dan monitoring feedback dari Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten.
4. Melakukan koordinasi dengan baik dengan pemangku kepentingan yang ada untuk menindaklanjuti rekomendasi dari BBPOM di Makassar.
5. Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar sertifikasi.
6. Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi *timeline*.
7. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2024, diketahui bahwa target IKU tidak tercapai. Sehingga dilakukan upaya untuk meningkatkan capaian persentase obat yang aman dan bermutu melalui pemeriksaan rutin pengawasan sarana produksi melalui penerapan CPOTB, CPKB sehingga dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap produk yang dihasilkan dapat memenuhi ketentuan baik mutu produk maupun penandaan.



3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan sarana produksi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk, pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB, penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan, Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF pada Tahun berjalan.

yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan.

Capaian indkator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar sebesar 98,40 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase Keputusan penilaiaan Sertifikasi} = \frac{\text{keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun berjalan diselesaikan tepat waktu}}{\text{jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun berjalan}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024 adalah 98,40% dengan realisasi sebesar 97,42 keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 99 % dengan kategori "Cukup".

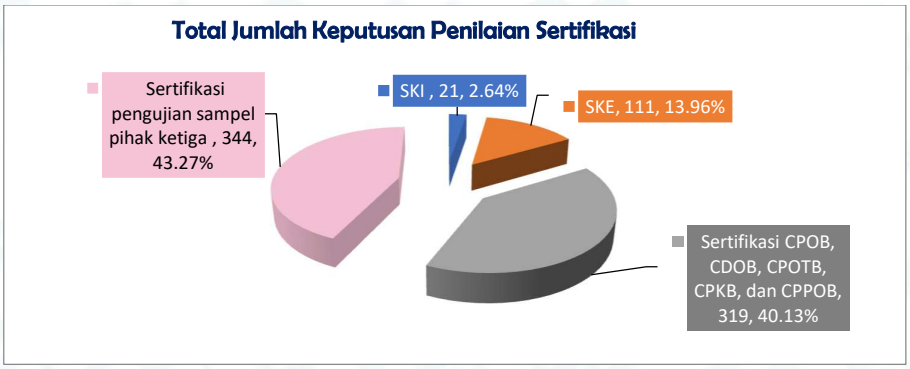
Tabel 3.25
Capaian Kinerja Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	99	101,02	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun 2024 yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 795 keputusan terhadap jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun 2024 sebanyak 803 Jumlah permohonan penilaian sertifikasi.

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 795 terdiri atas :

- Surat Keterangan Impor (SKI) : 21
- Surat Keterangan Ekspor (SKE) : 111
- Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB : 319
- Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga : 344



Gambar 3.19.
Jumlah keputusan penilaian sertifikasi pada Tahun 2024

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup surat hasil Pemeriksaan :

- sarana produksi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Pangan Olahan dalam pendaftaran produk,
- pemeriksaan PBF dalam rangka sertifikasi CDOB,
- penerbitan SKI/SKE obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan,
- Rekomendasi atas hasil pemeriksaan sarana dalam rangka perijinan Industri Kosmetik dan pendirian PBF.

- hasil pengujian sampel pihak ketiga

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.26. Perbandingan realisasi dan capaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya.

Persentase keputusan penilaian Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	85	96,43	113,45	Sangat Baik
Tahun 2021	96	94,08	98	Cukup
Tahun 2022	98	96,96	98,94	Cukuo
Tahun 2023	99	97,42	98,40	Cukup
Tahun 2024	98	99	101,02	Sangat Baik

Terdapat penurunan realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 113,45 kategori "Sangat Baik" menjadi 98, kategori "cukup" capaiannya mengalami penurunan 15,45 point. Sedangkan Pada tahun 2022 terdapat peningkatan realisasi dan peningkatan capaian dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan perubahan target untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Capaian tahun 2023 dibanding tahun 2022 dari nilai 98,40 kategori menjadi 98,94, kategori "Cukup" capaiannya mengalami penurunan 0,54 point. Capaian tahun 2024 dibanding tahun 2023 dari nilai 98,40 kategori "Cukup" menjadi 101,02, kategori "Sangat Baik" capaiannya mengalami peningkatan 2,62 point.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

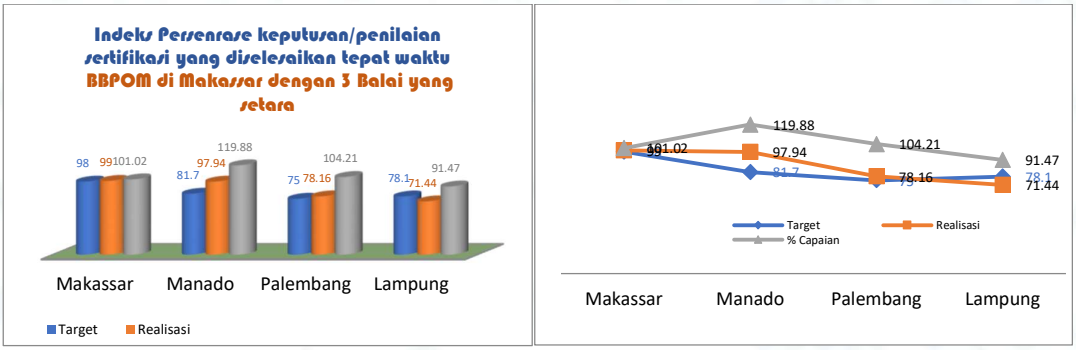
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	98	99	101,02	Sangat Baik
BBPOM di Manado	81,70	97,94	119,88	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	75,00	78,16	104,21	Sangat Baik
BBPOM Lampung	78,10	71,44	91,47	Cukup

Target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung pada angka yang berbeda. Hasil capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 99,00 lebih rtinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung kategori "Sangat Baik", serta persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan capaian 119,88 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi dibandingkan BBPOM Palembang, BBPOM Makassar, dengan kategori "Sangat Baik", sementara BBPOM Lampung belum mencapai target dengan capaian 91,47 kategori "Cukup".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

- Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 98% dengan target 624 terdiri dari 11 komponen yaitu
  - Rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB terdapat 1 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 3
  - Rekomendasi pemenuhan aspek CPKB terdapat 1 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 3
  - Penerbitan izin penerapan CPPOB skala menengah besar terdapat 1 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 2
  - P CPPB skala UMKM terdapat 5 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 10
  - Pemeriksaan penerbitan IP CPPOB sebanyak 4 sarana
  - SMKPO sebanyak 0 sarana
  - PBF terdapat 2 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 2
  - Rekomendasi Notifikasi Terdapat 0 permohonan
  - Penerbitan SKI SKE terdapat 18 pengajuan
  - Sertifikat LHU sampel Pihak ke 3 sebanyak 94 LHU
  - Hasil pemeriksaaan sarana produksi SK target 0
- Capaian kinerja persentase kepetusan penilaian sertifikasi untuk Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK untuk lingkup BBPOM di Makassar sebanyak 803 jumlah pemohon terdapat 795 Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu atau sebanyak 99 % yang sesuai dengan time line.
- Faktor yang juga berkontribusi terhadap nilai capaian persentase keputusan penilaian serrtifikasi dari target yang diperjanjikan adalah Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB yang sesuai dengan timeline yaitu 319 dari 321 jumlah pemohon atau mencapai 99,38% sesuai timeline.
- Penyelesaian penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE) sesuai time line, hal ini dikarenakan permohonan yang masuk melalui aplikasi e-bpom.pom.go.id segera di tindaklanjuti meskipun tidak ada sistem notifikasi pemeritahuan secara otomatis, dan petugas telah konsisten dalam memantau permohonan yang masuk dalam aplikasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Tersedianya jaringan ketika petugas evaluator sedang melaksanakan tugas di daerah sehingga dapat melakukan pengecekan permohonan pada aplikasi e-bpom dan dapat melakukan evaluasi permohonan SKJ/SKK yang masuk sehingga dapat melakukan evaluasi permohonan.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 99,00% dengan capaian 101,02 % pada tahun 2024. Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,02) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 101,02% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,45%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
101,02	212.903.000	208.172.799	99,45	1,02	0,02	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran menambah biaya perjadin Pemeriksaan dalam Rangka Keputusan Penilaian Sertifikasi yaitu menambah jumlah trip perjadin dari Rp 122.240.000,- menjadi Rp. 249.773.000,- Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu kategori Sangat Baik antara lain :

- Pencapaian target indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dilaksanakan melalui kegiatan Pemeriksaan Sarana Produksi Dalam Rangka Registrasi/Sertifikasi. Keputusan sertifikasi CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB memenuhi *timeline* meskipun hasil keputusan tersebut tidak seluruhnya memenuhi ketentuan. Untuk mengatasi hal ini, Balai Besar POM di Makassar melakukan kegiatan antara lain dengan memberikan sosialisasi, bimbingan teknis, serta layanan konsultasi sebelum dan/atau pada saat pelaku usaha mengajukan permohonan. Selain itu, pelaksanaan Desk CAPA berupa kegiatan konsultasi antara petugas dengan pelaku usaha terkait hasil tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap temuan ketidaksesuaian saat pemeriksaan sarana, diharapkan menjadi langkah percepatan dalam rangka pemenuhan ketentuan Cara Produksi/Distribusi yang Baik (Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB; Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB, memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap)
- Selain kegiatan tersebut, petugas Sertifikasi juga aktif mengikuti kegiatan Pelatihan/Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi terkait ekspor/impor yang diadakan oleh internal Badan POM maupun lintas sektor. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan petugas dan persamaan persepsi antar petugas.

- Peningkatan koordinasi lintas sektor agar dapat meningkatkan daya ungkit kegiatan pendampingan pelaku usaha obat dan makanan
- Peningkatan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi
- Pemberlakuan jadwal petugas dalam memantau/ mengecek ada tidaknya permohonan dalam aplikasi tidak berjalan secara optimal karena petugas yang bertugas tidak konsisten (kadang lupa) melakukan pengecekan
- Pengaturan jadwal pelaksanaaan pengujian sampel piha III dengan lebih teratur.
- Penerapan notifikasi kepada petugas jika ada permohonan, pengecekan aplikasi secara konsisten.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Pada tahun 2024, Realisasi Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu masuk dalam kategori Tercapai Melampaui. Untuk meningkatkan capaian di tahun 2025, upaya yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi.
2. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan, obat tradisional, kosmetik, dan sarana distribusi obat harus dilakukan secara seksama termasuk pemantauan perbaikan temuan dari pelaku usaha sehingga diperlukan peningkatan kompetensi petugas terkait materi inspeksi dan sertifikasi termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus. Terbatasnya jumlah personil yang dapat mengikuti peningkatan kompetensi menyebabkan petugas sertifikasi seringkali tidak memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatanpeningkatan kompetensi yang dibutuhkan. Sehingga Melakukan peningkatan kompetensi teknis secara mandiri melalui Pelatihan/Bimtek.
3. Melaksanakan *desk CAPA* untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik, cara produksi pangan olahan yang baik, cara distribusi obat, kosmetik, dan pangan yang baik.
4. Evaluasi SKI/SKE dengan *service level arrangement (SLA)* maksimal 6 jam untuk SKI dan 8 jam untuk SKE, membutuhkan fokus dan ketelitian tinggi dari petugas. Sedangkan dengan keterbatasan jumlah petugas sertifikasi, sangat sulit untuk mencapai kondisi ideal dimana petugas hanya melakukan evaluasi SKI/SKE tanpa mengerjakan tugas yang lain.
5. Meningkatkan komunikasi internal petugas Sertifikasi maupun dengan petugas pusat agar permasalahan SKI/SKE dapat segera terselesaikan.
6. Melaksanakan forum komunikasi dengan importir/eksportir dan lintas sektor terkait agar importir/eksportir memahami peraturan yang berlaku dan memperkecil kemungkinan kekurangan atau kesalahan dokumen yang diunggah sehingga mempercepat penyelesaian evaluasi SKI/SKE.
7. Meningkatkan respon petugas dalam menjawab pertanyaan pelaku usaha seputar sertifikasi.
8. Mengutamakan penyelesaian evaluasi SKI/SKE sebelum menyelesaikan tugas yang lain, sebagai contoh apabila terdapat pelaku usaha yang membutuhkan konsultasi tatap muka maupun secara daring, dilakukan setelah evaluasi SKI/SKE selesai.
9. Meningkatkan koordinasi internal agar tidak ada tindak lanjut yang melebihi *timeline*.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja 2024, diketahui bahwa target IKU tercapai. Penyumbang terbesar dari tingginya capaian kinerja dibandingkan dengan target adalah penerbitan Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB serta penerbitan SKI/SKE yang telah memenuhi *timeline*.

Telah dilakukan upaya perbaikan secara berkesinambungan selama tahun berjalan sehingga capaian kinerja tahun 2024 telah mencapai target



4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- Sarana Produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, sel punca dan rumah sakit).
- Memenuhi ketentuan adalah tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.
- Tidak Memenuhi Ketentuan apabila pada saat dilakukan pemeriksaan ditemukan temuan kritikal.

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
-Untuk sarana produksi IOT tidak memennuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
- Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
- TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
- TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.

3. Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
   - Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
   - Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
4. Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B
   - TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major
5. Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis /5 major.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah optimal Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah tercapainya target Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 107,72% , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Produksi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

Tabel 3.28

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71,20	76,70	107,72	Sangat Baik

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 adalah 107,72% dengan realisasi sebesar 76,70% sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 71,20% dengan kategori "Sangat Baik"

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 158 sarana terhadap target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 206 sarana.

Jenis sarana produksi yang disampling yaitu :

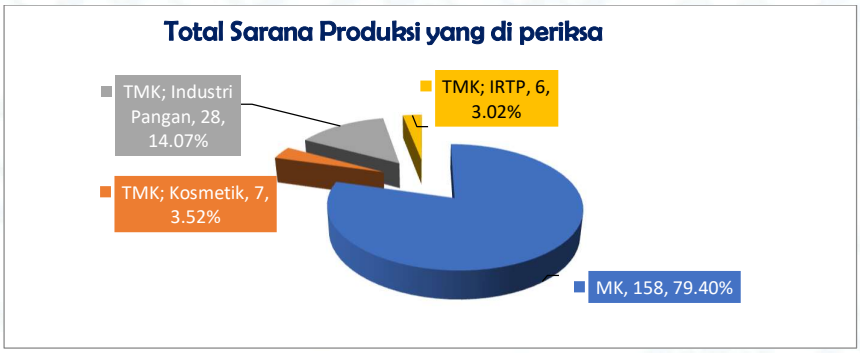
- Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP.
  a. TMK untuk sarana produksi pangan MD adalah yang memperoleh rating C dan D.
  b. TMK untuk sarana produksi IRTP adalah yang memperoleh level 3 dan 4.
- Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT
  a. Untuk sarana produksi IOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.
  b. Untuk sarana UKOT dan UMOT tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan kritis atau sanitasi higien major.
- Sarana produksi kosmetik mencakup golongan A dan B

- TMK apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major

- Sarana produksi Suplemen Kesehatan tidak memenuhi ketentuan apabila ditemukan temuan kritis atau 5 major.

Keseluruhan jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada Tahun 2024 adalah 206 sarana produksi diwilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 206 sarana tersebut terdapat 158 Sarana produksi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Industri Kosmetik : 4 Sarana
- Industri Obat Tradisional : 15 Sarana
- Usaha Kecil Obat Tradisional : 0 Sarana
- Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan (Target SK): 1 Sarana
- Industri Pangan : 118 Sarana
- Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) : 20 Sarana



Grafik 3.6

Jumlah Sarana Produksi yang diperiksa Tahun 2024

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.29. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	46	47,81	103,93	Sangat Baik
Tahun 2021	55	65,60	119,09	Sangat Baik
Tahun 2022	60	60,00	100	Sangat Baik
Tahun 2023	65	71,12	109,42	Sangat Baik
Tahun 2024	71,20	76,70	107,72	Sangat Baik

Terdapat penurunan realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 119,09 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 103,93 kategori "Sangat Baik" mengalami peningkatan 15,16 point. Sedangkan Pada tahun 2022 terdapat penurunan realisasi dan penurunan capaian dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan perubahan target untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan yang diselesaikan tepat waktu BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Terdapat peningkatan capaian pada tahun 2024 dengan nilai 109,42 kategori "Sangat Baik" jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai 100 kategori "sangat baik".

Tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Terdapat penurunan capaian pada tahun 2024 dengan nilai 107,72 kategori "Sangat Baik" jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai 109,42 kategori "sangat baik", namun untuk realisasi terdapat peningkatan dari 71,12 tahun 2023 menjadi 76,70 di tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7

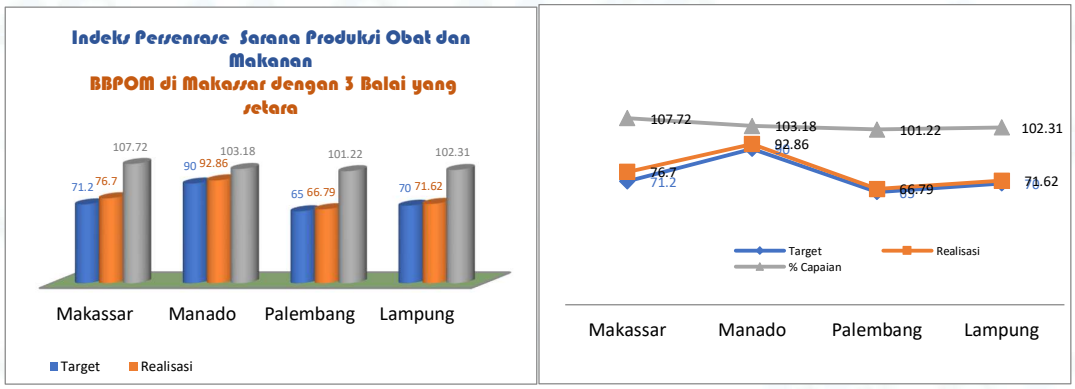
Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	71,20	76,70	107,72	Sangat Baik
BBPOM di Manado	90,00	92,86	103,18	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	65,00	66,79	101,22	Sangat Baik
BBPOM Lampung	70,00	71,62	102,31	Sangat Baik

Target indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar dibandingkan dengan dan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung pada angka yang berbeda,. Hasil capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 76,70 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan BBPOM Palembang dan BBPOM di

Lampung kategori "Sangat Baik" sementara realisasi capaian tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan capaian 92,86 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Analisis Penyebab Capaian kinerja

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik :

- Capaian persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan hingga Tahun 2024 adalah 107,72 % **sudah mencapai target** yang ditetapkan dengan kategori **"Sangat Baik"**.
- Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, tim kerja inspeksi perlu melakukan upaya komunikasi yang baik kepada pelaku usaha dan lintas sektor dalam hal melakukan tindaklanjut/ Pembinaan
- Peningkatan pemahaman, pengawalan dan pendampingan yang intens terhadap sarana produksi terutama sarana industri pangan dan industri rumah tangga pangan terkait persyaratan minimal yang wajib dipenuhi oleh sarana produksi/pelaku usaha.
- Perkuatan kompetensi SDM seksi sertifikasi terkait pendampingan pada sarana Industri pangan dan IRTP tentang pemenuhan standar minimal hygine sanitasi pada sarana produksi industri pangan diwilayah kerja Balai Besar POM di Makassar.
- Koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten lebih ditingkatkan dalam melakukan pembinaan bagi pelaku usaha sarana produksi IRTP yang berada di wilayah kerjanya.

- Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi dalam melakukaan pemeriksaan sarana produksi.
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha sarana produksi untuk tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan usaha peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pengawasan secara optimal.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 76,70 % dengan capaian 107,72 % pada tahun 2024. Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 107,72% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,84%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
107,72	325.786.000	325.272.119	99,84	1,09	0,08	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran yaitu penambahan Kegiatan Workshop Monitoring dan Evaluasi Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Olahan. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik antara lain :

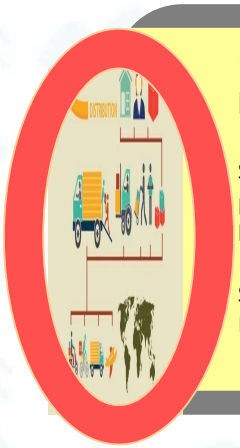
1. Telah diadakan forum komunikasi untuk inspektur CPOTB, forum Manajemen Inspeksi CPOB selain itu juga diadakan kegiatan pembelajaran daring peraturan dibidang pangan olahan yang dIVkuti oleh inspektur pangan di seluruh UPT Badan POM dan sosialisasi tools inspeksi CPPOB. Adanya kegiatan-kegiatan tersebut juga membantu menyamakan persepsi para inspektur dalam melakukan pemeriksaan sarana produksi dan menyampaikan permasalahan dilapangan yang perlu dibahas ke tingkat nasional dalam rangka perbaikan norma, standar dan kebijakan.
2. Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara produksi yang baik.
3. Optimalisasi pertemuan teknis secara rutin dengan pelaku usaha dan mencarikan solusi penyelesaian temuan dari hasil pemeriksaan merupakan salah satu upaya yang efektif.
4. Aktif memberikan informasi yang up date terkait cara produksi yang baik kepada *stakeholder*.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

- Evaluasi dari unit pengampu di pusat yang dilakukan periodik setiap tahun di awal tahun menjadi masukan bagi BBPOM di Makassar untuk menyusun strategi peningkatan kinerja pada tahun 2024. Penguatan secara internal melalui monitoring dan evaluasi bulanan serta intens melakukan komunikasi internal atas isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja serta sharing knowledge ke personel baru yang masih membutuhkan pembekalan kompetensi sebelum dapat menjalankan tugas sebagai pengawas dilakukan agar kinerja fungsi inspeksi tidak terganggu.
- Peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek dan pelatihan teknis dinilai efektif meningkatkan kinerja inspeksi dengan mengurangi perbedaan persepsi dan kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut terbaru
- Bimtek kepada pelaku usaha guna meningkatkan pemahaman yang baik, terkait GMP

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Bimtek kepada pelaku usaha produksi OMKA; meningkatkan dan kompetensi petugas pengawas serta melakukan diseminasi hasil pelatihan/sosialisasi peraturan terbaru terkait pemeriksaan sarana produksi untuk menyamakan persepsi petugas.; serta meningkatkan komunikasi dengan baik kepada pelaku usaha; Pembinaan pelaku usaha obat tradisional masih perlu dilakukan dimasa mendatang untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.



2. Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Sarana yang diperiksa setiap Tahun ditetapkan berdasarkan kategori Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.
Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.
Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi Tahun 2016) yang berlaku.
Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah optimal meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan sudah tercapainya target Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan capaian 100,32 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Presentase sarana Distribusi yang Memenuhi Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan}}{\text{target jumlah sarana Distribusi Obat Dan Makanan yang di diprioritaskan untuk diperiksa}} \times 100\ \%$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024 adalah 100,32 % dengan realisasi sebesar 82,81% sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 80% dengan kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.31

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sarana Distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	82,81	103,51	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari perbandingan Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan prioritas yang memenuhi ketentuan sebanyak 1007 sarana terhadap target jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan untuk diperiksa sebanyak 1.216 sarana.

Jenis sarana distribusi yang diperiksaa yaitu :

a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

b. Sarana yang diperiksa setiap Tahun ditetapkan berdasarkan kategori Perka/SOP/pedoman/juknis Pengawasan Sarana Distribusi Obat.

c. Jumlah Sarana distribusi yang diperiksa adalah sarana distribusi yang diperiksa dalam rangka pemeriksaan rutin.

d. Sarana distribusi yang memenuhi ketentuan dihitung terhadap sarana distribusi yang diprioritaskan.

e. Sarana distribusi yang diprioritaskan adalah sarana distribusi yang ditetapkan melalui analisa risiko. Analisa risiko dilakukan mengacu pedoman tindak lanjut hasil pengawasan (SK Deputi) yang berlaku.

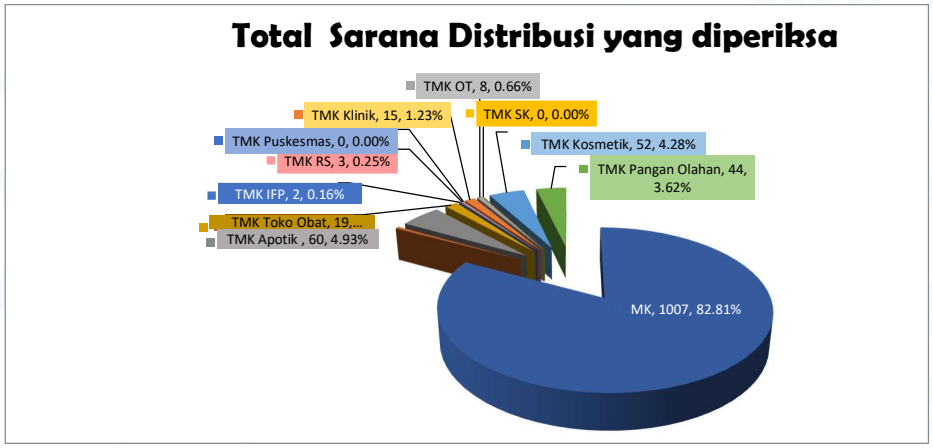
f. Sarana distribusi Obat TMK adalah sarana distribusi obat dan Saryanfar yang diberikan tindak lanjut berupa sanksi peringatan keras, penghentian sementara kegiatan dan rekomendasi pencabutan izin.

g. Acuan pemberian tindak lanjut berdasarkan peraturan yang berlaku.

Capaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2024 adalah 82,81% di atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 80% dengan kategori "Sangat Baik".

Keseluruhan jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa pada Tahun 2024 adalah sarana diwilayah kerja BBPOM di Makassar yang selesai diperiksa, dari 1.216 tersebut terdapat 209 Sarana distribusi Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan terdiri atas :

- Pedagang Besar Farmasi (PBF) : 6 Sarana
- Apotik : 60 Sarana
- Toko Obat : 19 Sarana
- Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) : 2 Sarana
- Rumah Sakit (RS) : 3 Sarana
- Puskemas : 0 Sarana
- Klinik : 15 Sarana
- Fasilitas Distribusi Obat Tradisional : 8 sarana
- Fasilitas Distribusi Suplemen : 0 sarana
- Fasilitas Distribusi Kosmetik : 52 sarana
- Fasilitas Distribusi Pangan Olahan : 44 sarana



Gambar 3.7

Jumlah Sarana Distribusi yang diperiksa Tahun 2024

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.32. Perbandingan realisasi dan capaian indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	55	72,95	132.64	Tidak dapat disimpulkan
Tahun 2021	75	80,26	107,01	Sangat Baik
Tahun 2022	76	75,46	99,29	Cukup
Tahun 2023	78	78,25	100,32	Sangat Baik
Tahun 2023	80	82,81	103,51	Sangat Baik

Terdapat penurunan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 132,64 kategori "Tidak dapat disimpulkan" menjadi 107,01 kategori "Sangat Baik" capaiannya mengalami penurunan 25,64 point. Pada tahun 2022 terdapat penurunan realisasi dan penurunan capaian dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 99,29 kategori "Belum Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 107,01 kategori "Sangat Baik". Hal ini disebabkan perubahan target untuk Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2021 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024. Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Capaian 2024 mengalami kenaikan dengan nilai 100,32 kategori "Sangat Baik" dibandingkan tahun 2022 dengan capaian 99,29 kategori "Cukup".

Tahun 2024 dibandingkan tahun 2022. Capaian 2023 mengalami kenaikan dengan nilai 103,51 kategori "Sangat Baik" dibandingkan tahun 2023 dengan capaian 100,32 kategori "Cukup".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

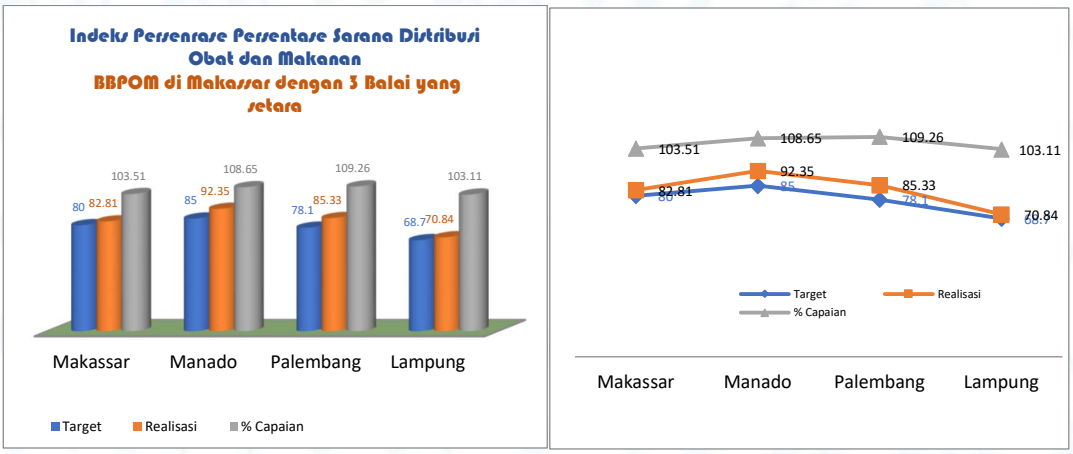
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	**80**	**82,81**	**103,51**	**Sangat Baik**
BBPOM di Manado	85	92,35	108,65	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	78,10	85,33	109,26	Sangat Baik
BBPOM Lampung	68,70	70,84	103,11	Sangat Baik

Target indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung pada angka yang berbeda,. Hasil realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM Makassar mencapai target dengan nilai 82,81 namun capaian realisasi lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Manado dan BBPOM di Palembang. Sementara persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Palembang dengan capaian 109,26 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, dan BBPOM di Lampung dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja)

Hal yang mempengaruhi capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik:

- Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang terperiksa hingga bulan Desember sebanyak 1216 Sarana , terdapat 1007 Sarana yang Memenuhi Ketentuan sehingga persentase sarana yang Memenuhi Ketetntuan adalah 82,81% melebihi target yaitu 80% (capaian =103,52% %), Penerapan cara distribusi Obat dan Makanan yang Baik oleh pelaku usaha/penanggungjawab sarana cukup optimal.
- Pada Tahun 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat (PBF, IF Kab/Kota, Apotek, Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Distribusi OT, suplemen Kesehatan, kosmetik dan pangan olahan). Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 1.007 sarana (82,81%) memenuhi ketentuan dan 209 sarana (17,19 %) tidak memenuhi ketentuan. Sarana yang memiliki persentase memenuhi ketentuan dibawah target 80 % adalah Apotek (58,33 %), Toko Obat (60,42 %), Fasilitas Distribusi Obat Tradisional (72,02) dan Fasilitas Distribusi Kosmetik (76,58 %)

  Hal ini disebabkan karena penetapan sarana pemeriksaan sarana distribusi obat telah menggunakan analisis resiko, dimana sarana dengan analisis resiko tertinggi yang akan diperiksa. Beberapa hal ketidaksesuaian yang ditemukan pada saat pemeriksaan antara lain terdapat sarana yang masa berlaku ijin nya sudah habis tetapi masih tetap melakukan penjualan obat, terdapat beberapa audit komprehensif dari PBF ke apotek dan diperoleh hasil apotek yang bertindak seperti distributor dan menyalurkan obat dalam jumlah besar ke paramedis dan perorangan, selain itu ditemukan juga PBF dan apotek yang melakukan panel penjualan obat.
- Selain pemeriksaan terhadap sarana distribusi obat, pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar juga telah melakukan pemeriksaan sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan pangan olahan sebanyak 1.216 sarana. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 1.007 sarana (82,81%) memenuhi ketentuan. Keseluruhan sarana memiliki persentase memenuhi ketentuan diatas target 80 % adalah distribusi PBF (81,25 %), Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP) (94,44 %), Rumah sakit (96,84 %), Puskesmas (100 %), Klinik (88,89 %), Rumah Sakit ((5,85 %), Puskesmas (100%), Klinik (85,85 %), Fasilitas Distribusi Obat Tradisional ((95,35) dan Fasilitas Distribusi Pangan Olahan (82,75 %) Tingginya angka kepatuhan ini disebabkan sudah adanya efek jera kepada pelaku usaha, sehingga minimnya ditemukan produk tanpa ijin edar (TIE) dan kedaluwarsa di pasaran.

e. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja BBPOM di Makassar kategori “Sangat Baik” antara lain :

- Meningkatkan kompetensi petugas inspeksi dalam melakukaan pemeriksaan sarana Distribusi.

- Kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu mengimplementasikan pedoman cara retail yang baik melalui kegiatan sosialiasi maupun pertemuan teknis.
- Melakukan kegiatan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha sehingga pelaku usaha mampu tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengimplementasikan pedoman cara distribusii yang baik.
- Senantiasa memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha pada saat melakukan pengawasan.
- Pembinaan kepada pelaku usaha
- Lebih giat untuk melaksanakan koordinasi dengan stakeholder/pihak terkait untuk melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang berada di wilayah kerjanya.

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 82,81 dengan capaian 103,51 % pada tahun 2024. Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,07) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 103,51% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,06 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
103,51	1.393.920.000	1.352.999.961	97,06	1,07	0,07	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dari Rp. 1.765.256.000,- menjadi Rp. 1..352.999.961 yaitu penambahan jumlah trip Pemeriksaan Sarana Distribusi OMKA dan NAPZA; Pelatihan ketentuan dan persyaratan kosmetik bagi

Dapat disimpulkan bila anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan bagi Beauty Enthusiast; Penggalangan Calon Peserta SAKA POM.

g. Upaya Peningkatan Kinerja

- Pembinaan ke pelaku usaha dan pemberian sanksi administratif,
- Melaksanakan bimtek bagi pelaku usaha/Penanggungjawab sarana terutama yang sarananya masih Tidak Memenuhi Ketentuan dengan fokus pada penerapan Cara Distribusi OMKA yang Baik termasuk penyaluran antimikroba sehingga dapat mencegah terjadinya Resistensi Antimikroba.
- Penguatan secara internal melalui monitoring dan evaluasi bulanan serta intensifikasi komunikasi internal atas isu-isu yang dapat mempengaruhi kinerja misal personel yang purna tugas dan penambahan personel baru yang masih membutuhkan pembekalan kompetensi sebelum dapat menjalankan tugas sebagai pengawas dilakukan agar kinerja fungsi inspeksi tidak terganggu.

Peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek dan pelatihan teknis dinilai efektif meningkatkan kinerja inspeksi dengan mengurangi perbedaan persepsi dan kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut terbaru. Pada triwulan sebelumnya dibuat rekomendasi mengenai pembinaan pelaku usaha dalam penyampaian CAPA dan dilaksanakan pada triwulan III untuk PBF berupa kegiatan Desk CAPA sertifikasi bekerjasama dengan fungsi sertifikasi.

- Evaluasi dari unit pengampu di pusat yang dilakukan periodik setiap tahun di awal tahun menjadi masukan bagi BBPOM di Makassar untuk menyusun strategi peningkatan kinerja pada tahun 2024.
- Peningkatan kompetensi petugas melalui bimtek dan pelatihan teknis dinilai efektif meningkatkan kinerja inspeksi dengan mengurangi perbedaan persepsi dan kesalahan dalam penarikan kesimpulan hasil pemeriksaan berdasarkan Pedoman Tindak Lanjut terbaru
- Bimtek kepada pelaku usaha guna meningkatkan pemahaman yang baik, terkait GMP

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja interim triwulan III tahun 2024, maka dipandang perlu untuk melaksanakan Merencanakan bimtek bagi pelaku usaha/Penanggungjawab sarana terutama yang sarananya masih Tidak Memenuhi Ketentuan dengan fokus pada penerapan Cara Distribusi OMKA yang Baik. Rencana pelaksanaan di TW 3- 4 tahun 2024 (Akan dibuat RAK dan dilakukan revisi Anggaran) dimana pada triwulam IV telah dilakukan Pembinaan ke pelaku usaha dan pemberian sanksi administratif,Melaksanakan bimtek bagi pelaku usaha/Penanggungjawab sarana terutama yang sarananya masih Tidak Memenuhi Ketentuan dengan fokus pada penerapan Cara Distribusi OMKA yang Baik termasuk penyaluran antimikroba sehingga dapat mencegah terjadinya Resistensi Antimikroba.

6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Aspek Pengukuran

a. **Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);**
b. **Profesionalitas SDM (18%);**
c. **Sarana Prasarana (15%);**
d. **Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);**
e. **Konsultasi dan Pengaduan (15%);**
f. **Inovasi (7%).**

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Target Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024 adalah 4,70 Capaian Realisasi indeks pelayanan publik Tahun Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan yaitu 4,79 dengan kategori "Sangat Baik".

Tabel 3.55
Target Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks Pelayanan Publik	4,70	4,79	101,91	Sangat Baik

Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

a. Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
b. Profesionalitas SDM (18%);
c. Sarana Prasarana (15%);
d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
e. Konsultasi dan Pengaduan (15%);
f. Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indeks Indeks Pelayanan Publik (IPP) Badan POM diperoleh dari rata-rata IPP seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan BPOM, yang terdiri atas unit kerja pusat dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM.

Cara perhitungan indikator ini

a. Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)
b. Kategori nilai:

***Range* Nilai**	**Kategori**	**Makna**
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup *(Dengan Catatan)*
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik *(Dengan Catatan)*
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.56. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indeks Pelayanan Publik	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	3,51	3,95	112,54	Sangat Baik
Tahun 2021	4,20	4,35	103,57	Sangat Baik
Tahun 2022	4,30	4,56	106,05	Sangat Baik
Tahun 2023	4,40	4,61	104,77	Sangat Baik
Tahun 2024	4,70	4,79	101,91	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 103,75 Kategori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 112,54 kategori "Sangat Baik".

Sedangkan target capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar untuk Tahun 2022 dibandingkan Tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 106,045 Kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 103,57 kategori "Sangat Baik".

Adapun, capaian tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2024 berada pada angka 104,77 kategori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada pada angka 106,05 kategori "Sangat Baik".

Adapun, capaian tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Tahun 2024 berada pada angka 101,91 kategori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang berada pada angka 104,77 kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

Tabel 3.7

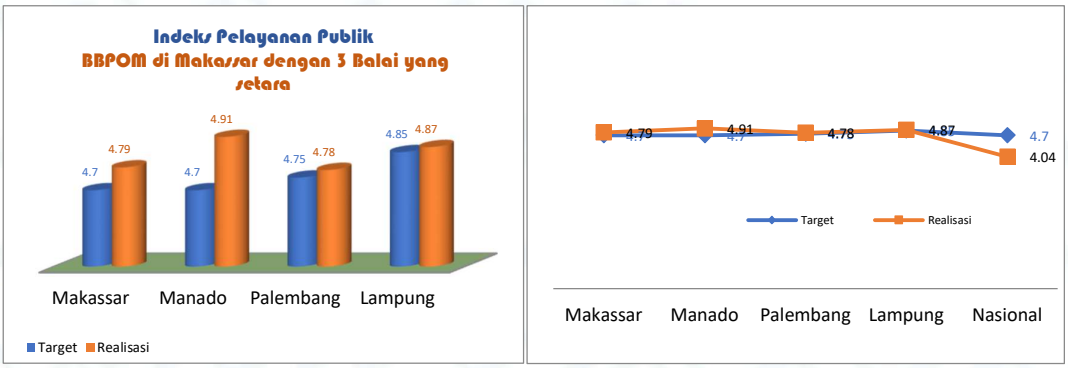
Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik (Target Nasional = 4,7)	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	4,70	4,79	101,91	Sangat Baik
BBPOM di Manado	4,70	4,91	104,47	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	4,75	4,78	100,63	Sangat Baik
BBPOM Lampung	4,85	4,87	100,41	Sangat Baik

Target indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar, BBPOM Manado pada angka yang sama, sementara target BBPOM Palembang dan BBPOM Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan 2 Balai lainnya. Hasil capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM Makassar telah mencapai target dengan nilai 101,91 lebih rendah apabila dibandingkan dengan BBPOM Manado namun lebih tinggi jika dibandingkan dengan BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung kategori "Sangat Baik" serta persentase capaian tertinggi adalah BBPOM di Yogyakarta dengan capaian 107,17 lebih tinggi dibandingkan BBPOM Jakarta dan BBPOM Makassar dengan kategori "Sangat Baik".

Realisasi indikator BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung sudah berada diatas target nasional sebesar 4,70.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks Pelayanan Publik syarat di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Pelayanan Publik BBPOM di Makakassar kategori Sangat Baik antara lain :

- Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Pelayanan Publik merupakan indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik. Dari hasil penilaian Unit Pelayanan Publik Tahun 2024 yang menghasilkan Indeks Pelayanan Publik 4,61 bagi BBPOM di Makassar menunjukkan masih banyak aspek yang belum maksimal. Aspek Kebijakan Pelayanan, Prosfesionalisme SDM, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan, SPIP, serta Inovasi merupakan aspek aspek yang masih harus ditingkatkan. Beberapa aspek yang perlu mendapatkan perhatian untuk ditingkatkan antara lain sbb :

- Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar belum melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
- Aspek Profesionalisme SDM : belum menerapkan mekanisme reward and punishment untuk SDM pemberi layanan publik. Selain itu respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar belum melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar belum melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk meningkatkan pelayanan publik yang diberikan Badan POM. Standar Pelayanan Publik yang ditetapkan Badan POM untuk memberikan kepastian bagi pemberi layanan dan penerima layanan berusaha dipenuhi oleh BBPOM Makassar, bahkan beberapa hal dapat dipenuhi dengan sangat baik oleh BBPOM Makassar misalnya timeline untuk rekomendasi SKI dan SKE. Sedangkan untuk meningkatkan profesionalisme SDM pemberi layanan dilakukan peningkatan kompetensi SDM secara terencana dan terstruktur. Mengantisipasi lingkungan strategis yang semakin dinamis diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi paripurna dalam memberikan layanan. Kebutuhan SDM secara kuantitas sebagian dapat digantikan dengan pemanfaatan Sistem Informasi yang dapat mempercepat layanan, memberikan layanan yang konsisten, transparan dan akuntabel.

Sistem informasi yang dikembangkan BBPOM Makassar ditujukan untuk memberikan kemudahan dan transparansi serta kepastiaan kepada pelanggan. Telah dikembangkan tracking system untuk layanan pengujian pihak ketiga sehingga konsumen mengetahui dengan pasti status progress sample yang sedang diuji di laboratorium BBPOM Makassar

- Perbaikan kebijakan pelayanan, sarana dan parasana pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik
- Tersedianya pemberian layanan konsultasi, sosialisasi dan pendampingan tentang Tata Cara Registrasi Produk kepada pelaku usaha sebelum mengajukan permohonan pemeriksaan sarana.
- Tersedianya layanan konsultasi online terkait registrasi obat dan makanan 24 jam 7 hari,
- Tersedianya sarana dan prasarana ruang pelayanan publuk yang lengkap dan nyaman
- Senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan konsisten dalam melakukan penyediaan untuk pemenuhan segala sarana dan prasarana yang dipersyaratkan.
- Pelaksanaan inovasi pelayanan publik secara konsisten (SEPPULO, MOLKIKA PLUS (MANTAPPOL) dan PEDANG PUANG BASOK)

Pada Tahun 2024 telah dilaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi pelayanan publik dan pembenahan fasilitas pada ruang layanan publik sebagai upaya peningkatan pelayanan publik sehingga terjadi peningkatan indeks pelayanan publik dari Tahun sebelumnya disebabkan karena beberapa aspek telah ditangani secara maksimal. Beberapa aspek yang telah dilakukan perbiaikan antara lain sbb :

- Aspek kebijakan : pada saat menyusun Standar Kebijakan Pelayanan Publik BBPOM Makassar telah melibatkan pihak pihak terkait misalnya OPD Pemerintah Daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, masyarakat umum, dll.
- Aspek Profesionalisme SDM : telah menerapkan mekanisme *reward and punishment* untuk SDM pemberi layanan publik. Namun respon pelayanan publik BBPOM Makassar masih perlu ditingkatkan.
- Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik : BBPOM Makassar telah melakukan update data dan informasi yang ada di Sistem Informasi Pelayanan Publik secara terjadwal.
- Aspek Konsultasi dan Pengaduan : BBPOM Makassar telah melakukan pengarsipan proses pengaduan dan hasilnya sehingga terdokumentasi dan mudah diakses.
- Pemanfaatan system informasi di semua aspek tersebut merupakan kunci peningkatan pelayanan publik BBPOM di Makassar saat ini, system informasi merupakan solusi untuk tetap memberikan pelayanan publik yang prima.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks Pelayanan Publik diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 4,79 dengan capaian 101,91% pada tahun 2024. Indikator Indeks Pelayanan Publik kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,03) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 101,97% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,36%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Pelayanan Publik Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
101,91	189.053.000	187.841.860	99,36	1,03	0,03	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan pemanfaatan kembali sisa anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dari Rp. 396.710.000,- menjadi Rp. 189.053.000 yaitu penambahan Kegiatan Inovasi kegiatan Pelayanan Publik; Penggalangan Dukungan Stake Holder Dalam Rangka Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan BBPOM Di Makassar Menuju WBBM; Pelayanan Publik di MPP Provinsi serta Peningkatan Kompetensi Farmakovigilans bagi Focal Point Farmakovigilans. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Pelayanan Publik.

f. Upaya Peningkatan Kinerja

Sebagian besar layanan yang dilakukan BBPOM di Makassar merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan izin edar produk, dimana tidak sepenuhnya merupakan kewenangan BBPOM Makassar namun kewenangan Badan POM di pusat. Prosedur, persyaratan, dan kelengkapan lainnya untuk setiap jenis layanan juga berpedoman pada regulasi yang telah

ditetapkan dari pusat. Selain itu, layanan BBPOM di Makassar mayoritas menggunakan aplikasi yang dikembangkan oleh pusat

Untuk itu, BBPOM di Makassar telah berupayaberadaptasi dengan regulasi terkini dengan konsisten dan berkesinambungan meningkatkan kompetensi petugas pelayanan, melakukan telaah apabila memungkinkan untuk dilakukannya penyederhanaan prosedur pelayanan dengan mempertimbangkan analisis resiko dan masukan dari masyarakat/pelaku usaha, menambah personil yang berperan sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah (fasilitator) untuk mengatasi kendala pemenuhan persyaratan dan penggunaan aplikasi, serta menambah kapasitas pendampingan kepada pelaku usaha. Kerjasama dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan juga dijalin misalnya layanan jemput bola pendampingan kepada UMKM melalui Inovasi Pedang Puang Basok dalam rangka penerbitan nomor izin edar. Layanan dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di masing masing Kabupaten/Kota sehingga pendampingan oleh BBPOM Makassar lebih efektif.

BBPOM Makassar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap masukan masukan dari para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha terhadap semua aspek standar pelayanan publik sehingga standar yang ditetapkan merupakan titik tengah antara kepentingan BPOM sebagai regulator dan pelaku usaha.

g. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan informasi pada laporan kinerja tahun 2024, diperoleh hasil indeks pelayanan publik sebesar 4,79 melebihi target tahun 2024 dan target akhir periode renstra. Pencapaian BBPOM di Makassar terhadap Indeks Pelayanan Publik belum maksimal jika dibandingkan dengan capaian UPT lainnya untuk pencapaian maksimal pada indeks 5 BBPOM Makassar terus melakukan perbaikan aspek pelayanan publik secara berkesinambungan dengan menerapkan aspek aspek pelayanan prima sehingga BBPOM di Makassar dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya dan meningkatkan prestasi. Masukan dan pengaduan masyarakat merupakan salah satu sumber informasi bagi BBPOM Makassar untuk meningkatkan pelayanan publik. Masukan dari evaluator juga akan ditindaklanjuti untuk perbaikan ke depan.



Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Ruang Lingkup UMKM :
- UMK pada Pangan (Usaha Mikro dan Kecil)
- UMK pada OBat Tradisional (UKOT dan UMOT)
- UMK pada Kosmetik

Ruang Lingkup UMKM:

- UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

b) Usaha Kecil rnemiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah)

- UMKM pada OT mencakup
  UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
- UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golonganB

b. UMKM yang memenuhi standar adalah:

- UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai
- UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap
- UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi:
  Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B)
  1) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB)
  2) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik)
  3) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

c. Kategori UMKM yang didampingi:

- Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman
  Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan
- Untuk UMKM OT :
  1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
  2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum Tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
  3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
  4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
  5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor
- Untuk UMKM Kosmetik :
  1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi)
  2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi

Perhitungan di atas merupakan persentase progres pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2024. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2024.

Persentase progress tahapan pendampingan UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik pada triwulan IV sebesar 79,37 % dengan capaian 100,47% dengan kategori **Sangat Baik**.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024 adalah 100 % dengan realisasi sebesar 100 % Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik telah memenuhi syarat **diatas dari target** yang dietentukan sebesar 100 dengan kategori **"Baik" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	100	100	Sangat Baik

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2021	-	-	-	-
Tahun 2022	77	89,33	116,01	Sangat Baik
Tahun 2023	79	79,37	100,47	Sangat Baik
Tahun 2024	100	100	100	Baik

Realisasi Persentase UMKM yang Memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau Pembuatan OT Dan Kosmetik Yang Baik tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya tahun 2022 sd 2023, indicator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2021 karena merupakan indikator baru. Sedangkan tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi tahun 2023 sebesar 79,37 dengan capaian 100,47 % kategori "Sangat Baik" lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022 dengan realisasi sebesar 89,33 capaian 116,01 % kategori "Sangat Baik".

Realisasi tahun 2024 sebesar 100 dengan capaian 100 % kategori "Baik" lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 dengan realisasi sebesar 79,37 capaian 100,47 % kategori "Sangat Baik".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2024

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	100	100	100	Baik
BBPOM di Manado	100	100	100	Baik
BBPOM di Palembang	100	100	100	Baik
BBPOM Lampung	100	100	100	Baik

Target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung pada angka yang sama. Hasil capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik serta seluruh balai mencapai target dengan katrgori “Baik”

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik di wilayah kerja BBPOM di Makassar BBPOM di Manado, BBPOM Palembang dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik kategori "Baik" antara lain:

- Target Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2024 akumulasi 100 % dimana pada bulan September 70 % dimana telah terdata pelaku usaha yang akan di dampingi pada tahun 2024 yaitu 20 pelaku usaha untuk CPPOB, 5 pelaku usaha untuk CPKB dan 4 pelaku usaha untuk CPOTB
- Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada bulan Desember 142.86 5 % dimana telah terdata pelaku usaha yang akan diberi pendampingan selama tahun 2024 yaitu 20 pelaku usaha untuk CPPOB, 5 pelaku usaha untuk CPKB dan 4 pelaku usaha untuk CPOTB
- Berdasarkan hasil capaian dan evaluasi, diperoleh capaian lebih dari 100%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan Olahan, Obat Tradisional dan Kosmetik terus dilakukan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha dengan berbagai upaya. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsul denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan.

  Dengan dilaksanakan bimtek, pemahaman pelaku usaha terhadap persyaratan pemenuhan dokumen persyaratan dan ketentuan terkait sarana produksi pangan, obat tradisional dan kosmetik menjadi meningkat. Bimbingan teknis dan pendampingan intensif sangat diperlukan oleh pelaku usaha agar dapat segera memenuhi persyaratan sehingga izin edar dapat segera diperoleh.
- Sampai dengan Tahun 2024 capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik melebihi target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sarana UMKM Pangan yang belum memenuhi persyaratan dan memerlukan waktu lebih lama untuk memperbaiki sarana produksi serta mempersiapkan dokumen terkait pemenuhan cara produksi yang baik dan dokumen administrasi yang diwajibkan sebagai persyaratan pengajuan pendaftaran produk. Hal ini disebabkan oleh permasalahan di hulu perizinan sebelum melakukan pengurusan ijin edar Badan POM dan beberapa permasalahan internal / kendala ekonomi bagi para pelaku usaha.
- Kompetensi, komitmen dan ketekunan fasilitator dalam membina dan mendampingan pelaku UMK.
- Melaksanakan kegiatan pendampingan sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 79,37 dengan capaian 100,47 % pada tahun 2024. Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,08) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,47 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 93,23 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100	111.224.000	110.487.565	99,34	1,01	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran pagu alokasi tetap sebesar Rp. 93.917..000,- yaitu penghapusan kegiatan Forum Komunikasi Fasilitasi UMKM yang anggarannya dialihkan untuk menambahkan trip pada Kegiatan Fasilitasi UMKM dalam rangka pemenuhan standar sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase obat yang memenuhi syarat kategori baik antara lain :

- Pelaksanaan PAGC (Pangan Aman Goes to Campus).
- Kolaborasi desk perizinan dengan PTSP
- Layanan konsultasi online dilaur jam kerja.
- Capaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada bulan Desember 142.86 5 % dimana telah terdata pelaku usaha yang akan diberi pendampingan selama tahun 2024 yaitu 20 pelaku usaha untuk CPPOB, 5 pelaku usaha untuk CPKB dan 4 pelaku usaha untuk CPOTB
- Telah terdata pelaku usaha yang akan diikutkan dalam Pendampingan akan diawali dengan pemberian Bimtek (20 Pelaku usaha untuk CPPOB, 5 Pelaku Usaha Untuk CPKB dan 4 pelaku usaha untuk CPOTB

g. Upaya Peningkatan Kinerja

Meskipun persentase UMKM Memenuhi Standar telah mencapai target pada tahun 2024, namun tetap harus terus dilakukan pendampingan kepada UMKM.

Pelaku UMKM pangan, obat tradisional, dan kosmetik perlu didampingi agar dapat memenuhi standar cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.

Untuk meningkatkan capaian pendampingan dan meningkatkan konsistensi enerapan standar, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan.
- Peningkatan kompetensi petugas terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang tepat saat melakukan pendampingan termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus.
- Meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dalam pendampingan UMKM terkait sarana prasarana saat desk konsultasi untuk menunjang pemenuhan dokumen persyaratan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik serta penerapan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.
- Melaksanakan desk CAPA untuk mempercepat penyelesaian pemenuhan persyaratan cara pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik.
- Melaksanakan bimbingan teknis secara efektif terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik, termasuk melakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test.
- Melakukan pendampingan secara intensif, efektif, dan sistematis sehingga UMKM dapat menerapkan dan memenuhi ketentuan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.
- Menambahkan materi terkait pemasaran untuk meningkatkan semangat pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik.
- Berkolaborasi dengan lintas sektor dan memberdayakan mahasiswa magang dalam melakukan pendampingan.

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan Kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024, diperoleh informasi bahwa target renstra tahun 2024 sudah tercapai sehingga tidak dilakukan usulan perubahan target. Namun tetap diperlukan upaya peningkatan di tahun 2024 ini. Selain itu juga dilakukan beberapa hal sebagai berikut untuk pencapaian target indikator:
Melakukan aksi jemput bola bekerjasama dengan DPMPTSP di beberapa kabupaten melakukan desk sarana dan pendampingan untuk pengajuan melalui aplikasi OSS RBA, aplikasi e-sertifikasi, dan aplikasi e-reg.

Berkolaborasi dengan lintas sektor agar dapat memperluas cakupan pendampingan terutama untuk pelaku usaha mikro dan kecil.





Sasaran 5

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar sebagai berikut :

1 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	3 Jumlah desa pangan aman
2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	4 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pada sasaran strategis keenam "Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan 4 indikator antara lain :

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan
Target 95,7 Realisasi 6,27 Capaian 100,60 %

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
Target 124 Realisasi 124 Capaian 100 %

Jumlah desa pangan aman
Target 31 Realisasi 31 Capaian 100 %

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya
Target 22 Realisasi 22 Capaian 100 %



1. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

1) KIE melalui media cetak dan elektronik
2) KIE langsung ke masyarakat dan
3) KIE melalui media sosial

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kategori:

- Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada Tahun berjalan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.34

Target Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori

Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7	96.27	100.60	Sangat Baik

Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE melalui berbagai media pada Tahun berjalan. Indikator ini diukur melalui survei terhadap. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kategori:

a) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;

b) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;

c) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;

d) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE (langsung, webinar, dll) atau penerima KIE (follower media social, subscriber youtube, dll) Balai Besar POM di Makassar dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dilakukan dengan menggunakan tools pada link survei/ QR Code via https://evaluasikie.pom.go.id serta menggunakan kuesioner fisik Jika kondisi tidak memungkinkan (terkendala sinyal, internet, dsb). Setelah kuesioner terisi lengkap, maka Enumerator dapat menginput pada aplikasi Evaluasi KIE secara online minimal 30 orang responden yang telah mengikuti/menerima KIE Obat dan Makanan melalui berbagai Media. Hasil survei ditampilkan dalam Aplikasi Evaluasi KIE https://evaluasikie.pom.go.id/

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui media cetak dan elektronik, KIE langsung ke masyarakat, dan KIE melalui media sosial.

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.60. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	85,16	92,41	108,51	Sangat Baik
Tahun 2021	92	92,85	100,92	Sangat Baik
Tahun 2022	93	93,13	100.14	Sangat Baik
Tahun 2023	94	94,84	100,89	Sangat Baik
Tahun 2024	95,7	96,27	100,60	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 100,92

lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 108,51 kategori "Sangat Baik" Terdapat penurunan target indikator Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan Balai Besar POM di Makassar tahun 2021 dibandingkan tahun 2020, yaitu sebesar 7,59 point; tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 93,13 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2021 dengan nilai 92,85 kategori "Sangat Baik". Tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Tahun 2023 berada pada angka 94,84 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2022 dengan nilai 93,13 kategori "Sangat Baik". Tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Tahun 2024 berada pada angka 96,27 lebih tinggi apabila dibandingkan Tahun 2023 dengan nilai 94,84 kategori "Sangat Baik".

Berdasarkan hasil perbandingan dengan tahun sebelumnya, realisasi Tingkat Efektifitas KIE setiap tahun mengalami kenaikan dengan nilai tertinggi di tahun 2024 sebesar 96,27%. Ini artinya bahwa masyarakat telah paham terhadap KIE yang diberikan dan memberikan manfaat bagi mereka.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

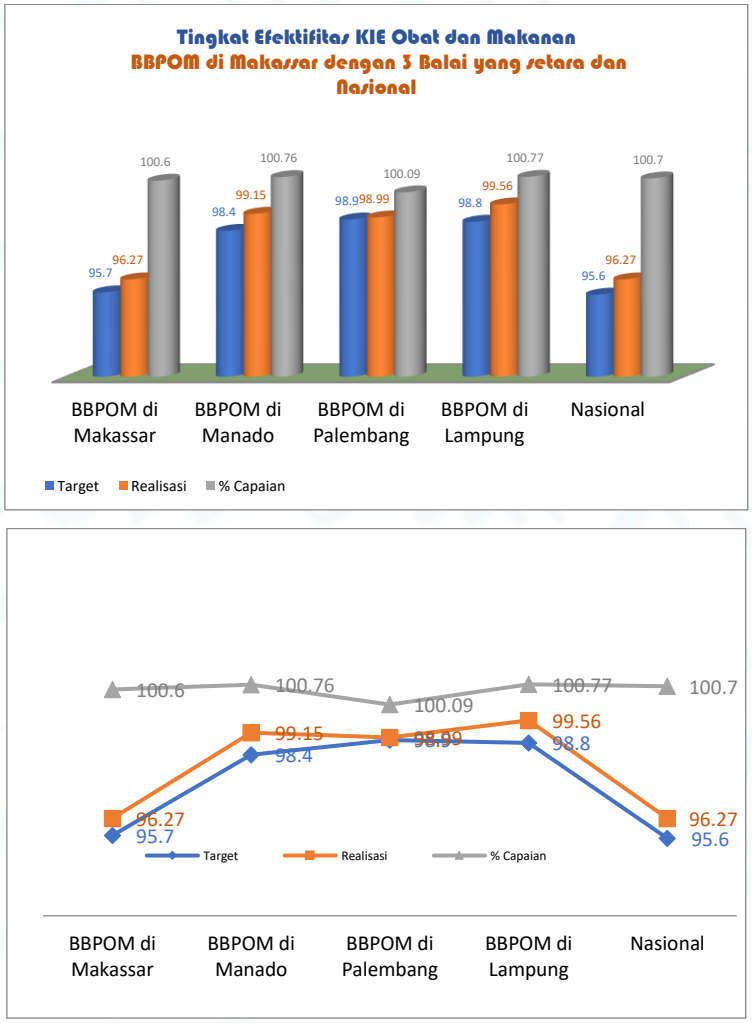
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan secara Nasional tahun 2024

Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	95,70	96,27	100,60	Sangat Baik
BBPOM di Manado	98,40	99,15	100,76	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	98,90	98,99	100,09	Sangat Baik
BBPOM di Lampung	98,80	99,56	100,77	Sangat Baik
Nasional	95,60	96,27	100,70	Sangat Baik

Berdasarkan data pada tabel, realisasi tertinggi diperoleh BBPOM di Lampung, BBPOM di Manado, BBPOM di Makassar dan yang terendah adalah BBPOM di Palembang. Semua Unit melampaui target nasional.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024

Perbandingan Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi BPOM atau capaian nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan	95,7	95,60	96,27	100,70	Sangat Baik

Realisasi Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024 BBPOM di Makassar **sudah mencapai** target IKU Badan POM secara nasional atau di atas dari rata-rata Nasional Badan POM, dengan nilai 96,27 dengan kategori "Sangat Baik".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Sangat Baik, antara lain :

- Pelaksanaan pengukuran tingkat Efektiviatas Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali pada TW I, TW II, TW III dan TW IV. Adapun aspek yang dinilai terdiri atas:
  a) Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
  b) Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
  c) Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
  d) Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan
- Kegiatan KIE yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Makassar bertujuan untuk memberikan pengatahuan tentang Obat dan Makanan aman kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai forum dan Media diantaranya melalui Iklan Televisi, Brosur, koran, Baliho, Media Sosial (Facebook, Instagram dan Twitter), Talkshow Televisi, Talkshow Radio, Penyuluhan dan Webinar.
- Sampai dengan Desember tahun 2024 juga dilaksanakan kegiatan KIE bersama tokoh masyarakat sebanyak 30 (tiga puluh) titik yang dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Bantaeng, Kabupaten Sidrap, Maros, Pangkep dan Kota Makassar dengan menyasar masyarakat umum sebanyak 7.430 peserta. 12 kegiatan Penyebaran Informasi dengan jumlah peserta 759 orang.
- Layanan informasi melalui media social ditingkatkan (facebook, Instagram, tweeter).
- Melakukan telaah dan pembaruan secara kontinu dengan melakukan pengamatan minat masyarakat terkini yang paling efektif dalam menerima informasi sehingga BBPOM di Makassar terus melakukan perbaikan.
- Penambahan variasi kegiatan khususnya pada saat KIE secara langsung (target peserta yang besar), seperti penyesuaian dengan kearifan lokal, senam Cek Klik, dll.
- Perencanaan kegiatan yang mencakup frekuensi, perluasan, dan pemerataan target KIE/sosialisasi/penyebaran informasi ke seluruh daerah.
- Telah dilakukan kegiatan KIE obat dan makanan sebanyak 30 kegiatan melalui KIE bersama tokoh masyarakat, 12 kegiatan Penyebaran Informasi serta Talkshow bak di radio maupun televisi.
- Kontributor indeks tertinggi adalah indikator :
  - Manfaat artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE
  - Pemahaman, yang artinya masyarakat dapat memahami konten informasi yang diterima, kemudian
  - Ragam Media yang merupakan penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE antara lain : Penyuluhan, Media Sosial, Berita/Iklan di TV
  - Minat : Mayoritas Masyarakat Berminat dan Sangat berminat mengikuti Kegiatan KIE
    3 topik KIE yang paling diminati : Pangan Olahan, Obat dan Kosmetik.

Target	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks Ef KIE	Capaian Target	Jumlah Responden	Target Responden
95,7	95,61	97,01	97,28	92,79	96,27	100,60	763	373

Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 250 orang orang. Indeks efektifitas KIE pada Tahun 2024 sebesar 96,27 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing-masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat. Aspek pemahaman dan manfaat merupakan 2 aspek yang sangat penting sebagai pembentuk indeks efektifitas KIE dari hasil survey ini harus menjadi kajian dan masukan bagi BBPOM di Makassar untuk melaksanakan KIE secara sistematis dan terstruktur dengan target populasi yang lebih luas dan frekwensi yang lebih sering sehingga tujuan pemberdayaan masyarakat melalui KIE dapat tercapai.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE yang jauh melebihi target merupakan hasil kerja keras selama Tahun 2024. Namun BBPOM Makassar harus tetap konsisten melaksankan program intensitas pelaksanaan KIE. Berbagai upaya KIE dengan biaya yang lebih murah melalui media sosial harus terus dilakukan. Demikian juga dengan pelibatan berbagai unsur dan komunitas dalam masyarakat harus tetap dijaga sehingga relasi positif dengan BBPOM Makassar tetap terjalin.
- Pelayanan informasi melalui media lebih ditingkatkan, bukan hanya melalui infografis juga melakukan Ig Live dan Webinar .
- Hingga Tahun 2024 BBPOM Makassar telah melaksanakan sebanyak 30 kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI di berbagai Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. Di tiap titik kegiatan KIE dihadiri oleh kurang lebih 250 orang. Indeks efektifitas KIE sebesar 96,27 merupakan komposit indeks pelaksanaan KIE menggunakan berbagai media antara lain media cetak, elektronik, media sosial dll. Kontribusi masing masing aspek adalah : aspek ragam kegiatan; aspek pemahaman; aspek manfaat dan aspek minat.
- Meningkatkan kompetensi narasumber.
- Memperluas cakupan KIE hingga ke Kabupaten/Kota yang frekuensi pelaksanaan KIE pada masyarakat masih rendah.
- Melakukan Update materi secara berkala sesuai dengan peraturan perundangan yang terbaru.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 96,27 dengan capaian 100,60 % pada tahun 2024. Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,60 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,58 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100,60	2,307,879,000	2,298,289,336	99,58	1,01	0,01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

- Nilai indikator "Pemahaman" sebagai kontribusi ketiga pada pencapaian indeks dapat disebabkan beberapa hal antara lain:
  a. Pembuatan konten KIE di media sosial dalam berbagai bentuk seperti infografis, videografis, video, dan kuis sehingga interaksi dengan masyarakat meningkat.
  b. Pada tahun 2024 juga telah dilaksanakan KIE tatap muka di berbagai daerah dengan dengan jumlah peserta masing-masing titik bervariasi, namun rata-rata sebanyak 250 orang.
  c. Penyebaran produk informasi kepada masyarakat dalam cakupan yang sangat besar.
- Kontributor pertama pada pencapaian indeks Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan "Manfaat", yang artinya masyarakat merasakan manfaat kegiatan KIE.
- Melakukan pengambilan data survei dalam setaip kegiatan KIE
- Mengusahakan agar kegiatan KIE dapat dilaksanakan tepat waktu
- Jenis media KIE yang digunakan memiliki pengaruh terhadap efektivitas KIE BPOM, untuk jenis penyuluhan, Virtual (Webinar/seminar online/daring), Media Sosial (Instagram BBPOM di Makassar (@bbpom_makassar), Twitter BBPOM di Makassar (@BBPOM_Makassar), Facebook BBPOM di Makassar (@Bbpom Makassar), Youtube BBPOM di Makassar (BBPOM di Makassar), Whatsapp Grup (0852 11111 533), Telegram) memiliki indeks yang lebih tinggi dibanding media yang lain. Hal ini disebabkan karena Jenis media penyuluhan dan Virtual memiliki kedekatan komunikasi dua arah antara BBPOM di Makassar dengan masyarakat/ audiens.
- Mayoritas masyarakat 'Berminat" dan "sangat berminat" mengikuti kegiatan KIE BPOM. Informasi/topik yang paling banyak diminati adalah Pangan Olahan, karena terkait dengan kebutuhan pokok, topik berikutnya yang diminati adalah mengenai Obat dan Kosmetik. Topik lainnya yang diminati masyarakat diantaranya mengenai tata cara registrasi, informasi tentang air minum isi ulang, Alkes dan PKRT, isu terkini dll.
- Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat secara langsung ternyata masih merupakan kegiatan KIE yang berdampak paling besar pada pencapaian pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain karena sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan tinggal di pedesaan dan kegiatan KIE secara langsung ini merupakan daya tarik tersendiri bagi masyarakat, apalagi jika dihadiri oleh tokoh masyarakat atau pemuka agama. Hal ini di lakukan agar kehadiran BBPOM di Makassar dapat dirasakan oleh masyarakat di pedesaan.

- Pencapaian indikator ini ditunjang oleh kegiatan KIE secara langsung Bersama tokoh masyarakat Anggota Komisi IX DPR RI. Kegiatan penyebaran informasi secara langsung serta KIE melalui talkshow radio serta inovasi parellui (Penyebaran informasi melalui infografis)

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pelaksanaan program Parenting KIE yaitu kegiatan KIE tematik Stunting yang berkolaborasi dengan pemda setempat dan KIE dalam rangka program MANTAPPOL SULSEL.	Frekuensi pelaksanaan masih kurang dan kondisi cuaca dan medan dalam perjalanan menuju lokasi, stabilitas jaringan internet ketika akan mendemokan aplikasi.	Perlu ditingkatkan frekuensi pelaksanaannya.	Pelaksanaan KIE tematik di Kab. Jeneponto dan MANTAPPOL di Kab. Sinjai	TW IV. Sudah Selesai.	Pelaksanaan kegiatan KIE tidak terpadu dengan kegiatan lain.	Pelaksanaan kegiatan terpadu dengan kegiatan lain.
2.	Pelaksanaan program KIE Tematik yaitu KIE KLB Keracunan Pangan dan langsung mengundangan seluruh pihak yang terlibat dan pelaksanaannya dilaksanakan atas dasar kondisi riil yang terjadi di masyarakat.	Peserta yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pelaksanaan ada yang tidak sempat hadir.	Menyampaikan kepada setiap peserta untuk menjadi pelanjut informasi untuk keluarga, teman, tetangga dan masyarakat lainnya.	Pelaksanaan KIE Tematik KLB Keracunan Pangan di Kabupaten Maros	TW IV. Sudah Selesai.	Peserta tidak mengetahui penyebab KLB Keracunan Pangan yang dialami dan terjadi di sekitarnya.	Peserta mengetahui penyebab terjadinya KLB Keracunan Pangan.
3.	Pelaksanaan program KIE Tematik yaitu Keamanan Pangan dan Laik Higiene Sanitasi, KIE Keamanan	Peserta yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pelaksanaan ada yang tidak sempat hadir.	Menyampaikan kepada setiap peserta untuk menjadi pelanjut informasi untuk keluarga, teman, tetangga dan masyarakat lainnya.	Menyampaikan kepada setiap peserta untuk menjadi pelanjut informasi untuk	TW IV. Sudah Selesai.	Sebelum pelaksanaan KIE, berdsasarkan pre test masih terdapat nilai pre test peserta dibawah 50.	Berdasarkan post test, setelah KIE, nilai post test pserta semuanya di atas 50.

	Pangan Keluarga dan langsung mengundangan seluruh pihak yang terlibat dan pelaksanaannya dilaksanakan atas dasar kondisi riil yang terjadi di masyarakat.			keluarga, teman, tetangga dan masyarakat lainnya.			

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan.
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional.
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



2. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dihitung berdasarkan jumlah sekolah yang memliki kategori memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif, melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah, dan mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA.

Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan :

- advokasi lintas sektor keamanan PJAS,
- sosialisasi keamanan PJAS,
- Bimtek kader keamanan pangan sekolah,
- pemberian paket edukasi keamanan pangan,
- monitoring pemberdayaan kader
- keamanan pangan sekolah,
- sertifikasi PJAS Aman.

Koordinasi dengan Pemda:

1. Advokasi Lintas Sektor PJAS
2. Integrasi terpadu program PJAS dengan dengan program Pemda Kab/ Kota (penetapan lokus sekolah/madrasah, audit/pengawasan PJAS terpadu)

Kemandirian Sekolah:

1. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
2. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
3. Sampling dan pengujian PJAS

4. Sosialisasi Keamanan PJAS bagi Komunitas sekolah (medsos, webinar, dll)

Peningkatan kompetensi petugas:

1. Workshop Keamanan Pangan Nasional Terpadu
2. Pelatihan Auditor Piagam Bintang bagi petugas UPT
3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah

Peran Aktif Kader:

- Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah

Pendampingan UMKM :

- Bimtek Keamanan PJAS untuk UMKM Produsen/Penyedia PJAS

Kategori Sekolah dengan PJAS Aman adalah :

1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif

2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah

3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan Kesehatan.

Intervensi utama yang dilakukan berupa bimbingan teknis keamanan pangan terhadap siswa dan guru. Selain itu akan dilakukan pendampingan yang lebih intensif untuk memastikan bahwa sekolah tersebut menerapkan persyaratan keamanan pangan, dan juga kegiatan sampling PJAS di kantin dan pedagang sekitar sekolah sebelum dan sesudah intervensi dilakukan. Tujuan dari intervensi ini untuk memastikan agar sekolah aman dari PJAS yang mengandung bahan berbahaya serta memiliki kemandirian dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip keamanan pangan di sekolah khususnya dikantin sekolah.

No	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1	Advokasi Lintas Sektor PJAS	20%	Januari-April (TW 1 – TW 2)
2	Sosialisasi Keamanan Pangan	10%	Maret-April (TW 1-TW 2)
3	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	April-Juni (TW 2-TW 3)
4	Pemberian Paket Edukasi / Produk Informasi Keamanan Pangan	10%	April-November (TW 2-TW 4)
5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15%	Juli-September (TW 3-TW 4)
	Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah		
	Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah		
6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20%	Agustus-November (TW 4)
7	Pengawalan	10%	Oktober-Desember (TW 4)
	Total Skor	100%	

Pada Tahun 2024 seluruh tahapan kegiatan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap pengawalan, realisasi progress tahapan jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman pada Tahun 2024 adalah 124 sekolah. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman telah mencapai target yaitu 100 % dengan kategori “Baik”.

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung berdasarkan jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan keamanan pangan mengacu pada Juknis Piagam Bintang Keamanan Pangan

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Sekolah yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI dan SMP/MTS, di 4 Kabupaten/Kota yaitu Luwu Utara, Luwu Timur, Pangkep dan Bantaeng. Target tahun 2024 adalah 26 sekolah baru dan 98 sekolah pengawalan yang merupakan target intervensi tahun 2020-2024.

Hingga akhir tahun 2024, semua tahapan intervensi program PJAS telah dilaksanakan sampai pengawalan sekolah yang diintervensi tahun sebelumnya dan persiapan mengikuti Lomba Nasional Sekolah dengan PJAS aman. Salah satu tahapan yang dilaksanakan adalah Sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman. Dari 26 sekolah yang diintervensi semuanya memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat sekolah dengan PJAS Aman. Diharapkan sekolah yang telah mendapatkan sertifikat sekolah dengan PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.

Pada Tahun 2024, frekuensi target dan capaian dihitung Tahunan untuk indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman. Dengan realisasi 124 sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2024. Progres capaian jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman **telah tercapai** yaitu 100% atau 124 sekolah yang menjadi target intervensi telah mendapatkan Sertifikat Sekolah dengan PJAS Aman dengan kategori **Baik**.

Tabel 3.63

Target Kinerja Indikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	124	124	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.64. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	16	16	100	Baik

Tahun 2021	40	40	100	Baik
Tahun 2022	68	68	100	Baik
Tahun 2023	98	98	100	Baik
Tahun 2024	124	124	100	Baik

Capaian kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023, dan 2024 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik", sementara terdapat kenaikan relisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Target inidikator sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

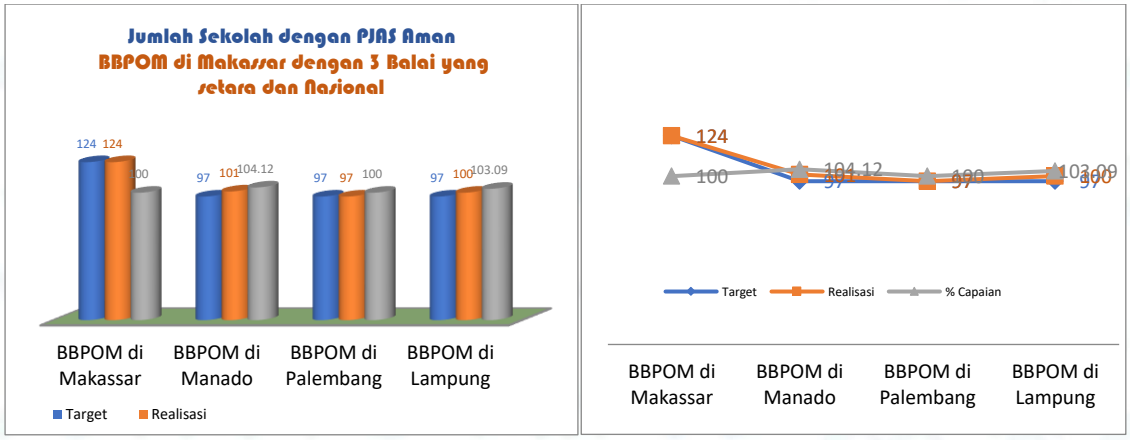
Perbandingan target capaian kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung Tahun 2024, maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	124	124	100	Baik
BBPOM di Manado	97.00	101	104.12	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	97.00	97	100.00	Baik
Lampung	97.00	100	103.09	Sangat Baik

Target indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Makassar lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Balai lainnya. Persentase hasil capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman BBPOM Makassar, BBPOM di Palembang, BBPOM di Manado, dan BBPOM di Lampung seluruhnya telah mencapai target dengan kategori "Baik dan Sangat Baik". Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Indikator
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	124	-	124	-	-

Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2024 BBPOM di Makassar tidak dapat dibandingkandengan target IKU Badan POM secara nasional karena merupakan target kumulatif jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman seluruh unit kerja di Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Realisasi Tahun 2024 Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman adalah sudah terlaksana dengan realisasi 100% Pencapain kinerja 100% pada Tahun 2024 karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan

Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 26 sekolah, 6 desa dan 5 pasar yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Makassar akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu pada prinsipnya terdiri dari beberapa tahapan yang diawali dengan :

1. audiensi/advokasi koordinasi lintas sector kepada Pemerintah Daerah termasuk seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang terlibat antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perdagangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bappeda, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, dll. Pada saat advokasi akan ditentukan lokus desa, pasar dan sekolah yang telah didahului dengan survey pasar.

   Intervensi keamanan pangan pada kegiatan Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar/Balai POM yang bertujuan menggugah komunitas desa, komunitas pasar dan komunitas sekolah agar dapat berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal keberlanjutan program pada desa, pasar dan sekolah yang telah diintervensi dan mereplikasi program pada Kabupaten/Kota secara mandiri.
2. Sosialisasi PJAS

   BBPOM Makassar dalam rangka upaya penyebaran informasi keamanan pangan kepada masyarakat termasuk komunitas sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah dan Pemberian Produk Informasi Keamanan Pangan. Melalui kegiatan ini diharapkan komunitas sekolah dapat memperoleh akses informasi keamanan pangan yang valid sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas sekolah terhadap keamanan pangan.
3. Tahapan selanjutnya adalah bimbingan teknis kader desa, sekolah dan pasar. Pada saat Bimtek kader akan diberikan materi tentang keamanan pangan dan para kader juga akan dilatih untuk pengujian sederhana menggunakan tes kit untuk mengetahui keberadaan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan dalam pangan. Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan antara lain formalin, boraks, rhodamine B dan methanil yellow.
4. Setelah dilakukan Bimtek kader keamanan pangan, para kader ini akan melakukan bimbingan teknis kepada komunitas di lingkungannya. Bimbingan teknis yang dilakukan oleh kader keamanan pangan tetap dalam

pengawasan dan pendampingan oleh Tim BBPOM Makassar. Setelah semua anggota komunitas memahami prinsip prinsip keamanan pangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari hari, akan dilakukan

5. intensifikasi pengawasan keamanan pangan melalui sampling dan uji bahan berbahaya menggunakan rapid test. Fasilitasi keamanan pangan melalui pendampingan penerapan keamanan pangan di sarana produksi juga merupakan bagian dari program keamanan pangan terpadu. Setelah semua tahapan ini selesai akan dilakukan
6. Pemberian paket edukasi
7. monitoring dan evaluasi dengan tujuan melihat penerapan prinsip keamanan pangan dan menurunnya jumlah pangan yang mengandung bahan berbahaya. Pendampingan program keamanan pangan ini dilakukan sampai masyarakat dapat menyusun dan mengembangkan program keamanan pangan secara mandiri menggunakan APBD atau APBDes. Adalah hal yang sangat membanggakan jika masyarakat telah secara mandiri mampu mengembangkan program keamanan pangan sesuai kebutuhan mereka. Terutama jika Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mereplikasi Program Keamanan Pangan Terpadu ini ke Desa, Pasar atau Sekolah yang lain.
8. Pada tahap akhir kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), akan dilakukan Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman terhadap 26 sekolah target intervensi tahun 2024. Sertifikasi dilakukan untuk melihat komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan di sekolah. Verifikasi dilakukan oleh petugas BBPOM Makassar. Diharapkan sekolah yang diintervensi dengan program PJAS Aman dapat meneruskan program ini secara berkesinambungan dengan melahirkan inovasi inovasi yang dapat dilaksanakan oleh kader keamanan pangan sekolah junior (siswa sekolah) dan menyebarluaskan ke sekolah sekitar yang belum mendapatkan program PJAS. Dengan demikian program PJAS akan semakin berkembang.
9. Pada tahun 2024 juga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap program PJAS ini untuk mendapatkan masukan dan kendala kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menerapkan program PJAS.
10. Pengawalan Lomba PJAS

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator persentase obat yang memenuhi syarat diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 124 dengan capaian 100 % pada tahun 2024. Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,07) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 93,19 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100.00	599,151,000	558,331,152	93.19	1.07	0.07	Efisien

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi dari pada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran pagu alokasi tetap, dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 124 sekolah, sekolah yang diintervensi 16 sekolah di tahun 2020, 24 sekolah di tahun 2021, 28 sekolah di tahun 2022 dan 30 sekolah ditahun 2023. Realisasi indikator kinerja Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajajan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada tahun2024 sebesar 100%
- Pencapaian indikator ini karena semua tahapan yang selesai yaitu tahap advokasi, sosialisasi kemanan pangan, pemberian paket edukasi dan bimtek kader keamanan pangan sekolah, Monitoring dan Evaluasi, sertifikasi dan pengawalan sekolah dan Lomba PJAS.
- Tujuan dari Program PJAS adalah Mengawal PJAS aman, bermutu, dan bernutrisi. Serta Memberdayakan Komunitas Sekolah agar mampu dan mandiri melindungi diri dan keluarganya dari produk pangan yang berisiko terhadap kesehatan termasuk menerapkan hygiene dan sanitasi, Adapun kegiatan Intervensi Keamanan PJAS antara lain :
    a. Koordinasi dengan Pemda:
        1. Advokasi Lintas Sektor PJAS
        2. Integrasi terpadu program PJAS dengan dengan program Pemda Kab/ Kota (penetapan lokus sekolah/madrasah, audit/pengawasan PJAS terpadu)
    b. Kemandirian Sekolah:
        1. Pemberian Paket Edukasi/Produk Informasi Keamanan Pangan
        2. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
        3. Sampling dan pengujian PJAS
        4. Sosialisasi Keamanan PJAS bagi Komunitas sekolah (medsos, webinar, dll)
    c. Peningkatan kompetensi petugas:
        1. Workshop Keamanan Pangan Nasional Terpadu
        2. Pelatihan Auditor Piagam Bintang bagi petugas UPT
        3. Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah
    d. Peran Aktif Kader:
        Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
    e. Pendampingan UMKM :
        Bimtek Keamanan PJAS untuk UMKM Produsen/Penyedia PJAS
- Dilakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan program Pangan Jajanan Anak Sekolah. Kegiatan bimtek yang dilaksanakan secara langsung, demikian juga tahapan kegiatan yang harus disesuaikan serta adanya komitmen dari kepala sekolah, guru, pengelola kantin yang tetap mendukung pelaksanaan program ini mengakibatkan program dapat tetap dilaksanakan. Pemberian paket edukasi dan paket untuk kader sekolah membuat

komunitas sekolah semakin bersemangat meneruskan program PJAS sampai selesai dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

- Perencanaan Pelaksaan seluruh tahapan program PJAS dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

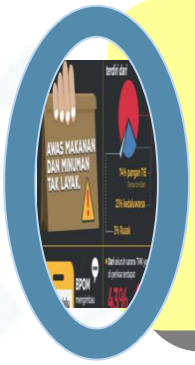
No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sebelum kegiatan sertifikasi dilaksanakan sebelumnya sekolah melakukan evaluasi mandiri *(self assessment)* pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti	Koordinasi dengan sekolah lebih ditingkatkan	Telah dilaksanakan Sertifikasi Sekolah Sampling dan Pengujian PJAS di Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar,Kab.Gowa dan Kab.Takalar	Tahapan Kegiatan PJAS telah selesai dilaksanakan sampai dengan sertifikasi sekolah setelah sebelumnya pada bulan Agustus dan september kegiatan pengawalan sekolah intervensi tahun 2024 telah dilaksanakan	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Sekolah melakukan evaluasi mandiri (*self assessment*) pemenuhan kriteria Sekolah dengan PJAS Aman	Telah dilaksanakan Sertifikasi Sekolah Sampling dan Pengujian PJAS di Sekolah di Kabupaten Kepulauan Selayar,Kab.Gowa dan Kab.Takalar
2	Tim Keamanan Pangan sekolah masih ada yang belum bekerja optimal sehingga perlu meningkatkan semangat dengan intensif melakukan komunikasi	Koordinasi dengan sekolah dan OPD terkait lebih ditingkatkan	Melaksanakan Tahapan Kegiatan PJAS intervensi tahun 2024 di tiga kabupaten	Tahapan Kegiatan PJAS intervensi tahun 2024 telah selesai dillaksanakan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gowa	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Belum dilaksanakan tahapan kegiatan PJAS Intervensi tahun 2024 di 3 Kabupaten	Telah dilaksanakan tahapan kegiatan PJAS Intervensi tahun 2024 di 3 Kabupaten

				Kabupatan Takalar dan kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah sekolah yang diintervensi adalah 26 sekolah.			

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Upaya yang dilakukan pada tahun 2024 antara lain yaitu terdapat penambahan 26 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, sebelumnya 98 menjadi 124 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar.
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indikator Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



3. Jumlah desa pangan aman

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain .

Desa yang dIVntervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Dearah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata

Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :

1) Kader keamanan pangan desa yang aktif
2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain

Pada Tahun 2024, frekuensi target dan capaian dihitung Tahunan untuk indikator Jumlah desa pangan aman. Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu :

1. Advokasi Kelembagaan Desa yang bertujuan untuk menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah.
2. Pengadaan gimmick, rapid test, dll
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
4. Bimtek Komunitas
5. Fasilitas Keamanan Pangan
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan

Gap Asessment merupakan penilaian awal terhadap pengetahuan kader dan komunitas desa mengenai keamanan pangan dan kemampuannya dalam melaksanakan praktek keamanan pangan.

Gap asessment dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Dalam rangka *gap asessment* Gerakan Keamanan Pangan Desa, Tim GKPD BBPOM di Makassar bersama fasilitator lapangan dan 6 enumerator melaksanakan survei terhadap kader dan komunitas desa yang berlokasi di 12 desa yang akan diintervensi program gerakan keamanan pangan desa. Responden yang diambil datanya merupakan calon kader dan calon komunitas desa/usaha pangan desa yang akan mengikuti bimtek dan fasilitasi keamanan pangan. Hasil *gap assessment*

dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

Pelatihan korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan)

Setelah diperoleh data *baseline* pengetahuan komunitas desa yang akan dIVntervensi, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan Korlap dan kader KPD (Kompetensi Keamanan Pangan). Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan.

Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan serta dapat melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Indikator keluaran kegiatan ini adalah jumlah kader keamanan pangan yang dilatih di bidang keamanan pangan . Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test* terdapat peningkatan pengetahuan kader yang dilatih

Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan dilingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa. Pelaksanaan Bimtek dimulai dengan koordinasi fasilitator lapangan ke masing-masing desa yang akan diintervensi. Bimtek keamanan pangan dilakukan terhadap komunitas masyarakat yang terlebih dahulu telah diambil datanya pada kegiatan *gap assessment*. Komunitas masing-masing terdiri dari 10 orang. Pada kegiatan Bimtek ini juga dilakukan *pre-test* dan *post-test*. Berdasarkan data nilai *pre-test* dan *post-test* peserta Bimteknkomunitas desa dan usaha pangan desa, dapat dilihat adanya peningkatan nilai setelah dilakukan Bimtek, hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pengetahuan komunitas desa dan usaha pangan desa setelah mengikuti Bimtek ini.

Fasilitasi keamanan pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas BBPOM di Makassar bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan *rapid test kit* dengan parameter pengujian *Methanyl yellow, Rhodamine B, Boraks dan Formalin.* Dari hasil pengujian tidak ditemukan sampel yang mengandung bahan berbahaya.

Bagi desa yang menerapkan keamanan pangan secara mandiri, Badan POM memberikan apresiasi dalam Desa Pangan Aman *Award* yang diumumkan pada puncak perayaan ulang Tahun Badan POM RI setiap Tahunnya. Penilaian dilaksanakan setelah intervensi GKPD. Untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan GKPD di Kabupaten yang telah dIVntervensi pada Tahun sebelumnya, dilaksanakan pengambilan data dalam rangka Monev dilaksanakan secara langsung terhadap seluruh kader keamanan pangan desa dan komunitas desa yang dIVntervensi di setiap desa/kelurahan. Kader dan komunitas desa (masyarakat desa maupun usaha pangan desa) yang telah diintervensi diambil data mengenai pengetahuan, persepsi dan perilaku tentang penerapan prinsip keamanan pangan selama

menangani pangan. Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis dan dijadikan acuan dalam melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program GKPD Tahun berikutnya.

Selain Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan pula kegiatan. Pengawalan terhadap desa/kelurahan yang sudah dIVntervensi dalam rangka pembentukan Desa Paman Pratama agar dapat dikembangkan menjadi Desa Paman Madya dan selanjutnya menjadi Desa Paman Mandiri. Kegiatan pengawalan ini dilaksanakan oleh petugas BBPOM di Makassar agar desa menjalankan program keamanan pangan secara berkelanjutan.
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah desa yang :
Desa pangan aman adalah desa yang memenuhi kategori poin C

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Pada Tahun 2024 seluruh tahapan kegiatan Desa Pangan Aman telah selesai dilakukan sampai dengan tahap Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan. Realisasi tahapan progress Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor) ; Lomba Desa Pangan Aman serta Pengawalan pada Tahun 2024 adalah sebanyak 31 desa. Capaian progress Jumlah desa pangan aman telah mencapai target yaitu 100 % dengan kategori “Baik”.

Tabel 3.67
Jumlah desa pangan aman di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	6	6	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.64. Perbandingan realisasi dan capaian Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Jumlah desa pangan aman di wilayah kerja BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2020	4	4	100	Baik
Tahun 2021	12	12	100	Baik
Tahun 2022	19	19	100	Baik
Tahun 2023	25	25	100	Baik
Tahun 2024	31	31	100	Baik

Capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik", sementara terdapat kenaikan relisasi Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Target inidikator Jumlah desa pangan aman memang ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

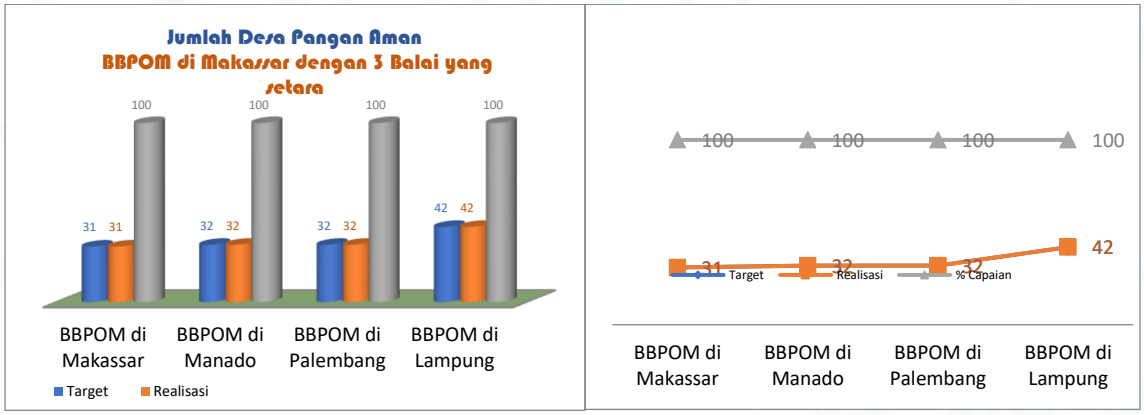
Perbandingan target capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Jumlah desa pangan BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini :

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakarta, dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2024

Indikator Kinerja Jumlah desa pangan aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	31.00	31	100.00	Baik
BBPOM di Manado	32.00	32	100.00	Baik
BBPOM di Palembang	32.00	32	100.00	Baik
BBPOM di Lampung	42.00	42	100.00	Baik

Target indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM Makassar, BBPOM Lampung pada angka yang berbeda, sementara target BBPOM Lampung lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Balai lainnya. Persentase hasil capaian Jumlah desa pangan aman untuk BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung seluruhnya telah mencapai target yaitu 100 % kategori "Baik". Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Jumlah desa pangan aman di wilayah BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, dan BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Jumlah desa pangan aman BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2024 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Indikator
Jumlah desa pangan aman	31	-	31	-	-

Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2024 BBPOM di Makassar tidak dapat dibandingkan dengan target IKU Badan POM secara nasional karena merupakan target komulatif jumlah desa pangan aman seluruh unit kerja di Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja jumlah Desa Pangan Aman disebabkan oleh :

Tahapan pelaksanaan kagiatan Desa Pangan Tahun 2024 terlaksana sesuai dengan perencanaan, Jumlah desa pangan aman adalah 31 sudah terlaksana dengan realisasi 100% Pencapain kinerja 100% pada Tahun 2024 karena tahapan kegiatan yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan

Jumlah desa pangan aman merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 5 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 26 sekolah, 6 desa dan 5 pasar yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis

komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Makassar akan melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya. Komunitas yang akan diintervensi misalnya IRTP, pelaku usaha ritel/warung, pedagang pasar, Ibu ibu PKK, Karang Taruna, pengelola kantin sekolah, komunitas sekolah, pondok pesantren, dll.

Program Desa Pangan Aman yang merupakan Prog. Priotas BBPOM di Makassar 2024 untuk mendukung salah satu arah kebijakan Badan POM yaitu Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui pemberdayaan masyarakat.
terdiri atas beberapa tahapan :

1. Advokasi Kelembagaan Desa
   - Kegiatan berupa pertemuan dengan Pemda, Perangkat Desa dan calon KKPD yang mewakili Komunitas Desa target tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan dan pemetaan kegiatan yang dapat diintegrasikan di masing-masing lintas sektor di daerah
   - Pertemuan ini diintegrasikan juga dengan pelaksanaan advokasi untuk kegiatan PJAS dan Pasar Aman Berbasis Komunitas
2. Pengambilan data/survei pre dan post intervensi desa pangan aman
   Survei ini dilakukan untuk memperoleh data profil keamanan pangan di desa/kelurahan sebelum dan sesudah desa diintervensi. Data ini akan menjadi salah satu acuan untuk melakukan intervensi. Selain itu, data ini akan menjadi acuan untuk mengevaluasi program desa pangan aman yaitu evaluasi pre dan post intervensi keamanan pangan
3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)
   Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam melakukan pendampingan kepada komunitas desa untuk membangun budaya keamanan pangan agar dapat mengimplementasikan keamanan pangan secara mandiri.
4. Bimtek Komunitas Desa
   Kegiatan ini untuk meningkatkan kepedulian dan kemampuan komunitas desa dan usaha pangan desa agar mampu secara mandiri menyediakan dan memilih pangan yang aman, sehingga masyarakat desa mampu melindungi desanya sendiri dari produk pangan yang tidak aman
5. Fasilitasi Keamanan Pangan Bagi Komunitas Desa dan Pelaku Usaha Pangan Desa
   Kegiatan ini dilakukan setelah mendapatkan bimtek, komunitas desa dan usaha pangan desa didampingi/difasilitasi langsung di sarana yang dimilikinya agar mampu menerapkan praktek keamanan pangan yang baik di tingkat rumah tangga dan tingkat IRTP, PKL dan Ritel, sehingga masyarakat desa lebih paham dan mampu menerapkan keamanan pangan secara mandiri
6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa
   Intensifikasi pengawasan yang dilakukan adalah pengambilan sampel dan pengujian sampel menggunakan rapid test kit, pada kegiatan ini juga dilakukan pengawasan label pangan produk IRTP yang ada di desa/kelurahan. Hasil pengawasan ini keberhasilan program keamanan pangan di desa
7. Lomba Desa PAMAN

Pemberian penghargaan kepada desa yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk memberikan motivasi kepada aparat dan lembaga pemerintah untuk meningkatkan prestasi dan kinerjanya dalam mewujudkan pangan aman serta menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peran lebih besar dalam upaya mewujudkan pangan aman di desa

8. Monitoring dan Evaluasi Program Desa Pangan Aman

   Kegiatan monev dilaksanakan untuk

   - melihat proses maupun kemajuan program,
   - mengidentifikasi hal-hal yang mendukung atau menghambat program,
   - mengukur ketercapaian target
   - memperoleh rekomendasi untuk pengembangan program selanjutnya
   - memberikan solusi terhadap permasalahan dan atau penyimpangan yang terjadi
   - menyiapapapapkn dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan program keamanan pangan pada tahun berikutnya.

9. Pengawalan di Desa yang sudah diintervensi keamanan pangan tahun sebelumnya

   Kegiatan pengawalan dilakukan untuk:

   - memastikan bahwa desa/kelurahan yang sudah diintervensi melanjutkan program-program keamanan pangan.
   - mengetahui tindak lanjut dokumen rencana aksi yang telah disusun tahun sebelumnya oleh desa/kelurahan yang telah mendapat intervensi.
   - menjaga kompetensi Kader Keamanan Pangan yang telah dilatih

Kegiatan intervensi desa pangan aman yang telah dilakukan sampai pada akhir Tahun 2024 adalah audiensi dan advokasi secara daring kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi I dan IV, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan desa terintervensi Tahun sebelumnya serta Monitoring dan Evaluasi.

Hambatan pelaksanaan program diantaranya :

1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Tidak adanya kordinator lapangan yang dapat memantau jalannya program di desa yang dIVntervensi;
3. Meningkatkan pemahman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Jumlah desa pangan aman diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 31 dengan capaian 100 % pada tahun 2024. Indikator Jumlah desa pangan aman kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,04) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 95,79 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Jumlah desa pangan aman Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori

100.00	496,237,000	475,346,657	95.79	1.04	0.04	Efisien

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran pagu alokasi tetap, dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah desa pangan aman.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

- Target dan capaian intervensi Kab/Kota dan Desa Tahun 2024 di BBPOM Makassar adalah target 4 Kab/Kota dan capaian adalah 4 Kab/Kota : Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur,
- Target 6 desa (1 desa stanting ; 5 desa non stunting) sementara capaian adalah 6 desa (2 desa stanting ; 4 desa non stunting) berdasarkan penilaian dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan untuk Waktu Pelaksanaan Advokasi: Januari - April Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan, BBPOM di Makassar termasuk dalam kriteria Balai dengan 100 % Ketepatan Waktu Pelaksanaan dan 100 % Ketepatan Waktu Pelaporan

Tabel : Desa yang Diintervensi Keamanan Pangan

Kabupaten/Kota	Nama Kecamatan	Nama Desa	Desa Stunting/Non Stunting
Kab. Pangkep	Labanang	Kanaungan	Stunting
Kab. Pangkep	Labanang	Taraweang	Non Stunting
Kab. Bantaeng	Eremerasa	Ulugalung	Non Stunting
Kab. Bantaeng	Bissapu	Bontojai	Non Stunting
Kab. Luwu Timur	Wasuponda	Tabarano	Non Stunting
Kab. Luwu Utara	Sukamaju Selatan	Wonokerto	Stunting

- komitmen dari Kepala Desa/Lurah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat sebagai Ketua Tim Keamanan Pangan sangat dibutuhkan agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Desa Pangan Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
- Kader Keamanan Pangan Desa sebagai fasilitator dan penggerak kegiatan memiliki tugas yang penting agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan. Komunitas desa sebagai pelaku keamanan pangan menerapkan praktek keamanan pangan dalam kehidupan sehari hari
- Melakukan pendampingan dan pengawalan kepada Desa Pangan Aman dalam memperluas cakupan intervensi di komunitasnya.

- Kegiatan intervensi desa pangan aman yang telah dilakukan sampai pada Tahun 2024 adalah audiensi dan advokasi kepada lintas sektor dan Organisasi Perangkat Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa, Bimtek Komunitas, Fasilitasi I dan IV, Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan, Pengawalan desa terintervensi Tahun sebelumnya serta Monitoring dan Evaluasi
- Evaluasi Pelaksanaan Prgram Desa Pangan Aman meliputi :
  - Capaian desa/kelurahan yang diintervensi (stunting/non stunting)
  - Jumlah Desa yang menyusunr encana aksi keamanan pangan
  - Capaian kader yang dilatih dan komunitas yang dibimtek
  - Ketepatan waktu pelaksanaan dan waktu pelaporan untuk setiap tahap kegiatan
- Jumlah KKPD pada desa yang diintervensi sesuai dengan target serta Jumlah Komunitas pada desa yang diintervensi sesuai dengan target
- Pelatihan Kader

  BBPOM Makassar termasuk dalam 28 BB/BPOM pelaporan kegiatan Pelatihan Kader tepat waktu, Waktu Pelaksanaan Pelatihan Kader: April – Juli ; Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan
- Bimtek Komunitas

  BBPOM Makassar termasuk dalam 27 BB/BPOM yang capaian waktu pelaksanaan dan capaian waktu pelaporan kegiatan Bimtek Komunitas tepat waktu,

  Waktu Pelaksanaan Bimtek Komunitas: Mei – September Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan
- Monitoring dan Evaluasi

  BBPOM Makassar termasuk dalam 33 BB/BPOM yang ketepatan waktu pelaksanaan dan ketepatan waktu pelaporan kegiatan Monitoring dan Evaluasi

  Waktu Pelaksanaan Monitooring dan Evaluasi : November - Desember Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan
- Pengawalan Desa Pangan Aman

  seluruh Balai POM tepat waktu pelaksanaan dan tepat waktu pelaporan kegiatan Pengawalan Desa Pangan Aman

  Waktu Pelaksanaan Monitooring dan Evaluasi : Juni - Desember Batas Waktu Pelaporan: maksimal 1 bulan setelah pelaksanaan kegiatan

Sebagai upaya pencapaian indikator Desa Pangan Aman di lakukan berbagai upaya sebagai berikut :

- Adanya komitmen seluruh unsur masyarakat dan pemerintah, mulai dari pemerintahan desa sampai dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kader keamanan pangan desa memegang peran yang sangat penting untuk menggerakkan aktifitas penerapan keamanan pangan di desa. Komitmen berkontribusi secara positif pada pencapaian target Desa pangan aman.
- Komitmen dari Kepala Desa, aparat desa dan kader keamanan pangan desa sehingga semua tahapan pelaksanakan kegiatan berjalan lancar

- Peran serta dari lintas sektor dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten dan Puskesmas, sebagai pendamping desa dan yang memiliki wilayah, sehingga bisa mengajak warga desa untuk berperan aktif dalam penerapan keamanan pangan**.**
- Melakukan replikasi gerakan keamanan desa secara mandiri
- Meningkatkan komitment terkait kemandirian perangkat desa untuk menghidupkan UMKM yang ada dipedesaan agar dapat berdaya saing sehingga memperkuat ekonomi desa

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1	Koordinasi dengan kepala desa dan aparat desa lebih ditingkatkan sehingga potensi masalah yang timbul bisa diselesaikan	Koordinasi Pemerintah Desa lebih ditingkatkan	Pada bulan Desember 2024 telah dilaksanakan Monev untuk lokus intervensi Kabupat Kepulauan Selayar dan pendampingan Lomba Desa seta mengirim Dokumen Desa Bontosunggu ke Pusat dalam rangka mewakili BBPOM Makassar untuk Lomba Desa	Tahapan Bulan Desember adalah Monitoring dan evaluasi di kabupaten Kepulauan Selayar dan Lomba Desa	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Kordinasi dengan Desa yang diintervensi untuk pelaksanaan kegiatan Monev dan Lomba Desa	Pada bulan Desember 2024 telah dilaksanakan Monev untuk lokus intervensiKabupaten Kepulauan Selayar dan Lomba Desa

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Jumlah desa pangan aman telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Jumlah desa pangan aman dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator Jumlah desa pangan aman pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Jumlah desa pangan aman serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



4. Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya.).

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pasar aman dari bahan berbahaya adalah pasar yang di dalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan

peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar aman dari bahan berbahaya, serta pelatihan fasilitator pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya dan rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya Pasar

yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kategori Pasar Aman meliputi :

1. Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya adalah :

1. Survei Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar aman dari bahan berbahaya. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk:

1. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang mengandung bahan berbahaya.
2. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
3. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang

2. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain pemerintah, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kampanye Pasar Aman dari Bahan Berbahaya merupakan salah satu bentuk advokasi kepada masyarakat sebagai bagian dari komunitas pasar.

3. Bimtek dan Fasilitasi Pasar aman dari bahan berbahaya kepada petugas pasar.

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

4. Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Tujuannya adalah melakukan sosialisasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada komunitas pasar, khususnya pedagang pasar; meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan yang dilarang untuk pangan ataupun produk-produk yang mengandung bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan.

5. Kampanye Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar tradisional.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran spot iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan berbahaya dengan menggunakan lab keliling, serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai Besar/Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar.

Petugas Balai Besar/Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti mobil laboratorium keliling, media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai Besar/Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli.

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing masing wilayah kerja BBPOM di Makassar, menggunakan perhitungan sebagai berikut :

Dihitung dari Jumlah pasar yang memenuhi kategori poin F
riteria Pasar Aman meliputi :

1) *Mendapat intervensi menjadi pasar aman dari bahan berbahaya*
2) *Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta*
3) *Mempunyai rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya*

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tahun 2024 progres jumlah realisasi pasar aman dari bahan berbahaya adalah sebanyak 22 pasar dari target 22 Pasar. Capaian Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya telah mencapai target yaitu 100 % dengan kategori “Baik”.

Tabel 3.71

Target Kinerja Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di wilayah kerja BBPOM di Makassar	22	22	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.72. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
Tahun 2020	2	2	100	Baik
Tahun 2021	8	8	100	Baik
Tahun 2022	13	13	100	Baik
Tahun 2023	18	18	100	Baik
Tahun 2024	22	22	100	Baik

Capaian kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM Makassar untuk tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik", sementara terdapat kenaikan realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM Makassar tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Target inidikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas ditetapkan secara kumulatif hingga tahun 2024.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

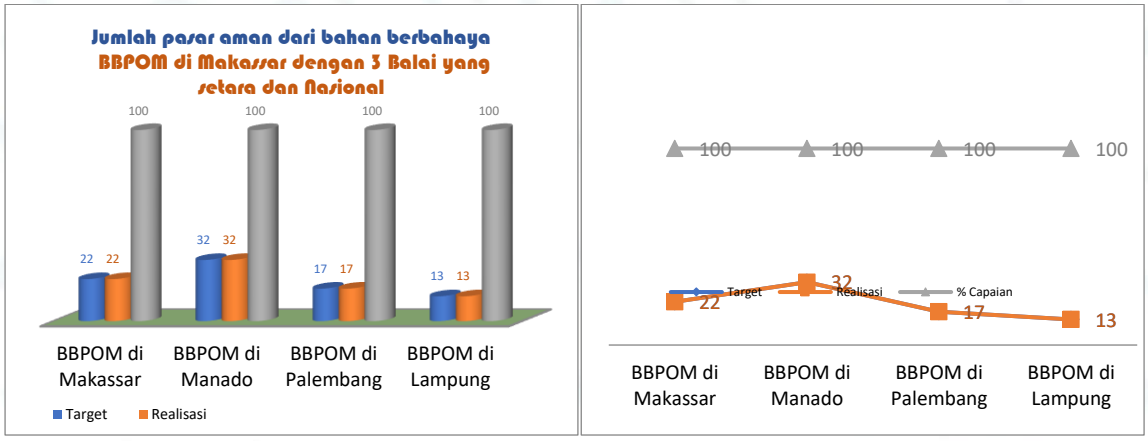
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	22	22	100	Baik
BBPOM di Manado	32	32	100	Baik
BBPOM di Palembang	17	17	100	Baik
BBPOM di Lampung	13	13	100	Baik

Target indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas berbeda-beda, sementara target BBPOM Maanado lebih tinggi dibandingkan dengan 3 Balai lainnya. Persentase hasil capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas seluruhnya telah mencapai target yaitu 100 % kategori "Baik". Target nasional merupakan target kumulatif seluruh Balai di Indonesia sehingga tidak dapat dibandingkan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024, sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi kinerja IKU BPOM atau capaian nasional

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2024 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Indikator
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	22	-	22	-	-

Realisasi Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2024 BBPOM di Makassar tidak dapat dibandingkandengan target IKU Badan POM secara nasional karena merupakan target komulatif Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya seluruh unit kerja di Badan POM.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Pencapaian indikator ini ditunjang oleh terlaksananya tahapan survei pasar, advokasi, sampling tahap 1 dan tahap 2, bimtek pengelola pasar dan penyuluhan pedagang pasar serta monitoring dan evaluasi

- Target dan capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas Tahun 2024 di BBPOM Makassar adalah target 4 Kak/Kota dan capaian adalah 4 Kab/Kota : Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Luwu Timur
- Target 4 Pasar (Pasar Kassi Kabupaten Pangkep; Pasar Lambocca Kabupaten Bantaeng; Pasar Malindungi Kabupaten Luwu Timur dan Pasar Kapidi Kabupaten Luwu Utara) berdasarkan penilaian dari Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan sebanyak 34 UPT BPOM termasuk BBPOM di Makassar sudah melakukan seluruh tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas dengan persentasr capaian 100 %.

Program Pasar pangan aman berbasis komunitas merupakan bagian dari Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu yang pada tahun 2024 dilaksanakan di 4 Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pangkep, Kabupaten Bantaeng Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini terdiri dari Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). Program Prioritas Nasional Keamanan Pangan Terpadu ini akan menargetkan 30 sekolah, 6 desa dan 4 pasar yang tersebar di 4 Kabupaten/Kota. Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas yang merupakan kelanjutan dari program yang sama tahun sebelumnya. BBPOM di Makassar telah melakukan intervensi dan pendampingan kepada komunitas komunitas yang ada di masing masing pasar, desa dan sekolah sampai akhirmya terbentuk masyarakat mandiri yang mampu menyediakan pangan yang aman dan bermutu untuk lingkungan terdekatnya.

- Evaluasi Pelaksanaan Prgram Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas meliputi :
  - Advokasi (Forum Advokasi komitmen Pemda dan lintas sector Pasar)

    Forum Advokasi Komitmen Pemda Dan Lintas Sektor Pasar dilakukan untuk melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan di daerah serta menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama. .Serta meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinu antar instansi dalam pelaksanaan program di daerah.
  - Survei

    Survei pasar dilakukan untuk melakukan identifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas pasar yang akan diintervensi
  - Bimtek Petugas Pengelola Pasar

    Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dilakukan untuk melatih petugas pengelola pasar agar dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik di pasar rakyat. Serta melatih pengelola pasar untuk membuat pelaporan hasil pengawasan yang akan disampaikan ke Balai BesarPOM di Makassar
    Apabila pelaksanaan Pelatihan Fasilitator Pasar digabung dengan Bimbingan Teknis Petugas Pengelola Pasar dilaksanakan selama satu hari dan materi yang disampaikan pada saat Bimtek adalah materi Modul 1 Pengetahuan Bahan Berbahaya, Modul 2 Identifikasi Pasar Untuk Pengendalian Bahan Berbahaya, Modul 3 Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi, Modul 4 Pengambilan Contoh Sampling, Modul 5 Pengujian Bahan Berbahaya Modul 6 Monev Pengawasan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.
  - Pelatihan Fasilitator Pasar

    Pelatihan Fasilitator Pasar bertujuan memberdayakan petugas Dinas yang membawahi pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya.
    Pelaksanaan pelatihan dapat digabung dengan pelaksanaan Bimtek Pengelola Pasar. Dimana Bimtek Pengelola Pasar dilaksanakan selama satu hari dan materi yang disampaikan pada saat Bimtek adalah materi Modul 1 Pengetahuan Bahan Berbahaya, Modul 2 Identifikasi Pasar Untuk Pengendalian Bahan Berbahaya, Modul 3 Identifikasi Pedagang Pasar dan Inventarisasi, Modul 4 Pengambilan Contoh Sampling, Modul 5

Pengujian Bahan Berbahaya Modul 6 Monev Pengawasan Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

Kegiatan Bimtek pengelola pasar juga dilaksanakan secara online di pasar pengawalan

- Sampling dan pengujian Tahap 1

Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar bertujuan memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit kimia, pengujian mikrobiologi.

tahap I di bulan April - Mei 2024 dimana pelaporan paling lambat bulan Mei 2024

Tabel. Jumlah sampel yang diambil dengan Tipe Pasar.

Tipe pasar	Sampel
Pasar Tipe A Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m_2	100 (95 kimia, 5 mikro)
Pasar Tipe B Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 hari dalam 1minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 orang,dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m_2	80 (75 kimia, 5 mikro)
Pasar Tipe C Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 kali dalam 1 minggu jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m_2	60 (55kimia, 5 mikro)
Pasar Tipe D Merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 kali dalam 1 minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m_2	40 (35 kimia, 5 mikro)

- Penyuluhan Pedagang Pasar

Penyuluhan pedagang pasar bertujuan untuk melakukan sosialisasi kegiatan kepada pedagang pasar, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan dan kemandirian pedagang pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik di pasar rakyat.

- Kampanye Keamanan Pangan di Pasar

Kampanye keamanan pangan bertujuan melakukan sosialisasi keamanan pangan, meningkatkan kesadaran, pengetahuan, pemberdayaan, dan kemandirian komunitas pasar tentang keamanan pangan dan ikut serta dalam mengawasi bahan berbahaya yang disalahgunakan pada pangan serta meningkatkan partisipasi pengelola pasar dan pedagang pasar dalam menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik di pasar rakyat.

- Sampling dan pengujian Tahap 2

Sampling dan Pengujian Sampel di Pasar bertujuan memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan terhadap bahan berbahaya, bahan pangan, maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar yang dikelolanya melalui pengambilan contoh dan pengujian cepat menggunakan test kit kimia, pengujian mikrobiologi.

tahap II di bulan September - Oktober 2024 dimana pelaporan paling lambat bulan Oktober 2024.

pembelian sampel untuk 2 (dua) tahap sesuai Tipe pasar, misal masing-masing 100 sampel untuk pasar intervensi tipe A dan 1 tahap sebanyak 50 sampel untuk pasar pengawalan (pasar yang diintervensi pada tahun sebelumnya),

Alternatif Solusi

- Mengidentifikasi program Dinas Kesehatan yang melibatkan petugas puskesmas di pasar yang dlintervensi untuk menggantikan peran kordinator lapangan;
- diperlukan komitmen lebih lanjut dari petugas dan kepala pasar serta Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setempat agar program dan kegiatan-kegiatan terkait keamanan pangan di Pasar Aman yang dilakukan secara mandiri dapat terus berlanjut dan berkesinambungan.
- Advokasi dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota
- Penandatanganan MOU antara Balai POM, Bupati dan Walikota.
- Melakukan Monev secara Luring dengan dihadiri Pemerintah Daerah yang terkait.
- Meningkatkan pemahman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 22 dengan capaian 100 % pada tahun 2024. Indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,07) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 93,19 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100.00	233,289,000	217,401,668	93.19	1.07	0.07	Efisien

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran pagu alokasi tetap dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

- Pencapaian indikator ini karena tahapan advokasi dan monitoring evaluasi dilaksanakan terintegrasi dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman

- Program intervensi pasar telah dilaksanakan sampai 100% target 22 pasar yang diintervensi telah diselesaikan di Bulan Oktober di awal triwulan ke IV lebih cepat dari yang ditargetkan semula selesai di akhir tahun. Upaya percepatan dengan menggabung ketiga progrram PN sangat efektif sehingga intervensi pasar dapat diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu adanya koordinasi dengan lintas sector yang sangat baik merupakan salah satu keberhasilan penyelesaian program pasar pangan aman berbasis komunitas. Pada umumnya masing masing Pemerintah Daerah telah membentuk Satgas pengawasan yang bertugas memantau kegiatan perdagangan dan ekonomi secara umum. Satgas ini dimanfaatkan sebagai Tim Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sehingga semua tahapan kegiatan dapat dilaksanakan lebih cepat dari jadwal
- Pelaksanaan program Pasar Aman Bahan Berbahaya relative lebih sulit dibandingkan dengan program PJAS dan Desa Pangan Aman. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang komunitas pasar yang sangat beragam dan kepentingan ekonomi yang terkait di dalamnya. Merubah perilaku komunitas pasar untuk menerapkan prinsip prinsip keamanan pangan di pasar bukan merupakan pekerjaan yang ringan. Namun demikian, BBPOM di Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar komunitas pasar yang telah dIintervensi tetap konsisten melaksanakan program Pasar Aman Bahan Berbahaya. Upaya pengawalan dilakukan melalui pembentukan wa group agar komunitas pasar dapat saling berbagi dan meniru keberhasilan pasar pasar lain
- Dukungan penuh dari Pemerindah Daerah dan OPD yang terkait
- Partisipasi aktif dari Pengelola Pasar yang dIintervensi serta Perencanaan Pelaksaan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Monitoring Evaluasi Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang di tetapkan.
- Meningkatkan pemahman pemerintah daerah / lintas sektor terhadap tujuan kegiatan sehingga pemerintah daerah dapat lebih berperan untuk mendukung keberhasilan program

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1	Target yang telah direncanakan pada bulan Oktober2024 dan terealiisasi sesuai dengan perencanaan sehingga tidak ditemukan permasalahan yang berarti	Koordinasi dengan Petugas Pengelola Pasar lebih ditingkatkan	Sampling dan Pengujian tahap 2 di Kabupaten Kepulauan Selayar telah selesai dilaksanakan	Koordinasi dengan Petugas Pengelola Pasar untuk pelaksanaan tahapan selanjutnya lebih ditingkatkan	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Sampling dan Pengujian tahap 2 di Pasar Sentral Benteng Kab.Kepulauan Selayar belum dilaksanakan	Sampling dan Pengujian tahap 2 di Pasar Sentral Benteng Kab.Kepulauan Selayar telah selesai dilaksanakan
2	Masih	Koordinasi dengan	Bulan Desember	Koordinasi	Desember	Koordinasi dengan	Tahapan kegiatan

	ditemukan kendala terkait dengan komitmen salah satu kepala pasar yang belum optimal sehingga diperlukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif	Petugas Pengelola Pasar lebih ditingkatkan sehingga keberlangsungan program PPABK dapat bekelanjutan	2024 tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Telah terealisasi seluruhnya	dengan Petugas Pengelola Pasar.	2024 (Sudah Selesai)	Petugas Pengelola Pasar.belum maksimal.	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Telah terealisasi seluruhnya

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja. serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



Sasaran 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Kerja BBPOM di Makassar

Meningkatnya pengujian Obat dan Makanan BBPOM di Makassar yang optimal di Provinsi Sulawesi Selatan diukur dengan 2 Indikator sebagai berikut

1 **Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

2 **Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Pada sasaran strategis keenam Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar dengan dua indikator tersebut semua indikator tersebut mencapai target yang diperjanjikan untuk Tahun 2024.

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 99,93 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%
B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 adalah 99,93 % dengan realisasi sebesar 99,93 % Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Tabel 3.35

Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	99,93	99,93	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1.594 sampel terhadap Jumlah target sampel Obat diperiksa selama Tahun 2024 sebesar 1.594 dan Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar sebanyak 2.180 terhadap Jumlah sampel Obat masuk ke Laboratorium selama Tahun 2024 sebesar 2.183 Sampel Obat mencakup (obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik)

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

B = (Jumlah sampel obat yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel obat) x 100%

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen Kesehatan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel Obat mencakup Balai dan Loka. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar terdiri dari komoditi Obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.36

Jumlah sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

Komoditi	diperiksa	diuji
Obat	452	553
Obat Tradisional	355	458
Obat Kuasi	18	29
Suplemen Kesehatan	85	118
Kosmetik	684	1.022
Rokok	-	-
Total	**1.594**	**2.180**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.37. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	85	95,21	112,01	Sangat Baik
Tahun 2021	100	100	100	Baik
Tahun 2022	100	100	100	Baik
Tahun 2023	100	100	100	Baik
Tahun 2024	100	99,93	99,93	Cukup

Terdapat kenaikan Capaian kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 ke tahun 2021 sementara untuk tahun 2021, 2022 dan 2023 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik". Kenaikan realisasi indikator dipengaruhi oleh adanya pengecualian bila kendala dalam pemenuhan timeline pengujian adalah kendala terkait alat, reagen, baku pembanding dan metode. Sedangkan pada tahun 2023 ke tahun 2024 terdapat penurunan capaian kinerja sebesar 0,7 poin dengan kategori Cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

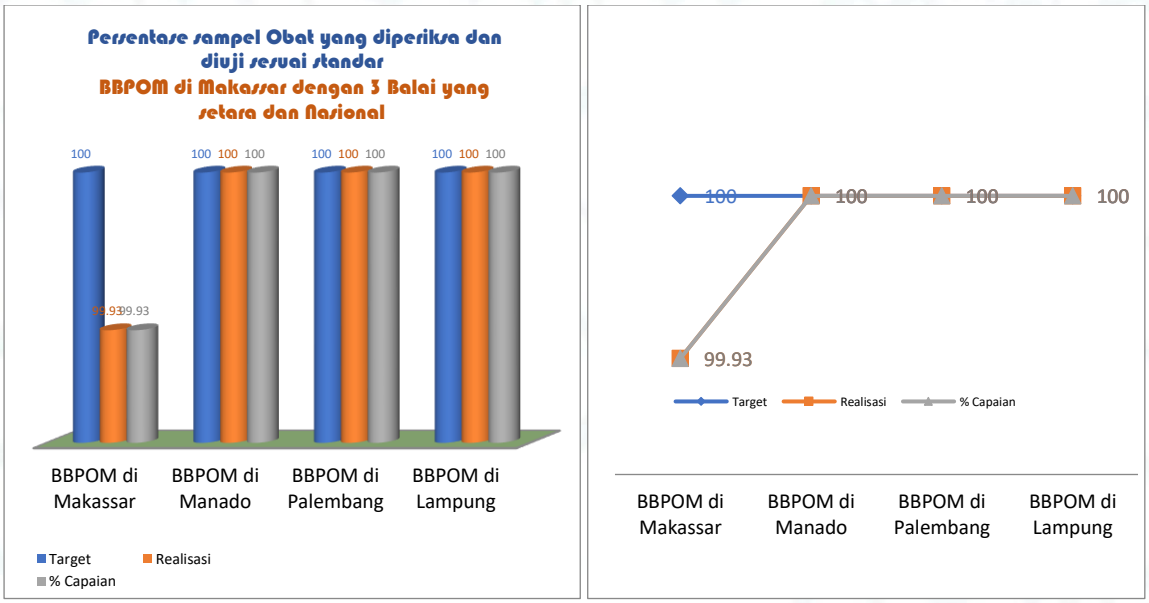
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	100	99.93	99.93	Cukup
BBPOM di Manado	100	100	100	Baik
BBPOM di Palembang	100	100	100	Baik
BBPOM di Lampung	100	100	100	Baik

Target indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar berada pada angka yang sama. Persentase hasil capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung telah mencapai target yaitu 100 % kategori "Baik", sementara BBPOM Makassar dibawah dari target dengan kriteria "Cukup".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung kegagalan kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori Cukup, antara lain :

- Jumlah sampel yang diuji sesuai standar tidak mencapai target tahun 2024, karena terdapat parameter disolusi sampel obat yang tidak dapat diuji karena BBPOM di Makassar belum memiliki Spektrofotometer Raman
- Sampel Komoditi obat yang diuji hanya kelas terapi sesuai penugasan Regionalisasi laboratorium, sehingga pengujian lebih cepat
- Komunikasi antara fungsi inspeksi dan pengujian belum efektif terkait kemampuan uji.

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat meningkat
- Meningkatkan Koordinasi antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Obat
- Bimtek daring Validasi Metode dan Penjaminan Mutu Analisis Kimia. Dan Mikrobiologi, OT, Obat, dan Kosmetik
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Realisasi Sampling yang dilaksanakan lebih besar di awal bertujuan untuk meniadakan penyelesaian pengujian yang carry over ke Tahun berikutnya

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 99,93 dengan capaian 100 % pada tahun 2024. Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 99,93 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,21 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
99.93	2,114,393,400	2,097,762,622	99.21	1.01	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024 Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran pagu anggaran berubah, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Kegiatan BBPOM Makassar yang menunjang kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- BBPOM di Makassar belum memiliki instrumen Spektrofotometer Raman, yang memang tidak dipersyaratkan dalam pemenuhan standar peralatan.
- Komunikasi antara fungsi inspeksi dan pengujian belum efektif terkait kemampuan uji.

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Bimtek Internal Mikrobiologi tertunda karena kendala teknis.	Percepatan pengujian sampel, dan pemanfaatan instrument sehingga tidak ada instrument yang idle	Sampel selesai uji sesuai Timeline	Optimalisasi penggunaan alat dan pengaturan pembagian pekerjaan sesuai parameter uji, disesuaikan antara sampel Rutin, regional dan sampel pihak Ketiga.	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Persentase Capaian Indikator pada bulan Oktober yaitu: 120,57 %	Persentase Capaian Indikator pada bulan November yaitu: 110,16 %
2.	Terdapat instrumen yang belum dimiliki Laboratorium, yaitu Spektrofotometer Raman dan tidak ada metode alternatif	Pedoman Sampling 2025 memberikan alternatif metode pengujian untuk parameter yang instrumennya jarang dimiliki	Penyebut dalam formula pada bulan ke 12 sudah disesuaikan dengan Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji.	Fungsi pengujian memperbaharui kemampuan uji dan fungsi inspeksi melakukan sampling berdasar kemampuan uji Laboratorium	2025	Persentase Capaian Indikator pada bulan November yaitu: 110,16 %	Persentase Capaian Indikator pada bulan Desember yaitu: 99,93 %

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja. serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan

- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya

2. Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Standar adalah : Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP .

Tools

Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar telah berhasil Meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan diwilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan telah dicapainya target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar sebesar 99,37 % , menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Persentase Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan i Diuji sesuai standar} = \frac{A + B}{2}$$

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%
B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel makanan) x 100%

a. Perbandingan Target dan Realisasi. Tahun 2024

Capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 adalah 100 % dengan realisasi sebesar 100 % Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Tabel 3.39

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standard Tahun 2024.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	100	100	Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 857 sampel terhadap Jumlah target sampel Makanan diperiksa selama Tahun 2024 sebesar 857 dan Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar sebanyak 1.277 terhadap Jumlah target sampel Makanan masuk ke Laboratorium selama Tahun 2022 sebesar 1.277 Sampel Makanan mencakup (segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman)

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar = A + B / 2

A = (Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel makanan yang diuji sesuai standar dibagi jumlah target sampel makanan) x 100%

Makanan yang dimaksud mencakup Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, serta Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium

Jumlah sampel Makanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.40

Jumlah sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

Komoditi	diperiksa	Diuji
Makanan	860	1.277
Total	**860**	**1.277**

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.41. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standa BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya.

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	75	92,57	123,43	Memuaskan
Tahun 2021	100	100	100	Baik
Tahun 2022	100	100	100	Baik
Tahun 2023	100	99,37	99,37	Cukup
Tahun 2024	100	100	100	Baik

Terdapat kenaikan Capaian kinerja indikator Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dari tahun 2020 ke tahun 2021 sementara untuk tahun 2021 dan 2022 adalah sama pada angka 100 kategori "Baik", selanjutnya terjadi penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dibandingkan tahun 2022.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampungtahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

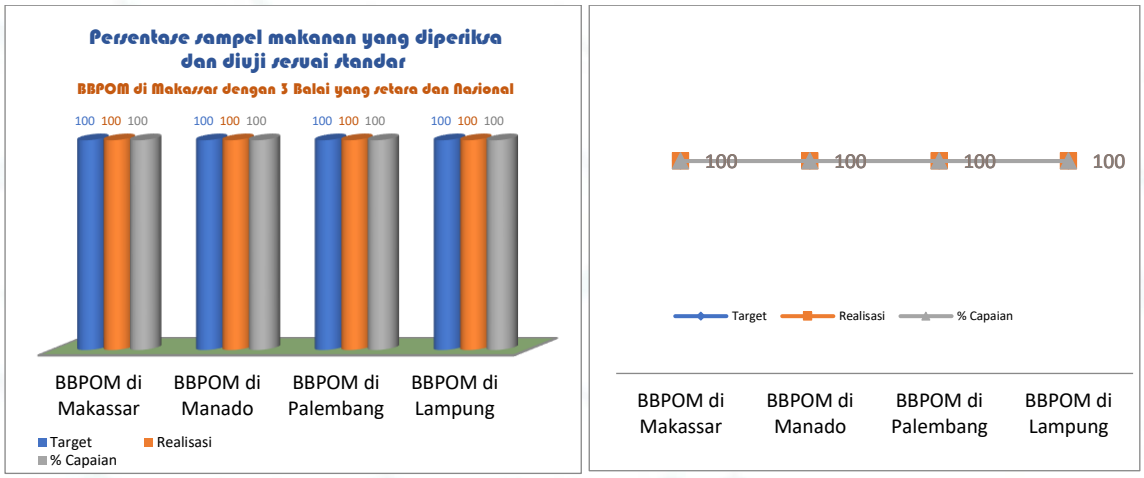
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
BBPOM di Makassar	100	100	100	Baik
BBPOM di Manado	100	100	100	Baik
BBPOM di Palembang	100	100	100	Baik
BBPOM di Lampung	100	100	100	Baik

Target Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung pada angka yang sama. Persentase hasil capaian Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung sesuai target dengan kriteria "Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampungtahun 2024, sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Badan POM Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Indikator
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	-	100	-	-

Pada tahun 2024 tidak di tentukan target IKU BPOM untuk indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai dengan standar.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori Baik, antara lain :

- Monitoring dan evaluasi yang rutin dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar sesuai target tahun.
- Koordinasi yang baik antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan

- Tersedianya peralatan dan instrumen yang mendukung pelaksanaan pengujian
- Kerjasama anggota tim yang solid
- Sampling yang sesuai renlak dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan Pedoman Sampling

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Usaha pemenuhan pengujian sesuai standar dilakukan dengan pemenuhan baku pembanding, reagensia/media, ketersediaan metode analisa, dan pengaturan jadwal pengujian mengingat saat ini masih dalam masa pandemi
- Meningkatkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan pengujian sesuai target yang ditetapkan agar efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian makanan meningkat.
- Realisasi Sampling yang dilaksanakan lebih besar di awal bertujuan untuk meniadakan penyelesaian pengujian yang carry over ke Tahun berikutnya

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 100 dengan capaian 100 % pada tahun 2024. Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,21 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100.00	1,409,595,600	1,398,508,415	99.21	1.01	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi dari pada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukanRevisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah . Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Makassar untuk yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja antara lain :

- Program evaluasi kinerja laboratorium melalui Program Uji Profisiensi, Uji Kolaborasi dan Uji Banding baik dari provider internal oleh P3OMN Badan POM RI maupun dari eksternal telah dilaksanakan oleh Laboratorium BBPOM di Makassar. Uji Profisiensi telah diikuti oleh seluruh laboratorium Bidang Pengujian dengan hasil inlier (memuaskan).

- Memastikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dilakukan dengan Verifikasi Metode Analisa
- Upaya penjaminan peralatan/instrumen yang digunakan dalam uji memberikan hasil pengukuran sesuai telah dilakukan dengan kalibrasi baik internal oleh P3OMN maupun oleh pihak eksternal
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 merupakan pengakuan terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian, pada Tahun 2024 telah dilaksanakan audit pemenuhan ISO 9001:2015 dan reakreditasi ISO 17025:2017
- Peningkatan kompetensi untuk penguji untuk dapat melakukan pengujian dengan metode terbaru
- Meningkatkan Koordinasi antara Bagian Inspeksi dan pengujian dalam memeriksa dan menguji sampel Makanan
- Monitoring dan evaluasi yang lebih intens dilaksanakan sehingga penyelesaian pengujian sampel tidak carry over.
- Pemenuhan kebutuhan reagen dan perawatan peralatan
- Proses transfer alat untuk pengujian unggul untuk penyelesaian pengujian lab unggulan serta pemenuhan standar peralatan dan standar kompetensi Balai regional tuntas bulan Desember 2024
- Input hasil uji di SIPT cukup tertib sehingga pelaporan kinerja sesuai
- Pelaksanaan sampling sesuai perencanaan dan pedoman sampling

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	- Terdapat alat KCKT yang rusak, dan sedang dalam perbaikan (pengadaan suku cadang). - Terdapat alat penunjang Nitrogen evaporator yang mengalami kerusakan, sehingga memperpanjang waktu pengujian	Percepatan pengujian sampel, dan pemanfaatan instrument sehingga tidak ada instrument yang idle	Sampel selesai uji sesuai Timeline	Optimalisasi penggunaan alat dan pengaturan pembagian pekerjaan sesuai parameter uji, disesuaikan antara sampel Rutin, regional dan sampel pihak Ketiga.	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Persentase Capaian Indikator pada bulan Oktober yaitu 123,88% dan November yaitu: 111,11 %	Persentase Capaian Indikator pada bulan Desember yaitu: 100 %

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja. serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indikator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



Sasaran 7

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya

Tools

Dihitung berdasarkan nilai tingkat keberhasilan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perUU dibidang Pengawasan Makanan dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)

b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))

c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)

d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar belum berhasil meningkatkan efektivitas penindakan tindak pidana Makanan dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, hal ini ditunjukkan karena belum tercapainya indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan dengan capaian 81,77 %, menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut :

Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a. **SPDP** sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]
b. **Tahap I** sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
c. **P21** sebesar 30%, dan -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
d. **Tahap 2** sebesar 15% -- nilai D (d / jumlah perkara)

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan OM =

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times \frac{Jumlah\ capaian}{Target\ perkara}$$

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan Tahun 2024 adalah 84,30 % dengan realisasi 81,77 % perkara yang diselesaikanI di wilayah kerja BBPOM di Makassar dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 97 % % dengan kategori "Cukup"

Tabel 3.43
Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Makanan dan Makanan	97,00	81,77	84,30	Cukup

Hasil perhitungan diperoleh dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara pada tabel berikut :

Tabel 3.44
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024

UPT		Tahapan	Desember									
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over						
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	2		1,00		0,15	15,00%	81,77%	100,00%	81,77%
		Tahap I			0	0	0,80	0,44	0,4	34,46%			
		P21			4	4	0,80	0,44	0,3	25,85%			
		Tahap II			4	4	0,40	0,22	0,15	6,46%			
		Total	10	8	10	8							

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.45. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	67	98,04	146,33	Tidak dapat disimpulkan
Tahun 2021	88,00	90,33	102,65	Sangat Baik
Tahun 2022	91,00	97,27	106,89	Sangat Baik
Tahun 2023	94,00	87,33	92,91	Cukup
Tahun 2024	97,00	81,77	84,30	Cukup

Terjadi perubahan target untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 98,04 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 73 menjadi 88.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 102,65 ketegori "Sangat Baik" lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 146,33 ketegori "Tidak dapat disimpulkan". .Terdapat penurunan realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar sebesar 43,68 point, Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar untuk Tahun 2022 berada pada angka 106,89 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 102,65 % ketegori "Sangat Baik". Terdapat peningkatan realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dari tahun 2021 ke Tahun 2022 sebesar 4,24 point, serta dibandingkan tahun 2022 maka tahun 2023 kembali mengalami penurunan realisasi serta persentase capaian hanya 92,91 Kategori "Cukup". Tahun 2024 juga mengalami penurunan capaian kinerja dibandingkan dengan tahun 2023 dengan kategori Cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

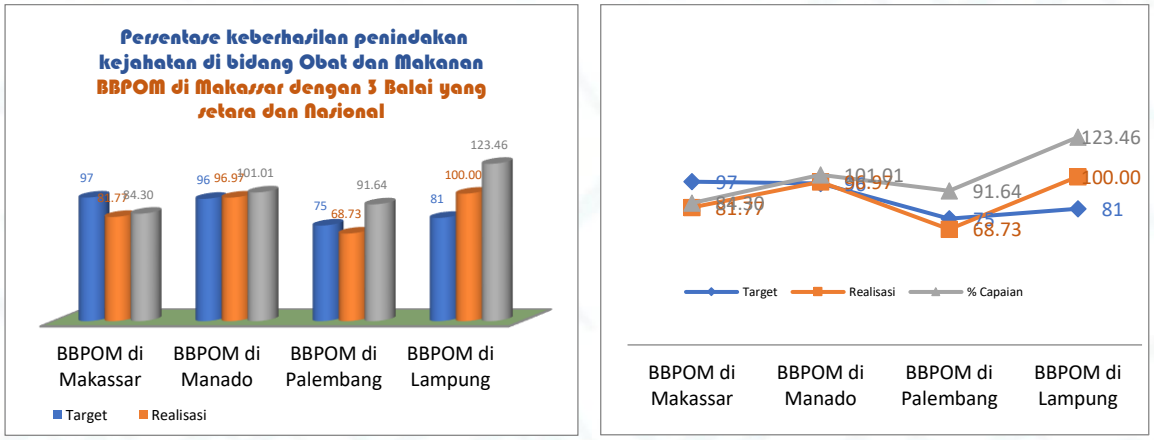
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	97	81,77	84.30	Cukup
BBPOM di Manado	96	96.97	101.01	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	75	68.73	91.64	Cukup
BBPOM di Lampung	81	100	123.46	Tidak Dapat disimpulkan

Target indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Makassar, lebih tinggi dibandingkan. BBPOM Lampung, BBPOM Manado dan BBPOM Palembang. Hasil capaian Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM Lampung, yaitu 100, lebih tinggi dibandingkan BBPOM Makassar, BBPOM Manado dan BBPOM Palembang.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024, sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Capaian indikator kinerja persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada tahun 2024 belum mencapai target, hal yang mempengaruhi pencapaian target tersebut adalah :

- Penyidik PPNS Kelompok Substansi Penindakan di Balai Besar POM di Makassar melaksanakan koordinasi dengan Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar, mulai per Januari 2024 terdaftar untuk memiliki akun E-Berpadu.
- Sejak Januari 2024 diterapkan aplikasi E-Berpadu milik Mahkamah Agung dimana masing-masing penyidik harus memiliki akun karena permohonan persetujuan penyitaan (e-sita) dan berkas perkara yang telah P21 (e-pelimpahan) harus dikirimkan secara online menggunakan aplikasi E-Berpadu untuk keperluan persidangan. Dilakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Pengadilan Negeri Makassar sehingga per Januari 2024 penyidik BBPOM di Makassar sudah memiliki akun.
- Pengumpulan Bahan Keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui kegiatan intelijen, patroli siber dan onsite. Berdasarkan hasil dari pendalaman informasi tersebut maka pada Tahun 2024 telah dilakukan operasi penindakan sebanyak 10 perkara, dengan progress tahapan sebagai berikut :
    - SPDP sebanyak 2 perkara.
    - P21 sebanyak 4 perkara

- Tahap 2 sebanyak 4 perkara.

- Membuat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri setempat segera setelah dilakukan penyitaan barang bukti oleh penyidik dan melakukan pengajuan penetapan penyitaan melalui e-berpadu.
- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Korwas Polda Sulawesi Selatan.
- Melakukan patroli siber setiap bulan untuk mengidentifikasi akun yang akan direkomendasikan untuk dilakukan take down.
- Melakukan update peta rawan kasus setiap bulan dengan mengambil data dari hasil pendalaman informasi / kegiatan penindakan / pengawasan / informasi masyarakat / media / temuan kasus dari kepolisian.
- Mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi antara lain sosialisasi Patroli Siber secara daring diselenggarakan oleh Direktorat Siber, Diklat Analis Dalam Rangka Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan di Pusdik Intelijen Soreang diselenggarakan oleh Direktorat Cegah Tangkal, Bimtek e-berpadu secara daring, sosialisasi aplikasi dashboard penindakan secara daring diselenggarakan oleh Kedeputian Bidang Penindakan, Bimtek Penanganan Pertama BB Elektronik di BBPOM Makassar yang diselenggarakan oleh Direktorat Siber, Rakor PPNS dari Korwas Polda Sulawesi Selatan, mengikuti Forkom PPNS di Bandung diselenggarakan oleh Direktorat Penyidikan.
- Dalam rangka meningkatkan kerjasama dan penggalangan dengan stake holder dilakukan kegiatan antara lain pemberian keterangan ahli kepada Penyidik Polri, sebagai tindak lanjut permohonan keterangan ahli dari Polri, sebagai Narasumber kegiatan Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan, menghadiri pemusnahan Barang Bukti dan barang rampasan di BNN.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 81,77 dengan capaian 84,30 % pada tahun 2024. Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi (-0,13) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 81,77 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 97,44 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
84.30	1,129,736,000	1,100,840,665	97.44	0.87	-0.13	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Tidak Efisien, karena % capaian anggaran lebih besar daripada % capaian indikator kinerja. Pada tahun 2024 terdapat pergeseran anggaran dalam upaya

pencapain target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Kegiatan yang menunjang pencapaian target indikator adalah kegiatan penindakan dengan target 10 perkara dan realisasi sebanyak 10 perkara, 4 Perkara selesai di Tahap 2, SPDP 2 Perkara dan P21 4 Perkara, serta terdapat 8 Perkara Carry Over dengan posisi 4 berada di P21 dan 4 Perkara di Tahap 2, yang masih memerlukan tindak lanjut. Untuk menunjang keberhasilan telah dilakukan upaya antara lain:

- Pengumpulan bahan keterangan dan pelaksanaan pendalaman informasi yang dilakukan melalui patroli siber maupun secara onsite sehingga dapat ditindaklanjuti dengan operasi intelijen dan operasi penindakan.
- Melakukan pemanggilan, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan tambahan saksi-saksi, pemeriksaan tersangka dalam rangka penyelesaian pemberkasan.
- Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Korwas Polda Sulawesi Selatan dalam rangka penyelesaian pemberkasan terkait upaya yang harus dilakukan dalam rangka perbaikan P19 dan terkait pelaksanaan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (tahap 2), akan dibuka kooprdinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Selatan terkait permohonan data kendaraan bermotor, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar terkait verifikasi data NIK, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK dan Bank Indonesia serta Bank Konvensional lain terkait permintaan izin untuk mendapatkan informasi transaksi keuangan, Provider Indosat dan Provider Telkomsel terkait permintaan data pendaftar.

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1	- Penyidikan terhadap perkara terakhir baru dimulai di akhir tahun sehingga sulit mengejar penyelesaian perkara tersebut hingga Tahap 2. - Batasan waktu pelaksanaan koordinasi dengan CJS di akhir tahun yang	Rekomendasi hasil evaluasi kedepan untuk mencapai Pemenuhan Persentase Keberhasilan Penindakan adalah : - Melanjutkan penyidikan dan pemberkasan hingga perkara selesai sampai	- Melakukan analisis penjejakan digital dan penajaman tren kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah pengawasan BBPOM di Makassar. - Meningkatkan	- Melakukan patroli siber dan profiling secara intensif untuk memproleh data pelaku kejahatan beserta dugaan pelanggaran yang dilakukan. - Melakukan	2025	Dengan adanya kemajuan progres Perkara : Perkara Tahun 2024 adalah sebanyak 8 perkara dengan dengan posisi berada pada: 1. Tahap 1	Dengan adanya kemajuan progres Perkara : Perkara Tahun 2024 adalah sebanyak 10 perkara dengan dengan posisi berada pada: 1. SPDP

	berpengaruh terhadap kemajuan suatu kasus dan perkara yang sedang ditangani.	Tahap 2. - Meningkatkan kegiatan patroli siber, kegiatan intelijen, wasmatlitrik hingga penindakan di awal tahun agar pertengahan hingga akhir tahun bisa fokus pada penyelesaian perkara yang ditangani.. - Melakukan analisis penjejakan digital dan penajaman tren dan meningkatkan pelaksanaan intelijen untuk memperoleh gambaran potensi kejahatan di wilayah kerja BBPOM Makassar. - Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dengan IJCS untuk mendorong kemajuan perkara..	frekuensi dan kualitas pelaksanaan intelijen dan wasmatlitrik di wilayah kerja BBPOM di Makassar.	kegiatan dan operasi intelijen dan dilanjutkan dengan operasi penindakan setelah diperoleh informasi yang akurat. - Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dengan ICJS untuk mempercepat proses penyidikan dan penyelesaian perkara.		sebanyak 4 perkara 2. P21 sebanyak 1 perkara 3. Tahap 2 sebanyak 3 perkara Sedangkan Perkara Carry over sebanyak 8 perkara dengan posisi berada pada: 1. P21 sebanyak 4 perkara 2. Tahap 2 sebanyak 4 perkara sehinga total persentase keberhasilan penindakan bulan November 2024 sebesar 72,22%	sebanyak 2 perkara 2. P21 sebanyak 4 perkara 3. Tahap 2 sebanyak 4 perkara Sedangkan Perkara Carry over sebanyak 8 perkara dengan posisi berada pada: 1. P21 sebanyak 4 perkara 2. Tahap 2 sebanyak 4 perkara sehinga total persentase keberhasilan penindakan bulan Desember 2024 sebesar 81,77%

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator ersentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya





Sasaran 8

Terwujudnya tatakelola pemerintahan BBPOM di Makassar yang optimal

1. Indeks RB BBPOM di Makassar

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 perubahan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tabel rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

Tabel 3.47

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM :

No	Komponen Pengungkit	Bobot (60%)
1	Manajemen Perubahan	8 %
2	Penataan Tatalaksana	7 %
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10 %

4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10 %
5	Penguatan Pengawasan	15 %
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10 %

Tabel 3.48

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

No	Komponen Pengungkit	Bobot (40%)
1	Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50 %
2	Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50 %

A.	**PENGUNGKIT**			**60,00**
	I.	**PEMENUHAN**		**30,00**
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
	II.	**REFORM**		**30,00**
		1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00
		2.	PENATAAN TATALAKSANA	3,50
		3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5,00
		4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	5,00
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7,50
		6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5,00
TOTAL PENGUNGKIT				
B.	**HASIL**			**40,00**
	I.	**BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL**		**22,50**
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00
	II.	**PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA**		**17,50**
		a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50
TOTAL HASIL				

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2024 adalah 98,62 % dengan realisasi sebesar 90,25 % **di bawah dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Cukup" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks RB BBPOM di Makassar	91,51	90,25	98,62	Cukup

hasil evaluasi berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal Inspektorat :

1. Telah melakukan pembangunan ZI sejak tahun 2019 dan berhasil mendapatkan predikat WBK dari Kementerian PANRB pada tahun 2021
2. Pada tahun 2022 telah mendapatkan predikat WBK
3. Pimpinan Unit Kerja terlibat langsung dalam penyusunan dokumen perencanaan penetapan kinerja, dan memantau pencapaian kinerja secara berkala
4. Balai Besar POM di Makassar telah melakukan berbagai upaya dan/atau inovasi yang dilakukan untuk memberikan dampak pada perbaikan pelayanan publik yang prima (Cepat dan mudah), inovasi yang dilakukan antara lain:
   a. MANTAPPOL : Pelayanan dan Pengawasan Obat dan Makanan Menjangkau Kota hingga Pelosok Sulawesi Selatan
   b. Pedang Puang Baso : Pendampingan Pelaku UMKM Pangan, ObatTradisional dan Kosmetik
5. BBPOM di Makassar telah melakukan sharing knowledge dengan BPOM d Kupang pada tanggal 10 Agustus 2023 terkait persiapan evaluasi ZI oleh TPN dan BPOM di Kupang memperoleh predikat WBK di tahun 2023.
6. Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) sebesar 3,64 (syarat 3,6) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,79 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB.
7. Capaian Kinerja Lebih Baik sebesar 3,75 (syarat 3,75) sesuai yang ditetapkan KemenPANRB.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	85	50,45	59,35	Kurang
Tahun 2021	77,80	77,81	100,01	Sangat Baik
Tahun 2022	79,80	89,06	111,60	Sangat Baik
Tahun 2023	81,80	90,51	110,65	Sangat Baik
Tahun 2024	91,51	90,25	98,62	Cukup

Terjadi perubahan target untuk indikator Indeks RB Balai Besar POM di Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai

baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 yaitu 50,45 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 89,00 menjadi 77,80.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks RB Balai Besar POM di Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 100,01 ketegori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 59.35 kategori "Tidak Memenuhi Ekspektasi" .Terdapat peningkatan realisasi Indeks RB untuk tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 111,60 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 100,01 kategori "Sangat Baik", peningkatan ealisasi Indeks RB Balai Besar POM di Makassar sebesar 11,59 point. Serta terdapat peningkatan realisasi Indeks RB Balai Besar POM di Makassar untuk tahun 2023 adalah 90,51 dibandingkan tahun 2022 yaitu 89,06. sebesar 1,45 point; persentase capaian Tahun 2023 berada pada angka 110,60 dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 111,60 kedua tahun ini berada pada kategori "Sangat Baik". Untuk tahun 2024, terjadi penurunan pencapaian kinerja jika dibandingkan dengan tahun 2023,Dimana tahun 2024 realisasi sebesar 90,25 dengan kategori cukp sedangkan tahun 2023 realisasi 90,51 dengan katgori sangat baik.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks RB BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks RB BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

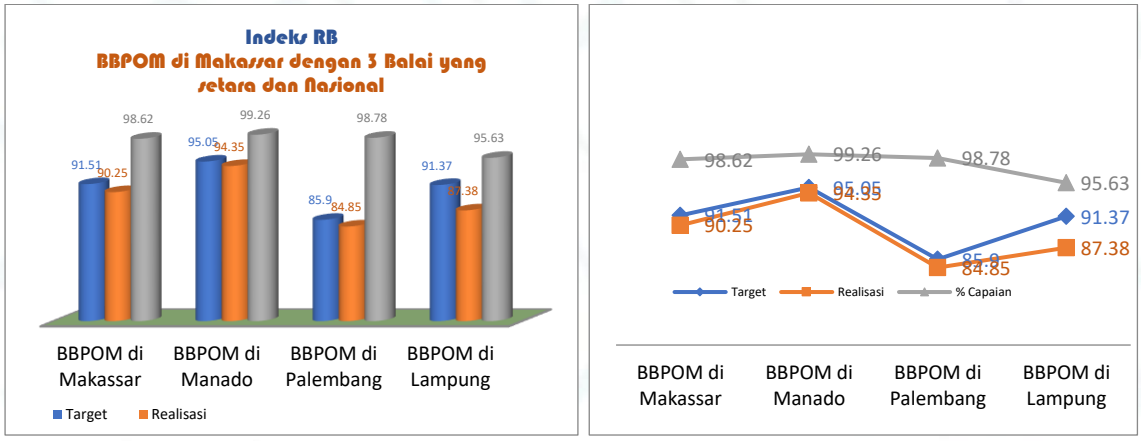
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Indeks RB	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	91.51	90.25	98.62	Cukup
BBPOM di Manado	95.05	94.35	99.26	Cukup
BBPOM di Palembang	85.9	84.85	98.78	Cukup
BBPOM di Lampung	91.37	87.38	95.63	Cukup

Target indikator Indeks RB tertinggi adalah BBPOM di Manado, Realisasi teringgi nilai Indeks RB adalah BBPOM di Manado apabila dibandingkan dengan Balai lain yang sejenis. Namun, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan BBPOM di Makassar tidak ada yang realisasi kinerjanya mencapai target. Semua sama dengan kategori Cukup.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks RB di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024, sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks RB BBPOM di Makassar	91,51	89,50	90,25	100,83	Sangat Baik

Realisasi Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2024 **telah mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai capaian 100,83 dengan kategori "Sangat Baik".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks RB BBPOM di Makassar kategori "Cukup", antara lain:

1. Hasil evaluasi berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal Inspektorat :
   - Kegiatan pembangunan ZI belum seluruhnya telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaa kegiatan belum dilakukan secara berkala serta belum terlihat ada upaya tindaklanjut atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai rencana/target.
   - Kampanye Pembangunan ZI belum dilakukan secara aktif kepada kepada Unit Kerja sekitar, masih terbatas menerima benchmark dari Unit Kerja lain
   - Budaya kerja dan core value ASN BerAKHLAK belum dituangkan ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.

- Monev atas dampak pengembangan kompetensi belum dilaksanakan terhadap peningkatan kinerja Pengelolaan manajemen risiko belum seluruhnya sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan, serta inovasi yang telah dibangun belum sepenuhnya berdasarkan pengelolaan manajemen risiko.
- Inovasi pengendalian gratifikasi (MASIRIKA) belum berjalan dengan efektif karena masih terdapat keterlambatan pelaporan gratifikasi pada aplikasi Sang Integritas Penolakan gratifikasi terjadi pada bulan April 2024 namun baru dilaporkan di aplikasi Sang Integritas pada bulan Mei 2024.
- Pengembangan kompetensi terkait penerapan budaya pelayanan prima kepada petugas/pelaksana layanan belum dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan.
- Implementasi sistem pemberian reward dan punishment bagi pelaksana pelayanan publik dan pemberian kompensasi bagi penerima layanan sub standar belum didukung dengan kertas kerja monev yang memadai

Alternatif Solusi

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks RB BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Menyusun analisis dampak pada inovasi yang baru terimplementasi pada Tahun 2024 sehingga dapat terlihat analisis dampaknya.
2. Melakukan pengawalan terhadap capaian kinerja Tahun 2024 agar lebih baik dari capaian kinerja Tahun sebelumnya..
3. Peningkatan peran agen perubahan dalam percepatan perubahan pola pikir untuk mendorong kinerja yang lebih baik.
4. Melaksanakan pengelolaan media/aktivitas interaktif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integrita secara berkala dan menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut, serta menindaklanjuti Rencana Aksi yang telah ditetapkan.
6. Peningkatan peran agen perubahan dalam percepatan perubahan pola pikir untuk mendorong kinerja yang lebih baik.
7. Melakukan perencanaan pengembangan kompetensi pada setiap pegawai.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi dalam upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja.
9. Menggunakan hasil assessment pegawai sebagai dasar pelaksanaan mutasi pegawai.
10. Menuangkan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi BerAKHLAK ke dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas.
11. Mendorong penciptaan inovasi pada seluruh area perubahan. Inovasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi suatu proses, memenuhi kebutuhan stakeholder, dan dapat direplikasi oleh unit kerja/instansi lain.
12. Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas dalam membangun ZI sehingga mampu menciptakan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks RB BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 90,25 dengan capaian 98,62 % pada tahun 2024. Indikator Indeks RB BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,00). Hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 98,62 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 98,57 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Indeks RB BBPOM di Makassar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
98.62	25,813,559,000	25,445,607,037	98.57	1.00	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks RB BBPOM di Makassar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks RB BBPOM di Makassar kategori Memenuhi Ekspektasi antara lain :

- Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan stakeholder disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM.
- Berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.
- Meningkatkan peran Agen Perubahan dalam percepatan perubahan pola pikir kinerja yang lebih baik melalui implementasi rencana aksi yang berprinsip spesifik, terukur, logis dan dapat dilaksanakan dalam periode waktu yang jelas
- Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) adalah metode untuk melakukan penilaian serta analisis yang menyeluruh terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 sudah memasuki periode keempat yaitu tahun 2020-2024. Agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat berjalan sesuai dengan arah yang telah ditetapkan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaannya. Di samping itu monitoring dan evaluasi juga dimaksudkan untuk memberikan masukan dalam menyusun rencana aksi perbaikan berkelanjutan bagi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun berikutnya.
- Dalam kurun waktu tahun 2024, BBPOM di Makassar sebagai salah satu UPT yang telah meraih predikat WBK juga menjadi salah satu tujuan UPT dari seluruh Indonesia untuk sharing terkait keberhasilan pencapaian predikat WBM, dari kegiatan tersebut juga telah dilakukan sharing apa saja yang sudah dilakukan di UPT tersebut, sehingga bisa menjadi masukan perbaikan untuk BBPOM di Makassar. Seluruh rencana aksi RB yang telah direncanakan di tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik. Kegiatan penunjang yang juga dilaksanakan

sepanjang tahun 2024 antara lain : Pemeliharaan dan Peningkatan QMS, Dukungan Kegiatan Agent Of Change, Pelatihan Lead Auditor, Internalisasi Reformasi Birokrasi Mempertahankan WBK, Capacity Building untuk peninngkatan kompetensi ASN berakhlak, Operasional dukungan kegiatan inovasi Pokja RB dalam rangka pembangun ZI dan WBK, Belamja Pegawai dan semua kegiatan operasional perkantoran.

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Belum terdapat kendala yang berarti.	Informasi berkala dengan tim SDM sehingga target yang ingin dicapai dapat terealisasi dan pemantauan tgl 6 Des 2024	Undangan penyampaian hasil evaluasi zi oleh TPN tgl 4 Des 2024 untuk,menerima penghargaan predikat wbbm tanggal 11 Des 2024	Pertemuan berkala dengan menyiapkan dakung UANG (Undangan Absen Notulen dan Gambar/Foto)	4 Desember 2024 (Sudah Selesai)	Apr-Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nov Des terealisasi	Terpantaunya indeks RB BBPOM di Makassar

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks RB BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks RB BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks RB BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Indeks RB BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.

2. Nilai AKIP BBPOM di Makassar

Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L).

Komponen

1. **Perencanaan Kinerja**
2. **Pengukuran Kinerja**
3. **Pelaporan Kinerja**
4. **Evaluasi Kinerja**
5. **Capaian Kinerja**

Capaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar diperoleh berdasarkan hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM Pusat dengan menggunakan Lembar Kerja Elektronik terhadap dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM Tahun n-1.

Penilaian AKIP terdiri dari 5 komponen penilaian, antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
   a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%)
   b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%).
2. Pengukuran Kinerja (25%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pengukuran (5%)
   b. Kualitas Pengukuran (12,5%)
   c. Implementasi pengukuran (7,5%)
3. Pelaporan Kinerja (15%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan pelaporan (3%)
   b. Kualitas pelaporan (7,5%)
   c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4. Evaluasi Internal Kinerja (15%), meliputi aspek:
   a. Pemenuhan evaluasi (2%);
   b. Kualitas evaluasi (5%);

c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).

5. Pencapaian Kinerja (20%), meliputi aspek:

- Kinerja yang dilaporkan (output) (5%);
- Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%);
- Kinerja Tahun berjalan (benchmark) (5%).
-

Kategori Penilaian SAKIP

No	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat Memuaskan
2.	> 80 - 90	A	Memuaskan
3.	> 70 - 80	BB	Sangat Baik
4.	> 60 - 70	B	Baik
5.	> 50 - 60	CC	Cukup Baik
6.	> 30 - 50	C	Agak Kurang
7.	< 30	D	Kurang

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2024 adalah 100,93 % dengan realisasi sebesar 81,05 % **diatas dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82,45	81,90	99,33	Cukup

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	81	77,27	95,40	Cukup
Tahun 2021	78,3	78,13	99,78	Cukup
Tahun 2022	79,30	79,21	99,89	Cukup
Tahun 2023	80,30	81,05	100,93	Sangat Baik
Tahun 2024	82,45	81,90	99,33	Cukup

Terjadi perubahan target untuk indikator Nilai AKIP BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline

baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 77,27 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 85,00 menjadi 78,30.

Terdapat peningkatan realisasi indikator Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 77,27 menjadi 78,13, capaian mengalami peningkatan 0,86 point, berada pada kategori "Cukup"; tahun 2022 dibanding tahun 2021 dari nilai 78,13 menjadi 79,21, capaian mengalami peningkatan 1,08 point, berada pada kategori "Cutup" ; serta mengalami peningkatan tahun 2023 dibanding tahun 2022 dari nilai 79,21 menjadi 82,34, capaian mengalami peningkatan 1,84 point, berada pada kategori "Sangat Baik" juga mengalamai peningkatan tahun 2024 dibanding tahun 2023 dari nilai 81,05 menjadi 81,90, capaian mengalami peningkatan 0,85 poin, berada pada kategori Cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Nilai AKIP BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

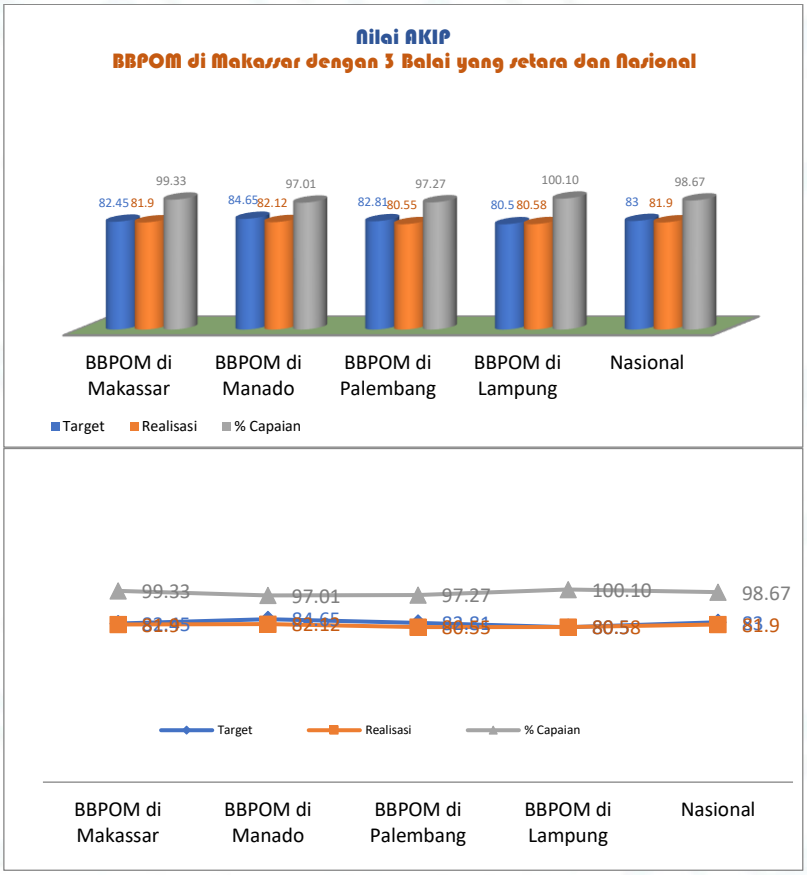
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai AKIP	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	82.45	81.9	99.33	Cukup
BBPOM di Manado	84.65	82.12	97.01	Cukup
BBPOM di Palembang	82.81	80.55	97.27	Cukup
BBPOM di Lampung	80.5	80.58	100.10	Sangat Baik
Nasional	83	81.9	98.67	Cukup

Target indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung pada angka yang berbeda,. Hasil capaian Nilai AKIP BBPOM Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang belum mencapai target dengan kategori Cukup. Hanya BBPOM di Lampung yang telah mencapai target dengan nilai realisasi 80,58 kategori "Sangat Baik",

Berikut ini perbandingan capaian realisasi indikator Nilai AKIP di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Nialia AKIP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024

d. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Nilai AKIP BBPOM di Makassar	82,45	83	81,90	98,67	Cukup

Realisasi Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2024 BBPOM di Makassar **belum mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 96,59 dengan kategori "Cukup".

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks Nilai AKIP BBPOM di Makassar kategori "Cukup" antara lain:

hasil evaluasi berdasarkan penilaian dari Tim Penilai Internal Inspektorat :

1. Seluruh Komponen terdiri atas perencanaan Kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja belum mendapat nilai maksimal sehingga perlu dilakukan perbaikan berkelanjutan. Rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil audit sakip tahun 2024 antara lain : menciptakan inovasi terkait pengukuran kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi; Pada laporan kinerja menambahkan penjelasan mengenai perubahan anggaran dan dikaitkan dengan capaian kinerja serta menciptakan inovasi terkait pelaporan kinerja; menambahkan penjelasan progres rencana aksi periode sebelumnyapada Laporan Kinerja Interim; menambahkan penjelasan terkait upaya efisiensi tingkat sasaran dan kegiatan pada Laporan Kinerja Interim; menciptakan inovasi terkait evaluasi akuntabilitas kinerja internal; memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

   BPOM telah memiliki sistem, pedoman/panduan dalam rangka pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui e-performace (e-planning dan SIMETRIS), aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN, dan implementasi pedoman penyelenggaraan SAKIP di lingkungan BPOM. Namun demikian terdapat hal yang menyebabkan hasil penilaian tidak optimal yaitu belum seluruh Satuan Kerja mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten, pengisian data oleh Satuan Kerja pada aplikasi yang dibangun di BPOM tidak lengkap, tidak berkala, maupun isian data tidak selaras antar laporan..
2. Pemanfaatan aplikasi SIMETRIS (e-planning dan e-performance) dalam menginput data kinerja balai setiap bulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Makassar serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja;
3. Semua rekomendasi APIP terhadap pelaksanaan SAKIP tahun 2023 telah ditindaklanjuti. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan telah memiliki inovasi Dasikuka (Pengendalian Sistem Keuangan atas Kinerja Akuntabilitas) dengan mengakses Manajemen File BBPOM di Makassar (berupa Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran, Standar Operasional Prosedur, capaian kinerja dan monitoring evaluasi kinerja) yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment dengan judul program/inovasi "K-4 (Kinerjaku, Kinerjamu, Kinerja Kita)".
4. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Telah diterapkan mekanisme reward dan punishment kepada individu di BBPOM di Makassar, berupa penurunan ataupun kenaikan nilai SKP yang kemudian berpengaruh kepada besaran tunjangan kinerja yang diterima.

5. Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dikategorikan A (Memuaskan) yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tiap komponen disajikan pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,20	20,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	9,72
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,20	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	15,41	16,66
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	81,05	81,9
Predikat			**A**	**A**

*Rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP.

Alternatif Solusi

Kedepan agar hasil pengukuran Indeks RB BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang baru memiliki standar yang lebih tinggi dibandingkan LKE yang sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai AA maupun A pada setiap sub-komponen, diantaranya harus terdapat inovasi per komponen maupun adanya penghargaan/pengakuan/apresiasi dari Unit Kerja maupun instansi lain.
2. Komponen capaian kinerja mempunyai bobot 20% dari total komponen dan berpengaruh pada penilaian komponen yang lain, sehingga kenaikan dan penurunan nilai capaian kinerja akan berpengaruh besar pada nilai total hasil evaluasi SAKIP

f. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Nilai AKIP diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 81,90 % dengan capaian 99,33 % pada tahun 2024. Indikator Nilai AKIP kategori tidak efisen dengan tingkat efisiensi (-0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 99,33 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,83 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
99.33	246,118,000	245,710,777	99.83	0.99	-0.01	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Tidak Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih kecil daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar, namun dibutuhkan peningkatan kinerja agar kategori bisa efisien.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

- Laporan Kinerja interim yang disusun setiap triwulan telah menyajikan informasi kinerja dan telah dilakukan monitoring pencapaiannya per triwulan;
- Balai Besar POM di Makassar melakukan evaluasi internal setiap triwulan yang membahas realisasi capaian kinerja dan anggaran. Hasil evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.
- Komitmen pimpinan dan staf Balai Besar POM di Makassar. Pimpinan beserta staf tetap berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan dari berbagai aspek.
- Telah dilakukan upaya penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi simakin yaitu cascading kinerja dari eselon 2 dalam hal ini Kepala Balai ke ketua tim hingga ke anggota tim kerja. Pada SKP tersebut sudah terdapat indikator individu yang selaras dengan indikator kinerja ketua tim. Hal ini sudah sesuai dengan rekomendasi APIP di tahun 2021 untuk menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai level individu.

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1	Kurang konsistennya pengisian RTL oleh tiap fungsi.	'-BBPOM Makassar telah mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten namun pengisian data pada aplikasi yang dibangun di BPOM masih belum sepenuhnya dilengkapi dan masih terdapat isian data tidak selaras antar laporan. - Berupaya untuk	'- Telah dilaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja triwulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan dan RATL dan	'- RTL dibuat Bulanan serta Pemenuhan pengisian LKE Tahun 2025 dalam tautan Dasikuka - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal dan melakukan monitoring secara memadai pada periode selanjutnya;	2025	"- Nilai SAKIP BBPOM Makassar Tahun 2023 81,05	"- Nilai SAKIP BBPOM Makassar Tahun 2024 8190

		meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.	monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya - Melakukan pengawalan dengan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama disertai tindak lanjut rekomendasi untuk seluruh IKU				

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Nilai AKIP BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Nilai AKIP BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Nilai AKIP BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya

3. Nilai Pengelolaan Kearsipan BBPOM di Makassar

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai pengelolaan kearsipan	89.47	94.35	105.45	Sangat Baik

Berdasarkan surat Sekretaris Utama nomor B-KA.03.2.07.24.563 tanggal 19 Juli 2024 tentang Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024, BBPOM di Makassar mendapatkan nilai 94,35 dengan kategori AA (sangat memuaskan). Dengan demikian, capaian nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar pada tahun 2024 adalah 105,45% dengan kategori sangat baik.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai pengelolaan kearsipan Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Nilai pengelolaan kearsipan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2023	-	-	-	-
Tahun 2024	60	64.06	106.77	Sangat Baik

Realisasi indikator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar tahun 2024 adalah 64,06 dari target 60 sehingga capaian indikator adalah 106,77% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan indikator direktif

penugasan yang baru ada di Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

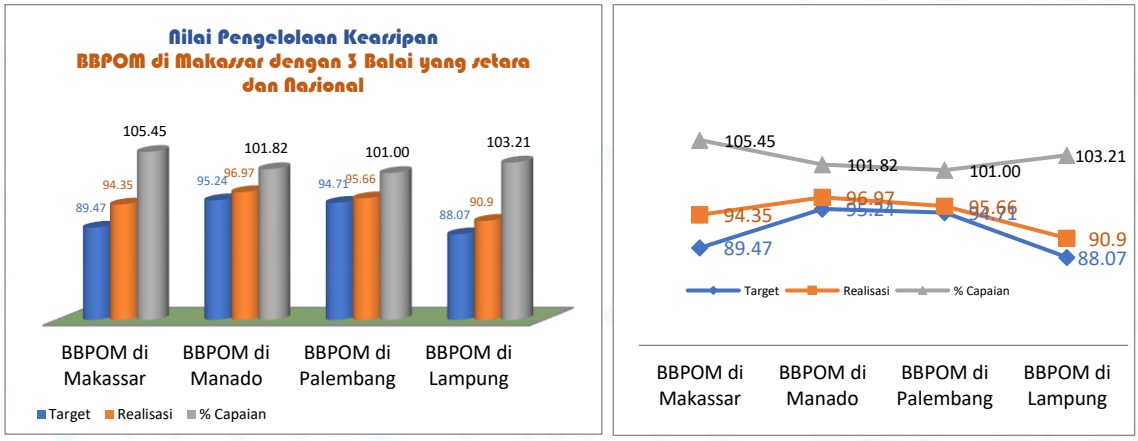
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai pengelolaan kearsipan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	89.47	94.35	105.45	Sangat Baik
BBPOM di Manado	95.24	96.97	101.82	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	94.71	95.66	101.00	Sangat Baik
BBPOM di Lampung	88.07	90.9	103.21	Sangat Baik

Target tertinggi indikator Nilai pengelolaan kearsipan, yaitu pada BBPOM Manado pada angka 95,24,Realisasi tertinggi adalah BBPOM di Manado yaitu 96,97. Sedangkan Ketiga UPT Lainnya yang sejenis, capaian kinerjanya sudah melampaui dari target yang telah ditetapkan dengan kategori Sangat Baik.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi indikator Nilai pengelolaan kearsipan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Faktor penyebab tercapainya indicatori Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

- Perapihan dan proses pembenahan berkelanjutan untuk arsip dinamis sesuai standar pengelolaan arsip sesuai hasil audit.
- Adanya perencanaan, pembagian tugas yang baik, kerja sama yang baik dari seluruh fungsi, unit pengolah, dan unit kearsipan

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 94.35 dengan capaian 105,45 % pada tahun 2024. Indikator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,05). Hal ini disebabkan capaian realisasi kinerja indikator ini 105,45 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 100 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
105.45	20,789,000	20,788,393	100.00	1.05	0.05	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- Pertemuan tim UK dan UP untuk menyamakan persepsi standar pengelolaan arsip di UP dan UK Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri (PDN) dan/atau produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40% Penginputan PSP pada aplikasi SIMAN sesuai ketentuan.
- Melakukan upaya perbaikan dan pencegahan terhadap temuan audit internal kearsipan.
- Membuat laporan pengelolaan arsip aktif, inaktif, vital, dan pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi sebelum	Kondisi setelah
			Selesai *	Belum **		

				Rencana Aksi	Timeline	rencana aksi	rencana aksi
1.	Belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana dalam pengelolaan kearsipan	Pertemuan tim UK dan UP untuk menyamakan persepsi standar pengelolaan arsip di UP dan UK	Beberapa saran auditor internal di ruang Record center, ruang arsip aktif, update dokumen arsip aktif yang perlu disiapkan secara berkelanjutan	Update pembenahan arsip dan persiapan peralatan record center, CENTRAL ARSIP	TW 4 Tahun 2024 (Sudah Selesai)	Sebelum pengawasan arsip kondisi arsip UK dan UP : Arsip belum tertata lebih tertib pemberkasan Arsip Aktif, belum tertata Arsip Inaktif	Arsip Inaktif terpantau mulai ditata

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market
- Capaian kinerja terkait Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Nilai pengelolaan kearsipan BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya





1. Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan

Acuan

Peratuan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatusr Sipil Negara

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Form Survei dian survei disiapkan oleh Biro Umum dan SDM

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);

b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);

c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan

d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :

a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;

b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;

c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;

d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan

e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah. Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :
a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut :
a. Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu- seratus) berkategori Sangat Tinggi;
b. Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-sembilan puluh) berkategori Tinggi;
c. Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu- delapan puluh) berkategori Sedang;
d. Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
e. Nilai 0 – 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian persentase Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2024 adalah 100,46 % dengan realisasi sebesar 87,25% **diatas dari target** yang dietentukan dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	86,85	87,25	100,46	Sangat Baik

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	75	73,49	97,99	Cukup
Tahun 2021	75	85,44	113,92	Sangat Baik
Tahun 2022	76	81,14	106,76	Sangat Baik
Tahun 2023	77	89,63	116,42	Sangat Baik
Tahun 2024	86,85	87,25	100,46	Sangat Baik

Terjadi perubahan target untuk indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar sesuai dengan hasil reviu Renstra dilakukan penyesuaian terhadap target kinerja BBPOM di Makassar dengan menggunakan realisasi tahun 2020 sebagai baseline baru dalam penetapan/penyesuaian target kinerja tahun 2021-2024, dimana realisasi tahun 2020 sebesar 73,49 dijadikan sebagai baseline baru dengan perubahan target tahun 2021 dari 77,00 menjadi 75.

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar untuk tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Tahun 2021 berada pada angka 113,92 ketegori " Sangat Baik " lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 97,99 kategori "Cukup". Terdapat peningkatan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sebesar 15,93 point

tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 106,76 lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 113,92 kategori "Sangat Baik", Terdapat penurunan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sebesar 7,16 point.

tahun 2023 dibandingkan tahun 2022, tahun 2023 berada pada angka 116,42 lebih tinggi apabila dibandingkan tahun 2022 dengan nilai 106,76 kategori "Sangat Baik .Terdapat peningkatan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sebesar 8,49 point.

tahun 2024 dibandingkan tahun 2023, tahun 2024 berada pada angka 100,46 lebih rendah apabila dibandingkantahun 2023 dengan nilai 116,42 kategori "Sangat Baik .Terdapat penurunan realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sebesar 15,96 point.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian kinerja indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini

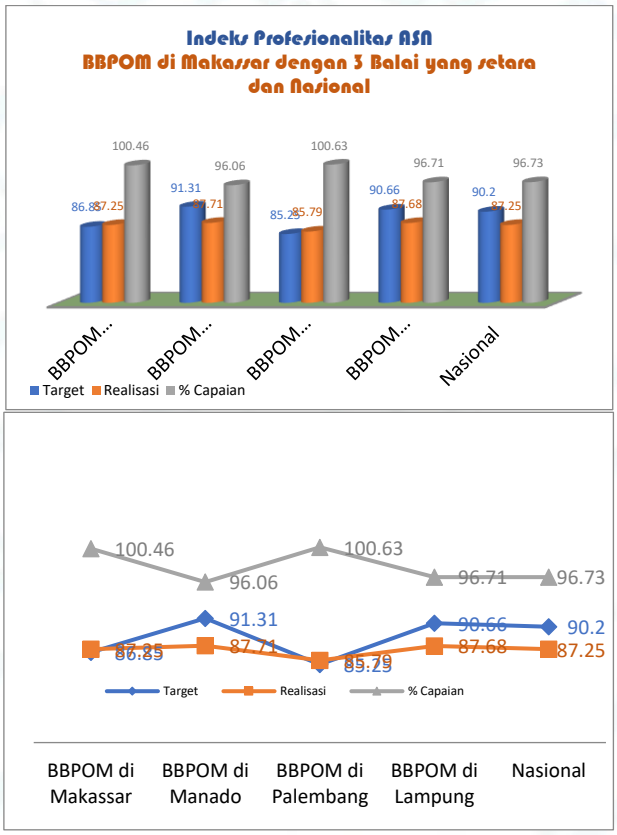
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	86.85	87.25	100.46	Sangat Baik
BBPOM di Manado	91.31	87.71	96.06	Cukup
BBPOM di Palembang	85.25	85.79	100.63	Sangat Baik
BBPOM di Lampung	90.66	87.68	96.71	Cukup
Nasional	90.2	87.25	96.73	Cukup

Target indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM Makassar yaitu 86,85 dan target dan realisasi tertinggi adalah BBPOM di Manado dengan nilai target 91,31 dan nilai realisasi 87, sementara persentase hasil capaian Indeks Profesionalitas ASN tertinggi kedua adalah BBPOM di Makassar yaitu 100,46 kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks Profesionalitas ASN di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.3
Capaian Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar dibandingkan dengan BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar	86,85	90,2	89,63	96,73	Cukup

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar Tahun 2024 BBPOM di Makassar **belum mencapai** target Badan POM secara nasional, dengan nilai 96,73 dengan kategori "Cukup".

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Kendala /Keberhasilan pencapaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

1. Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Biro SDM Nomor KP.17.24.11.24.305 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Usulan Penyesuaian/Perubahan Target IP ASN Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :
    a. Pada Nota Dinas di atas, disampaikan bahwa terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Terhadap perubahan tersebut Biro SDM mengusulkan penyesuaian target IP ASN BPOM Tahun 2024 yang semula 90,2 menjadi 87,8.

Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.
Berdasarkan surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 tanggal 22 Mei 2023 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN untuk 4 Dimensi menjadi sebagai berikut:

a) Dimensi Kualifikasi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan bobot kualifikasi pendidikan disesuaikan dengan jenis jabatan yang diduduki, dengan bobot sebesar 25%;
b) Dimensi Kinerja, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kinerja berdasarkan predikat kinerja dengan bobot sebesar 30%;
c) Dimensi Kompetensi, perhitungan bobot penilaian pada dimensi kompetensi dinilai secara proporsional yang memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dengan bobot sebesar 40%; dan
d) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, dengan bobot sebesar 5%.

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar di peroleh dari aplikasi IP ASN BPOM yang masing-masing dimensi mengambil data dari :

a) Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;
   Hanya ada 1 orang pegawai yang seharusnya sudah diberhentikan tapi masih terdata karena menunggu SK Pemberhentian. Selain itu masih ada 5 orang yang belum terdata (1 akan pensiun januari 2024, 2 PFM, 2 JFT)

b) Dimensi Kompetensi dikonversi data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja dengan data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
c) Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN;
d) Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.

Pada tahun 2024 telah diperoleh nilai Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar sesuai aplikasi IP ASN BPOM sebesar 87,25. Capaian Indeks Profesionalitas ASN BB:POM di Makassar belum berhasil mencapai target yaitu 100,46 dengan kategori "Cukup"

Rencana aksi yang telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target indikator antara lain : pelaporan disiplin pegawai yang tidak mengikuti upacara, penerapan inovasi PINSIL (pemberian pin kepada 3 orang pegawai dengan jumlah keterlambatan paling banyak) dan penilaian SKP setiap triwulan. Dengan adanya target peningkatan kompetensi teknis sebanyak 20 JP, setiap bulan di buat rekap capaian JP pengembangan kompetensi untuk mengingatkan masing-masing pegawai yang capaian JP kompetensi teknisnya belum tercapai, agar berusaha meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pengembangan kompetensi teknis (pelatihan teknis, manajerial, bimbingan teknis dan workshop) baik yang diselenggarakan oleh PPSDM melalui ideas atau pengembangan kompetensi mandiri, sehingga pada akhir tahun semua pegawai dapat mencapai target peningkatan kompetensi.
Berdasarkan hasil evaluasi pengukuran IP ASN 2024 masih terdapat pegawai dengan nilai dibawah rata-rata, hal ini dikarenakan masih pejabat fungsional yang belum mengikuti diklat fungsional. Upaya yang telah dilakukan adalah bersurat ke PPSDM agar pegawai tersebut didaftarkan/diikutkan diklat kepemimpinan untuk pejabat struktural dan diklat struktural untuk pejabat fungsional.

Alternatif Solusi

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar adalah :
Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan IP ASN, adalah komitmen Bagian Tata Usaha terutama yang terkait baik dari tim IT maupun anpeg untuk selalu mengingatkan, membantu, mendampingi dan mengarahkan pegawai melakukan tahapan-tahapan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyiapkan dokumen secara tepat waktu, dan mengikuti kegiatan pelatihan, bimtek, workshop, sosialisasi, coaching mentoring dsb yang telah direncanakan dan yang belum, baik secara mandiri maupun secara kolektif, terutama pemenuhan unsur kompetensi 20 JP minimal per individu, diklat teknis, diklat fungsional, diklat kepemimpinan dan kehadiraan tepat waktu sesuai jam masuk dan jam pulang yang ditetapkan.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar

87,25 dengan capaian 100,46 % pada tahun 2024. Indikator Indeks Profesionalitas ASN kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,46 % sedangkan realisasi anggarannya 99,61 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100.46	563,112,000	560,934,244	99.61	1.01	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran telah Efisien karena capaian indikator lebih tinggi daripada % realisasi anggaran 2024. Pada tahun 2024 telah dilakukan revisi anggaran, dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar kategori Memenuhi Ekspektasi antara lain :

- Komitmen pimpinan dalam mengingatkan pegawai baik secara langsung atau saat rapat, atau melalui kegiatan apel pagi, ataupun di media sosial, sehingga membuat pegawai cukup patuh dalam melaksaanakan tugasnya.
- pegawai secara mandiri melakukan pengembangan kompetensi baik melalui SIASN / IDEAS/ Undangan Bimtek yang terjadwal dan Undangan workshop/ sosialisasi / bimtek, pelatihan dari instansi terkait tugas dan jabatan fungsional pegawai.
- Dengan adanya inovasi dari pokja SDM terkait rewards dan punishment, meskipun belum berjaalan efektif, tetapi cukup memberikan dampak kepada pegawai, untuk lebih disiplin dalam kehadiran.
- Petunjuk yang berkelanjutan (Continous improvement) dari bagian tata usaha, sehingga pegawai memahami, apa yang harus dikerjakan dan disiapkan.

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Sulit menyatukan persepsi 103 pegawai	Pelaksanaan MPH untuk seluruh pegawai	Pelaksanaan MPH BBPOM di Makassar	Pelaksanaan MPH BBPOM di Makassar	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Penyelesaian skp siklus pendek tw4	Penilaian skp siklus pendek terpantau Baik

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks Profesionalitas ASN telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks Profesionalitas ASN dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas reviuw Rencana Strategis tahun 2020-2024, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Telah dilakukan revisi rencana pelaksanaan kegiatan dan revisi anggaran tahun 2024 untuk meningkatkan efektifitas dan peningkatan kinerja serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Penacapain kinerja untuk indicator Indeks Profesionalitas ASN serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya





Sasaran 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan





1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diperoleh dari nilai asesment Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional.

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Pengembanagan Pengujian Obat dan Makanan Nasional

Kategori yang digunakan adalah:

2,26 – 3 : Optimal

1,51 – 2,25 : Cukup

0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi Standar *Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Standar Ruang Lingkup > 65,
2. Standar Kompetensi personel laboratorium > 75,
3. Standar Alat Laboratorium > 70.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024 adalah 105,29 % dengan realisasi sebesar 89,96 **di atas dari target** yang dietentukan sebesar 85,44 dengan kategori **"Sangat Baik" .**

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85.44	89.96	105.29	Sangat Baik

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori

Pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP				
Tahun 2020	78,80	70,60	89,59	Cukup
Tahun 2021	76,00	75,43	99,29	Cukup
Tahun 2022	81,00	78,80	97,28	Cukup
Tahun 2023	86,00	84,40	98,14	Cukup
Tahun 2024	85.44	89.96	105.29	Sangat Baik

Terdapat peningkatan realisasi indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2021 dibanding tahun 2020 dari nilai 70,60 menjadi 75,43, capaian mengalami peningkatan 4,82 point, berada pada kategori "Cukup". Serta persentase capaian Tahun 2022 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2021 turun dari 99,25 menjadi 97,28 meskipun realisasi mengalami trand meningkat dari tahun 2020 hingga tahun 2022 namun karena target juga meningkat sehingga persentase capaiannya menurun dari Tahun 2021 ke 2022.

Realisasi dan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi tahun 2023 dengan nilai 84,40 dan capaian 98,14 kategori "Cukup" lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan nilai realisasi 78,80 dan capaian 97,28 kategori "Cukup".

Realisasi dan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023. Realisasi tahun 2024 dengan nilai 89,96 dan capaian 105,29 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2023 dengan nilai realisasi 84,40 dan capaian 98,14 kategori "Cukup".

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target, realisasi, capaian kinerja indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di LampungTahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

Tabel 3.7

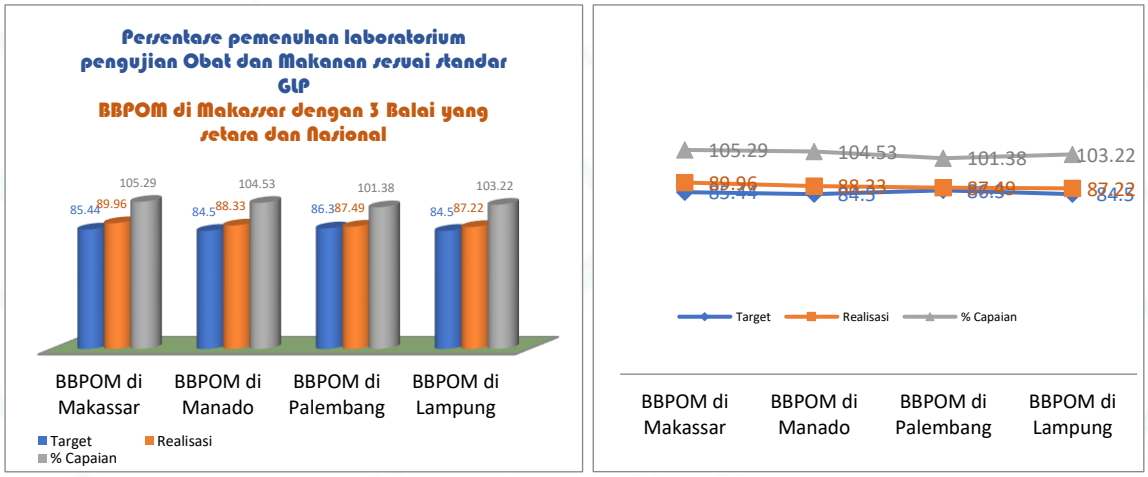
Capaian Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampungtahun 2024

Indikator Kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	85.44	89.96	105.29	Sangat Baik
BBPOM di Manado	84.5	88.33	104.53	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	86.3	87.49	101.38	Sangat Baik

BBPOM di Lampung	84.5	87.22	103.22	Sangat Baik

Target indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM Yogyakarta berada pada angka yang berbeda. Hasil realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP seluruhnya mencapai target dengan kategori "Sangat Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di LampungTahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan Target BPOM

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024 dengan target Nasional Badan POM

Indikator Kinerja	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	84,50	-	87.22	-	-

Pada tahun 2024 tidak di tentukan target IKU BPOM untuk indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP kategori "Cukup" antara lain:

Ruang Lingkup :

Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, nilai capaian persentase pemenuhan SKL adalah 84,4%. Dengan komponen :

1. Persentase Pemenuhan Ruang Lingkup : 91,73%;
2. Persentase Pemenuhan Standar Kompetensi 90,27%;
3. Persentase Pemenuhan Standar Peralatan 87,89%.

Terdapat beberapa kendala terkait pemenuhan target SKL antara lain :

1. Keterbatasan jenis baku pembanding yang tersedia di Infalabs, sementara anggaran untuk pengadaan baku pembanding eksternal sangat terbatas;
2. Keterbatasan sampel obat yang beredar di wilayah regional Makassar yang sesuai dengan penugasan pengujian kelas terapi BBPOM Makassar pada SRL
3. Peningkatan ruang lingkup yang menggunakan alat GCMS, IC, turbidimeter, KCKT ELSD belum dapat dilaksanakan karena karena alat belum tersedia
4. Media dan reagen untuk parameter pada penguian antibiotik Vancomycin dan suplemen kesehatan probiotik belum tersedia, dan baru akan diadakan tahun 2024
5. Pengadaan suku cadang yang kurang tiap tahunnya disebabkan keterbatasan anggaran
6. Jumlah SDM yang tidak sebanding dengan jumlah parameter uji yang harus diverifikasi untuk dimasukkan ke dalam capaian SRL
7. Kompetensi belum bisa dikembangkan karena belum memiliki alat yang ada pada syarat kompetensi keterampilan (GCMS, Spektrofluorometer, DUSA)
8. Terdapat personel pindahan dari fungsi lain (ahli muda) yang masih butuh pendampingan terkait parameter uji dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi, sehingga belum dapat diberikan penugasan mengerjakan sampel sendiri
9. Mainboard Spektrofluorometer yang dikirimkan dari BBPOM Jayapura mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan.
10. Anggaran untuk pengadaan DUSA tahun 2024 hanya cukup untuk yang manual, hasil uji presisi yang dihasilkan tidak memenuhi syarat. Diharapkan tambahan anggaran untuk pengadaan DUSA otomatis
11. Tidak terdapat pemenuhan alat penunjang tahun 2024 di laboratorium mikrobiologi karena anggaran yang tersedia dialokasikan untuk pengadaan isolator

Alternatif Solusi

Dari kendala yang diuraikan tersebut diatas, langkah tindak lanjut yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan ruang lingkup menggunakan alat GCMS akan dilakukan setelah pengadaan alat GCMS
2. Melakukan koordinasi dengan bagian Inspeksi untuk memperoleh sampel obat yang sesuai dengan penugasan pengujian kelas terapi BBPOM Makassar pada SRL

3. Melakukan penambahan ruang lingkup terhadap parameter uji yang ada pada SRL jika baku pembanding, reagen, dan media sudah tersedia.
4. Penambahan SDM Magang dari Balai POM Palopo tahun 2024 diharapkan dapat membantu meningkatkan pemenuhan RL
5. Berkomunikasi dengan PPPOMN atau BBPOM/BPOM yang telah melakukan pengembangan ruang lingkup tertentu untuk sharing baku pembanding/pereaksi apabila anggaran pengadaan terbatas atau membuat permintaan pengembangan baku pembanding ke Laboratorium Baku Pembanding PPPOMN apabila memungkinkan untuk dikembangkan
6. Melakukan pelatihan (bimbingan teknis) untuk personel laboratorium sesuai dengan kebutuhan
7. Menyusun rencana percepatan peningkatan kompetensi untuk personel pindahan dari fungsi/lab lain (supervisi atau magang)
8. Peralatan (utama dan penunjang) akan dilengkapi sesuai dengan kebutuhan Balai dan disesuaikan dengan anggaran yang diperoleh

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 89,96 % dengan capaian 105,29 % pada tahun 2024. Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,05) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 105,29% sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,93 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
105.29	3,310,236,000	3,308,080,000	99.93	1.05	0.05	Efisien

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Belum Efisien karena % realisasi anggaran lebih besar dari capaian indikator. Terdapat revisi anggaran pada tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 sudah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Beberapa Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP kategori Cukup antara lain :

- Telah dilakukan kegiatan Verifikasi Metode Analisa di laboratorium, sehingga dapat menunjang peningkatan nilai pemenuhan ruang lingkup
- Telah dilaksanakan pelatihan dan magang penguji sehingga dapat menunjang peningkatan nilai kompetensi
- Proses transfer alat dari balai anggota region makassar telah tuntas dilaksanakan sehingga meningkatkan nilai pemenuhan peralatan

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Sebelum Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	1. Anggaran pengadaan peralatan masih terblokir (DUSA) 2. Pengembangan kompetensi dan SRL analisis menggunakan GCMS tahun 2024 terkendala waktu pelaksanaan 3. Pelatihan internal tertunda pelaksanaannya terkendala ketersediaan GC MS 4. Pemenuhan kompetensi keterampilan terkendala pada metode yang tidak digunakan lagi dalam pengujian sehingga sulit terpenuhi	1. Anggaran pengadaan peralatan masih terblokir (DUSA) 2. Pengembangan kompetensi dan SRL analisis menggunakan GCMS tahun 2024 terkendala waktu pelaksanaan 3. Pelatihan internal tertunda pelaksanaannya terkendala ketersediaan GC MS 4. Pemenuhan kompetensi keterampilan terkendala pada metode yang tidak digunakan lagi dalam pengujian sehingga sulit terpenuhi	1. Identifikasi pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan peralatan 3. Pengembangan kompetensi melalui magang (8 orang), pelatihan terpadu (10 orang), pelatihan internal (lab pangan, obat, OT, Kosmetik dan Mikrobiologi) 4. Koordinasi dengan tim inspeksi untuk penyiapan sampel 5. Pengadaan GC MS hingga	1. Pelaksanaan pengadaan DUSA untuk uji sediaan inhaler (anggaran terblokir) 2. Penyiapan sampel, reagensia dan baku pembanding untuk pemenuhan SRL dengan koordinasi lintas fungsi telah dilaksanakan namun belum maksimal akibat keterbatasan anggaran dan ketersediaan barang	2025	Nilai pemenuhan 84,44 %	Nilai pemenuhan 89,96%

			tahap uji fungsi				

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya.



Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan

Acuan

Perhitungan Diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional

Kategori yang digunakan adalah:
2,26 – 3 : Optimal
1,51 – 2,25 : Cukup
0,76 – 1,5 : Kurang Optimal

0 – 0,75 : Sangat Kurang

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1) Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BCC
   a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
   b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
   c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan makanan dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan makanan dan makanan oleh pimpinan
   d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
   e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
      a. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracuanan
      b. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2) Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/dIVmplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
   a. Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
   b. Pusat : email dan dashboard BCC

Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Pada Tahun 2024 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Nasional sebesar 3. Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar telah mencapai target yang ditetapkan 3 dengan capaian 100 % dengan kategri “Baik”.

Tabel 3.111

Target Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2024

Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	100	Baik

b. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.112. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Tahun 2020	2	1,75	87,50	Cukup
Tahun 2021	2	1,62	81,00	Cukup
Tahun 2022	2,25	2,88	128,00	Tidak Dapat Disimpulkan
Tahun 2023	2,5	2,90	116,00	Sangat Baik
Tahun 2024	3	3	100	Baik

Perbandingan target, realisasi, capaian kinerja indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM Makassar untuk tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, tahun 2024 lebih rendah dengan kategori Baik jika dibandingkan tahun 2023 dengan kategori Sangat Baik. Untuk Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022. Realisasi tahun 2023 sebesar 2,90 dengan capaian 116,00 kategori "Sangat Baik" lebih tinggi apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2022 sebesar 2,88 dengan capaian 128,00 kategori "Tidak Dapat Disimpulkan", peningkatan realisasi indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal Tahun 2022 ke 2023, yaitu sebesar 0,02 poin.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan target, realisasi, capaian kinerja indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar dan dibandingkan dengan capaian Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung Tahun 2024 maka diperoleh hasil seperti tabel di bawah ini.

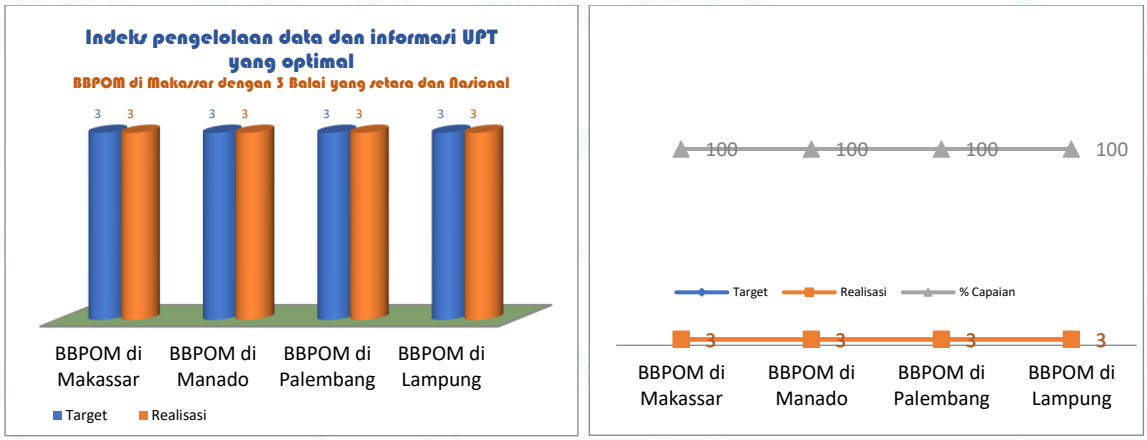
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	3	3	100	Baik
BBPOM di Manado	3	3	100	Baik
BBPOM di Palembang	3	3	100	Baik
BBPOM di Lampung	3	3	100	Baik

Target indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM Makassar BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung berada pada angka yang sama. Hasil realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang juga berada pada angka yang sama dengan kategori "Baik".

Berikut ini perbandingan capaian realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Jakarta dan BBPOM di Yogyakarta tahun 2024 sebagai berikut:



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Jakrta dan BBPOM di Yogyakarta Tahun 2024

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2024 dengan realisasi IKU BPOM atau capaian nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan target Nasional Tahun 2024

Tabel 3.8. Perbandingan realisasi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimalTahun 2024 dengan target IKU Badan POM

Indikator	Target 2024	Target Nasional	Realisasi 2024	% Capaian	Indikator
Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal	3	-	3	-	-

Pada tahun 2024 tidak di tentukan target IKU BPOM untuk indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor kendala /Pendukung ketercapaian kinerja

Beberapa hal yang mempengaruhi capaian Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar kategori Sangat Baik, antara lain:

- Monev Tengah Bulan terkait pencapaian nilai target sementara pada bulan berjalan;

- Tim Pengelola Media Sosial dan Pengelola Subsite Balai telah bekerja dengan baik.
- Penyampaian Pelaksanaan kegiatan dari penanggung jawab kegiatan kepada tim pengelola media sosial belum maksimal (belum semua fungsi melaporkan kegiatan yang sudah dilaksanakan).

Alternatif Solusi`

Ke depan agar hasil pengukuran Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar semakin representatif, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Sosialisasi berkala / periodik untuk pemutakhiran data dan informasi di SIPT, SPIMKER , dan Data Keracunan oleh Bidang terkait (Infokom, Inspeksi, Pengujian dan TU), didampingi oleh tim IT.
- Pemanfaatan data dan informasi melalui SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan.
- Melakukan akses rutin, berkala/periodik untuk aplikasi SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan. 4 Sosialisasi dan monev berkala/periodik oleh tim IT untuk: pemanfaatan email coorporate terutama di level individu, bagian/bidang dan unit kerja; pemanfaatan sharing folder oleh seksi inspeksi; akses Dashboard BOC di level pimpinan; dan pemanfaatan berita aktual di subsite balai

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 3 dengan capaian 100,00 % pada tahun 2024. Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,00) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,00 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,76%.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100.00	306,635,000	305,885,400	99.76	1.00	0.00	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 telah sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Upaya-upaya program/kegiatan untuk pencapaian indeks pengeloaan data dan informasi capaian kinerja di atas, antara lain :

- Konsistensi pemutakhiran data di SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan belum optimal.
- Konsistensi akses berkala/periodik dan pemanfaatan email dan sharing folder belum optimal.
- Akses dashboard BOC belum rutin dan berkala.

- Pemanfaatan subsite balai untuk berita aktual belum optimal
- Telah dilakukan monev pencapaian realisasi pada pertengahan bulan setiap bulan berjalan yaitu pada tanggal 20-25 bulan berjalan
- Telah dilakukan Sosialisasi terkait Juknis Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, untuk meningkatkan pemahaman pegawai terkait pengelolaan media sosial khususnya

Analisis yang akan menunjang keberhasilan:

1. Kerjasama seluruh pegawai untuk konsisten dalam pemanfaatan akses email coorporate dan sharing folder.
2. informasi dari bidang terkait untuk kegiatan bidang dapat ditayangkan di berita aktual subsite balai, dengan berkoordinasi dengan tim IT.
3. Tim IT dan bidang terkait untuk saling berkoordinasi terkait pemutakhiran data berkala di SIPT, SPIMKER dan Data Keracunan

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

Sebagai upaya perbaikan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM Makassar akan melakukan berbagai upaya sebagai berikut:

- Untuk mencapai target indeks pengelolaan data dan informasi perlu memperhatikan kategori nilai ASESMEN dari PUSDATIN , yaitu:
  2,26 – 3 : Optimal
  1,51 – 2,25 : Cukup
  0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
  0 – 0,75 : Sangat Kurang;
  serta memperhatikan hal-hal yang dapat meningkatkan penilaian asesmen pengelolaan data baik pemutakhiran maupun pemanfaatan

h. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks PDI terutama pada Indeks Data dan Informasi yang	1. Penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input pemeriksaan	1. Penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input	Memaksimalkan input data pemeriksaan sarana, sampling dan pengujian sampel serta pengiriman data SIPT ke pusat	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Nilai Capaian Kinerja TW III 100%	Nilai Capaian Kinerja TW IV 100%

	dimutakhirkan di BOC - SIPT dan pemanfaatan email coorporate.	sarana dan pada Ketua Tim pada Fungsi Pengujian untuk meningkatkan input hasil uji 2. Penyampaian informasi kepada Kepala Balai untuk memanfaatkan dashboard BOC dengan login dan mengakses 3. Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian	pemeriksaan sarana dan pada Ketua Tim pada Fungsi Pengujian untuk meningkatkan input hasil uji 2. Penyampaian informasi kepada Kepala Balai untuk memanfaatkan dashboard BOC dengan login dan mengakses 3. Memaksimalkan input sampling, sarana dan pengujian	tepat waktu.			

i. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indikator Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya





Sasaran 11

Birokrasi Bersih & Melayani

Terkelolanya Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel



Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Acuan

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai (EKA) bobot 60 % dengan Nilai (IKPA) bobot 40 %

a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluas iKinerja Anggaran (EKA).

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

c. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
   a. Revisi DIPA
   b. DeviasiHalaman III DIPA
   c. Penyerapan anggaran
   d. Belanja Kontraktual
   e. PenyelesaianTagihan
   f. Pengelolaan UP dan TUP
   g. Dispensasi SPM

h. Capaian Output

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2024 adalah 100,86 % dengan realisasi sebesar 90,80 dibawah dari target yang telah diperjanjikan sebesar 90,03 dengan kategori Sangat Baik

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar	90.03	90.8	100.86	Sangat Baik

Hasil perhitungan diperoleh dari penjumlahan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50 % dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50 %

Tabel 3.55

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2024

Nilai Kinerja Anggaran	Bobot	Hasil
EKA	50%	85
IKPA	50%	96,59
Total	100%	**90,80**

Jumlah Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2024 sebesar 90,80 terdiri atas :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dengan bobot 50 % = 85
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 50 % = 96,59

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

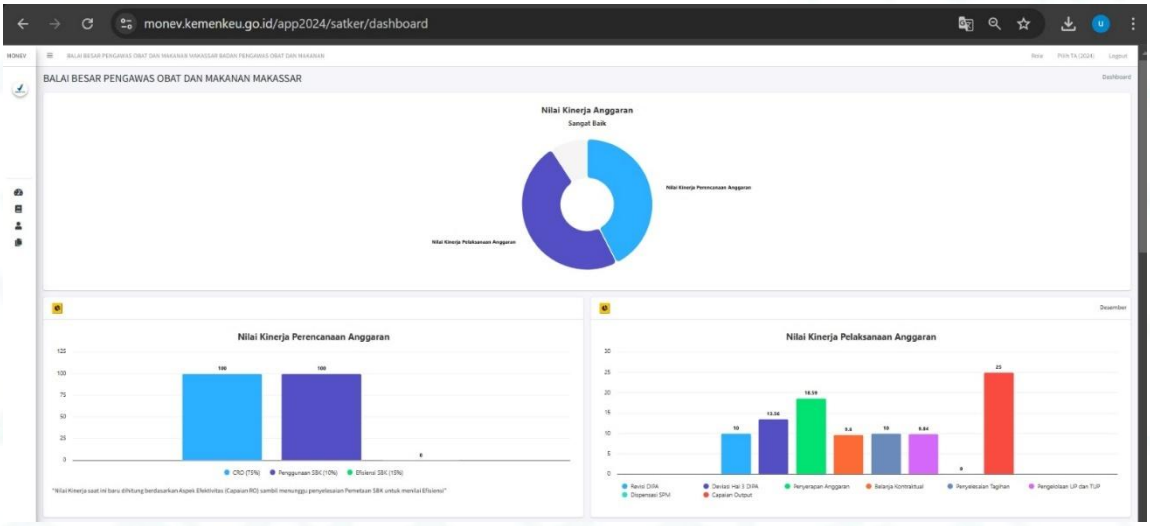
Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain :

revisi DIPA, deviasi halaman IVI DIPA, penyerapan anggaran, retur SP2D, penyerapan anggaran, Belanja kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP dan TUP, dispensasi penyampaian SPM dan capaian *output*.

Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 pada Aplikasi OM-SPAN sebesar 96,59

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD awal, Konsistensi RPD akhir, Capaian keluaran kegiatan, Efisiensi.



Gambar 3.37
Dashboard BBPOM Makassar Monev DJA Tahun 2024

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar Tahun 2024 yaitu pada angka 86,54

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai AKIP BBPOM di Makassar Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Nilai AKIP BBPOM di Makassar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2020	93	93,07	100,08	Sangat Baik
Tahun 2021	95,90	90,84	94,82	Cukup
Tahun 2022	95,90	89,48	93,30	Cukup
Tahun 2023	96,20	89,92	93,47	Cukup
Tahun 2024	90.03	90.8	100.86	Sangat Baik

Perbandingan target capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar Tahun 2021 berada pada angka 94,82 ketegori "Cukup" lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2020 dengan nilai 100,08 kategori "Sangat Baik" ; Terdapat penurunan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar sebesar 2,23 point tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Tahun 2022 berada pada angka 93,30 ketegori "Cukup" lebih rendah apabila dibandingkan tahun 2021 dengan nilai 94,82 kategori "Cukup". Serta penurunan realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar sebesar 1,52 point; serta mengalami peningkatan 0,44 point tahun 2023 dibanding tahun 2022 dari nilai 89,92

menjadi 89,48 pada kategori “Cukup”. Dan pada tahun 2024 juga mengalami peningkatan dengan kategori sangat Baikjikadibandingkan dengan tahun 2023 dengan kategori Cukup.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

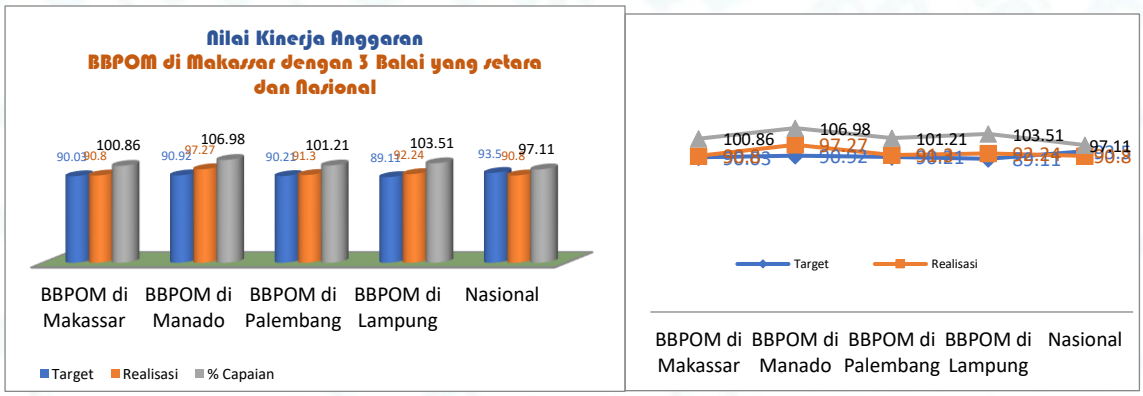
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	90.03	90.8	100.86	Sangat Baik
BBPOM di Manado	90.92	97.27	106.98	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	90.21	91.3	101.21	Sangat Baik
BBPOM di Lampung	89.11	92.24	103.51	Sangat Baik
Nasional	93.5	90.8	97.11	Cukup

Target tertinggi indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM Manador pada angka 90,920 dan target terendah adalah BBPOM di Lampung, Realisasi teringgi Nilai Kinerja Anggaran adalah BBPOM di Lampung dengan nilai 92,24 serta hasil Nilai Kinerja Anggaran terendah adalah BBPOM di Makassar yaitu 90,80 Dari keempat balai yang diperbandingkan, BBPOM di Makasar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, realisasinya berada di bawah capaian nasional BPOM yaitu 97,11. Hanya BBPOM di Lampung yang melampaui target Nasional BPOM dengan nilai realisasi 97,27..

Berikut ini perbandingan capaian realisasi indikator Nilai Kinerja Anggaran di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Faktor penyebab tercapainya indicator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

- Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) BBPOM di Makassar Tahun 2024 sebesar 85
- Nilai IKPA dengan total nilai 96,59
- Total Nilai Kinerja Anggaran 90,80 yang diperoleh dari Nilai EKA bobot 50 % dan Nilai IKPA bobot 50, dimana target IKU ini adalah 90,03, target tercapai dengan persentase capaian 100,86, Berada pada kategori (sangat Baik)
- Penyerapan anggaran BBPOM di Makassar pada Tahun 2024 sebesar Rp. 45,086,800,785 (98,22%) terhadap pagu anggaran sebesar Rp. 45.903.772.000,-

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar adalah :

- Menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman IV DIPA serta meningkatkan capaian output kegiatan BBPOM di Makassar.
- Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
- Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/kesalahan SPM atau retur SP2D;
- Melakukan ralat dokumen realisasi belanja (SPM) sebagai akibat adanya kesalahan penggunaan akun;
- Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai Besar POM di Makassar;.
- Melakukan perhitungan kebutuhan anggaran dalam mencapai kinerja untuk periode Tahun ketiga Renstra 2020-2024
- Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
- Meningkatkan capaian indikator kinerja kegiatan (IKK) terutama untuk IKK yang tidak mencapai 100% dari target.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 90,80 % dengan capaian 100,867 % pada tahun 2024. Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,01) hal ini disebabkan realisasi kinerja indikator ini 100,86 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 100 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
100.86	305,363,000	305,353,523	100.00	1.01	0.01	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Terhadap variabel pembentuk Nilai IKPA 4 dari 8 variabel pembentuk yaiitu Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan dan Dispensasi SPM dan Capaian Output dengan nilai 100 namun pada variabel Deviasi Halaman IV DIPA, Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual dan Pengelolaan UP dan TUP, BBPOM di Makassa rata rata capaian Dengan nilai 96,82
- Telah adanya aktivitas relevan yang dilakukan pada setiap Rincian output dalam mencapai output terkait.
- Perencanaan kegiatan dan proyeksi pencairan dana telah disusun lebih akurat dibandingkan triwulan sebelumnya
- Koordinasi yang lebih optimal terkait penjadwalan revisi DIPA sehingga dapat melakukan revisi hal III DIPA di awal triwulan.
- Kegiatan yang telah dilaksanakan di Tahun 2024 untuk menunjang keberhasilan pencapaian indikator nilai kinerja anggaran adalah pengelolaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, dan koordinasi serta konsultasi secara internal maupun stakeholder eksternal dalam hal ini adalah KPPN Makassar IV dan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder, maka permasalahan permasalahan keuangan yang dihadapi dapat segera diselesaikan dengan baik.
- Mengikuti Sosialisasi terkait IKPA dan EKA oleh DJPB dan KPPN
- Mengikuti Sosialisasi Peraturan Revisi Tahun 2024 oleh DJP

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Pengelolaan UP dan TUP perlu di cermati agar pemenuhan pada bobot ini dapat maksimal dimana varibel ini berdasarkan pada ketepatan waktu; % GUP disebulankan dan	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.	Pengawalan penyerapan anggaran secara proporsional Berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana	Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Nilai IKPA November 94,90	Nilai IKPA Desember 96,59

	persentase setoran TUP			DIPA tidak melebihi 5% (lima persen)			

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market
- Capaian kinerja terkait Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya atas dari target yang telah diperjanjikan sebesar 81,56 dengan kategori Sangat Baik



Nilai Pengelolan Pengadaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar

Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 Indikator yaitu:

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)

a. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) [90% < nilai RUP < 100%], diberi nilai 100 (seratus);

b. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) [70% < nilai RUP < 90%], diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) [50% < nilai RUP < 70%], diberi nilai 50 (lima puluh);

d. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) [nilai RUP < 50%], diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase >100% dilakukan klarifikasi)

2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%).

a. Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).

b. Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).

3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%).

a. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan took daring, diberi nilai 100 (seratus);

b. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 80% s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai ≥ 60% s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan

d. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai < 60% pada aplikasi Katalog Elektronik dan took daring, diberi nilai 0.

4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%).

a. Satuan Kerja sudah menerapkan >60% Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);

b. Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);

c. Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh); dan

d. Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.

5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

a. Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).

b. Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat diperoleh dengan rumus : Total Nilai dari Persentase RUP (20%) + Persentase Penerapan E-Tendering (20%)+Persentase E-Purchasing (20%) + Persentase Non Tendering dan Non e-Purchasing (20%) + Persentase e-Kontrak (20%)

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian. Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

1. Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
2. Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
3. Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
4. Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81.56	95	116.48	Sangat Baik

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa adalah Indeks Tata Kelola Barang dan Jasa yang di peroleh dari pemanfaatan sistem pengadaan yang terdiri dari :

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi SIRUP pada tahun anggaran berjalan dengan anggaran berikutnya dengan (bobot 10%),
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (bobot 5%)
3. Persentase penyelesaiain paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%)
4. Persentase penerapan proses E-Tendering dan non E-Purchasing pada aplikasi SPSE (bobot 5%)
5. Persentase E-Kontrak pada aplikasi SPSE (bobot 5%)

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2023	-	95	-	-
Tahun 2024	81.56	95	116.48	Sangat Baik

Realisasi indikator “Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa tahun 2024 adalah 95 dari target 81,56 sehingga capaian indikator adalah 116,48% dengan kategori “Sangat Baik”. Indikator ini merupakan indikator direktif yang baru dimasukkan ke dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

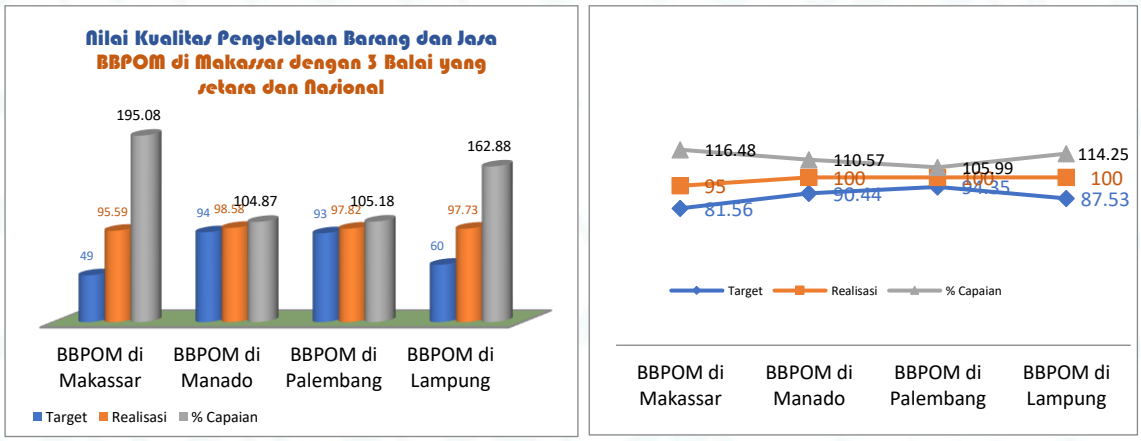
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	81.56	95	116.48	Sangat Baik
BBPOM di Manado	90.44	100	110.57	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	94.35	100	105.99	Sangat Baik
BBPOM di Lampung	87.53	100	114.25	Sangat Baik

Target tertinggi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, yaitu pada BBPOM Palembang pada angka 94,35 dan target terendah adalah BBPOM di Lampung, Realisasi terendah adalah BBPOM di Makassar yaitu 95

Berikut ini perbandingan capaian realisasi indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Faktor penyebab tercapainya indicator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

- Keberhasilan dalam pencapaian Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dikarenakan telah optimalnya pencapaian dari ke 5 (lima) indikator penilaian pemanfaatan sistem Pengadaan Barang dan Jasa
- Telah dilakukan penginputan untuk semua paket yang dilakukan baik dengan Metode Pemilihan Pengadaan Langsung maupun E Purchasing di LPSE

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 95 % dengan capaian 116,48 % pada tahun 2024. Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,16) hal ini disebabkan capaian realisasi kinerja indikator ini 116,48 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 100 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
116.48	36,120,000	36,119,403	100.00	1.16	0.16	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- Telah dilakukan penginputan untuk semua paket yang dilakukan baik dengan Metode Pemilihan Pengadaan Langsung maupun E Purchasing di LPSE Dengan nilai 96,82
- Satker (KPA / PPK) memastikan RUP terumumkan 100% sebelum 31 Maret.
- Melakukan update SIRUP ketika ada perubahan dalam revisi anggaran yang mengakibatkan perubahan Pagu dan melakukan pengumuman RUP ulang
- Melakukan monitoring secara berkala pada aplikasi e-purcashing saat melakukan pengadaan, dan menyelesaikan paket segera setelah kontrak selesai
- Melakukan penginputan paket pengadaan yang tidak melalui e-purchasing pada menu Non E-Tendering dan Non E-Purchasing di LPSE, dan melakukan perekaman realisasi saat kontrak pengadaan telah selesai.

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	Beberapa penyedia belum melakukan penginputan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga paket belum seluruhnya dapat diselesaikan (Status Paket Selesai)	Konsistensi untuk melakukan penginputan pada LPSE untuk setiap paket yang statusnya telah selesai dilaksanakan.	Melakukan pemantauan penginputan pada LPSE untuk setiap paket yang statusnya telah selesai dilaksanakan.	- Memaksimalkan kinerja anggota tim untuk memastikan penginputan pada LPSE dan SIRUP sudah sesuai - Koordinasi dengan penyedia untuk proaktif melengkapi paket	Maksimal 30 HK untuk setiap paket yang telah selesai dilaksanakan(Sudah Selesai)	Terdapat > 10 % Penyedia belum melakukan penginputan surat jalan yang merupakan salah satu tahapan untuk menyelesaikan penginputan pada LPSE	Terdapat < 5 % Penyedia belum melakukan penginputan surat jalan yang merupakan salah satu tahapan untuk menyelesaikan penginputan pada LPSE

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market

- Capaian kinerja terkait Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



Nilai Pengelolan Barang Milik Negara BBPOM di Makassar

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap kegiatan Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. a.1 Kualitas pelaporan (Bobot 75%) a.2 Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%).

Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

Ketepatan waktu penyampaian RKBMN diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut:

- Tanggal penerimaan > H+3 : Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
- H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3 : Tidak tepat waktu (Skor 25)
- H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0 : Tepat waktu (Skor 75)
- Tanggal Penerimaan ≤ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014). Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah: (Total Nilai Aset yang telah diPSP (SIMAN) / Total Aset) x 100%.

Penghapusan adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: nilai total penghapusan yang diusulkan disetujui / total barang rusak berat x 100 %. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase

Pemusnahan adalah: Nilai total pemusnahan yang diusulkan / total barang usang atau rusak x 100 %

Cara Perhitungan dan Formula Perhitungan Penjumlahan nilai dari masing masing aspek penilaian:

- Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) (20%),
- Persentase Penghapusan (20%),
- Persentase Pemusnahan (20%),
- Penatausahaan yang Baik (30%),
- Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (10%)

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan salah satu indikator dengan penilaian yang akan keluar pada akhir tahun anggaran, sebagaimana pengukuran capaian indikator ini adalah secara tahunan. Meskipun demikian, Balai POM di Gorontalo terus melakukan pengelolaan BMN sesuai pedoman agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	49	95.59	195.08	Tidak dapat Disimpulkan

Penilaian indikator kinerja nilai tahun 2024 dari target 49 mampu direalisasikan di akhir tahun 2024 sebesar 95,59 atau sebesar 195,08% persentase capaian atau dengan kategori tidak dapat disimpulkan atau jauh melebih dari target yang ditetapkan ditahun 2024.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2023	-	97	-	-
Tahun 2024	49	95.59	195.08	Tidak Dapat Disimpulkan

Untuk Tahun 2023 Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan BMN merupakan Derektif Penugasan sehingga untuk Target BBPOM di Makassar berdasarkan Exercise dari Biro Umum dinilai 49, sementara hasil Realisasi yang dicapai Pada Tahun 2023 TW III sebesar 97 sehingga secara persentase capaian dan kriteria tidak bisa diukur karena ini merupakan IKU Direktif Penugasan yang baru dimasukkan kedalam Perjanjian Kinerja tahun 2024. Untuk Target 2024 berdasarkan Surat Dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor : B-KP.09.01.24.01.24.40 Tanggal 22 januari 2024 perihal Direktif penugasan untuk Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara sudah Menjadi IKU dan masuk dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai dengan Target 49, jika dihitung dengan capaian realisasi 95,59 maka persentase capaian Penilaian sebesar 195,08% dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

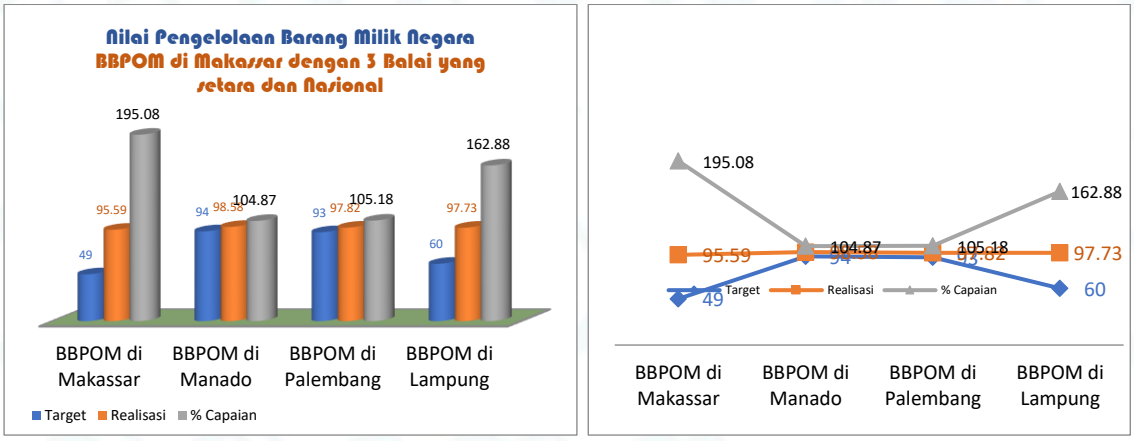
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik NegaraBBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	49	95.59	195,08	Tidak Dapat Disimpulkan
BBPOM di Manado	94	98.58	104.87	Sangat Baik
BBPOM di Palembang	93	97.82	105.18	Sangat Baik
BBPOM di Lampung	60	97.73	162.88	Sangat Baik

Target tertinggi indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, yaitu pada BBPOM Palembang pada angka 94,35 dan target terendah adalah BBPOM di Lampung, Realisasi terendah adalah BBPOM di Makassar yaitu 95

Berikut ini perbandingan capaian realisasi indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negaradi wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024 sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Faktor penyebab tercapainya indicatori Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

Sampai dengan akhir Tahun 2024 BBPOMdi Makassar terus melakukan continuous improvement dengan adanya beberapa tindakan perbaikan yang dijalankan untuk mendukung pencapaian target nilai kualitas pengelolaan Barang Milik Negara sebagai berikut:

- Penyampaian Laporan BMN yang berkualitas dan tepat waktu.
- Penetapan status penggunan dilaksanakan dengan akurat dan tepat waktu.
- Penghapusan BMN yang akurat sesuai jumlah barang rusak berat.
- Pemusnahan persediaan yang akurat sesuai dengan jumlah persediaan usang.
- Kolaborasi dengan tiap fungsi untuk membantu me-lisT DBR

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik NegaraBBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 95,59 % dengan capaian 195,08 % pada tahun 2024. Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik NegaraBBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,97) hal ini disebabkan capaian realisasi kinerja indikator ini 195,08 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 99,06 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Makassar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
195.08	53,747,000	53,244,217	99.06	1.97	0.97	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Nilai Pengelolaan BMN BBPOM di Makassar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- Penatausahaan BMN : laporan berkualitas, laporan tepat waktu
- Penyampaian RKBMN tepat waktu
- Pengajuan Penetapan status penggunaan (PSP) BMN oleh Kuasa Pengguna Barang
- Penginputan PSP pada aplikasi SIMAN sesuai ketentuan
- Penghapusan BMN sesuai peraturan
- Pemusnahan BMN sesuai peraturan

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	SDM Pengelola BMN yang masih kurang baik dalam jumlah maupun kompetensi ditambah lagi dengan penugasan sebagai Koordinator Wilayah	Konsistensi serta peningkatan pengelolaan BMN dengan baik, akurat dan tepat waktu	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan BMN.	Memaksimalkan kinerja anggota tim dalam pengelolaan BMN - Melengkapi kompetensi SDM di bagian pengelolaan BMN	Desember 2024 (Sudah Selesai)	Capaian realisasi cukup	capai realisasi Tidak Dapat Disimpulkan

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Nilai Pengelolaan BMN BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market
- Capaian kinerja terkait Nilai Pengelolaan BMN BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan
- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Nilai Pengelolaan BMN BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya



Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri BBPOM di Makassar

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah :

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%).
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%).
3. Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024 minimal 60%.

a. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024

Tabel 3.54

Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar Tahun 2024

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	60	64.06	106.77	Sangat Baik

Penilaian indikator kinerja nilai tahun 2024 dari target 60 mampu direalisasikan di akhir tahun 2024 sebesar 64,06 atau sebesar 106,77% persentase capaian atau dengan kategori Sangat Baik.

b. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Tabel 3.5. Perbandingan realisasi dan capaian Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Tahun 2024 dengan Tahun sebelumnya

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Tahun 2023	-	34,97	-	-

Tahun 2024	60	64.06	106.77	Sangat Baik

Realisasi indikator Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri BBPOM di Makassar tahun 2024 adalah 64,06 dari target 60 sehingga capaian indikator adalah 106,77% dengan kategori "Sangat Baik". Indikator ini merupakan indikator direktif yang baru ada di tahun 2024, sehingga belum dapat dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan realisasi kinerja Balai lain yang sejenis/setara, dengan IKU BPOM atau capaian nasional

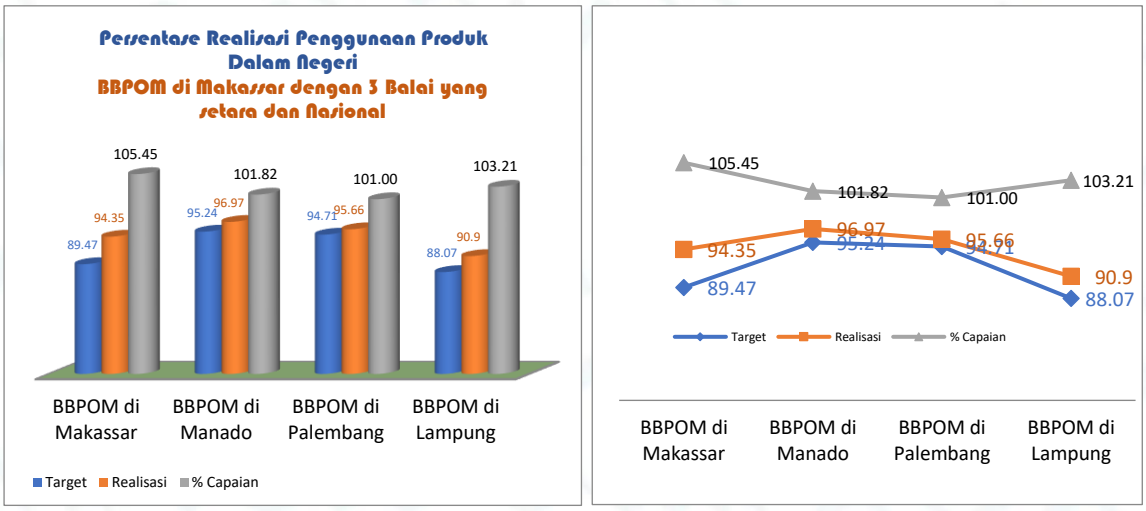
Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024

Indikator Kinerja Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
BBPOM di Makassar	60	64.06	106.77	Sangat Baik
BBPOM di Manado	67.19	88.65	131.94	Tidak Dapat Disimpulkan
BBPOM di Palembang	60	79.3	132.17	Tidak Dapat Disimpulkan
BBPOM di Lampung	60	65.93	109.88	Sangat Baik

Target tertinggi indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri, yaitu pada BBPOM Manado pada angka 67,19 dan target UPT sejenis lainnya samadi angka 60, Realisasi terendah adalah BBPOM di Makassar yaitu 64,06, namun walau begitu BBPOM di Makassar sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Berikut ini perbandingan capaian realisasi indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri di wilayah kerja BBPOM di Makassar, BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung tahun 2024, sebagai berikut :



Gambar 3.3

Capaian Kinerja Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar dibandingkan dengan capaian BBPOM di Manado, BBPOM di Palembang, BBPOM di Lampung dan Nasional Tahun 2024

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kedepan (rekomendasi perbaiakan kinerja)

Faktor Pendukung ketercapaian kinerja

Faktor penyebab tercapainya indicatori Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar disebabkan oleh :

- Terselesaikannya Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
- Terselesaikannya proses Pengadaan berbasisi PDN (Realisasi Pemilihan Belanja PDN).

Adapun kendala yang dihadapi adalah :

- Kesulitan pengadaan barang dan mesin PDN, karena spesifikasi yang kurang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan di fungsi-fungsi

Alternatif Solusi

- Tim di fungsi-fungsi mengupdate kebutuhan barang dan mesin sesuai katalog PDN, jika tidak ada baru mengajukan pengadaan selain PDN.

e. Efisiensi atas penggunaan Sumber daya dalam mencapai kinerja

Tingkat efisiensi (TE) Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Pengukuran tingkat efisiensi dilakukan pada akhir tahun anggaran, realisasi indikator ini sebesar 64,06 dengan capaian 106,77 % pada tahun 2024. Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar kategori efisen dengan tingkat efisiensi (0,15). Hal ini disebabkan capaian realisasi kinerja indikator ini 106,77 % sedangkan realisasi anggarannya mencapai 92,89 %.

Tabel 3.9. Pengukuran Tingkat Efisiensi Indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar Tahun 2024

Output (indicator)	Total Target (Rp)	Total Capaian (Rp)	Input (Anggaran)	IE	TE	Kategori
106.77	1,896,900,000	1,762,022,896	92.89	1.15	0.15	Efisien

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penggunaan sumber daya/anggaran Efisien, karena % capaian indikator kinerja lebih besar daripada % realisasi anggaran. Pada tahun 2024 telah dilakukan pergeseran anggaran sebagai upaya pencapaian target. Dapat disimpulkan bahwa anggaran 2024 belum sepenuhnya mendukung pencapaian indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar.

f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan :

- Melakukan tagging PDN pada paket pengadaan yang diumumkan di aplikasi SIRUP Penyampaian RKBMN tepat waktu

- Melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri (PDN) dan/atau produk dalam negeri dengan nilai penjumlahan TKDN dan BMP paling sedikit 40% Penginputan PSP pada aplikasi SIMAN sesuai ketentuan

g. Tindak Lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (Internal maupun eksternal)

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Kendala	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum rencana aksi	Kondisi setelah rencana aksi
			Selesai *	Belum **			
				Rencana Aksi	Timeline		
1.	PBJ Pengelola PDN yang masih kurang, juga perlu Kolaborasi informasi dan masukan dari pengelola BMN terkait PDN, ditambah lagi dengan penugasan pengelola BMN sebagai korwil sehingga masih terjadi inkonsistensi Kolaborasi informasi	Tim di fungsi-fungsi mengupdate kebutuhan barang dan mesin sesuai katalog PDN, jika tidak ada baru mengajukan pengadaan selain PDN	Tim di fungsi-fungsi mengupdate kebutuhan barang dan mesin sesuai katalog PDN, jika tidak ada baru mengajukan pengadaan selain PDN	Tim di fungsi-fungsi mengupdate kebutuhan barang dan mesin sesuai katalog PDN, jika tidak ada baru mengajukan pengadaan selain PDN	Oktober 2024 (Sudah Selesai)	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Belum dapat diukur	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri Sudah Terukur

h. Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

- Telah dilakukan penguatan system informasi pengawasan Obat dan Makanan dimana hasil capaian kinerja Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar telah diupload dan terintegrasi dalam subsite makassar.pom.go.id serta telah mendukung digitalisasi pengawasan pre-market dan post-market
- Capaian kinerja terkait Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar dapat diakses secara terbuka pada subsite makassar.pom.go.id
- Dengan diterbitkannya laporan kinerja ini akan menjadi acuan atas Rencana Strategis tahun 2025-2029, sehingga pengambil kebijakan dapat memanfaatkan informasi dalam laporan kinerja.serta sebagai masukan bagi masyarakat dan informasi public terkait pencapaian kinerja pada program pengawasan Obat dan Makanan

- Hasil informasi knerja ini merupakan potret pencapaian terhadap indikator kinerja Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar pada lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Sulawesi Selatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian IKU secara Nasional
- Penacapain kinerja untuk indicator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri BBPOM di Makassar serta realisasi alokasi anggaran yang digunakan dalam pencapaian indicator ini akan menjadi indeks untuk penyusunan anggaran periode berikutnya

3.2 Evaluasi Tahun Ke – 5

1. Analisis Tren

Tahun 2024 merupakan akhir periode renstra dimana pada tahun ini dilakukan analisis perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra sesuai pada tabel dibawah ini :

Tabel Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (*Trend Analysis*)

No Kode	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	*Baseline* (2020)	Tahun										Keterangan	*Baseline*		Capaian Terkini		Target 2024 (x*)	N1 (2024-t0)	N2 (t-t0)	R1 ((xt/xt0) ^(1/N1)) −1	R2 ((xt/xt0) ^(1/N2)) −1	PERKEMBANGAN KINERJA	
				2020		2021		2022		2023		2024			Tahun (t0)	Realisasi (xt0)	Tahun (t)	Realisasi (xt)						Perkembangan Kinerja	Kategori
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi												
															1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	SK.1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80.8	80.8	88.09	89	95.45	90	96.67	91.00	98.18	98.2	93.2		2020	88.09	2023	98.18	98.2	4	3	0.03	0.04	133.69	Meningkat (On The Track)
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	78	85.86	85.5	86.04	87	93.83	88.50	93.28	93.3	89		2020	85.86	2023	93.28	93.3	4	3	0.02	0.03	133.45	Meningkat (On The Track)
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	80.6	80.6	83.42	87	92.58	88	92.6	89.00	92.71	92.8	87.85		2020	83.42	2023	92.71	92.8	4	3	0.03	0.04	132.69	Meningkat (On The Track)
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	78	77.42	77	79.02	78	92.18	80.00	95.45	95.5	96.32		2020	77.42	2023	95.45	95.5	4	3	0.05	0.07	134.17	Meningkat (On The Track)

		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat				75	60	76	80	77.00	88.42	87	74.03	Tanpa Target Tahun 2020	2021	60	2023	88.42	87	3	2	0.13	0.21	162.26	Meningkat (On The Track)
2	SK.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap Keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	74	74	76.36	79	74.11	81	79.41	83.00	83.85	85	79.08		2020	76.36	2023	83.85	85	4	3	0.03	0.03	116.65	Meningkat (On The Track)
3	SK.3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian Bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83	83	82.5	83.5	87.3	84.6	90.6	85.60	97.60	97.7	97.72		2020	82.5	2023	97.60	97.7	4	3	0.04	0.06	133.45	Meningkat (On The Track)
		Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	69	69	73.94	75.5	70.84	77	73.84	78.50	77.96	80	81.31		2020	73.94	2023	77.96	80	4	3	0.02	0.02	89.52	Meningkat (Moderat)
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	89	89	93.31	90	92.04	93	91.9	93.50	94.90	95.50	94.44		2020	93.31	2023	94.90	95.50	4	3	0.01	0.01	97.10	Meningkat (Moderat)
4	SK.4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	87	68.19	89	100	91	100	93.00	95.24	95	100		2020	68.19	2023	95.24	95	4	3	0.09	0.12	136.31	Meningkat (On The Track)
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55	55	51.91	60	74.89	65	72.81	70.00	58.42	75	83.81		2020	51.91	2023	58.42	75	4	3	0.10	0.04	41.69	Meningkat (Moderat)

	POM di Makassar	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	85	96.43	96	94.08	98	96.96	99.00	97.42	98	99		2020	96.43	2023	97.42	98	4	3	0.00	0.00	84.30	Meningkat (Moderat)
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan	46	46	47.81	55	65.6	60	59.18	65.00	71.12	71.2	76.7		2020	47.81	2023	71.12	71.2	4	3	0.10	0.14	135.20	Meningkat (On The Track)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	55	72.95	75	80.26	76	75.46	78.00	78.25	80	82.81		2020	72.95	2023	78.25	80	4	3	0.02	0.02	101.38	Meningkat (On The Track)
		Indeks Pelayanan Publik	3.51	3.51	3.48	4.2	4.35	4.3	4.56	4.40	4.61	4.7	4.79		2020	3.48	2023	104.77	4.7	4	3	0.08	2.11	2,705.34	Meningkat (On The Track)
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik						77	89.33	79.00	79.37	100	100	Tanpa Target Tahun 2020-2021	2022	89.33	2023	121.36	100	2	1	0.06	0.36	617.80	Meningkat (On The Track)
		Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten /Kota										95	81.66	Indikator baru di Tahun 2024	2024	81.66	2024	81.66	95	0	0	-	-	-	Belum Dapat Disimpulkan
5	SK.5 Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	85.16	85.16	92.41	92	92.85	93	93.13	94.00	94.84	95.7	96.27		2020	92.41	2023	100.89	95.7	4	3	0.01	0.03	338.08	Meningkat (On The Track)
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	16	16	16	40	40	68	68	98.00	98.00	124	124		2020	16	2023	98.00	124	4	3	0.67	0.83	124.11	Meningkat (On The Track)

	kerja Balai Besar POM di Makassar	Jumlah desa pangan aman	4	4	4	12	12	19	19	25.00	25.00	31	31		2020	4	2023	25.00	31	4	3	0.67	0.84	125.96	Meningkat (On The Track)
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	2	8	8	13	13	18.00	18.00	22	22		2020	2	2023	18.00	22	4	3	0.82	1.08	131.53	Meningkat (On The Track)
6	SK.6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85	85	95.21	100	100	100	100	100.00	100.00	100	99.93		2020	95.21	2023	99.81	100	4	3	0.01	0.02	128.39	Meningkat (On The Track)
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75	75	92.57	100	100	100	100	100.00	99.37	100	100		2020	92.57	2023	96.77	100	4	3	0.02	0.01	76.46	Meningkat (Moderat)
7	SK.7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Makassar	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan	67	67	98.04	88	90.33	91	97.27	94.00	87.33	97	81.77		2020	98.04	2023	87.33	97	4	3	0.00	-0.04	1,420.66	Meningkat (On The Track)
8	SK.8 Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Makassar yang optimal	Indeks RB UPT	85	85	50.45	77.8	77.81	79.8	89.06	81.80	90.51	91.51	90.25		2020	50.45	2023	90.51	91.51	4	3	0.16	0.22	134.00	Meningkat (On The Track)
		Nilai AKIP UPT	81	81	77.27	78.3	78.13	79.3	79.21	80.30	81.05	82.45	81.9		2020	77.27	2023	81.05	82.45	4	3	0.02	0.02	98.13	Meningkat (Moderat)
		Nilai Pengelolaan Kearsipan										89.47	94.35	Indikator baru di Tahun 2024	2024	81.9	2024	81.90	82.45	0	0	-	-	-	Belum Dapat Disimpulkan
9	SK.9 Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Makassar	Indeks Profesionalitas ASN upt	75	75	73.49	75	85.44	76	81.14	77.00	89.64	86.85	87.25		2020	73.49	2023	91.66	86.85	4	3	0.04	0.08	179.22	Meningkat (On The Track)

	yang berkinerja optimal																							
10	SK.10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	78.8	78.8	70.6	76	75.43	81	78.8	86.00	84.40	85.44	89.96		2020	70.6	2023	84.40	85.44	4	3	0.05	0.06	125.52	Meningkat (On The Track)
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1.51	1.51	1.32	2	1.62	2.25	2.88	2.50	2.90	3	3		2020	1.32	2023	2.90	3	4	3	0.23	0.30	131.68	Meningkat (On The Track)
11	SK.11 Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Makassar secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	93	93.07	95.8	90.84	95.9	89.48	96.20	89.92	90.03	90.8		2020	93.07	2023	89.92	90.03	4	3	-0.01	-0.01	138.02	Meningkat (On The Track)
		Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa										81.56	95	Indikator baru di Tahun 2024	2024	95	2024	95.00	81.56	0	0	-	-	-	Belum Dapat Disimpulkan
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara										49	95.59	Indikator baru di Tahun 2024	2024	95.59	2024	95.59	49	0	0	-	-	-	Belum Dapat Disimpulkan
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam negeri										60	64.06	Indikator baru di Tahun 2024	2024	64.06	2024	64.06	60	0	0	-	-	-	Belum Dapat Disimpulkan
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran	88	88	100	88.5	100							Tanpa Target Tahun 2022-2024											

BerdasarkanTabel Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Trend Analysis) dapat dilihat perkembangan kinerja BBPOM di Makassar selama periode Renstra Tahun 2020 s.d 2024.

Adapun kriteria hasil perhitungan perkembangan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

1) Menurun, jika perkembangan kinerja 15–0 persen;
2) Stagnan, jika perkembangan kinerja 0–15 persen;

3) Meningkat:
   a. moderat, jika perkembangan kinerja >15–
   b. on the track, jika perkembangan kinerja ≥100 persen;
   c. Relatif, jika perkembangan kinerja >0 persen
4) Belum Dapat disimpulkan, jika perkembangan kinerja belum dapat ditentukan pola kecenderungan.

Berdasarkan hasil perhitungan analisis trend tersebut, sebanyak 23 Indikator kinerja utama BBPOM di Makassar mencapai kategori Meningkat (On The Track), Selain itu, sebanyak 9 Indikator kinerja utama BBPOM di Makassar mencapai kategori Meningkat (Moderat) dan Dan terdapat 5 indikator kinerja utama yang tidak dapat disimpukan karena merupakan indikator kinerja utama yang baru diperhitungkan kinerjanya pada tahun 2024 diantaranya yaitu Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota; Nilai Pengelolaan Kearsipan; Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa (Per Satker); Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara; dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri.

2. Analisis GAP

Analisis Gap merupakan perbandingan antara realisasi akhir periode Renstra terhadap target di tahun akhir periode Renstra. Hasil analisis ini dinyatakan dalam kategori berikut:



Berdasarkan tabel analisis gap di bawah, sebanyak 23 indikator kinerja utama BBPOM di Makassar telah mencapai target akhir periode Renstra. Sedangkan terdapat 11 Indikator kinerja utama BBPOM di Makassar tidak mencapai target akhir renstra diantaranya yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat; Persentase Makanan yang memenuhi syarat; Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan; Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat; Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu; Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM; Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota; Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar; Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan; Indeks RB UPT; Nilai AKIP UPT.

Tabel Kertas Kerja Realisasi Kinerja pada Evaluasi Akhir Renstra 2020-2024 (Gap Analysis)

No. Kode (Kolom 1)	Program dan Kegiatan (Kolom 2)	Kode *	Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan (Kolom 3)	Satuan (Kolom 4)	T1		T2		T3		T4		T5		Kinerja (Kolom 9)			Unit Pelaksana (Kolom 10)
					Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Nilai	Notifikasi Kinerja	Kategori	
SK.1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase	80.8	88.09	89	95.45	90	96.67	91.00	98.18	98.20	93.20	94.91	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Persentase	78	85.86	85.5	86.04	87	94	88.50	93.28	93.30	89.00	95.39	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	80.6	83.42	87	92.58	88	93	89.00	92.71	92.80	87.85	94.67	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Persentase	78	77.42	77	79.02	78	92.18	80.00	95.45	95.50	96.32	100.86	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Persentase			75	60	76	80	77.00	88.42	87.00	74.03	85.09	Cukup Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Persentase	74	76.36	79	74.11	81	79.41	83.00	83.85	85.00	79.08	93.04	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar

	Obat dan Makanan																	
SK.3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Persentase	83	82.5	83.5	87.3	84.6	91	85.60	97.60	97.70	97.72	100.02	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		8	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Persentase	69	73.94	75.5	70.84	77	73.84	78.50	77.96	80.00	81.31	101.64	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Persentase	89	93.31	90	92.04	93	91.90	93.50	94.90	95.50	94.44	98.89	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Persentase	87	68.19	89	100	91	100.00	93.00	95.24	95.00	100.00	105.26	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Persentase	55	51.91	60	74.89	65	72.81	70.00	58.42	75.00	83.81	111.75	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	85	96.43	96	94.08	98	97	99.00	97.42	98.00	99.00	101.02	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase	46	47.81	55	65.6	60	59.18	65.00	71.12	71.20	76.70	107.72	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar

		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Persentase	55	72.95	75	80.26	76	75.46	78.00	78.25	80.00	82.81	103.51	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		15	Indeks Pelayanan Publik di wilayah kerja UPT	Nilai	3.51	3.48	4.2	4.35	4.3	4.56	4.40	4.61	4.70	4.79	101.91	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Persentase					77	89.33	79.00	79.37	100.00	100.00	100.00	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		17	Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Persentase									95.00	81.66	85.96	Cukup Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	18	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Persentase	85.16	92.41	92	92.85	93	93.13	94.00	94.84	95.70	96.27	100.60	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		19	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah Sekolah	16	16	40	40	68	68	98.00	98.00	124.00	124.00	100.00	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		20	Jumlah desa pangan aman	Jumlah Desa	4	4	12	12	19	19	25.00	25.00	31.00	31.00	100.00	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar

		21	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	Jumlah Pasar	2	2	8	8	13	13	18.00	18.00	22.00	22.00	100.00	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	22	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	85	95.21	100	100	100	100.00	100.00	100.00	100.00	99.93	99.93	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
		23	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Persentase	75	92.57	100	100	100	100	100.00	99.37	100.00	100.00	100.00	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	24	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Persentase	67	98.04	88	90.33	91	97	94.00	87.33	97.00	81.77	84.30	Cukup Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	25	Indeks RB UPT	Persentase	85	50.45	77.8	77.81	79.8	89.06	81.80	90.51	91.51	90.25	98.62	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
		26	Nilai AKIP UPT	Persentase	81	77.27	78.3	78.13	79.3	79.21	80.30	81.05	82.45	81.90	99.33	Baik	Tidak Tercapai	BBPOM di Makassar
		27	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Persentase									89.47	94.35	105.45	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	28	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Persentase	75	73.49	75	85.44	76	81.14	77.00	89.64	86.85	87.25	100.46	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar

SK.10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	29	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Persentase	78.8	70.6	76	75.43	81	78.80	86.00	84.40	85.44	89.96	105.29	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		30	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Indeks	1.51	1.32	2	1.62	2.25	2.9	2.50	2.90	3.00	3.00	100.00	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
SK.11	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	31	Nilai Kinerja Anggaran UPT	Persentase	93	93.07	95.8	90.84	95.9	89.48	96.20	89.92	90.03	90.80	100.86	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		32	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Persentase									81.56	95.00	116.48	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Persentase									49.00	95.59	195.08	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase									60.00	64.06	106.77	Sangat Baik	Tercapai	BBPOM di Makassar
		35	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	Persentase	88	100	88.5	100							#DIV/0!	Belum dapat disimpulkan	Sudah ada komponen efisiensi penggunaan anggaran di penyusun indikator NKA (EKA dan IKPA)	BBPOM di Makassar

Berdasarkan tabel analisis gap diatas, sebanyak 23 indikator kinerja utama BBPOM di Makassar telah mencapai target akhir periode Renstra. Sedangkan terdapat 11 Indikator kinerja utama BBPOM di Makassar tidak mencapai target akhir renstra dan terdapat 1 Indikator kinerja utama BBPOM di Makassar belum dapat disimpulkan karena indicator tersebut sudah tidak dilakukan penilaian sejak tahun 2022 sampai tahun 2024.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Keberhasilan pencapaian 7 tujuan BBPOM di Makassar diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/reviu Renstra Satker. Dari 7 tujuan yang diukur, semuanya sudah tercapai/ *on track* dengan nilai pencapaian berkisar antara 100,28 % hingga 110,50 %. Sesuai pada tabel dibawah ini :

Tabel Evaluasi Ketercapaian Tujuan Strategis Tahun 2020 sampai dengan 2025

Tujuan	Indikator	Sifat Indikator	Tahun ke-1 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-2 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-3 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-4 Pelaksanaan Renstra			Tahun ke-5 Pelaksanaan Renstra			Rata-Rata Pencapaian Indikator	Rata-Rata Pencapaian Indikator per Tujuan	Kategori Ketercapaian Tujuan
			T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%			
Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu	Rata-rata	74	76.36	103.19	79	74.11	93.81	81	79.41	98.04	83	83.85	101.02	85	79.08	93.04	97.82	100.28	Sudah Tercapai / On Track
	Persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Rata-rata	87	68.19	78.38	89	100	112.36	91	100	109.89	93	95.24	102.41	95	100	105.26	101.66		
	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Rata-rata	85.16	92.41	108.51	92	92.85	100.92	93	93.13	100.14	94	94.84	100.89	95.7	96.27	100.60	102.21		
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Kumulatif	16	16	100.00	40	40	100.00	68	68	100.00	98	98	100.00	124	124	100.00	100.00		
	Jumlah desa pangan aman	Kumulatif	4	4	100.00	12	12	100.00	19	19	100.00	25	25	100.00	31	31	100.00	100.00		
	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Kumulatif	2	2	100.00	8	8	100.00	13	13	100.00	18	18	100.00	22	22	100.00	100.00		

Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	75	73.49	97.99	75	85.44	113.92	76	81.14	106.76	77	89.64	116.42	86.85	87.25	100.46	107.11	102.50	Sudah Tercapai / *On Track*
	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Rata-rata	78.8	70.6	89.59	76	75.43	99.25	81	78.8	97.28	86	84.4	98.14	85.44	89.96	105.29	97.91		
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Makassar yang optimal	Rata-rata	1.51	1.32	87.42	2	1.62	81.00	2.25	2.88	128.00	2.5	2.9	116.00	3	3	100.00	102.48		
Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	83	82.5	99.40	83.5	87.3	104.55	84.6	90.6	107.09	85.6	97.6	114.02	97.7	97.72	100.02	105.02	103.36	Sudah Tercapai / On Track
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	69	73.94	107.16	75.5	70.84	93.83	77	73.84	95.90	78.5	77.96	99.31	80	81.31	101.64	99.57		
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat	Kumulatif						#DIV/0!	77	89.33	116.01	79	79.37	100.47	100	100	100.00	105.49		

	Tradisional dan Kosmetik yang baik																		
Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Rata-rata	80.8	88.09	109.02	89	95.45	107.25	90	96.67	107.41	91	98.18	107.89	98.2	93.2	94.91	105.30	103.84	Sudah Tercapai / On Track
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Rata-rata	78	85.86	110.08	85.5	86.04	100.63	87	93.83	107.85	88.5	93.28	105.40	93.3	89	95.39	103.87		
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	80.6	83.42	103.50	87	92.58	106.41	88	92.6	105.23	89	92.71	104.17	92.8	87.85	94.67	102.79		
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Rata-rata	78	77.42	99.26	77	79.02	102.62	78	92.18	118.18	80	95.45	119.31	95.5	96.32	100.86	108.05		
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Rata-rata				75	60	80.00	76	80	105.26	77	88.42	114.83	87	74.03	85.09	96.30		
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Rata-rata	69	73.94	107.16	75.5	70.84	93.83	77	73.84	95.90	78.5	77.96	99.31	80	81.31	101.64	99.57		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Rata-rata	87	68.19	78.38	89	100	112.36	91	100	109.89	93	95.24	102.41	95	100	105.26	101.66		
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	Rata-rata	55	51.91	94.38	60	74.89	124.82	65	72.81	112.02	70	58.42	83.46	75	83.81	111.75	105.28		

	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan																		
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	46	47.81	103.93	55	65.6	119.27	60	59.18	98.63	65	71.12	109.42	71.2	76.7	107.72	107.80	
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Rata-rata	55	72.95	132.64	75	80.26	107.01	76	75.46	99.29	78	78.25	100.32	80	82.81	103.51	108.55	
	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	85	95.21	112.01	100	100	100.00	100	100	100.00	100	100	100.00	100	99.93	99.93	102.39	
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Rata-rata	75	92.57	123.43	100	100	100.00	100	100	100.00	100	99.37	99.37	100	100	100.00	104.56	
Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	67	98.04	146.33	88	90.33	102.65	91	97.27	106.89	94	87.33	92.90	97	81.77	84.30	106.61	106.61	Sudah Tercapai / On Track
Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Rata-rata	67	98.04	146.33	88	90.33	102.65	91	97.27	106.89	94	87.33	92.90	97	81.77	84.30	106.61	106.61	Sudah Tercapai / On Track
Terwujudnya Kelembagaan Pengawasan Obat dan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	89	93.31	104.84	90	92.04	102.27	93	91.9	98.82	93.5	94.9	101.50	95.5	94.44	98.89	101.26	110.50	Sudah Tercapai / On Track

Makanan yang Kredibel dan Akuntabel dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Prima.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Rata-rata	85	96.43	113.45	96	94.08	98.00	98	96.96	98.94	99	97.42	98.40	98	99	101.02	101.96	
	Indeks Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	3.51	3.48	99.15	4.2	4.35	103.57	4.3	4.56	106.05	4.4	4.61	104.77	4.7	4.79	101.91	103.09	
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	Rata-rata												#DIV/0!	95	81.66	85.96	85.96	
	Indeks RB Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	85	50.45	59.35	77.8	77.81	100.01	79.8	89.06	111.60	81.8	90.51	110.65	91.51	90.25	98.62	96.05	
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	81	77.27	95.40	78.3	78.13	99.78	79.3	79.21	99.89	80.3	81.05	100.93	82.45	81.9	99.33	99.07	
	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	93	93.07	100.08	95.8	90.84	94.82	95.9	89.48	93.31	96.2	89.92	93.47	90.03	90.8	100.86	96.51	
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai Besar POM di Makassar	Rata-rata	88	100	113.64	88.5	100	112.99									#DIV/0!	113.32	

	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Rata-rata													81.56	95	116.48	116.48		
	Nilai Pengelolaan BMN	Rata-rata													49	95.59	195.08	195.08		
	Penggunaan Produk dalam Negeri	Rata-rata													60	64.06	106.77	106.77		
		Capaian Tahun ke 5 Renstra																		

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal pada semua Indikator Kinerja Utama antara lain pemetaan terhadap kondisi awal, rekomendasi perbaikan, progres rencana aksi, dan kondisi setelah rencana aksi yang dilaksanakan semua fungsi satker BBPOM d Makassar, seperti dalam matrik dibawah ini:

Tabel Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

No.	Indikator Kinerja	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Kendala	Rekomendasi dan Tindak Lanjut				Kondisi Sebelum Rencana Aksi Bulan/ Triwulan Sebelumnya	Kondisi Setelah Rencana Aksi Bulan/ Triwulan Sebelumnya
				Rekomendasi	Selesai	Belum			
						Rencana Aksi	Timeline		
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat tahun 2024 tidak mencapai target karena terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat, sebagai berikut : 1. Kosmetik 56 sampel, yang terdiri atas : - TMK : 53 sampel - TMS hasil uji : 2 sampel - TMK dan TMS uji : 1 sampel 2. Obat Tradisional : 11 sampel, yaitu TMK Penandaan 3. Suplemen Kesehatan : 8 sampel, yang terdiri atas : TMK : 1 Sampel TMS hasil uji : 7 Sampel 4. Obat kuasi : 1 sampel TMK	Banyaknya sampel yang masih TMK Penandaan menunjukkan pelaku usaha belum paham atau kurang peduli terhadap aturan label dan penandaan.	1. Sampel TMK Penandaan sebaiknya tidak menjadi penentu hasil TMS 2. Definisi operasional dan penetapan IKU untuk Renstra 2025-2029 perlu ditinjau ulang, agar evaluasinya lebih rasional dan dapat dikendalikan internal.	Draft Renstra 2025-2029 sudah tidak memperhitungkan persentase produk yang Memenuhi syarat hasil pengujian maupun Memenuhi ketentuan Penandaan.	Pada tahun 2025, Evaluasi penandaan tidak menjadi salah satu faktor penentu TMS dan terdapat pembaharuan ketentuan sampling dan pengujian dalam Pedoman Sampling 2025, yaitu semua sampel adalah Targeted .	2025	Persentase Capaian Indikator pada bulan November adalah 94,64%.	Terdapat kenaikan persentase Capaian Indikator pada bulan Desember yaitu: 94,90 % namun masih belum mencapai target tahunan.

		Penandaan 5. Obat : 3 sampel yang TMS hasil uji.							
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	-Tidak Tercapainya target Persentase Makanan yang memenuhi syarat tahun 2024 karena: Jumlah Sampel Tidak Memenuhi Syarat 2024 : 66 sampel, terdiri dari: * TMK Penandaan: 36 sampel (55 %) * TMK Penandaan dan TMS Uji: 8 sampel (12 %) * TMS Uji : 22 sampel (33 %)	Terdapat alat penunjang Nitrogen evaporator yang mengalami kerusakan, sehingga memperpanjang waktu pengujian.	Pada tahun 2025, jumlah sampel TMK penandaan tidak menjadi penentu TMS sampel.	ampel selesai uji sesuai Timeline.	Pada tahun 2025, Evaluasi penandaan tidak menjadi salah satu faktor penentu TMS.	2025	Persentase Capaian Indikator pada bulan November adalah 112.65%.	Terdapat penurunan persentase Capaian Indikator pada bulan Desember yaitu: 95,39 %.
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Tidak tercapainya target Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan karena : 1. adanya sampel yang TMK penandaan sehingga berpengaruh pada kesimpulan akhir TMS 2. Adanya sampel kadaluarsa yang tidak dilakukan pengujian namun menambah jumlah TMS.	Banyaknya sampel yang masih TMK Penandaan menunjukkan pelaku usaha belum paham atau kurang peduli terhadap aturan label dan penandaan.	1. Sampel TMK Penandaan sebaiknya tidak menjadi penentu hasil TMS 2. Definisi operasional dan penetapan IKU untuk Renstra 2025-2029 perlu ditinjau ulang, agar evaluasinya lebih rasional dan capaiannya dapat dikendalikan internal.	Pedoman Sampling 2025 hanya mengatur pelaksanaan sampling targeted.	Proporsi sampling disesuaikan profil UPT dan sampling tidak terbatas pada produk yang sudah terdaftar.	2025	Persentase Capaian Indikator pada bulan November adalah 93,89%.	Terdapat kenaikan persentase Capaian Indikator pada bulan Desember yaitu: 94,41 % namun masih belum mencapai target tahunan.
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Tercapainya target Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasrkan hasil pengawasan karena	Belum ada untuk Triwulan IV.	Percepatan pengujian sampel, dan pemanfaatan instrument sehingga tidak ada instrument	Sampel selesai uji sesuai Timeline.	Belum ada rencana aksi untuk tahun 2025.	-	Persentase Capaian Indikator pada bulan November adalah 101,22 %.	Terdapat penurunan persentase Capaian Indikator pada bulan Desember ,

		terselesaikannya pekerjaan pengujian laboatorium, dan tidak terdapat penambahan sampel yang Tidak Memenuhi Syarat dari bulan sebelumnya.		yang idle.					tapi masih dalam kategori baik sekali yaitu: 100, 86%.
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Tidak tercapainya Target Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat karena terdapat 20 sampel fortifikasi garam yang Tidak Memenuhi Syarat.	Jumlah fortifikan yang Tidak Memenuhi Syarat	- Koordinasi dengan Badan POM terkait kelangkaan KIO3 di peredaran yang menyebabkan produsen kesulitan untuk mendapatkan KIO3 - Sedang dilakukan upaya penanggulangan diantaranya FGD Monitoring dan Sinergi Pengawasan Pangan Fortifikasi sebagai kolaborasi antara praktisi, K/L, Asosiasi, NGO pada tanggal 18 Desember 2024.	-	Pada tahun 2025, Sampling dan pengujian fortifikasi dilakukan di sarana produksi	2025	Persentase Capaian Indikator pada bulan November adalah 85,09 %.	Persentase Capaian Indikator pada bulan Desember adalah 85,09 %. Tidak terdapat kenaikan capaian indikator.
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	- Pelaksanaan KIE tidak menjangkau keterwakilan masyarakat dari seluruh wilayah kerja Balai Besar POM di Masyarakat. - Belum optimal dalam mengiklankan postingan dalam media sosial.	1. KIE yang dilaksanakan secara langsung pada umumnya berlokasi di wilayah ibukota kabupaten / kota. 2. Kepedulia	1. Menjalin kemitraan dengan lintas sektor seperti pemda, media lokal dan institusi pendidikan dalam menyebarluaskan informasi obat dan	-	1. Publikasi informasi obat dan makanan melalui media lokal 2. Publikasi postingan dalam bentuk iklan secara rutin.	Mulai Januari 2025	-	-

			n masyarakat yang rendah untuk membuka dan membaca informasi yang dipublikasi melalui media.	makanan 2. Menjalin kerjasama dengan pelaku usaha dan sarana layanan kesehatan dalam menyampaikan informasi obat dan makanan. 3. Publikasi postingan dalam bentuk iklan secara ruitn					
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Capaian Indikator Kinerja BBPOM di Makassar untuk indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Bulan September tahun 2024 97.72 % ldengan responden 111 lebih tinggi dari target yaitu 97,7%	1. Telah dilaksanakan bimtek pendampingan pelaku usaha dimana responden belum memahami tahapan pendampingan sehingga pengisian survei belum maksimal 2. jumlah responden bulan September 99	Responden perlu mendapatkan penjelasan terkait pengisian survei peningkatan jumlah responden	-	Pemberiuan penjelasan kepada responden terkait pengisian survei pada saat kegiatan pendampingan pelaku usaha Peningkatan jumlah responden	Januari - Desember 2025	Responden belum mengerti cara pengisian survei	Jumlah responden 0
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	1. Konsumen belum memahami dengan jelas spesifikasi jenis layanan	Responden tidak memberikan poin maksimal dalam	1. Melakukan sosialisasi lebih intensif lagi dan penjelasan yang lebih	-	Memberikan penjelasan spesifik kepada setiap respon tentang pengisian	Mulai Januari 2025	-	-

		yang diberikan oleh BBPOM di Makassar, konsumen beranggapan bahwa layanan yang diberikan adalah layanan hingga terbit izin edar bukan hanya layanan sampai tahap sertifikasi. 2. Waktu penyelesaian layanan masih dirasakan lambat oleh masyarakat. Beberapa pelanggan menghitung waktu penyelesaian layanan secara keseluruhan termasuk ketika tahapan penyelesaian layanan pada posisi pelanggan . 3. Pelanggan sering mendapatkan Informasi dari sumber yang tidak jelas bahwa biaya / tarif pelayanan di BBPOM mahal, atau informasi dari pelanggan sebelumnya yang dalam melakukan pengurusan izin edar dilakukan oleh pihak ketiga.	menilai survei padahal komentar yang diberikan pada umumnya menyampaikan pelayanan yang diberikan sudah maksimal.	detail tentang jenis/ spesikasi layanan, tarif dan waktu penyelesaian. 2. Memberikan penjelasan spesifik kepada setiap respon tentang pengisian survey.		survey.			
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Target Indikator Kinerja Presentase Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang	-	-	-	-	-	-	-

		dilaksanakan pada tahun 2024 95%, terdiri dari 4 komponen yaitu : - keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. - rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. - rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain. - rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Upaya untuk menunjang keberhasilan diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antara Tim Inspeksi dengan PIC/Katim.							
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Capaian Indikator Kinerja Presentase Keputusan/ Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	-	-	-	-	-	-	-

		pada tahun 2024 : 111,75 %, terdiri dari 2 komponen yaitu : - keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha sebanyak 36 sarana, dan di TL oleh pelaku usaha 29, - rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Lintas sektor sebanyak 0 sarana dan di TL oleh Lintas Sektor 0.							
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 98% dengan target 624 terdiri dari 11 komponen yaitu - Rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB terdapat 1 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 3 - Rekomendasi pemenuhan aspek CPKB terdapat 1 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 3	1. Penerbitan IP CPPOB UMK Pangan mengalami Peningkatan 2. Penyelesaian CAPA CPOTB oleh UMKM OT membutuhkan waktu lama karena sarana belum siap dan pelaku usaha sudah mengajukan disistem 3. Penyelesaian CAPA terkait dokumentasi CPKB oleh UMKM Kosmetik membutuhkan waktu lama karena sarana	1. Menyelenggarakan desk konsultasi IP CPPOB, memberikan respon cepat terkait permasalahan IP CPPOB. 2. Menyelenggarakan desk konsultasi SPA CPOTB,memberikan respon cepat terkait permasalahan SPA CPOTB Bertahap	-	Melaksankan bimtek/desk/pendampingan pelaku usaha	Januari - Desember 2025	Pelaku usaha belum memahami CPPOB,CPOTB dan CPKB	Telah dilaksanakan pendampingan pelaku usaha

		- Penerbitan izin penerapan CPPOB skala menengah besar terdapat 1 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 2 - IP CPPB skala UMKM terdapat 5 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 10 - Pemeriksaan penerbitan IP CPPOB sebanyak 4 sarana - SMKPO sebanyak 0 sarana - PBF terdapat 2 permohonan dan jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diterbitkan 2 - Rekomendasi Notifikasi Terdapat 0 permohonan - Penerbitan SKI SKE terdapat 18 pengajuan - Sertifikat LHU sampel Pihak ke 3 sebanyak 94 LHU - Hasil pemeriksaaan sarana produksi SK target 0	belum siap dan pelaku usaha sudah mengajukan disistem						
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target, tim kerja inspeksi perlu melakukan upaya komunikasi yang baik kepada pelaku usaha dan lintas sektor dalam hal melakukan	Ketidakmampuan pelaku usaha/penanggungjawab untuk memahami dan memperbaiki suatu ketidaksesuaian dalam pelaksanaan	Untuk memenuhi / lebih memperbaiki pencapaian persentase Sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan , perlu dilakukan	-	Melaksanakan Bimtek kepada pelaku usaha produksi OMKA	TW 1 2025	Persentase Capaian Indikator pada bulan November adalah 77,17 %.	Persentase Capaian Indikator pada bulan Desember adalah 76,70 %. Tidak terdapat kenaikan capaian indikator.

		tindaklanjut/ Pembinaan.	penerapan cara produksi Obat dan Makanan Yang Baik.	Bimbingan terkait Cara Produksi Obat dan Makanan di sarana produksi OMKA bagi pelaku usaha, serta meningkatkan komunikasi dengan baik kepada pelaku usaha					
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang terperiksa hingga bulan Desember sebanyak 1216 Sarana , terdapat 1007 Sarana yang Memenuhi Ketentuan sehingga persentase sarana yang Memenuhi Ketetntuan adalah 82,81% melebihi target yaitu 80% (capaian =103,52% %), Penerapan cara distribusi Obat dan Makanan yang Baik oleh pelaku usaha/penanggungjawab sarana cukup optimal.	Ketidakmampuan pelaku usaha/penanggungjawab untuk memahami suatu ketidaksesuaian dan bagaimana memperbaikinya dalam pelaksanaan penerapan cara distribusi Obat dan Makanan Yang Baik	Untuk memenuhi pencapaian persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan , perlu dilakukan Bimbingan terkait Cara Distribusi Obat dan Makanan di sarana distribusi OMKA bagi pelaku usaha	Telah dilakukan kegiatan peningkatan kapasitas Apoteker penanggungjawab sarana pelayanan Kesehatan Terkait Antimicrobial Resisteance (AMR) pada tanggal 5 Oktober 2024	Pembinaan ke pelaku usaha dan pemberian sanksi administratif, Melaksanakan bimtek bagi pelaku usaha/Penanggungjawab sarana terutama yang sarananya masih Tidak Memenuhi Ketentuan dengan fokus pada penerapan Cara Distribusi OMKA yang Baik termasuk penyaluran antimikroba sehingga dapat mencegah terjadinya Resistensi Antimikroba.	TW IV 2024	Pencapaian target sarana distribusi yang memenuhi ketentuan masih kurang dari 80 %.	Pencapaian target sarana distribusi yang memenuhi ketentuan telah mencapai 80 % bahkan lebih dari 80%.
15	Indeks Pelayanan Publik	Senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan dan konsisten dalam melakukan penyediaan untuk pemenuhan segala sarana dan prasarana yang	Belum tersedia tempat / ruangan bagi pelanggan yang membawa makanan dan ingin makan di tempat.	1. Pemenuhan persyaratan fasilitas layanan untuk kelompok rentan. 2. Keikutsertaan dalam kompetisi inovasi layanan pubik.	1. Ikut serta dalam kompetisi inovasi yang dilaksanakan oleh BPOM (KOIN) 2. Mengikut pelatihan bahasa isyarat (Irmah Azis dan A. Ummi	1. Menyiapkan fasilitas layanan untuk kelompok rentan sesuai dengan standar. 2. Menyiapkan fasilitas layanan publik berbasis HAM	TW IV 2025	Nilai aspek inovasi 4	Nilai aspek inovasi 4,5

		dipersyaratkan.		3. Pelayanan publik berbasis HAM	Angkani)				
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Target Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada tahun 2024 akumulasi 100 % dimana pada bulan September 70 % dimana telah terdata pelaku usaha yang akan di dampingi pada tahun 2024 yaitu 20 pelaku usaha untuk CPPOB, 5 pelaku usaha untuk CPKB dan 4 pelaku usaha untuk CPOTB.	Pelaku usaha belum memahami persyaratan pengajuan izin edar terutama persyaratan sarana produksi dan pembuatan SOP.	Pendampingan kepada pelaku usaha.	-	Pendataan pelaku usaha yang akan diikutkan dalam Pendampingan akan diawali dengan pemberian Bimtek kepada pelaku usaha.	Desember 2024	Pelaku usaha belum pernah mengikuti Bimtek tentang CPPOB, CPKB dan CPOTB	Telah terdata pelaku usaha yang akan diikutkan dalam Pendampingan akan diawali dengan pemberian Bimtek (20 Pelaku usaha untuk CPPOB, 5 Pelaku Usaha Untuk CPKB dan 4 pelaku usaha untuk CPOTB
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan KIE memadai dan materi disampaikan secara menarik, materi tematik dan dilaksanakan sampai daerah pelosok kepada masyarakat yang untuk pertama kalinya mengikuti kegiatan secara langsung dari BPOM.	'Pelaksanaan program KIE Tematik yaitu Keamanan Pangan dan Laik Higiene Sanitasi, KIE Keamanan Pangan Keluarga dan langsung mengundangan seluruh pihak yang terlibat dan pelaksanaannya dilaksanakan atas dasar kondisi riil yang terjadi di masyarakat.	'Peserta yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi pelaksanaan ada yang tidak sempat hadir.	'Menyampaikan kepada setiap peserta untuk menjadi pelanjut informasi untuk keluarga, teman, tetangga dan masyarakat lainnya.	Belum terdapat rencana aksi.	-	Sebelum pelaksanaan KIE, berdsasarkan pre test masih terdapat nilai pre test peserta dibawah 50.	Berdasarkan post test, setelah KIE, nilai post test pserta semuanya di atas 50.

18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 124 sekolah, sekolah yang diintervensi 16 sekolah di tahun 2020, 24 sekolah di tahun 2021, 28 sekolah di tahun 2022, 30 sekolah ditahun 2023 dan 26 sekolah di tahun 2024. Kabupaten yang menjadi target intervesi tahun 2024 adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Target bulan November 100. capaian 100 %. Hal ini karena pada bulan November tahapan kegiatan PJAS telah dilaksanakan seluruh tahapannya di masing masing lokus intervensi	Tim Keamanan Pangan sekolah masih ada yang belum bekerja optimal sehingga perlu meningkatkan semangat dengan intensif melakukan komunikasi	Koordinasi dengan sekolah dan OPD terkait lebih ditingkatkan	-	Tahapan Kegiatan PJAS intervensi tahun 2024 telah selesai dillaksanakan di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Gowa Kabupatan Takalar dan kabupaten Kepulauan Selayar dengan jumlah sekolah yang diintervensi adalah 26 sekolah.	Desember 2024	-	-
19	Jumlah desa pangan aman	Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 31 desa, desa yang diintervensi 4 desa di tahun 2020, 8 desa di tahun 2021, 7 desa di tahun 2022, 6 desa	'Koordinasi dengan kepala desa dan aparat desa lebih ditingkatkan sehingga potensi masalah yang timbul bisa diselesaikan	Koordinasi Pemerintah Desa lebih ditingkatkan	Pada bulan Desember 2024 telah dilaksanakan Monev untuk lokus intervensi Kabupaten Kepulauan Selayar dan pendampingan Lomba Desa seta mengirim Dokumen Desa	Tahapan Bulan Desember adalah Monitoring dan evaluasi di kabupaten Kepulauan Selayar dan Lomba Desa	Desember 2024	Kordinasi dengan Desa yang diintervensi untuk pelaksanaan kegiatan Monev dan Lomba Desa	pada bulan Desember 2024 telah dilaksanakan Monev untuk lokus intervensi Kabupaten Kepulauan Selayar dan Lomba Desa

		ditahun 2023 dan 6 desa di tahun 2024. Kabupaten yang menjadi target intervensi tahun 2024 adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Target bulan Desember 100, capaian 100 % Hal ini karena pada bulan Desember telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi untuk lokus intervensi di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember2024 di Hotel Reyhan Kab.Kep Selayar dan pendampingan Desa Bontosunggu untuk mengikuti Lomba Desa tahun 2024 selanjutnya tanggal 30 Desember 2024 Mengirim data dukung ke Pusat untuk mengikuti Lomba Desa Tahun 2024			Bontosunggu ke Pusat dalam rangka mewakili BBPOM Makassar untuk Lomba Desa		Desember / Februari 2024 (Revisi DIPA TW I masa perbaikan IKPA)		
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Pada tahun 2024, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah target kumulatif dari tahun 2020, yaitu 22 pasar, pasar yang diintervensi 2 pasar di tahun	Masih ditemukan kendala terkait dengan komitmen salah satu kepala pasar yang belum optimal sehingga	Koordinasi dengan Petugas Pengelola Pasar lebih ditingkatkan sehingga keberlangsungan program PPABK dapat	Bulan Desember 2024 tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Telah terealisasi seluruhnya	Belum terdapat rencana aksi	-	-	-

		2020, 6 pasar di tahun 2021, 5 pasar di tahun 2022, 4 pasar ditahun 2023 dan 5 pasar di tahun 2024. Kabupaten yang menjadi target intervesi tahun 2024 adalah Kabupaten Gowa, Kabupaten Takalar dan Kabupaten Kepulauan Selayar. Target bulanDesember 100 , capaian 100 %. Hal ini karena pada bulan Desember 2024 tahapan kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Telah terealisasi seluruhnya	diperlukan komunikasi dan koordinasi lebih intensif	bekelanjutan					
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jumlah sampel yang diuji sesuai standar tidak mencapai target tahun 2024, karena terdapat parameter disolusi sampel obat yang tidak dapat diuji karena BBPOM di Makassar belum memiliki Spektrofotometer Raman	Terdapat instrumen yang belum dimiliki Laboratorium, yaitu Spektrofotometer Raman dan tidak ada metode alternatif	Pedoman Sampling 2025 memberikan alternatif metode pengujian untuk parameter yang instrumennya jarang dimilik	Penyebut dalam formula pada bulan ke 12 sudah disesuaikan dengan Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji	Fungsi pengujian memperbaharui kemampuan uji dan fungsi inspeksi melakukan sampling berdasar kemampuan uji Laboratorium	2025	Persentase Capaian Indikator pada bulan November yaitu: 110,16 %	Persentase Capaian Indikator pada bulan Desember yaitu: 99,93 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji sesuai standar sesuai target tahun 2024	Terdapat alat penunjang Nitrogen evaporator yang mengalami kerusakan, sehingga memperpanjang	Percepatan pengujian sampel, dan pemanfaatan instrument sehingga tidak ada instrument yang idle	Sampel selesai uji sesuai standar	Optimalisasi penggunaan alat dan pengaturan pembagian pekerjaan sesuai parameter uji, disesuaikan antara sampel Rutin, regional dan	Desember 2024	Persentase Capaian Indikator pada bulan November yaitu: 111,11 %	Persentase Capaian Indikator pada bulan Desember yaitu: 100 %

			waktu pengujian			sampel pihak Ketiga.			
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Dengan adanya kemajuan progres Perkara : Perkara Tahun 2024 adalah sebanyak 10 perkara dengan dengan posisi berada pada: 1. SPDP sebanyak 2 perkara 2. P21 sebanyak 4 perkara 3. Tahap 2 sebanyak 4 perkara Sedangkan Perkara Carry over sebanyak 8 perkara dengan posisi berada pada: 1. P21 sebanyak 4 perkara 2. Tahap 2 sebanyak 4 perkara sehinga total persentase keberhasilan penindakan bulan Desember 2024 sebesar 81,77%	1. Penyidikan terhadap perkara terakhir baru dimulai di akhir tahun sehingga sulit mengejar penyelesaian perkara tersebut hingga Tahap 2. 2. Batasan waktu pelaksanaan koordinasi dengan CJS di akhir tahun yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu kasus dan perkara yang sedang ditangani.	1. Meningkatkan kegiatan patroli siber, kegiatan intelijen, wasmatlitrik hingga penindakan di awal tahun agar pertengahan hingga akhir tahun bisa fokus pada penyelesaian perkara yang ditangani. 2. Melakukan analisis penjejakan digital dan penajaman tren dan meningkatkan pelaksanaan intelijen untuk memperoleh gambaran potensi kejahatan di wilayah kerja BBPOM Makassar. 3. Meningkatkan intensitas dan kualitas koordinasi dengan IJCS untuk mendorong kemajuan perkara.	1. Melakukan analisis penjejakan digital dan penajaman tren kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah pengawasan BBPOM di Makassar 2. Meningkatkan frekuensi dan kualitas pelaksanaan intelijen dan wasmatlitrik di wilayah kerja BBPOM di Makassar	1. Melakukan patroli siber dan profiling secara intensif untuk memproleh data pelaku kejahatan beserta dugaan pelanggaran yang dilakukan 2. Melakukan kegiatan dan operasi intelijen dan dilanjutkan dengan operasi penindakan setelah diperoleh informasi yang akurat 3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas koordinasi dengan ICJS untuk mempercepat proses penyidikan dan penyelesaian perkara	-	Dengan adanya kemajuan progres Perkara : Perkara Tahun 2024 adalah sebanyak 8 perkara dengan dengan posisi berada pada: 1. Tahap 1 sebanyak 4 perkara 2. P21 sebanyak 1 perkara 3. Tahap 2 sebanyak 3 perkara Sedangkan Perkara Carry over sebanyak 8 perkara dengan posisi berada pada: 1. P21 sebanyak 4 perkara 2. Tahap 2 sebanyak 4 perkara sehinga total persentase keberhasilan penindakan bulan November 2024 sebesar 72,22%	Dengan adanya kemajuan progres Perkara : Perkara Tahun 2024 adalah sebanyak 10 perkara dengan dengan posisi berada pada: 1. SPDP sebanyak 2 perkara 2. P21 sebanyak 4 perkara 3. Tahap 2 sebanyak 4 perkara Sedangkan Perkara Carry over sebanyak 8 perkara dengan posisi berada pada: 1. P21 sebanyak 4 perkara 2. Tahap 2 sebanyak 4 perkara sehinga total persentase keberhasilan penindakan bulan Desember 2024 sebesar 81,77%

24	Indeks RB UPT	Telah terpantaunya capaian bulan Agustus September Oktober(Tw4) Pembobotan yang wajib terpenuhi untuk Penguatan sistem manajemen SDM adalah Komponen Pengungkit 10,00 terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform, dan bobot komponen pengungkit 7,81 (pemenuhan 4,74 (94,75%) dan reform 4,33 (86,67%) bobot komponen hasil 5,00 untuk capaian kinerja lebih baik. Dan dari hasil penilaian Auditor Internal sebelum desk TPN tanggal 11 Oktober, Memenuhi Syarat dengan nilai 94%. penilaian TPI berdasarkan surat Inspektur utama tgl 28 nov 2024, dengan nilai PMPZI 90,25	Belum ada	Informasi berkala dengan tim SDM sehingga target yang ingin dicapai dapat terealisasi dan pemantauan tgl 6 Des 2024	Undangan penyampaian hasil evaluasi zi oleh TPN tgl 4 Des 2024 untuk,menerima penghargaan predikat wbbm tanggal 11 Des 2024	Pertemuan berkala dengan menyiapkan dakung UANG (Undangan Absen Notulen dan Gambar/Foto)	04 Desember 2024	Apr-Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nov Des terealisasi	Terpantau
25	Nilai AKIP UPT	Pada pedoman/panduan dalam rangka pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja internal antara lain melalui aplikasi perencanaan dan pengukuran kinerja melalui e-performace (e-planning dan SIMETRIS), aplikasi	o Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan target	- BBPOM Makassar telah mengimplementasikan sistem maupun pedoman/panduan dengan memadai dan konsisten namun pengisian data pada aplikasi yang dibangun di BPOM masih belum	- Telah dilaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja triwulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan dan RATL dan monitoring tindak lanjut	- Mengaktifkan secara optimal Tim Monev BBPOM di Makassar serta setiap bulanan dan Triwulan setiap Ketua Tim menyusn Laporan Kinerja Triwulanan dilengkapi data dukung yang memadai dan valid serta	RTL dibuat Bualanan serta Pemenuhan pengisian LKE Tahun 2024 dalam tautan Dasikuka - Menindaklanjuti	Konsisten melaksnakan TL sesuai rekomendasi LHE SAKIP tahun 2023	Konsisten melaksnakan TL sesuai rekomendasi LHE SAKIP tahun 2023

		perencanaan dan pengukuran kinerja individu melalui SIMAKIN, BBPOM Makassar untuk Tahun 2023 dimana pengisian dilakukan hingga tgl 20 Januari 2024 telah berupaya untuk menyampaikan data yang memadai dan konsisten, pengisian data pada aplikasi yang dibangun di BPOM lengkap, berkala, maupun isian data telah selaras antar laporan. 2. Pemanfaatan aplikasi SIMETRIS (e-planning dan e-performance) dalam menginput data kinerja balai setiap bulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran kegiatan Balai Besar POM di Makassar serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja; 3. Telah menyajikan informasi kinerja dan telah dilakukan monitoring pencapaiannya per triwulan pada Laporan Kinerja interim yang disusun setiap	kinerja; o Menyusun kertas kerja penetapan/perubahan target indikator kinerja berdasarkan basis data yang memadai, perhitungan data/justifikasi yang komprehensif dan mempertimbangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya. 2. Pengukuran Kinerja o Mendokumentasikan dengan baik keterlibatan dan peran aktif pimpinan terkait kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi; o Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja dengan menambahkan mekanisme yang memadai dalam	sepenuhnya dilengkapi dan masih terdapat isian data tidak selaras antar laporan. '- Berupaya untuk meningkatkan capaian kinerja agar lebih baik dari Tahun sebelumnya.	pada periode sebelumnya - Melakukan pengawalan dengan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh Indikator Kinerja Utama disertai tindak lanjut rekomendasi untuk seluruh IKU Pada point 4 di LHE SAKIP 4. Evaluasi Kinerja Internal a. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan informasi: o menyajikan Upaya dan/atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja secara memadai; o Data monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode sebelumnya; o terdapat Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja. b. Berita Acara evaluasi internal agar	Rencana Tindak Lanjut Dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan, RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya	seluruh rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal dan melakukan monitoring secara memadaipada periode selanjutnya '- RTL dibuat Bualanan serta Pemenuhan pengisian LKE Tahun 2024 dalam tautan Dasikuka - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal dan melakukan monitoring secara memadaipada periode selanjutnya		

		triwulan; 4. Melakukan evaluasi internal setiap triwulan yang membahas realisasi capaian kinerja dan anggaran. Hasil evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja. 5. Komitmen pimpinan dan staf Balai Besar POM di Makassar. untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan dari berbagai aspek. 6. telah dilakukan upaya penyusunan SKP berdasarkan permenpan 8 tahun 2020 melalui aplikasi simakin yaitu cascading kinerja dari eselon 2 Pada SKP sudah terdapat indikator individu yang selaras dengan indikator kinerja ketua tim. dengan menyempurnakan pemetaan cascading indikator kinerja sampai level individu. 7. Semua rekomendasi APIP terhadap pelaksanaan SAKIP tahun 2021 telah	menangani perubahan/perbedaan data realisasi kinerja; o Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga adanya keselarasan data pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim dan Laporan Kinerja Tahunan. 3. Pelaporan Kinerja Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan informasi terkait: o Efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran strategis; o Upaya efisiensi yang telah dilakukan		ditandatangani oleh ketua tim evaluasi internal.		'- RTL dibuat Bualanan serta Pemenuhan pengisian LKE Tahun 2024 dalam tautan Dasikuka - Menindaklanjuti seluruh rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi kinerja internal dan melakukan monitoring secara memadaipada periode selanjutnya		

		ditindaklanjuti. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan dan telah memiliki inovasi Dasikuka (Pengendalian Sistem Keuangan atas Kinerja Akuntabilitas) dengan mengakses Manajemen File BBPOM di Makassar (berupa Dokumen Perencanaan, Dokumen Anggaran, Standar Operasional Prosedur, capaian kinerja dan monitoring evaluasi kinerja) yang digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan. Pengukuran kinerja telah dijadikan dasar dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien serta sebagai dasar pemberian Reward dan Punishment dengan judul program/inovasi "K-4 (Kinerjaku, Kinerjamu, Kinerja Kita)". 8. Pelaporan kinerja telah memberikan dampak dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam	maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya; o Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan. 4. Evaluasi Kinerja Internal a. Menyusun laporan evaluasi internal dengan menyajikan informasi: o Upaya dan/atau kendala dalam pencapaian indikator kinerja secara memadai; o Data monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi pada periode						

		mencapai kinerja berikutnya. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, serta mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. Telah diterapkan mekanisme reward dan punishment kepada individu di BBPOM di Makassar, berupa penurunan ataupun kenaikan nilai SKP yang kemudian berpengaruh kepada besaran tunjangan kinerja yang diterima.	sebelumnya; o Kertas kerja/data pendukung perhitungan capaian kinerja. b. Berita Acara evaluasi internal agar ditandatangani oleh ketua tim evaluasi internal. 5. Capaian Kinerja Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya						
26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Pantauan IP ASN sesuai aturan terbaru tercatat 86,95 dengan target 78 untuk 103 ASN.	Sulit menyatukan persepsi 103 pegawai	Pelaksanaan MPH untuk seluruh pegawai	Jadwal Desember 2024	Pelaksanaan MPH BBPOM di Mks	Jadwal Des 2024	Penyelesaian skp siklus pendek tw4	Terpantau BAIK
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	- Penambahan Ruang Lingkup telah berhasil dilaksanakan (19 metode) yaitu lab Obat 6 metode, lab Kosmetik 1 metode, Lab Pangan 8 metode, Lab Mikro 2 metode dan Lab OT 4	'1. Anggaran pengadaan peralatan masih terblokir (DUSA) 2. Pengembangan kompetensi dan SRL analisis menggunakan GCMS tahun 2024	'1. Anggaran pengadaan peralatan masih terblokir (DUSA) 2. Pengembangan kompetensi dan SRL analisis menggunakan GCMS tahun 2024	1. Identifikasi pemenuhan SKL (kompetensi, peralatan dan ruang lingkup pengujian) 2. Menyusun usulan rekomendasi pengadaan	1. Pelaksanaan pengadaan DUSA untuk uji sediaan inhaler (anggaran terblokir) 2. Penyiapan sampel, reagensia dan baku pembanding untuk	2025	Nilai pemenuhan 84,44 %	Nilai pemenuhan 89,96%

		metode sehingga diperoleh peningkatan pemenuhan SRL dari 87,73% menjadi 91,73%) - Penambahan kompetensi pengetahuan dan keterampilan personil lab sebanyak 25 kompetensi, peningkatan pemenuhan dari 89,10% menjadi 90,27%) - Pemenuhan terhadap standar peralatan mengalami peningkatan dari 84,72% menjadi 87,89% akibat pengadaan peralatan penunjang dan utama (GC MS) yang telah selesai proses pengadaannya, sebaliknya pengadaan DUSA belum terlaksana menunggu arahan P3OMN - Beberapa penyebab belum tercapainya pemenuhan RL laboratorium Obat, OT-SK, Kosmetik dan Mikrobiologi yaitu kesulitan untuk memperoleh sampel, reagensia dan baku pembanding. yang sulit serta pengadaan peralatan (GC-MS) diakhir tahun masih tahap uji fungsi dan belum	terkendala waktu pelaksanaan 3. Pelatihan internal tertunda pelaksanaannya terkendala ketersediaan GC MS 4. Pemenuhan kompetensi keterampilan terkendala pada metode yang tidak digunakan lagi dalam pengujian sehingga sulit terpenuhi	terkendala waktu pelaksanaan 3. Pelatihan internal tertunda pelaksanaannya terkendala ketersediaan GC MS 4. Pemenuhan kompetensi keterampilan terkendala pada metode yang tidak digunakan lagi dalam pengujian sehingga sulit terpenuhi	peralatan 3. Pengembangan kompetensi melalui magang (8 orang), pelatihan terpadu (10 orang), pelatihan internal (lab pangan, obat, OT, Kosmetik dan Mikrobiologi) 4. Koordinasi dengan tim inspeksi untuk penyiapan sampel 5. Pengadaan GC MS hingga tahap uji fungsi	pemenuhan SRL dengan koordinasi lintas fungsi telah dilaksanakan namun belum maksimal akibat keterbatasan anggaran dan ketersediaan barang		

		memungkinkan digunakan untuk pengujian. - Peningkatan kompetensi pengetahuan dan keterampilan masih terkendala GC MS yang masih tahap uji fungsi. - Beberapa peralatan yang masuk dalam standar peralatan tidak digunakan dalam pengujian sampel di lab manapun seperti refraktometer dsb							
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks Pengelola Data dan Informasi terutama pada Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT dan pemanfaatan email coorporate.	Mempertahankan dan meningkatkan capaian indeks PDI terutama pada Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan di BOC - SIPT dan pemanfaatan email coorporate.	-	-	1. Penyampaian informasi kepada Ketua Tim di Fungsi Inspeksi untuk lebih memaksimalkan input pemeriksaan sarana dan pada Ketua Tim pada Fungsi Pengujian untuk meningkatkan input hasil uji. 2. Penyampaian informasi kepada Kepala Balai untuk memanfaatkan dashboard BOC dengan login dan mengakses. 3. Penyampaian informasi kepada Pegawai BBPOM di Makassar untuk memanfaatkan email coorporate.	Desember 2024	Capaian indikator triwulan sebelumnya belum mencapai target, 3.	Capaian indikator triwulan IV sudah mencapai target, 3.

29	Nilai Kinerja Anggaran UPT	NKA dihitung berdasarkan nilai EKA dan IKPA.	- Pengelolaan UP dan TUP perlu di cermati agar pemenuhan pada bobot ini dapat maksimal dimana varibel ini berdasarkan pada ketepatan waktu; % GUP disebulankan dan persentase setoran TUP - Indikator deviasi halaman III DIPA pada Nilai IKPA tidak memnuhi bobot nilai 15 - Indikator penyerapan anggaran tidak memenuhi bobot 20 - Indikator belanja kontraktual tidak memenuhi bobot 10	- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana. - Memastikan Halaman III DIPA menjadi alat kendali bagi KPA dalam pencapaian kinerja dan output serta sasaran program/kegiatan Satker.	- Terdapat realisasi Fisik dan Realisasi anggaran pada RO CAB dan RAB sehingga Capaian Output dapat sesuai dengan bobot maksimal yaitu nilai 25 - Mengoptimlkan agar Target penyerapan anggaran triwulanan ditetapkan untuk masing-masing jenis belanja dengan komposisi (TW 1 Belanja Pegawai 20 %; Belanja Barang 15 % dan Belanja Modal 10%) dapat terpenuhi	- Memastikan deviasi antara pelaksanaan dengan rencana yang tercantum pada Halaman III DIPA tidak melebihi 5% (lima persen)	2025	Capaian Output pada IKPA 20,83 dari bobot maksimal 25	Capaian Output pada IKPA 25,00 dari bobot maksimal 25
30	Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	1. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan stakeholder terkait pada pemda Kabupaten / Kota Setempat. 2. Menjadi narasumber dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh pemda kabupaten / kota.	-	-	-	-	-	-	-
31	Nilai Pengelolaan	Perapihan dan proses	Kendala dalam	Pertemuan tim UK dan	Beberapa saran auditor	Update pembenahan	Tw4 Tahun 2024	Sebelum pengawasan	Terpantau

	Kearsipan	pembenahan berkelanjutan untuk arsip dinamis sesuai standar pengelolaan arsip sesuai hasil audit	pengelolaan kearsipan sarana dan prasarana	UP untuk menyamakan persepsi standar pengelolaan arsip di UP dan UK	internal di ruang Record center, ruang arsip aktif, update dokumen arsip aktif yang perlu disiapkan secara berkelanjutan	arsip dan persiapan peralatan record center, CENTRAL ARSIP		arsip kondisi arsip UK dan UP : Arsip belum tertata lebih tertib pemberkasan Arsip Aktif, belum tertata Arsip Inaktif	
32	Nilai Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	Selesai proses kegiatan pengadaan	Beberapa penyedia belum melakukan penginputan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga paket belum seluruhnya dapat diselesaikan (Status Paket Selesai)	Konsistensi untuk melakukan penginputan pada LPSE untuk setiap paket yang statusnya telah selesai dilaksanakan.	Melakukan pemantauan penginputan pada LPSE untuk setiap paket yang statusnya telah selesai dilaksanakan.	'- Memaksimalkan kinerja anggota tim untuk memastikan penginputan pada LPSE dan SIRUP sudah sesuai - Koordinasi dengan penyedia untuk proaktif melengkapi paket	'- Maksimal 30 HK untuk setiap paket yang telah selesai dilaksanakan	Terdapat > 10 % Penyedia belum melakukan penginputan surat jalan yang merupakan salah satu tahapan untuk menyelesaikan penginputan pada LPSE	Terdapat < 5 % Penyedia belum melakukan penginputan surat jalan yang merupakan salah satu tahapan untuk menyelesaikan penginputan pada LPSE
33	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Selesai proses kegiatan pengelolaan BMN (uji coba sensus dengan SIMAN 2 utk pengelolaan BMN)	SDM Pengelola BMN yang masih kurang baik dalam jumlah maupun kompetensi ditambah lagi dengan penugasan sebagai korwil	Konsistensi serta peningkatan pengelolaan BMN dengan baik, akurat dan tepat waktu	Melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan BMN .	- Memaksimalkan kinerja anggota tim dalam pengelolaan BMN - Melengkapi kompetensi SDM di bagian pengelolaan BMN	Desember 2024	Capaian realisasi cukup	capai realisasi sangat baik
34	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam negeri	Selesai proses Pengadaan berbasisi PDN	PBJ Pengelola PDN yang masih kurang, juga perlu Kolaborasi informasi dan masukan dari pengelola BMN terkait PDN, ditambah lagi dengan penugasan pengelola BMN	Tim di fungsi-fungsi mengupdate kebutuhan barang dan mesin sesuai katalog PDN, jika tidak ada baru mengajukan pengadaan selain PDN	Selesai di Bulan Oktober 2024	Belum terdapat Rencana Aksi	Desember 2024	Belum dapat diukur	Terukur

			sebagai korwil sehingga masih terjadi inkonsistensi Kolaborasi informasi						

Bab IV

Penutup

Laporan Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil perhitungan capaian sasaran, pengukuran kinerja kegiatan dan evaluasi yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran strategis yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2024 telah dapat dicapai secara maksimal. Capaian kinerja organisasi sesuai penilaian 11 sasaran strategis yang telah dilaksanakan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Laporan Kinerja Tahun 2024 BBPOM di Makassar merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan visi dan misi melalui pencapaian sasaran strategis/kegiatan yang telah ditetapkan dan sepenuhnya mengacu pada Reviu Rencana Strategis BBPOM di Makassar tahun 2020-2024.

Tahun 2024 merupakan tahun kelima dari periode Rencana Strategis 2020-2024, serta evaluasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra BBPOM di Makassar tahun 2020-2024 dan DIPA tahun 2024 Untuk menunjang pencapaian 11 sasaran strategis dan 34 indikator tersebut, telah dilakukan 21 kegiatan utama.

1. 11 sasaran strategis tahun 2024, diperoleh 7 sasaran strategis kategori “Sangat Baiki”; 4 sasaran strategis kategori “Cukup”.
2. 11 sasaran strategis yang dievaluasi 8 sasaran strategis kategori “ Sangat Baik” dan. 3 sasaran strategis kategori “Cukup”,
3. Hasil capaian tiap sasaran strategis adalah sebagai berikut :
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 94,18 % dengan kriteria “Cukup”, menunjukkan belum optimalnya BBPOM di Makassar dalam mewujudkan Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup BBPOM di Makassar pada Tahun 2024.
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 93,04 % dengan kriteria “Cukup”, menunjukkan belum optimalnya BBPOM di Makassar dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2024.
    - Capaian Indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 100,18 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2024.
    - Capaian Indikator Kinerja Utama pada sasaran strategis keempat sebesar 102,14 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja BBPOM di Makassar.
    - Capaian Indikator pada. sasaran strategis kelima sebesar 100,15 % dengan kriteria “Sangat Baik”, menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar pada Tahun 2024.

- Capaian Indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 109,97 % dengan kriteria "Sangat Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja BBPOM di Makassar, serta telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada BBPOM di Makassar dalam pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan pada Tahun 2024.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 84,30 % dengan kriteria "Cukup", menunjukkan kurang optimalnya keberhasilan BBPOM di Makassar dalam meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan pada wilayah kerja BBPOM di Makassar, serta masih dibutuhkan tindak lanjut terhadap rekomendasi pada BBPOM di Makassar dalam penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis delapan sebesar 101,14 % dengan kriteria "Sangat Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan UPT yang optimal pada Tahun 2024.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis sembilan sebesar 100,46 % dengan kriteria "Sangat Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam mewujudkan SDM BBPOM di Makassar yang berkinerja optimal pada Tahun 2024.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis sepuluh sebesar 112,65 % dengan kriteria "Sangat Baik", menunjukkan keberhasilan BBPOM di Makassar dalam menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan pada Tahun 2024.
- Capaian Indikator pada sasaran strategis kesebelas sebesar 111,037 % dengan kriteria "Sangat Baik" menunjukkan optimalnya tindak lanjut terhadap rekomendasi oleh BBPOM di Makassar dalam mengelola Keuangan BBPOM di Makassar secara Akuntabel pada pada Tahun 2024.

Pada Tahun 2024 BBPOM di Makassar melaksanakan 21 (dua puluh satu) kegiatan utama untuk mendukung pencapaian 11 sasaran strategis dengan hasil empat belas kegiatan efisien. Nilai Tingkat Efisiensi (TE) kegiatan diperoleh bervariasi antara 0 – 0,24 . Dalam hal ini, semakin tinggi TE maka semakin rendah ketidakefisienan yang terjadi. TE tertinggi karena output melampaui 100 % dari target dengan persentase penyerapan anggaran lebih rendah dibandingkan dengan persentase output. 21 kegiatan utama termasuk kategori efisien.

4.2. SARAN

Sehubungan dengan capaian kinerja tersebut, BBPOM di Makassar terus melakukan upaya-upaya perbaikan secara berkesinambungan demi peningkatan kinerja BBPOM di Makassar untuk masa mendatang :

- Memperhatikan rekomendasi Inspektur Utama tentang hasil Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2024 dengan memanfaatkan pengukuran data kinerja sebagai acuan dalam memberikan *reward* dan *punishment* hingga tataran indidu pegawai.
- Menyajikan narasi pada renstra selanjutnya bahwa indikator tujuan sama dengan sasaran strategis.
- Menyajikan narasi mengenai latar belakang terjadinya perubahan anggaran serta upaya yang telah dilakukan dalam efisiensi sumber daya/anggaran pada Laporan Kinerja

- Menuangkan pembahasan terkait perubahan lingkungan internal dan eksternal yang menyebabkan perubahan target dan/atau indikator kinerja pada laporan evaluasi internal dan Laporan Kinerja Interim.
- Memanfaatkan evaluasi internal secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja sertamempertahankan upaya perbaikan secara terus-menerus (*continuous improvement*).

Lampiran

Capaian IKU~ Tahun 2021

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: HARIANI
Jabatan	: Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, 12 September 2024

Pihak Pertama Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar	Pihak Kedua Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
HARIANI	TARUNA IKRAR

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	98.2 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	93.3 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92.8 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95.5 %
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	87 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.2 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80 %
		06 - Indeks Pelayanan Publik	4.7 Nilai
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 %
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 %
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7 Nilai
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	124 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		03 - Jumlah desa pangan aman	31 Nilai
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	22 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100 %
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	97 %
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	85.44 %
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	85 Nilai
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	97.7 Nilai
		02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	80 Nilai
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95.5 Nilai
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	91.51 Nilai
		03 - Nilai AKIP UPT	82.45 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	89.47 Nilai
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	86.85 Nilai
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.03 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	81.56

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
			Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	49 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 %

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 51.666.112.000 (Lima Puluh Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	23.602.325.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	25.684.331.000

Makassar, 12 September 2024

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

HARIANI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI BESAR POM DI MAKASSAR
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat		98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	98.2	762.312.600
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat		93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	598.629.000
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	92.8	508.208.400
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan		95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	95.5	399.086.000
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	42.285.000
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	48.168.000
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	32.112.000
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	142.834.000
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	71.2	292.690.000
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	1.642.720.000
		06 - Indeks Pelayanan Publik	0	0	0	0	0	0	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	461.661.000
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	5	10	15	20	30	40	50	60	70	80	90	100	111.224.000
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	134.618.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	95.7	3.913.239.000
		02 - Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	4	8	15	30	44	52	57	66	76	85	94	124	1.017.105.000
		03 - Jumlah desa pangan aman	4	9	14	19	27	40	52	64	72	80	88	31	1.091.866.000
		04 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	5	13	20	43	59	70	81	82	91	95	99	22	604.009.000
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	3	7	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	2.143.676.400
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4.3	8	15	20	25	40	50	60	70	80	90	100	1.429.117.600
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	12	15	25	35	40	45	50	60	70	75	80	97	1.475.332.000
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	01 - Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.44	4.262.500.000
		02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	409.070.000
7.	07 - Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	01 - Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	76.404.000
8.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap	01 - Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.7	296.174.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	kinerja pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	148.636.000
		03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.5	48.278.000
9.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	02 - Indeks RB UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.51	20.174.689.000
		03 - Nilai AKIP UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.45	354.045.000
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89.47	30.672.000
10.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.85	510.094.000
11.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	25	35	58	0	0	0	0	0	0	0	0	90.03	1.604.807.000
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.56	4.982.405.000
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	1.791.140.000
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	126.305.000
														Total	51.666.112.000

Makassar, 15 May 2024

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar

Dra. Hariani, Apt

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran

Capaian IKU- Tahun 2024

IKU 1-5

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
5. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Indikator Kinerja Utama 1 : Persentase Obat yang memenuhi syarat

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember														
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
													MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
	Total Obat		362	Random	372	0	0	0	0	372	372	369	3	0	0	0	3,00	0	372
	Total Obat Tradisional		237		238	0	0	0	11	238	238	227	11	0	0	0	11	0	238
	Total Obat Kuasi		16		17	0	0	0	1	17	17	16	1	0	0	0	1	0	17
	Total Suplemen Kesehatan		63		63	0	0	0	1	63	63	55	8	0	0	0	8	0	63
	Total Kosmetik		474		471	0	0	0	54	471	471	415	56	0	0	0	56	0	471
	Makassar		1152	Random	1161	0	0	0	67	1161	1161	1082	79	0	0	0	79	0	1161
	Palopo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	Total Random Obat, OT, Sk dan Kos		1152		1161	0	0	0	67	1161	1161	1082	79	0	0	0	79,00	0	1161

Indikator Kinerja Utama 2 : Persentase Makanan yang memenuhi syarat

No	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	1	Pangan	Mak	599		600	0	0	0	44	600	600	534	66	0	0		66	0	600
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
			Palo		Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	1	Pangan	Mak assa r	141		163	0	0	0	40	163	163	157	6		0		6	0	163
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
					Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
			Palo			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	Total Pangan Balai			599	Random	600	0	0	0	44	600	600	534	66	0	0	0	66	0	600
	Total Pangan Balai			141	Targeted	163	0	0	0	40	163	163	157	6	0	0	0	6	0	163

Indikator Kinerja Utama 3 : Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember															
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
													MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
	Total Obat		90	Targeted	76	0	3	0	0	73	73	73	0	0	0	0	3,00	0	76
	Total Obat Tradisional		101		100	1	0	0	0	99	99	95	4	0	0	0	5	0	100
	Total Obat Kuasi		7		7	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	0	0	0	7
	Total Suplemen Kesehatan		27		28	0	0	0	0	28	28	27	1	0	0	0	1	0	28
	Total Kosmetik		203		213	0	0	0	37	213	213	171	42	0	0	0	42	0	213
	Total Rokok		0		4	0	0	0	0	4	4	2	2	0	0	0	2	0	4
	Makassar		428	Targeted	428	1	3	0	37	424	424	375	49	0	0	0	53,00	0	428
	Palopo		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Indikator Kinerja Utama 4 : Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

No	No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember														
						Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
							TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
														MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar																			
	1	Pangan	Mak	599		600	0	0	0	44	600	600	534	66	0	0		66	0	600
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
					Random	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	1	Pangan	Mak assa r	141		163	0	0	0	40	163	163	157	6		0		6	0	163
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
					Targeted	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
						0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	Total Pangan Balai			599	Random	600	0	0	0	44	600	600	534	66	0	0	0	66	0	600
	Total Pangan Balai			141	Targeted	163	0	0	0	40	163	163	157	6	0	0	0	6	0	163

Indikator Kinerja Utama 5 : Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

No	Jenis Produk	UPT	Target 1 tahun sesuai pedoman sampling	Metode Sampling	Desember															
					Jumlah sampling	TMK			TMK Label / Penandaan	Jumlah sampel masuk Lab	Jumlah Sampel yang diuji	Hasil uji					Total TMS yang diperiksa	Belum selesai uji	Perhitungan Output DJA
						TIE/ Ilegal/ Palsu	kedaluarsa	rusak				MS (MK penandaan dan MS uji lab) *	TMS						
													MK Penandaan dan TMS uji lab **	TMK Penandaan dan MS Uji Lab ***	TMK Penandaan dan TMS uji lab ****	TMS Uji (Khusus Pangan Purposive)			
2	Fortifikasi	Makassar	95	Targeted	77	0	0	0	25	77	77	57	20		0		20	0	77
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
		Palopo			0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0
	Total Pangan		95	Targeted	77	0	0	0	25	77	77	57	20	0	0	0	20	0	77

IKU 6

Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja BBPOM di Makassar

Indikator Kinerja Utama 6 : Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
25	Balai Besar POM di Mataram	510	82,00	83,15	101,41%
26	Balai POM di Kupang	530	78,20	78,85	100,83%
27	Balai Besar POM di Pontianak	480	87,00	86,67	99,62%
28	Balai Besar POM di Palangkaraya	450	87,50	92,60	105,83%
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	510	89,00	86,69	97,41%
30	Balai Besar POM di Samarinda	470	88,80	88,98	100,20%
31	Balai POM di Tarakan	460	89,50	91,11	101,80%
32	Balai Besar POM di Manado	430	92,00	92,71	100,77%
33	Balai POM di Palu	540	85,00	84,52	99,44%
34	Balai Besar POM di Makasar	500	85,00	79,08	93,03%
35	Balai POM di Palopo	500	85,00	89,69	105,52%
36	Balai POM di Kendari	500	84,00	83,73	99,68%
37	Balai POM di Gorontalo	490	89,00	83,48	93,80%
38	Balai POM di Mamuju	560	78,00	80,67	103,43%
39	Balai POM di Ambon	550	85,00	79,39	93,40%
40	Balai POM di Sofifi	540	84,00	77,94	92,78%
41	Balai POM di Manokwari	520	89,00	85,54	96,11%
42	Balai Besar POM di Jayapura	570	67,50	74,09	109,76%
Nasional		**20,610**	**85,00**	**88,09**	**103,64%**

IKU 7

Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama 7 : Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

Tabel 2. Capaian Indeks Balai Besar/Balai POM Tahun 2024

No	Unit Penyelenggara KBP	Target	Capaian Indeks	Persen Capaian	Jumlah KBP	Jumlah Responden
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	96,2	99,49	103,42%	8	76
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	97,3	98,02	100,74%	4	178
3	Balai Besar POM di Bandung	97,5	97,55	100,05%	29	468
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	98,7	99,82	101,13%	7	65
5	Balai Besar POM di Denpasar	95,8	96,20	100,41%	30	667
6	Balai Besar POM di Jakarta	95,2	97,94	102,88%	75	1187
7	Balai Besar POM di Jayapura	94,6	96,49	102,00%	5	22
8	Balai Besar POM di Makassar	97,7	97,72	100,03%	4	134
9	Balai Besar POM di Manado	99,3	99,45	100,15%	24	203
10	Balai Besar POM di Mataram	97,9	97,68	99,78%	10	196
11	Balai Besar POM di Medan	98,6	98,39	99,79%	8	210
12	Balai Besar POM di Padang	98,7	99,91	101,28%	10	49
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	95,6	96,15	100,57%	5	40
14	Balai Besar POM di Palembang	99,0	98,85	99,85%	11	252
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	99,2	99,44	100,24%	11	430
16	Balai Besar POM di Pontianak	97,2	98,09	100,92%	11	88
17	Balai Besar POM di Samarinda	95,8	97,63	101,91%	11	152

IKU 8

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Utama 8 : Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

No	Balai Besar/Balai POM	Jumlah Sampel	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian
3	Balai Besar POM di Padang	490	80,01	87,73	109,65%
4	Balai POM di Payakumbuh	490	77,87	75,21	96,59%
5	Balai Besar POM di Pekanbaru	500	77,80	82,36	105,86%
6	Balai POM di Jambi	490	80,00	81,92	102,40%
7	Balai Besar POM di Palembang	490	80,01	80,60	100,74%
8	Balai POM di Bengkulu	480	81,88	83,97	102,55%
9	Balai Besar POM di Bandar Lampung	440	87,60	88,74	101,31%
10	Balai POM di Pangkalpinang	500	81,30	85,11	104,69%
11	Balai POM di Batam	480	76,30	80,20	105,11%
12	Balai Besar POM di Jakarta	460	80,16	85,89	107,15%
13	Balai Besar POM di Bandung	470	85,01	88,57	104,19%
14	Balai POM di Tasikmalaya	470	87,54	83,18	95,02%
15	Balai POM di Bogor	470	82,63	84,91	102,75%
16	Balai Besar POM di Semarang	520	76,90	79,88	103,88%
17	Balai POM di Surakarta	520	74,41	80,58	108,29%
18	Balai Besar POM di Yogyakarta	470	83,20	84,51	101,58%
19	Balai Besar POM di Surabaya	490	80,14	86,56	108,01%
20	Balai POM di Kediri	490	69,11	80,74	116,83%
21	Balai POM di Jember	490	75,97	84,24	110,88%
22	Balai Besar POM di Serang	410	91,00	91,86	100,95%
23	Balai POM di Tangerang	410	87,36	86,10	98,55%
24	Balai Besar POM di Denpasar	490	80,00	82,15	102,69%
25	Balai Besar POM di Mataram	510	79,70	79,53	99,79%
26	Balai POM di Kupang	530	77,00	81,88	106,34%
27	Balai Besar POM di Pontianak	480	78,00	82,51	105,78%
28	Balai Besar POM di Palangkaraya	450	89,09	92,40	103,72%
29	Balai Besar POM di Banjarmasin	510	85,10	80,11	94,14%
30	Balai Besar POM di Samarinda	470	80,80	80,34	99,43%
31	Balai POM di Tarakan	460	83,10	82,66	99,47%
32	Balai Besar POM di Manado	430	87,35	86,79	99,36%
33	Balai POM di Palu	540	75,01	82,90	110,51%
34	Balai Besar POM di Makasar	500	80,00	81,31	101,64%
35	Balai POM di Gorontalo	490	80,00	82,10	102,62%
36	Balai POM di Kendari	500	80,70	80,83	100,16%
37	Balai POM di Gorontalo	490	80,00	82,10	102,62%
38	Balai POM di Mamuju	560	80,01	81,98	102,47%
39	Balai POM di Ambon	550	75,00	77,64	103,52%
40	Balai POM di Sofifi	540	74,60	77,89	104,41%
41	Balai POM di Manokwari	520	78,50	82,63	105,26%
42	Balai Besar POM di Jayapura	570	73,00	68,70	94,11%
Nasional		**20,610**	**83,00**	**83,97**	**101,17%**

IKU 9

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

Indikator Kinerja Utama 9 : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Makassar

No.	UPP	Target 2023	Indeks 2023	Target 2024	Indeks 2024	Capaian 2024	Kenaikan/ Penurunan dari 2023
	Balai Besar POM						
12	Balai Besar POM di Surabaya	91.00	91.98	92.50	93.04	100.58%	1.06
13	Balai Besar POM di Pontianak	91.00	90.70	91.25	92.55	101.42%	1.85
14	Balai Besar POM di Palangka Raya	93.00	96.72	97.25	97.37	100.12%	0.65
15	Balai Besar POM di Banjarmasin	91.50	94.99	95.50	97.33	101.92%	2.34
16	Balai Besar POM di Samarinda	89.00	93.30	93.75	94.67	100.98%	1.37
17	Balai Besar POM di Denpasar	90.20	96.12	96.50	98.23	101.79%	2.11
18	Balai Besar POM di Mataram	94.00	98.09	98.50	99.34	100.85%	1.25
19	Balai Besar POM di Makassar	93.50	94.90	95.50	94.44	98.89%	-0.46
20	Balai Besar POM di Manado	92.00	99.05	99.50	99.60	100.10%	0.55
21	Balai Besar POM di Jayapura	91.00	90.04	90.50	91.96	101.61%	1.92

IKU 10

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI BESAR POM DI Makassa

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

kode 2 rekom

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Januari			Februari	
			Rekomendasi *	TL**		Rekomendasi*	TL**
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	7	7		9	9
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	3	3		4	4
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0
		Kosmetik	4	4		7	7
		Pangan	5	5		3	3
		Total	19	19	100,00	23	23
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat					
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam					
		Suplemen Kesehatan					
		Kosmetik					
		Pangan					
		Total	0	0	0	0	0
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat					
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam					
		Suplemen Kesehatan					
		Kosmetik					
		Pangan					
		Total	0	0	0	0	0
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat					
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam					
		Suplemen Kesehatan					
		Kosmetik					
		Pangan					
		Total	0	0	0	0	0
TOTAL			**19**	**19**	100,00	**23**	**23**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANGar

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

ıendasi berubah dari 1 menjadi 0, perubahan karena salah penginputan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi		Maret		
				Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat		12	12	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam		0	0	
		Suplemen Kesehatan		0	0	
		Kosmetik		0	0	
		Pangan		17	17	
		Total	100,00	29	29	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam				
		Suplemen Kesehatan				
		Kosmetik				
		Pangan				
		Total	0	0	0	0
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam				
		Suplemen Kesehatan				
		Kosmetik				
		Pangan				
		Total	0	0	0	0
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam				
		Suplemen Kesehatan				
		Kosmetik				
		Pangan				
		Total	0	0	0	0
TOTAL			100,00	**29**	**29**	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	April			Mei		
			Rekomendasi *	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	7	7		4	4	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	2	2		8	8	
		Pangan	4	4		14	14	
		Total	13	13	100,00	26	26	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	1				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	1				
		Suplemen Kesehatan						
		Kosmetik	1	0				
		Pangan	0	0				
		Total	2	2	100,00	0	0	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	1	1				
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam						
		Suplemen Kesehatan						
		Kosmetik						
		Pangan						
		Total	1	1	100,00	0	0	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat						
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam						
		Suplemen Kesehatan						
		Kosmetik						
		Pangan						
		Total	0	0	0	0	0	0
TOTAL			**16**	**16**	100,00	**26**	**26**	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Juni			Juli		
			Rekomendasi *	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	13	13		9	9	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	1	1		1	1	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	3	3		6	6	
		Pangan	13	13		1	1	
		Total	30	30	100,00	17	17	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		1	1	
		Pangan	0	0		2	0	
		Total	1	1	100,00	3	1	66,67
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	1	1	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	2	2		0	0	
		Total	2	2	100,00	0	0	100,00
TOTAL			**33**	**33**	100,00	**21**	**19**	91,67

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Agustus			September		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	9	9		7	7	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	4	4		9	9	
		Pangan	0	0		4	4	
		Total	13	13	100,00	20	20	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	2	2		0	0	
		Pangan	0	2		0	0	
		Total	2	4	100,00	1	1	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		1	1	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0				
		Suplemen Kesehatan	0	0				
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	1	1	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0				
		Suplemen Kesehatan	0	0				
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
TOTAL			**15**	**17**	100,00	**22**	**22**	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober			November		
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**	
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	11	11		15	15	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	3	3		4	4	
		Pangan	42	42		40	40	
		Total	56	56	100,00	59	59	100,00
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0				
		Kosmetik	2	2		2	2	
		Pangan	1	1		2	2	
		Total	3	3	100,00	4	4	100,00
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0	
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0	
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0	
		Kosmetik	0	0		0	0	
		Pangan	0	0		0	0	
		Total	0	0	100,00	0	0	100,00
TOTAL			**59**	**59**	100,00	**63**	**63**	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana p

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Desember			Total	
			Rekomendasi*	TL**		Rekomendasi*	TL**
1	keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	7	7		110	110
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		9	9
		Suplemen Kesehatan				0	0
		Kosmetik	1	1		51	51
		Pangan	28	28		171	171
		Total	36	36	100,00	341	341
2	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		2	3
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0
		Kosmetik	1	1		9	8
		Pangan	0	0		5	5
		Total	1	1	100,00	17	17
3	rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	Obat	0	0		3	3
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0
		Kosmetik	0	0		0	0
		Pangan	0	0		0	0
		Total	0	0	100,00	3	3
4	rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0		0	0
		Obat Tradisional/ Obat Bahan Alam	0	0		0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0		0	0
		Kosmetik	0	0		0	0
		Pangan	0	0		2	2
		Total	0	0	100,00	2	2
TOTAL			**37**	**37**	100,00	**363**	**363**

IKU 11

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI BESAR POM DI MAKA

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

data berubsah di bln maret

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d Januari		s.d Februari	
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	3	6	8	15
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	3	3	7	7
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	4	4	11	11
		Pangan	5	5	8	8
		Total	15	18	34	41
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0
TOTAL			**15**	**18**	**34**	**41**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAISSAR

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil ins|

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d Maret		s.d April	
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	16	27	17	28
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	7	7	7	7
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	11	11	12	12
		Pangan	19	19	21	21
		Total	53	64	57	68
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0
TOTAL			**53**	**64**	**57**	**68**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAI

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d Mei		s.d Juni	
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	24	32	27	35
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	7	7	7	7
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	20	20	23	23
		Pangan	23	23	27	27
		Total	74	82	84	92
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	0	0	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	0	0	2	2
		Total	0	0	3	3
TOTAL			**74**	**82**	**87**	**95**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAI

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d Juli		s.d Agustus	
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	33	44	39	53
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	7	7	7	7
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	29	29	33	33
		Pangan	39	42	50	48
		Total	108	122	129	141
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	1	1	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	2	2	2	2
		Total	3	3	3	3
TOTAL			**111**	**125**	**132**	**144**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAI

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d September		s.d Oktober	
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	45	59	49	67
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	7	7	7	7
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	42	42	45	45
		Pangan	58	68	63	73
		Total	152	176	164	192
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	1	1	2	2
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	1	1	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	2	2	2	2
		Total	4	4	5	5
TOTAL			**156**	**180**	**169**	**197**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAI

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	s.d November		s.d Desember	
			TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	60	82	65	89
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	7	7	7	7
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	49	49	50	50
		Pangan	83	99	106	127
		Total	199	237	228	273
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	2	2	2	2
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	1	1	1	1
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0
		Pangan	2	2	2	2
		Total	5	5	5	5
TOTAL			**204**	**242**	**233**	**278**

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YAI

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil insp

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Total	
			Rekomendasi*	TL**
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	386	537
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	80	80
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	329	329
		Pangan	502	560
		Total	1297	1506
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	7	7
		Obat Tradisional/Obat Bahan Alam	7	7
		Suplemen Kesehatan	0	0
		Kosmetik	0	0
		Pangan	14	14
		Total	28	28
TOTAL			**1325**	**1534**

IKU 12

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar POM di Makassar

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Total			RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	Makassar	21	21	21	15	15	100,00
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	Makassar	117	117	111	10	13	76,92
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	Makassar	321	319	319	56	85	65,88
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produks OT			8	11	11			
	Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk			0	0	0			
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetik			13	14	14			
	Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang			7	11	11			
	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang			129	131	131			

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	UPT	Total			RAPK s.d TW I (Jan - Mar)		
				Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi/ sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terhadap Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan)			116	103	103			
	Hasil pemeriksaan audit survelan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.			2	2	2			
	Hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB			43	44	44			
	Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik / obat tradisional / suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK			1	0	0			
	Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik			2	3	3			
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	Makassar	344	344	344	9	9	100,00
Total			Makassar	803	801	795	90	122	73,77

SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN

Balai Besar POM di Makassar

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	18	18	100,00	19	19	100,00	21	21	100,00
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	37	40	92,50	63	69	91,30	111	117	94,87
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	123	164	75,00	227	241	94,19	319	321	99,38
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produks OT										
	Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk										
	Rekomendasi / keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk Kosmetik										
	Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang										
	Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui e-sertifikasi.pom.go.id kepada untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang										

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	RAPK s.d TW II (Jan - Juni)			RAPK s.d TW III (Jan - Sept)			RAPK s.d TW IV (Jan - Des)		
			Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)	Jumlah rek tepat waktu (pembilang)	Jumlah Permohonan (Penyebut)	% sertifikasi tepat waktu (Capaian)
	Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) terhadap Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila sarana tidak memenuhi ketentuan)										
	Hasil pemeriksaan audit survelan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikasi pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran.										
	Hasil pemeriksaan PBF dan Evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB										
	Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik / obat tradisional / suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK										
	Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik										
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	43	43	100,00	128	128	100,00	344	344	100,00
Total			221	265	83,40	437	457	95,62	795	803	99,00

IKU 13

Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	s.d Januari			s.d Februari		
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	1	14	0	0	0	2	0	2
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi	0	1	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	11	8	0	0	0	2	1	1
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	251	164	8	5	3	16	13	3
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Makassar	263	188	8	5	3	20	14	6

No	Sarana Produksi	s.d Maret			s.d April			s.d Mei		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	4	0	4	6	2	4	7	3	4
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	4	2	2	5	2	3	6	2	4
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	30	22	8	35	25	10	51	36	15
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	4	3	1	5	4	1	10	7	3
	Makassar	42	27	15	51	33	18	74	48	26

No	Sarana Produksi	s.d Juni			s.d Juli			s.d Agustus		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	10	6	4	12	8	4	14	9	5
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	6	2	4	6	2	4	6	2	4
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	67	50	17	73	54	19	84	62	22
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	11	8	3	11	8	3	13	10	3
	Makassar	94	66	28	102	72	30	117	83	34

No	Sarana Produksi	s.d September			s.d Oktober			s.d November		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	16	11	5	16	11	5	19	14	5
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Industri Kosmetik	8	2	6	11	4	7	11	4	7
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Industri Pangan	88	66	22	102	79	23	127	103	24
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	20	16	4	22	18	4	26	20	6
	Makassar	132	95	37	151	112	39	184	142	42

No	Sarana Produksi	s.d Desember		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel Punca)	0	0	0
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	22	15	7
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	0	0	0
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi	1	1	0
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat	0	0	0
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi	0	0	0
11	Industri Kosmetik	11	4	7
12	Industri Farmasi/Industri Obat Tradisional	0	0	0
13	Industri Pangan	146	118	28
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	26	20	6
	Makassar	206	158	48

IKU 14

Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No	Sarana Distribusi	s.d Januari			s.d Februari			s.d Maret		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	1	1	0	3	3	0	5	5	0
2	Apotek	5	1	4	19	7	12	33	13	20
3	Toko Obat	1	0	1	3	2	1	5	4	1
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	1	0	1	2	1	1	3	2	1
5	Rumah Sakit (RS)	3	3	0	6	6	0	9	9	0
6	Puskemas	2	2	0	7	7	0	12	12	0
7	Klinik	5	4	1	13	11	2	21	18	3
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	9	6	3	15	10	5	21	14	7
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	4	4	0	10	10	0	16	16	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	12	8	4	42	32	10	72	56	16
13	Klinik Kecantikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	11	9	2	21	16	5	84	67	17
	Makassar	54	38	16	141	105	36	281	216	65

No	Sarana Distribusi	s.d April			s.d Mei			s.d Juni		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	7	6	1	10	9	1	15	13	2
2	Apotek	43	19	24	56	28	28	75	40	35
3	Toko Obat	5	4	1	5	4	1	5	4	1
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	4	3	1	6	5	1	8	7	1
5	Rumah Sakit (RS)	9	9	0	11	11	0	15	14	1
6	Puskemas	17	17	0	23	23	0	33	33	0
7	Klinik	24	21	3	25	22	3	33	26	7
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	26	19	7	33	26	7	50	42	8
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	16	16	0	22	22	0	27	27	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	76	59	17	98	74	24	116	89	27
13	Klinik Kecantikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	96	78	18	112	94	18	119	99	20
	Makassar	323	251	72	401	318	83	496	394	102

No	Sarana Distribusi	s.d Juli			s.d Agustus			s.d September		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	19	16	3	23	18	5	25	20	5
2	Apotek	89	46	43	102	53	49	117	66	51
3	Toko Obat	6	5	1	10	8	2	18	11	7
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	11	10	1	11	10	1	14	13	1
5	Rumah Sakit (RS)	18	17	1	29	28	1	36	35	1
6	Puskemas	37	37	0	44	44	0	58	58	0
7	Klinik	36	29	7	42	35	7	52	45	7
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	61	53	8	83	75	8	83	75	8
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	27	27	0	30	30	0	34	34	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	135	102	33	152	118	34	167	124	43
13	Klinik Kecantikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	142	112	30	164	129	35	180	145	35
	Makassar	581	454	127	690	548	142	784	626	158

No	Sarana Distribusi	s.d Oktober			s.d November			s.d Desember		
		Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	32	26	6	32	26	6	32	26	6
2	Apotek	126	73	53	144	84	60	144	84	60
3	Toko Obat	25	15	10	34	21	13	48	29	19
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	16	14	2	18	16	2	18	16	2
5	Rumah Sakit (RS)	58	56	2	72	69	3	72	69	3
6	Puskemas	67	67	0	85	85	0	85	85	0
7	Klinik	70	60	10	98	84	14	106	91	15
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	102	94	8	152	144	8	172	164	8
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	37	37	0	54	54	0	62	62	0
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	192	146	46	214	164	50	222	170	52
13	Klinik Kecantikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	206	171	35	217	182	35	255	211	44
	Makassar	931	759	172	1120	929	191	1216	1007	209

IKU 15

Indeks Pelayanan Publik

Indikator Kinerja Utama 15 : Indeks Pelayanan Publik

INDEKS PELAYANAN PUBLIK BALAI BESAR/BALAI POM 2024

BADAN POM

No	Unit Pelayanan Publik	IPP 2023	Target IPP Tahun 2024	IPP 2024	Keterangan
22	Balai POM di Batam	4,7	4,8	4,84	Pelayanan Prima
23	Balai Besar POM di Jayapura	4,72	4,8	4,83	Pelayanan Prima
24	Balai Besar POM di Padang	4,71	4,8	4,81	Pelayanan Prima
25	Balai Besar POM di Makassar	4,6	4,7	4,79	Pelayanan Prima
26	Balai POM di Mamuju	4,64	4,7	4,78	Pelayanan Prima
27	Balai Besar POM di Palembang	4,67	4,75	4,78	Pelayanan Prima
28	Balai Besar POM di Palangka Raya	4,58	4,65	4,77	Pelayanan Prima
29	Balai POM di Kendari	4,52	4,60	4,76	Pelayanan Prima
30	Balai POM di Palu	4,49	4,55	4,76	Pelayanan Prima
31	Balai Besar POM di Banjarmasin	4,54	4,60	4,75	Pelayanan Prima
32	Balai POM di Sofifi	4,64	4,70	4,72	Pelayanan Prima
33	Balai POM di Tarakan	4,24	4,45	4,67	Pelayanan Prima
34	Balai Besar POM di Pekanbaru	4,41	4,50	4,45	Sangat Baik
35	Balai POM di Tasikmalaya	4,04	4,15	4,43	Sangat Baik
36	Balai POM di Payakumbuh	0	3,55	4,16	Sangat Baik
37	Balai POM di Tangerang	0	3,55	3,96	Baik
38	Balai POM di Palopo	0	3,55	3,93	Baik
39	Balai POM di Jember	0	3,55	3,93	Baik
40	Balai POM di Bogor	0	3,55	3,89	Baik
41	Balai POM di Kediri	0	3,55	3,88	Baik
42	Balai POM di Surakarta	0	3,55	3,88	Baik

IKU 16

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Progres Pendampingan UMKM
Balai Besar POM di Makassar

Komoditi	No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Januari	Februari	Maret
Pangan	1	Seleksi UMKM Pangan	Januari-Februari	10	0	10	10
	2	Bimtek CPPOB	Maret	20	0	0	0
	3	Fasilitasi pendampingan	Februari - Desember	40	0	0	40
	4	PSB	Maret- Desember	20	0	0	0
	5	Monev	Desember	10	0	0	0
					0,00	10,00	50,00
OT	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	Januari-Februari	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	Maret	20	0	0	0
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	Februari - Desember	40	0	0	0
	4	Sertifikasi	Maret - Desember	20	0	0	0
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	April, Juli, Oktober, Desember	10	0	0	0
					10,00	10,00	10,00
Kos	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	Januari-Februari	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	Februari - Desember	40	0	0	0
	3	Pelaksanaan pendampingan	Februari - Desember	40	0	0	0
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roren	November	10	0	0	0
		Total			10,00	10,00	10,00
		%Progress			6,67	10,00	23,33

Progres Pendampingan UMKM
Balai Besar POM di Makassar

Komoditi	No	Kegiatan	April	Mei	Juni	Juli	Agustus
Pangan	1	Seleksi UMKM Pangan	10	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	0	0	20	20	20
	3	Fasilitasi pendampingan	40	0	40	40	25
	4	PSB	0	0	0	15	15
	5	Monev	0	0	0	8	8
			50,00	10,00	70,00	93,00	78,00
OT	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	0	0	0	0	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	0	30	40	40	40
	4	Sertifikasi	0	5	5	10	20
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	0	0	0	10	10
			10,00	45,00	55,00	70,00	100,00
Kos	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	0	40	40	40	40
	3	Pelaksanaan pendampingan	0	40	40	40	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roren	0	0	0	10	10
		Total	10,00	90,00	90,00	100,00	100,00
		%Progress	23,33	48,33	71,67	87,67	92,67

Progres Pendampingan UMKM
Balai Besar POM di Makassar

Komoditi	No	Kegiatan	September	Oktober	November	Desember
Pangan	1	Seleksi UMKM Pangan	10	10	10	10
	2	Bimtek CPPOB	20	20	20	20
	3	Fasilitasi pendampingan	40	40	40	40
	4	PSB	20	20	20	20
	5	Monev	10	10	10	10
			100,00	100,00	100,00	100,00
OT	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10	10	10	10
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20	20	20	20
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB (Pendampingan)	40	40	40	40
	4	Sertifikasi	20	20	20	20
	5	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	10	10	10	10
			100,00	100,00	100,00	100,00
Kos	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10	10	10	10
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40	40	40	40
	3	Pelaksanaan pendampingan	40	40	40	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Roren	10	10	10	10
		Total	100,00	100,00	100,00	100,00
		%Progress	100,00	100,00	100,00	100,00

IKU 17

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Indikator Kinerja Utama 17 : Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	CAPAIAN (berdasarkan bobot)											
		TARGET (KUMULATIF) diisi oleh UPT sesuai dengan target RAPK											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Makassar	5,00	10,00	25,00	30,00	40,00	50,00	55,00	65,00	75,00	80,00	90,00	95,00
9	Manado	8,42	12,88	82,42	82,42	82,42	82,42	91,65	91,65	91,65	91,65	91,65	95,00
10	Mataram	0,29	0,29	20,00	84,00	86,00	87,50	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00	95,00
11	Medan	0,00	10,00	20,00	52,50	52,50	52,50	55,00	55,00	65,00	75,00	85,00	95,00
12	Padang	3,00	10,00	30,00	35,00	40,00	45,00	70,00	80,00	85,00	90,00	93,00	95,00
13	Palangkaraya	0,00	0,00	0,00	67,00	80,00	85,00	94,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

NO	Unit Pelaksana Teknis (Balai Besar/ Balai/Loka POM)	TOTAL REALISASI (KUMULATIF)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Makassar	50,33	53,60	55,22	57,38	57,38	58,99	67,05	72,44	72,44	79,44	81,60	81,66
9	Manado	9,19	15,88	75,69	90,69	99,15	99,15	99,15	99,31	99,38	99,38	99,54	99,54
10	Mataram	14,33	52,17	74,67	86,67	90,33	90,33	93,67	95,33	97,00	97,00	97,00	97,00
11	Medan	0,44	61,02	80,69	85,67	85,67	85,67	85,67	87,40	97,06	98,67	98,67	84,23
12	Padang	3,00	11,80	31,80	40,60	80,30	80,30	88,50	96,40	97,40	97,40	99,60	99,60
13	Palangkaraya	0,00	10,00	10,00	87,23	87,23	89,86	97,27	99,91	99,91	99,91	99,91	99,91

IKU 18

Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

DATA HISTORIS INDEKS KEGIATAN KIE

Periode : (2024-01-01 s/d 2024-12-31)

Unit : Unit (Balai Besar POM Makassar)

Dicetak Pada : 26-02-2025 15:02:51

Kategori status : Seluruh Data

No	Regional	Unit Kerja	Ragam Kegiatan	Pemahaman	Manfaat	Minat	Indeks	Target Indeks	Capaian Target Indeks
1	SULAM PAPUA	Balai Besar POM Makassar	95,61	97,01	97,28	92,79	96,27	95,7	100.60 %

Total Responden	Target Responden	Capaian Target Responden	Status
763	373	Memenuhi	Status 1

IKU 19

Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Januari
Makassar	1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April	98,00	98,00	3,33
	2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00
	3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni			0,00
	4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	April - Nov			0,00
	5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - Sept			0,00
		- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah					
		- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah					
	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	Agustus - Nov			0,00
	7	Pengawalan	10,00	Okt - Des			0,00
		Total skor (Tahun N)	**100,00**		**98,00**	**98,00**	**3,33**

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Pro				
				s,d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
Makassar	1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	8,33	15,00	20,00	20,00	20,00
	2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00
	3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	0,00	0,00	0,00	10,00	15,00
	4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	0,00	0,00	0,00	6,67	10,00
	5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah						
		- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah						
	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Pengawalan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total skor (Tahun N)	**100,00**	**8,33**	**15,00**	**20,00**	**46,67**	**55,00**

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

UPT	Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	gres (Capaian DJA)			
				s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober
Makassar	1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
	2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	0,00	5,00	15,00	15,00
		- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah					
		- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah					
	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
	7	Pengawalan	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00
		Total skor (Tahun N)	**100,00**	**60,00**	**70,00**	**80,00**	**100,00**

Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	s.d November	s.d Desember	Realisasi Jumlah Sekolah Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
Makassar	1	Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	20,00	20,00	Jumlah sekolah 2024 : 26, Target 26
	2	Sosialisasi keamanan pangan	10,00	10,00	10,00	
	3	Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	15,00	15,00	
	4	Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	10,00	10,00	
	5	Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	15,00	15,00	
		- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah				
		- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah				
	6	Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	20,00	20,00	
	7	Pengawalan	10,00	10,00	10,00	
		Total skor (Tahun N)	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0**

IKU 20

Jumlah desa pangan aman

Desa Pangan Aman

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Januari
1	Makassar	1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	25	25	3,33
		2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			0,00
		3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April-Juli			0,00
		4	Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			0,00
		5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			0,00
		6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Mei-Oktober - Post Nover			0,00
		7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	November-Desember			0,00
		8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			0,00
		9	Pengawalan	10,00	Juni-Desember			0,00
			Total	**100,00**		**25,00**	**25,00**	**3,33**

Desa Pangan Aman

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres				
					s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni
1	Makassar	1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	8,33	15,00	20,00	20,00	20,00
		2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
		3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	0,00	0,00	0,00	5,00	15,00
		4	Bimtek Komunitas	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Pengawalan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total	**100,00**	**8,33**	**15,00**	**20,00**	**30,00**	**40,00**

Desa Pangan Aman

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	s (Capaian DJA) (%)			
					s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober
1	Makassar	1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		4	Bimtek Komunitas	15,00	7,50	15,00	15,00	15,00
		5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	2,50	5,00	5,00	10,00
		6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	2,50	5,00	5,00	10,00
		7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9	Pengawalan	10,00	5,00	10,00	10,00	10,00
			Total	**100,00**	**57,50**	**75,00**	**75,00**	**85,00**

Desa Pangan Aman

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)			Realisasi Jumlah Desa Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir
					s.d November	s.d Desember	
1	Makassar	1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	20,00	20,00	6
		2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	5,00	5,00	
		3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	15,00	15,00	
		4	Bimtek Komunitas	15,00	15,00	15,00	
		5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	10,00	10,00	
		6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	10,00	10,00	
		7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	6,67	10,00	
		8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	0,00	5,00	
		9	Pengawalan	10,00	10,00	10,00	
			Total	**100,00**	**91,67**	**100,00**	**6,00**

IKU 21

Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Januari
20	Makassar	1	Advokasi	20,00	Januari-April			3,33
		2	Survei Pasar	5,00	Januari-April			0,00
		3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			0,00
		4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			0,00
		5	Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			0,00
		6	Kampanye	10,00	Juni-Juli			0,00
		7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktobe			0,00
		8	Pengawalan	10,00	Februari-Oktober			0,00
			Total	**100,00**		**0,00**	**0,00**	**3,33**

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Progres (Capaian D					
					s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli
20	Makassar	1	Advokasi	20,00	8,33	15,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		2	Survei Pasar	5,00	1,67	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
		4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	0,00	0,00	0,00	12,00	15,00	15,00
		5	Penyuluhan	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
		6	Kampanye	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00
		7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8	Pengawalan	10,00	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			Total	**100,00**	**10,00**	**25,00**	**35,00**	**62,00**	**81,00**	**81,00**

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

No	UPT	Kegiatan		Pembobotan Progres (%)	)JA)				
					s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember
20	Makassar	1	Advokasi	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
		2	Survei Pasar	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		5	Penyuluhan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		6	Kampanye	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	0,00	12,00	15,00	15,00	15,00
		8	Pengawalan	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
			Total	**100,00**	**85,00**	**97,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Realisasi Jumlah Pasar Tahun N : 1. Capaian RAPK akhir tahun 2. Capaian RO pada SMART DJA dan Bappenas akhir tahun
20	Makassar	1	Advokasi	20,00	
		2	Survei Pasar	5,00	
		3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00	
		4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	
		5	Penyuluhan	10,00	
		6	Kampanye	10,00	
		7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	
		8	Pengawalan	10,00	
			Total	**100,00**	**0,00**

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
20	Makassar	1	Advokasi	20,00
		2	Survei Pasar	5,00
		3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00
		4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00
		5	Penyuluhan	10,00
		6	Kampanye	10,00
		7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00
		8	Pengawalan	10,00
			Total	**100,00**

Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

No	UPT		Kegiatan	Pembobotan Progres (%)
20	Makassar	1	Advokasi	20,00
		2	Survei Pasar	5,00
		3	Bimtek Pengelola Pasar	15,00
		4	Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00
		5	Penyuluhan	10,00
		6	Kampanye	10,00
		7	Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00
		8	Pengawalan	10,00
			Total	**100,00**

IKU 22

Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	1580	79	**Benar**	1580	14	**Benar**	2,94
2	Pebruari	1580	185	**Benar**	1580	91	**Benar**	8,73
3	Maret	1580	311	**Benar**	1580	224	**Benar**	16,93
4	April	1580	456	**Benar**	1580	331	**Benar**	24,91
5	Mei	1580	623	**Benar**	1580	514	**Benar**	35,98
6	Juni	1580	799	**Benar**	1580	740	**Benar**	48,70
7	Juli	1580	984	**Benar**	1580	947	**Benar**	61,11
8	Agustus	1580	1.169	**Benar**	1580	1.211	**Benar**	75,32
9	September	1580	1.339	**Benar**	1580	1.504	**Benar**	89,97
10	Oktober	1580	1.468	**Benar**	1792	1.791	**Benar**	96,43
11	November	1580	1.553	**Benar**	2041	2.038	**Benar**	99,07
12	Desember	1.594	1.594	**Benar**	2.183	2.180	**Benar**	99,93

IKU 23

Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR

No	Bulan	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	835	81	**Benar**	835	11	**Benar**	5,51
2	Pebruari	835	151	**Benar**	835	32	**Benar**	10,96
3	Maret	835	230	**Benar**	835	204	**Benar**	25,99
4	April	835	230	**Benar**	835	230	**Benar**	27,54
5	Mei	835	284	**Benar**	835	514	**Benar**	47,78
6	Juni	835	531	**Benar**	835	558	**Benar**	65,21
7	Juli	835	657	**Benar**	835	674	**Benar**	79,70
8	Agustus	835	730	**Benar**	835	808	**Benar**	92,10
9	September	835	820	**Benar**	979	979	**Benar**	99,10
10	Oktober	857	844	**Benar**	1277	1.277	**Benar**	99,24
11	Nopember	857	857	**Benar**	1.277	1.277	**Benar**	100,00
12	Desember	857	857	**Benar**	1277	1.277	**Benar**	100,00

IKU 24

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Balai Besar POM di Makassar

UPT		Tahapan	Januari											
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	0,00		0		0,15	0,00%	31,25%	44,44%	13,89%
		Tahap I				2	0	1,00	0,4	20,00%			
		P21				6	0	0,75	0,3	11,25%			
		Tahap II					0	0,00	0,15	0,00%			
		Total	10	8	0,00	8							

UPT		Tahapan	Juli											
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	1		1,00		0,15	15,00%	79,75%	66,67%	53,17%
		Tahap I			0		0,75	0,67	0,4	34,00%			
		P21			2	4	0,75	0,67	0,3	25,50%			
		Tahap II			1	4	0,25	0,33	0,15	5,25%			
		Total	10	8	4	8							

Persentase keberha
Balai Besar POM

UPT		Tahapan	Pebruari										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	0		0		0,15	0,00%	35,94%	44,44%	15,97%
		Tahap I				0	0	1,00	0,4	20,00%			
		P21				7	0	1,00	0,3	15,00%			
		Tahap II				1	0	0,13	0,15	0,94%			
		Total	10	8	0	8							

UPT		Tahapan	Agustus										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	0		1,00		0,15	15,00%	90,25%	66,67%	60,17%
		Tahap I			1	0	1,00	0,67	0,4	40,00%			
		P21			0	4	0,75	0,67	0,3	25,50%			
		Tahap II			3	4	0,75	0,33	0,15	9,75%			
		Total	10	8	4	8							

Persentase keberha
Balai Besar POM

UPT		Tahapan	Maret										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	2		1,00		0,15	15,00%	47,78%	55,56%	26,54%
		Tahap I					0,00	0,80	0,4	17,78%			
		P21				6	0,00	0,80	0,3	13,33%			
		Tahap II				2	0,00	0,20	0,15	1,67%			
		Total	10	8	2	8							

UPT		Tahapan	September										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	2		1,00		0,15	15,00%	74,47%	77,78%	57,92%
		Tahap I			1	0	0,67	0,57	0,4	31,52%			
		P21			0	4	0,50	0,57	0,3	20,45%			
		Tahap II			3	4	0,50	0,29	0,15	7,50%			
		Total	10	8	6	8							

Persentase keberha
Balai Besar POM

UPT		Tahapan	April										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	0		1,00		0,15	15,00%	70,83%	55,56%	39,35%
		Tahap I			2		1,00	0,80	0,4	40,00%			
		P21				5	0,00	0,80	0,3	13,33%			
		Tahap II				3	0,00	0,30	0,15	2,50%			
		Total	10	8	2	8							

UPT		Tahapan	Oktober										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	2		1,00		0,15	15,00%	74,58%	106,67%	79,56%
		Tahap I			2	0	0,75	0,50	0,4	33,33%			
		P21			1	4	0,50	0,50	0,3	20,00%			
		Tahap II			3	4	0,38	0,25	0,15	6,25%			
		Total	11	4	8	8							

Persentase keberha
Balai Besar POM

UPT		Tahapan	Mei										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	1		1,00		0,15	15,00%	63,07%	61,11%	38,54%
		Tahap I			2		0,67	0,73	0,4	32,28%			
		P21				4	0,00	0,73	0,3	12,63%			
		Tahap II				4	0,00	0,36	0,15	3,16%			
		Total	10	8	3	8							

UPT		Tahapan	Nopember										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	0		1,00		0,15	15,00%	81,25%	88,89%	72,22%
		Tahap I			4	0	1,00	0,50	0,4	40,00%			
		P21			1	4	0,50	0,50	0,3	20,00%			
		Tahap II			3	4	0,38	0,25	0,15	6,25%			
		Total	10	8	8	8							

Persentase keberha
Balai Besar POM

UPT		Tahapan	Juni										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8			1,00		0,15	15,00%	76,58%	61,11%	46,80%
		Tahap I			2		1,00	0,73	0,4	40,00%			
		P21			1	4	0,33	0,73	0,3	18,42%			
		Tahap II				4	0,00	0,36	0,15	3,16%			
		Total	10	8	3	8							

UPT		Tahapan	Desember										
			Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
			Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Makassar	Makassar	SPDP	10	8	2		1,00		0,15	15,00%	81,77%	100,00%	81,77%
		Tahap I			0	0	0,80	0,44	0,4	34,46%			
		P21			4	4	0,80	0,44	0,3	25,85%			
		Tahap II			4	4	0,40	0,22	0,15	6,46%			
		Total	10	8	10	8							

IKU 25

Indeks RB BBPOM di Makassar

Indikator Kinerja Utama 25 : Indeks RB BBPOM di Makassar

Rekap Nilai ZI 2024

	Belum WBK
Keterangan:	WBK
Rumus	WBBM
Diisi manual	Non Yanblik

PIC	No	Unit Kerja	Wilayah Pengawasan	UPP/ NON UPP	Status WBK/WBBM	Nilai 2024
	40	Balai Besar POM di Makassar	Ir II	UPP	WBK	90,25
Bagus	41	Balai Besar POM di Jayapura	Ir I	UPP	Belum WBK	86,90
Karin	42	Balai Besar POM di Bandar	Ir II	UPP	WBK	87,38
Karin	43	Balai Besar POM di Pekanbaru	Ir II	UPP	WBK	88,76
Lilis	44	Balai Besar POM di Padang	Ir I	UPP	WBBM	89,41
farhan	45	Balai Besar POM di Mataram	Ir II	UPP	WBK	88,00
	46	Balai Besar POM di Banjarmasin	Ir II	UPP	WBK	92,44
Fikri	47	Balai Besar POM di Pontianak	Ir I	UPP	WBK	86,41
Sarol	48	Balai Besar POM di Samarinda	Ir II	UPP	Belum WBK	88,24
Taufiq	49	Balai Besar POM di Manado	Ir I	UPP	WBK	94,35
farhan	50	Balai Besar POM di Palangka Raya	Ir II	UPP	Belum WBK	87,33
Riri	51	Balai Besar POM di Serang	Ir I	UPP	Belum WBK	89,49

IKU 26

Nilai AKIP BBPOM di Makassar

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor	:	B-PI.06.08.7.01.25.05	Jakarta, 7 Januari 2025
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat I	

Kepada Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis.

di
Tempat

Berdasarkan:
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
3. Surat Edaran Nomor PI.04.7.08.24.02 Tahun 2024 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
4. Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.11.24.369 tanggal 5 November 2024 dan Nomor PI.04.7.11.24.405 tanggal 29 November 2024.

Bersama ini kami sampaikan nilai AKIP pada 39 (tiga puluh sembilan) Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat I yang terdiri dari 3 (tiga) Eselon I, 1 (satu) Satuan Kerja Mandiri Pusat, 9 (sembilan) Balai Besar POM, 11 (sebelas) Balai POM, dan 15 (lima belas) Loka POM dengan ringkasan catatan terkait implementasi SAKIP antara lain:
1. Matriks reviu target indikator tahun 2024 belum mencantumkan justifikasi untuk target yang lebih rendah dari realisasi tahun sebelumnya;
2. Ketidakselarasan pada dokumen perencanaan (PK/RAPK/SKP) dan pelaporan (Laporan Evaluasi Internal/Laporan Kinerja/Laporan Kinerja Interim/SIMETRIS/ Penilaian SKP) yaitu perbedaan penyajian nomenklatur indikator, target serta capaian kinerja pada setiap periodenya;
3. Perhitungan capaian kinerja (angka pembilang dan penyebut) yang tercantum pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)/kertas kerja capaian indikator tidak dapat ditelusur/berbeda dengan dokumen monev (sumber data);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

4. Pengisian kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut per bulan pada aplikasi SIMETRIS dan monitoringnya belum dilakukan secara tertib;
5. Laporan evaluasi internal belum memadai, antara lain:
   a. Belum menyajikan:
      1) Evaluasi atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya;
      2) Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan.
   b. Belum mengidentifikasi akar masalah dan rencana tindak lanjut kurang spesifik dan/atau relevan terhadap kendala yang telah diidentifikasi;
   c. Perbedaan rencana tindak lanjut/rencana aksi yang disajikan pada laporan evaluasi internal dan laporan kinerja interim.
6. Laporan kinerja interim belum disusun sesuai dengan pedoman antara lain:
   a. Belum menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran;
   b. Laporan kinerja interim belum menjelaskan adanya indikator baru maupun perubahan target triwulanan/tahunan;
   c. Belum menyajikan rencana tindak lanjut atas periode sebelumnya.
7. Hasil penyajian informasi dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan kinerja dan mendukung upaya pencapaian kinerja periode selanjutnya.

Nilai hasil evaluasi AKIP sebagaimana terlampir dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) akan kami sampaikan kemudian, untuk selanjutnya Satuan Kerja dapat menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan melalui aplikasi SAPA APIP.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,



Yan Setiadi, AK., M.B.A.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
Surat Dinas Inspektur Utama
Nomor : B-PI.06.08.7.01.25.05
Tanggal : 7 Januari 2025

Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satuan Kerja BPOM Tahun 2024

1. Satuan Kerja Eselon I

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Sekretariat Utama	82,81	20,16	20,16	9,48	15,80	17,21
2	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	78,39	19,68	18,48	8,88	15,80	15,55
3	Deputi Bidang Penindakan	75,86	17,76	17,28	9,00	16,80	15,02

2. Satuan Kerja Eselon II Mandiri

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	81,87	19,68	18,48	9,72	16,20	17,79

3. Balai Besar POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai Besar POM di Denpasar	77,56	17,76	17,52	8,64	16,80	16,84
2	Balai Besar POM di Jayapura	76,95	17,76	18,00	9,12	15,80	16,27
3	Balai Besar POM di Manado	82,12	20,16	18,48	10,08	15,80	17,60
4	Balai Besar POM di Medan	79,74	20,16	19,44	10,08	14,80	15,26
5	Balai Besar POM di Padang	81,76	20,16	18,24	10,08	16,80	16,48
6	Balai Besar POM di Pontianak	80,65	20,16	18,48	10,08	15,20	16,73
7	Balai Besar POM di Semarang	81,63	19,44	18,96	10,08	15,80	17,35
8	Balai Besar POM di Serang	82,44	18,96	20,16	9,48	16,80	17,04
9	Balai Besar POM di Yogyakarta	81,86	20,16	20,16	10,08	15,80	15,66

4. Balai POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Balai POM di Ambon	77,78	18,48	17,76	9,48	15,20	16,86
2	Balai POM di Batam	80,60	19,44	18,24	9,12	15,20	18,60
3	Balai POM di Bengkulu	79,41	19,44	18,00	9,12	15,20	17,65
4	Balai POM di Gorontalo	79,13	17,28	18,96	9,84	15,20	17,85
5	Balai POM di Kendari	80,27	19,20	17,76	9,48	16,80	17,03
6	Balai POM di Mamuju	80,83	20,16	17,76	9,84	15,80	17,27
7	Balai POM di Pangkalpinang	81,62	19,68	18,00	9,24	16,40	18,30
8	Balai POM di Sofifi	78,67	19,44	18,96	9,48	15,20	15,59

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
9	Balai POM di Surakarta	74,39	17,76	17,28	9,48	14,80	15,07
10	Balai POM di Tangerang	75,34	17,76	17,28	8,88	14,80	16,62
11	Balai POM di Payakumbuh	74,31	17,28	17,28	8,88	14,80	16,07

5. Loka POM

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
1	Loka POM di Banyumas	76,96	18,24	17,28	9,12	15,20	17,12
2	Loka POM di Mimika	74,98	18,48	16,80	9,48	15,40	14,82
3	Loka POM di Tanimbar	75,55	18,00	17,76	9,60	14,80	15,39
4	Loka POM di Baubau	77,75	18,96	18,00	9,48	14,80	16,51
5	Loka POM di Kabupaten Belitung	74,70	18,48	16,08	8,28	15,20	16,66
6	Loka POM di Kabupaten Buleleng	73,06	17,76	17,76	8,88	14,40	14,26
7	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	76,73	17,76	18,48	8,88	14,80	16,81
8	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	77,93	19,20	17,28	8,88	14,80	17,77
9	Loka POM di Kabupaten Merauke	73,78	17,28	16,80	9,48	14,40	15,82

No	Nama Satker/Unit	Nilai Final Evaluasi 2024	Komponen Evaluasi				
			Perencanaan Kinerja (24)	Pengukuran Kinerja (24)	Pelaporan Kinerja (12)	Evaluasi Internal (20)	Capaian Kinerja (20)
10	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	79,20	18,96	18,48	8,64	15,40	17,72
11	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	77,77	18,48	17,28	9,24	15,80	16,97
12	Loka POM di Kabupaten Sanggau	75,55	17,28	17,28	8,88	14,80	17,31
13	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	74,94	17,76	18,00	8,88	14,80	15,50
14	Loka POM di Kota Tanjungbalai	74,90	17,76	17,28	8,88	14,80	16,18
15	Loka POM di Kota Tanjungpinang	76,57	18,96	17,28	8,64	14,80	16,89

BADAN POM
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726
Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuirtamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

Nomor : B-PI.04.7.01.25.51 Jakarta, 31 Januari 2025

Lampiran : -

Hal : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024

Yth. Kepala Balai Besar POM
di Makassar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat Utama telah melakukan Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1. Evaluasi AKIP Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan:
   a) Pedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
   b) Keputusan Kepala Badan POM Nomor 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
   c) Surat Edaran Nomor PI.04.7.08.24.02 Tahun 2024 Tentang Sub Kriteria Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM;
   d) Surat Tugas Inspektur Utama Nomor PI.04.7.11.24.369 tanggal 5 November 2024 dan Nomor PI.04.7.11.24.405 tanggal 29 November 2024.
2. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:
   a) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
   b) Menilai tingkat implementasi;
   c) Menilai tingkat akuntabilitas;
   d) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

e) Melakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup evaluasi AKIP mulai dari perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja serta evaluasi atas pencapaian kinerja.
4. Evaluasi AKIP dilaksanakan melalui pengumpulan, analisis serta interpretasi data dan informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi, maka implementasi atas SAKIP Balai Besar POM di Makassar Tahun 2024 dikategorikan **A (Memuaskan)** yaitu Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil. Rincian hasil evaluasi tiap komponen disajikan pada tabel berikut:

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	20,16	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	19,20	20,16
3.	Pelaporan Kinerja	12	10,08	9,72
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	16,20	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	15,41	16,66
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	81,05	81,9
Predikat			**A**	**A**

*Rincian nilai per komponen dapat dilihat melalui aplikasi SAPAAPIP.

Penjelasan singkat hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Balai Besar POM di Makassar telah memiliki dokumen perencanaan kinerja, antara lain:

a) Reviu Renstra dan matriks evaluasi akhir Renstra;
b) Kertas Kerja reviu target indikator kinerja;
c) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d) SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);
e) *Cascading* indikator kinerja disetiap level.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a) Total anggaran pada revisi RAPK tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp51.666.112.000,00 tidak sesuai dengan anggaran DIPA Revisi ke-3 tanggal 24 April 2024 sebesar Rp50.086.658.000,00 (masih menggunakan DIPA awal).
b) Indikator Nilai Pengelolaan BMN diturunkan ke SKP level ketua dan anggota tim, seharusnya indikator tersebut hanya untuk SKP Kepala BBPOM di Makassar. Hal tersebut tidak sesuai dengan surat Kepala Biro SDM tanggal 20 Februari 2024.

2. Pengukuran Kinerja

Kriteria komponen pengukuran kinerja yang telah dipenuhi, antara lain:

a) Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU);
b) Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator;
c) Penginputan data kinerja dan analisisnya pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a) SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran belum mencantumkan mekanisme perbaikan pelaporan jika terjadi perubahan/kesalahan data setelah adanya persetujuan dari Biro Perencanaan dan Keuangan.
b) Notulen rapat evaluasi internal pada Laporan Evaluasi Internal Triwulan I Tahun 2024 belum menyajikan arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja;
c) Perbedaan penyajian realisasi indikator pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja, yaitu:

Indikator	RHPK	SKP	Realisasi SIMETRIS	Realisasi Laporan Evaluasi Internal	Realisasi Laporan Kinerja
TW III tahun 2024 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	84,07	84,14	84,14	87,77	84,07

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d) Analisis capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS kurang memadai, yaitu:

- Sebagian besar kendala dan rencana tindak lanjut bulan April s.d September 2024 dengan narasi yang sama.
- Belum mencantumkan kendala/penyebab yang memadai atas kegagalan pencapaian target dan/atau rencana tindak lanjut yang relevan terhadap kendala, sebagai contoh:

No	Indikator	Periode	Kendala	Rencana Tindak Lanjut
1	Persentase obat yg memenuhi syarat	TW II 2024	Terdapat 3 sampel Suplemen Kesehatan yang TMS Kadar Vitamin C dan 1 sampel TMS Kadar Kafein serta adanya sampel yang TMK penandaan sehingga berpengaruh pada kesimpulan akhir.	Peningkatan kompetensi penguji terkait pengujian unggul yang menggunakan instrumen Spektrofluorometer dan LCMSMS.
2	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	TW II dan III tahun 2024	Jumlah fortifikan yang TMS	1. Bimtek fortifikan untuk para pelaku usaha 2. KIE tentang pentingnya fortifikasi iodium untuk kesehatan 3. Bimtek penandaan/label

3. Pelaporan Kinerja

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Makassar telah menyajikan, antara lain:

a) Perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan;
b) Perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan dan tahunan;
c) Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Satker yang sejenis;
d) Upaya terkait keberhasilan dalam pencapaian kinerja dan hambatan terkait kegagalan dalam pencapaian kinerja;
e) Efisiensi atas penggunaan sumber daya dan analisisnya;
f) Pemanfaatan informasi kinerja.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a) Laporan Kinerja triwulan I s.d III tahun 2024 (Bab II Perencanaan Kinerja) belum menyajikan informasi terkait adanya penambahan indikator kinerja pada tahun 2024, yaitu:

- Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

- Nilai Pengelolaan Kearsipan
- Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa
- Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
- Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

b) Perbedaan penyajian realisasi indikator pada Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja triwulan III tahun 2023 (sesuai poin 2.c).

c) Laporan Kinerja Tahun 2023 belum menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran.

d) Laporan Kinerja Interim belum menyajikan monitoring tindak lanjut atas seluruh rencana aksi periode sebelumnya, sebagai contoh:

No	Indikator Kinerja	Rencana aksi TW I 2024 yang tidak dimonitor pada Lapkin TW II 2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Menerapkan sistem survei 2D barcode
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Koordinasi dengan lintas sektor terkait pengawasan obat dan makanan

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Balai Besar POM di Makassar telah menyusun laporan evaluasi internal setiap triwulanan dengan menyajikan:

a) Berita Acara Evaluasi Internal;
b) Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan;
c) Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK);
d) Kertas Kerja terkait capaian program/kegiatan dan indikator kinerja;
e) Notulen rapat.

Namun masih terdapat beberapa kelemahan antara lain:

a) Laporan Evaluasi Internal triwulan I s.d III tahun 2024 belum menyajikan analisis capaian target output (identifikasi kendala/hambatan dan rencana tindak lanjut);

b) Laporan Evaluasi Internal triwulan II dan III tahun 2024 belum menyajikan evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan.

c) Terdapat rencana tindak lanjut/rencana aksi yang tidak dilakukan monitoring pada Laporan Evaluasi Internal periode selanjutnya (contoh sesuai poin 3.d).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

d) Sebagian besar rencana aksi atas indikator yang tidak mencapai target pada Laporan Kinerja triwulan I s.d III Tahun 2024 memiliki *timeline* yang panjang yaitu Januari s.d Desember sehingga pemantauan/monitoring atas tindak lanjut kurang optimal.

5. Capaian Kinerja

No	Kriteria	Tahun 2022		Tahun 2023		Keterangan
		Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	
5a	**Kinerja *output***	**AA**	**7,50**	**AA**	**6,96**	
1	Target dapat dicapai	AA	3,75	AA	3,75	Seluruh Indikator kinerja tahun 2023 telah tercapai
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	AA	3,75	A	3,21	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 14,29% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya
5b	**Kinerja *outcome***	**B**	**7,91**	**BB**	**9,7**	
1	Target dapat dicapai	BB	4,46	BB	4,74	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 20,59% tidak tercapai
2	Capaian Kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	CC	3,45	BB	4,96	Indikator kinerja tahun 2023 sebanyak 17,65% capaiannya tidak lebih baik dari tahun sebelumnya

Terhadap kelemahan tersebut, direkomendasikan kepada Kepala Balai Besar POM di Makassar beserta jajarannya agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

a. Memastikan keselarasan total anggaran pada Perjanjian Kinerja dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

b. Memastikan cascading Sasaran Kinerja Pegawai sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

2. Pengukuran Kinerja

a. Menyusun SOP Mikro Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang menggambarkan mekanisme jika terjadi kesalahan data antara lain:
   - Tahap persetujuan data dari Biro Perencanaan dan Keuangan;
   - Tahap perbaikan pelaporan data.

b. Menyusun notulen rapat evaluasi internal yang menyajikan arahan pimpinan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

terkait pengukuran dan/atau pencapaian kinerja secara spesifik (tidak hanya bersifat umum);

c. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja;
d. Menyusun identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan memadai.

3. Pelaporan Kinerja

a. Menyusun Laporan kinerja interim dengan menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja;
b. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja antara SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja;
c. Menyusun laporan Kinerja sesuai dengan pedoman SAKIP terutama terkait analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
d. Melakukan monitoring terhadap rencana tindak lanjut/rencana aksi periode sebelumnya pada Laporan Kinerja Interim.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

a. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
    - Evaluasi atas Pelaksanaan Program dan Kegiatan terkait analisis capaian target output (identifikasi kendala dan rencana tindak lanjutnya);
    - Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan.
b. Melakukan monitoring terhadap rencana tindak lanjut/rencana aksi periode sebelumnya pada Laporan Evaluasi Internal;
c. Menyusun rencana aksi atas indikator yang tidak mencapai target dengan timeline yang memudahkan proses pemantauan/monitoring sehingga evaluasi internal optimal.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP, selanjutnya kami mengharapkan Balai Besar POM di Makassar menindaklanjuti rekomendasi tersebut melalui aplikasi SAPAAPIP dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP dan atas kerjasamanya selama proses evaluasi AKIP kami ucapkan terima kasih.

Inspektur Utama,



Yan Setiadi,AK.,M.B.A

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan POM
2. Deputi Bidang Penindakan selaku pembina
3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU 27

Nilai Pengelolaan Kearsipan

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-KA.03.2.07.24.563 Jakarta, 19 Juli 2024
Lampiran : 6 (enam) halaman
Hal : Penyampaian Nilai Final Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024

Yth.
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan POM
2. Kepala Balai Besar, Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan pengawasan kearsipan internal di lingkungan Badan POM Tahun 2024 yang telah dilakukan verifikasi oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 17 Juli 2024, bersama ini kami sampaikan beberapa hal berikut :

1. Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 telah dilaksanakan sejak bulan Maret sampai dengan Mei 2024 sesuai dengan Surat Kepala Biro Umum Nomor: B-KA.03.25.01.24.84, tanggal: 29 Januari 2024, hal: Jadwal Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024;
2. Penentuan target nilai kearsipan pada masing-masing unit kerja mengacu pada Surat Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Nomor: B-KP.09.01.24.01.24.40, tanggal: 22 Januari 2024, hal: Direktif Penugasan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ada Lingkungan Kesektamaan dan Kedeputian yaitu:
   a. Penilaian Nilai Pengelolaan Kearsipan telah dilaksanakan mulai tahun 2021 untuk unit kerja Pusat dan Balai Besar/Balai POM, dan tahun 2022 untuk Loka POM;
   b. Berdasarkan Target indikator kinerja kearsipan dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan TW III tahun 2023, dengan hasil reviu apabila capaian kinerja tahun 2022 lebih besar dari pada TW III tahun 2023 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2022 dan apabila capaian kinerja TW III tahun 2023 lebih besar dari pada tahun 2022 maka target indikator menggunakan capaian kinerja tahun 2023;

c. Realisasi capaian kinerja tersebut dijadikan target Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada tahun 2024 di masing-masing Unit Kerja;
d. Penilaian Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan didapatkan dari Laporan hasil pengawasan kearsipan internal di unit kerja di lingkungan Badan POM yang dilakukan sepanjang tahun.

3. Berdasarkan pelaksanaan ketentuan di atas, diperoleh nilai final hasil pengawasan kearsipan masing-masing unit kerja di lingkungan Badan POM sebagaimana tercantum pada lampiran 1;
4. Memperhatikan hasil final pengawasan kearsipan internal tahun 2024 dan penetapan target kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala UPT, dapat disimpulkan bahwa:
   a. Unit kerja Pusat dengan pencapaian target kinerja kearsipan sejumlah 30 unit kerja atau sebesar 100%;
   b. UPT Balai Besar/ Balai POM dengan pencapaian target kinerja kearsipan sejumlah 42 unit kerja atau sebesar 100%;
   c. UPT Loka POM dengan pencapaian target kinerja kearsipan sejumlah 34 unit kerja atau sebesar 100%.

Sebagai upaya tindak lanjut peningkatan kualitas pengelolaan arsip pada Unit Kerja Pusat dan UPT, agar berkoordinasi dengan Biro Umum terutama dalam hal peningkatan dan pemenuhan target kinerja kearsipan di tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas komitmen dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Sekretaris Utama,

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

Tembusan:

1. Plt. Kepala Badan POM
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

LAMPIRAN 1
Surat Sekretaris Utama
Nomor: B-KA.03.2.07.24.563
Tanggal: 19 Juli 2024

Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

A. Unit Kerja Pusat

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Inspektorat II	100	AA (Sangat Memuaskan)
2	Biro Sumber Daya Manusia	99,32	AA (Sangat Memuaskan)
3	Direktorat Cegah Tangkal	99,23	AA (Sangat Memuaskan)
4	Biro Umum	99,15	AA (Sangat Memuaskan)
5	Pusat Pengembangan SDM Pengawas Obat dan Makanan	99,10	AA (Sangat Memuaskan)
6	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	98,98	AA (Sangat Memuaskan)
7	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	98,75	AA (Sangat Memuaskan)
8	Biro Hukum dan Organisasi	98,47	AA (Sangat Memuaskan)
9	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
10	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
11	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
12	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
13	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
14	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
15	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
16	Biro Perencanaan dan Keuangan	98,46	AA (Sangat Memuaskan)
17	Direktorat Registrasi Obat	98,41	AA (Sangat Memuaskan)
18	Direktorat Siber Obat dan Makanan	98,29	AA (Sangat Memuaskan)
19	Direktorat Pengawasan Kosmetik	98,17	AA (Sangat Memuaskan)
20	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	97,74	AA (Sangat Memuaskan)
21	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	97,71	AA (Sangat Memuaskan)
22	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	97,69	AA (Sangat Memuaskan)
23	Inspektorat I	97,69	AA (Sangat Memuaskan)
24	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	97,58	AA (Sangat Memuaskan)
25	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	97,41	AA (Sangat Memuaskan)
26	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	96,78	AA (Sangat Memuaskan)
27	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	96,54	AA (Sangat Memuaskan)
28	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	95,40	AA (Sangat Memuaskan)
29	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	94,37	AA (Sangat Memuaskan)
30	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	91,11	AA (Sangat Memuaskan)

B. Balai Besar/Balai POM

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Balai Besar POM di Yogyakarta	98,45	AA (Sangat Memuaskan)
2	Balai Besar POM di Surabaya	98,06	AA (Sangat Memuaskan)
3	Balai Besar POM di Bandung	97,63	AA (Sangat Memuaskan)
4	Balai POM di Manokwari	97,58	AA (Sangat Memuaskan)
5	Balai Besar POM di Jayapura	97,56	AA (Sangat Memuaskan)
6	Balai Besar POM di Mataram	97,15	AA (Sangat Memuaskan)
7	Balai Besar POM di Serang	97,04	AA (Sangat Memuaskan)
8	Balai Besar POM di Manado	96,97	AA (Sangat Memuaskan)
9	Balai POM di Ambon	96,96	AA (Sangat Memuaskan)
10	Balai POM di Batam	96,87	AA (Sangat Memuaskan)
11	Balai Besar POM di Pekanbaru	96,83	AA (Sangat Memuaskan)
12	Balai POM di Pangkal Pinang	96,74	AA (Sangat Memuaskan)
13	Balai POM di Bengkulu	96,01	AA (Sangat Memuaskan)
14	Balai POM di Mamuju	95,87	AA (Sangat Memuaskan)
15	Balai Besar POM di Pontianak	95,70	AA (Sangat Memuaskan)
16	Balai Besar POM di Palembang	95,66	AA (Sangat Memuaskan)
17	Balai Besar POM di Jakarta	95,49	AA (Sangat Memuaskan)
18	Balai POM di Jambi	95,42	AA (Sangat Memuaskan)
19	Balai Besar POM di Medan	95,39	AA (Sangat Memuaskan)
20	Balai Besar POM di Banda Aceh	95,35	AA (Sangat Memuaskan)
21	Balai POM di Palu	95,33	AA (Sangat Memuaskan)

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
22	Balai Besar POM di Padang	95,30	AA (Sangat Memuaskan)
23	Balai POM di Kendari	95,30	AA (Sangat Memuaskan)
24	Balai Besar POM di Semarang	95,18	AA (Sangat Memuaskan)
25	Balai Besar POM di Palangkaraya	95,10	AA (Sangat Memuaskan)
26	Balai Besar POM di Denpasar	94,82	AA (Sangat Memuaskan)
27	Balai Besar POM di Makassar	94,35	AA (Sangat Memuaskan)
28	Balai POM di Sofifi	94,32	AA (Sangat Memuaskan)
29	Balai POM di Kupang	93,70	AA (Sangat Memuaskan)
30	Balai POM di Bogor	93,66	AA (Sangat Memuaskan)
31	Balai Besar POM di Bandar Lampung	93,27	AA (Sangat Memuaskan)
32	Balai Besar POM di Samarinda	92,99	AA (Sangat Memuaskan)
33	Balai POM di Gorontalo	92,26	AA (Sangat Memuaskan)
34	Balai POM di Tarakan	92,33	AA (Sangat Memuaskan)
35	Balai POM di Kediri	91,33	AA (Sangat Memuaskan)
36	Balai Besar POM di Banjarmasin	91,89	AA (Sangat Memuaskan)
37	Balai POM di Tasikmalaya	91,32	AA (Sangat Memuaskan)
38	Balai POM di Payakumbuh	88,15	A (Memuaskan)
39	Balai POM di Jember	87,85	A (Memuaskan)
40	Balai POM di Surakarta	85,66	A (Memuaskan)
41	Balai POM di Tangerang	84,16	A (Memuaskan)
42	Balai POM di Palopo	83,03	A (Memuaskan)

C. Loka POM

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	97,49	AA (Sangat Memuaskan)
2	Loka POM di Kabupaten Tabalong	92,36	AA (Sangat Memuaskan)
3	Loka POM di Kabupaten Belitung	91,88	AA (Sangat Memuaskan)
4	Loka POM di Kota Baubau	91,70	AA (Sangat Memuaskan)
5	Loka POM di Kota Dumai	91,62	AA (Sangat Memuaskan)
6	Loka POM di Kabupaten Merauke	90,81	AA (Sangat Memuaskan)
7	Loka POM di Kabupaten Sanggau	90,35	AA (Sangat Memuaskan)
8	Loka POM di Kepulauan Tanimbar	90,17	AA (Sangat Memuaskan)
9	Loka POM di Kabupaten Indragiri hulu	89,87	A (Memuaskan)
10	Loka POM di Kabupaten Banyumas	89,48	A (Memuaskan)
11	Loka POM di Kabupaten Buleleng	89,18	A (Memuaskan)
12	Loka POM di Kabupaten Ende	87,91	A (Memuaskan)
13	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	87,83	A (Memuaskan)
14	Loka POM di Kabupaten Sorong	87,80	A (Memuaskan)
15	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	87,62	A (Memuaskan)
16	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	86,30	A (Memuaskan)
17	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	85,05	A (Memuaskan)
18	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	84,27	A (Memuaskan)
19	Loka POM di Kabupaten Mimika	83,71	A (Memuaskan)
20	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	83,12	A (Memuaskan)
21	Loka POM di Kabupaten Banggai	83,09	A (Memuaskan)
22	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	82,82	A (Memuaskan)
23	Loka POM di Kabupaten Bungo	81,55	A (Memuaskan)

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
24	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	81,25	A (Memuaskan)
25	Loka POM di Kabupaten Tulang Bawang	80,28	A (Memuaskan)
26	Loka POM di Kabupaten Bima	79,55	BB (Sangat Baik)
27	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	78,32	BB (Sangat Baik)
28	Loka POM di Kota Tanjung Balai	75,96	BB (Sangat Baik)
29	Loka POM di Kota Lubuk Linggau	74,57	BB (Sangat Baik)
30	Loka POM di Kota Balikpapan	69,13	B (Baik)
31	Loka POM di Kabupaten Toba	68,31	B (Baik)

Sekretaris Utama,

Dra. Rita Mahyona, Apt, M.Si

IKU 28

Indeks Profesionalitas ASN BBPOM di Makassar

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor : B-KP.17.24.01.25.52 Jakarta, 10 Januari 2025
Lampiran : -
Hal : Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024

Yth. 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPOM
2. Kepala Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh indonesia
di Tempat

Sehubungan dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) dan Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 pasal 16 ayat 1 dinyatakan bahwa Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilakukan secara berkala setiap tahun.
2. Surat Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Nomor 4190/B-BM.02.01/SD/K/2024 Perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, terdapat perubahan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024.
3. Telah dilakukan pengukuran IP ASN Badan POM Tahun 2024 dengan menggunakan aplikasi IP ASN BPOM untuk masing-masing dimensi yaitu:
   a. Dimensi Kualifikasi mengambil data dari Riwayat Pendidikan Terakhir pada Aplikasi SIAP, untuk proses pengukuran disesuaikan dengan syarat minimum pendidikan pada jabatan terakhir Pegawai;
   b. Dimensi Kompetensi dikonversi data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja dengan data dari Riwayat Pengembangan Kompetensi pada Aplikasi SIAP dimana data Riwayat Kompetensi di Aplikasi SIAP terintegrasi pada Aplikasi Pengembangan Kompetensi (PPSDM).
   c. Dimensi Kinerja mengambil data dari Aplikasi SIMAKIN yang diambil dari data kinerja yang sudah dilaporkan melalui SIASN BKN.
   d. Dimensi Disiplin mengambil data disiplin dari SIASN BKN.
4. Berdasarkan hasil pengukuran IP ASN Tahun 2024 *cut off* data per 31 Desember 2024, diperoleh hasil nilai IP ASN Badan POM Tahun 2024 sebesar **86.98**. Data IP

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ASN Badan POM Tahun 2024 sebagaimana pada lampiran. Sebagai informasi nilai IP ASN Badan POM Tahun 2023 adalah **89.99**. terdapat **penurunan nilai IP ASN sebesar 3,01,** hal ini dipengaruhi dengan perubahan pengukuran IP ASN sesuai yang tercantum pada poin 2.

5. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap hasil pengukuran IP ASN dengan nilai dibawah rata-rata, dikarenakan antara lain belum mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis.
6. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profesionalitas pegawai antara lain memberikan penugasan kepada jabatan pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan/diklat fungsional/diklat teknis dan mengikuti seminar/*worksho*p/sejenisnya minimal 20 JP.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Tembusan:
1. Kepala Badan POM;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan POM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN
Surat Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia
Nomor : B-KP.17.24.01.25.52
Tanggal : 10 Januari 2025

Rekapitulasi IP ASN Badan POM Tahun 2024

Unit Kerja	Capaian IP ASN 2024
BPOM	
BPOM	86,98
Unit Kerja Pusat	87,25
Balai Besar/Balai POM	87,10
Loka POM	86,56
IP ASN UNIT ESELON I	
Inspektorat Utama	86,76
Sekretariat Utama	86,58
Deputi Bidang Penindakan	87,23
Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	87,35
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan. dan Kosmetik	87,82
Deputi Bidang Pengawasan Obat. Narkotika. Psikotropika. Prekursor dan Zat adiktif	88,49

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Unit Kerja Pusat

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Inspektorat Utama	86,36	92,9
Inspektorat I	86,09	91,25
Inspektorat II	87,84	94,84
Biro Perencanaan dan Keuangan	84,74	88,7
Biro Hukum dan Organisasi	87,63	87,71
Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	83,82	84,55
Biro Sumber Daya Manusia	85,93	89,12
Biro Umum	85	85,9
Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	87,65	90,79
Balai Pengujian Produk Biologi	89	89,29
Balai Kalibrasi	88,33	89,9
Balai Pengujian Khusus Obat dan Makanan	88	91,71
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,19	88,64
Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	87,27	92,27
Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	86,38	89,63
Direktorat Cegah Tangkal	87,92	89,93
Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	86,56	89,13
Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	87,03	89,42
Direktorat Siber Obat dan Makanan	87,42	90,31
Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	87,82	91,6
Direktorat Registrasi Pangan Olahan	87,56	91,5
Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	87,11	90,81
Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,98	90,56

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	87,27	91,65
Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88,57	92,14
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	88,16	91,74
Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	87,72	92,2
Direktorat Pengawasan Kosmetik	87,35	87,41
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	87,3	91,44
Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	88,69	90,35
Direktorat Registrasi Obat	89,75	92,54
Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	88,5	91,22
Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	87,07	87,21
Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	88,42	91,26

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Balai Besar/Balai POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai Besar POM di Banda Aceh	87,14	90,52
Balai Besar POM di Medan	86,69	91,04
Balai Besar POM di Padang	86,51	90,21
Balai Besar POM di Pekanbaru	86,13	90,81
Balai Besar POM di Palembang	87,75	90,77
Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,68	90,66
Balai Besar POM di Jakarta	87,79	91,5
Balai Besar POM di Bandung	88,8	91,32
Balai Besar POM di Semarang	87,79	91,18
Balai Besar POM di Yogyakarta	88,28	91,66
Balai Besar POM di Surabaya	86,37	90,86
Balai Besar POM di Serang	86,89	89,15
Balai Besar POM di Denpasar	87,43	89,69
Balai Besar POM di Mataram	86,88	90,65
Balai Besar POM di Pontianak	88,06	90,59
Balai Besar POM di Palangkaraya	87,58	91,22
Balai Besar POM di Banjarmasin	87	90,42
Balai Besar POM di Samarinda	86,71	90,59
Balai Besar POM di Manado	87,71	91,31
Balai Besar POM di Makassar	87,25	86,85
Balai Besar POM di Jayapura	86,88	91,08
Balai POM di Jambi	87,68	90,52
Balai POM di Bengkulu	86,76	90,73
Balai POM di Batam	86,16	90,43
Balai POM di Pangkalpinang	87,2	90,82
Balai POM di Kupang	87,25	87,21
Balai POM di Palu	87,12	90,62
Balai POM di Kendari	86,46	90,57
Balai POM di Gorontalo	87,31	86,45
Balai POM di Ambon	87,41	88,84
Balai POM di Manokwari	88,18	88,91
Balai POM di Sofifi	86,86	88,1

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Balai POM di Mamuju	87,09	88,66
Balai POM di Bogor	87,42	90,16
Balai POM di Tasikmalaya	85,42	89,63
Balai POM di Surakarta	87,27	90,64
Balai POM di Jember	86,67	91,59
Balai POM di Kediri	86,07	91,52
Balai POM di Palopo	86,4	90,5
Balai POM di Payakumbuh	88,6	90,53
Balai POM di Tarakan	85,86	89,87
Balai POM di Tangerang	85,71	88,53

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Loka POM

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Loka POM di Kab. Aceh Selatan	85.77	91.29
Loka POM di Kab. Aceh Tengah	85.33	91.5
Loka POM di Kota Tanjung Balai	86.67	91.25
Loka POM di Kab. Toba	85.88	90.31
Loka POM di Kota Lubuklinggau	86.56	87.4
Loka POM di Kab. Banyumas	87.4	90.63
Loka POM di Kab. Buleleng	87.19	88.59
Loka POM di Kab. Mimika	85.94	89.5
Loka POM di Kab. Merauke	86.39	91.25
Loka POM di Kab. Dharmasraya	85	91.36
Loka POM di Kota Dumai	86.16	90.07
Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	87.31	91
Loka POM di Kab. Tulangbawang	86	90
Loka POM di Kab. Bima	86.81	90.86
Loka POM di Kab. Sanggau	86.33	89.62
Loka POM di Kab. Tabalong	87.67	91.31
Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	86.67	91.15
Loka POM di Kota Balikpapan	86	90.08
Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	84.86	88.57
Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	86.15	91.38
Loka POM di Kab. Bungo	85.63	90
Loka POM di Kab. Rejang Lebong	87.74	90.56
Loka POM di Kab. Ende	86.18	89.86
Loka POM di Kab. Manggarai Barat	87.5	86.29

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Loka POM di Kab. Banggai	85.71	88.21
Loka POM di Kota Baubau	85.71	90.71
Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	87.5	89.67
Loka POM di Kota Tanjung Pinang	86.92	91
Loka POM di Kab. Belitung	85.5	89.55
Loka POM di Kab. Sorong	86.88	90.92
Loka POM di Kab. Pulau Morotai	87	90.25
Loka POM di Kab. Sambas	87.19	0
Loka POM di Kab. Belu	88.33	0
Loka POM di Kab. Sumba Timur	89	0

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Dr. Irwansyah, S.IP, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU 29

Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website :www.pom.go.id

Nomor : T-02.01.10.12.24.507 Jakarta, 30 Desember 2024
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampaian Nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar/ Balai POM Tahun 2024

Yth. Bapak/Ibu Kepala Balai Besar/Balai POM (Lampiran 1)
di Lingkungan Badan POM

Menindaklanjuti surat Kepala PPPOMN Nomor B-PR.10.01.10.12.24.705 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pembahasan Hasil Monitoring Evaluasi SKL TW IV Tahun 2024 dan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut SKL Tahun 2025 serta peningkatan kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Balai Besar/Balai POM untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global, maka PPPOMN dan perwakilan dari Balai Besar / Balai POM telah melakukan evaluasi pemenuhan SKL pada hari Senin, 30 Desember 2024 yang dilakukan secara daring.

Penilaian SKL ini secara ringkas sebagai berikut:

1. Dasar penilaian kemampuan laboratorium adalah Keputusan Kepala Badan POM No. 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.
2. Hasil pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium untuk 34 laboratorium Balai Besar POM/Balai POM tahun 2024 adalah **85.91%** atau sebesar **102.76%** dari target 83.60%. Pemenuhan tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dari nilai SKL Tahun 2023 sebesar 82.38%.
3. Kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL telah ditanggapi PPPOMN seperti tercantum pada Lampiran 2.

Sebagai tindak lanjut, diharapkan agar Balai Besar/ Balai POM tetap melakukan pengawalan pemenuhan target untuk tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Pusat Pengembangan Pengujian
Obat dan Makanan Nasional,

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 424 4691, 424 4819, 424 5075, Fax : 424 5150, 420 1427
Email : ppomn@pom.go.id; sekretariatkappomn@gmail.com Website :www.pom.go.id

Tembusan:

1. Sekretaris Utama Badan POM
2. Deputi I, II dan III Badan POM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN I
Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Nomor : T-OT.02.01.10.12.24.507
Tanggal : 30 Desember 2024

DAFTAR BALAI BESAR/BALAI POM

1 Balai Besar POM di Surabaya
2 Balai Besar POM di Semarang
3 Balai Besar POM di Medan
4 Balai Besar POM di Manado
5 Balai Besar POM di Pekanbaru
6 Balai Besar POM di Makassar
7 Balai Besar POM di Samarinda
8 Balai Besar POM di Serang
9 Balai Besar POM di Mataram
10 Balai Besar POM di Padang
11 Balai Besar POM di Denpasar
12 Balai Besar POM di Bandung
13 Balai Besar POM di Pontianak
14 Balai Besar POM di Yogyakarta
15 Balai Besar POM di DKI Jakarta
16 Balai Besar POM di Bandar Lampung
17 Balai Besar POM di Banjarmasin
18 Balai Besar POM di Palembang
19 Balai Besar POM di Aceh
20 Balai Besar POM di Jayapura
21 Balai Besar POM di Palangkaraya
22 Balai POM di Batam
23 Balai POM di Palu
24 Balai POM di Kupang
25 Balai POM di Bengkulu
26 Balai POM di Gorontalo
27 Balai POM di Kendari
28 Balai POM di Ambon
29 Balai POM di Manokwari
30 Balai POM di Pangkalpinang
31 Balai POM di Jambi
32 Balai POM di Mamuju
33 Balai POM di Sofifi
34 Balai POM di Tarakan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN II
Surat Dinas Kepala Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
Nomor : T-OT.02.01.10.12.24.507
Tanggal : 30 Desember 2024

LAPORAN HASIL STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM BALAI BESAR/BALAI POM TAHUN 2024

I. PENDAHULUAN

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Pengawalan terhadap keamanan Obat dan Makanan merupakan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menyebabkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan penguatan sistem manajemen laboratorium karena hasil pengujian di laboratorium merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Mengingat pentingnya pengujian di laboratorium, maka dicantumkan dalam salah satu sasaran kinerja BPOM dalam Peta Strategi 2020-2024 yaitu menguatnya laboratorium pengawasan Obat dan Makanan. Berbagai upaya dilakukan untuk peningkatan kemampuan uji laboratorium agar hasil uji yang dikeluarkan oleh laboratorium di BPOM berkualitas dan valid. Secara umum penguatan kapasitas dan kapabilitas laboratorium dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi penguji, ketersediaan peralatan laboratorium yang digunakan untuk pengujian dan bertambahnya kemampuan uji melalui ruang lingkup pengujian.

Laboratorium Badan POM terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya untuk mewujudkan kemampuan pengujian Obat dan Makanan yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis baik lingkup nasional maupun global. Kapasitas dan kapabiltas laboratorium direfleksikan ke dalam tiga aspek komponen *Good Laboratory Practices* (GLP) dan ditetapkan sebagai Standar Kemampuan Laboratorium Badan POM melalui Keputusan Kepala Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Obat dan Makanan Nomor 470 Tahun 2023 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan yang ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2023.

Standar Kemampuan Laboratorium BB/Balai POM juga mengacu pada sistem Regionalisasi Laboratorium yang ditetapkan di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 193 tahun 2023 Tentang Regionalisasi Laboratorium Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang mengelompokkan Balai Besar/Balai POM ke dalam tujuh Region dengan Balai Besar POM yang memiiliki kapasitas dan kapabilitas yang lebih unggul sebagai Laboratorium Regional, yaitu BBPOM di Medan, BBPOM di Pekanbaru, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Samarinda, BBPOM di Makassar dan BBPOM di Manado. BB/Balai POM lain sebagai Laboratorium Anggota.

Standar Kemampuan Laboratorium merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk:

1. melakukan pemantauan kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian obat dan makanan;
2. menentukan kompetensi teknis penguji di laboratorium dan dasar penyusunan program pelatihan terstruktur bagi peningkatan kompetensi sumber daya manusia pada laboratorium pengujian obat dan makanan;
3. monitoring ketersediaan peralatan laboratorium, baik dari jenis dan jumlahnya.

PPPOMN sebagai pengampu indikator “Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan terhadap Standar Kemampuan Pengujian” telah mengajukan perubahan target SKL Balai Besar/Balai POM tahun 2024 karena adanya penerapan konsep baru regionalisasi laboratorium BPOM. Target SKL Balai Besar/Balai POM pada tahun 2024 adalah 83,60%.

Untuk memperoleh profil kemampuan pengujian di laboratorium di Balai Besar/Balai POM serta memantau pencapaian target masing-masing Balai Besar/Balai POM, maka perlu dilakukan penilaian terhadap standar ruang lingkup, standar kompetensi personel dan terhadap standar peralatan laboratorium. Laboratorium Regional dan Laboratorium Anggota melakukan pengisian tools pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium sesuai dengan penugasannya pada sistem Regionalisasi Laboratorium.

II. TUJUAN

1. Meningkatkan kinerja laboratorium Balai Besar/Balai POM.
2. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam perencanaan dan pemanfaatan sumber daya laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

III. PELAKSANAAN

Hasil penilaian Standar Kemampuan Laboratorium ini berdasarkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi pemenuhan terhadap Standar Kemampuan Laboratorium TW 4 Tahun 2024 dilaksanakan berdasarkan surat Kepala PPPOMN Nomor B-PR.10.01.10.12.24.477 tanggal 5 Desember 2024 dan surat Kepala PPPOMN Nomor B-PR.10.01.10.12.24.705 tanggal 27 Desember 2024 tentang Pembahasan Hasil Monitoring Evaluasi SKL TW IV Tahun 2024 dan Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut SKL Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, 30 Desember 2024 secara daring/*on line* antara PPPOMN dan perwakilan dari Balai Besar/Balai POM.

Balai Besar/Balai POM melengkapi tools monev SKL sesuai beserta kelengkapan data dukungnya. Standar Kemampuan Laboratorium yang digunakan pada tahun 2024 adalah standar yang tercantum di dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 470 tahun 2023 Tentang Standar kemampuan laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Pengukuran capaian untuk Indikator Kinerja Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan Terhadap Standar Kemampuan Laboratorium dilakukan setiap triwulan, namun penetapan nilai SKL di Balai Besar/Balai POM dilakukan pada akhir tahun. Dengan dilakukannya monitoring dan evaluasi diharapkan dapat mengawal tercapainya pemenuhan SKL sesuai target akhir tahun 2024 yaitu 83,60%.

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI POM

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Penilaian SKL BB/Balai POM Tahun 2024.

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan			
1.	Banda Aceh	92.02	93.91	77.32	87.75	87.00	100.86
2.	Ambon	91.50	92.07	76.19	86.59	85.10	101.75
3.	Bandar Lampung	95.42	94.33	71.91	87.22	84.50	103.22
4.	Bandung	93.18	91.79	81.30	88.76	88.04	100.81
5.	Banjarmasin	87.45	89.97	72.76	83.39	81.32	102.55
6.	Batam	95.30	92.60	73.30	87.07	85.00	102.43
7.	Bengkulu	90.28	92.46	82.70	88.48	87.50	101.12

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
8.	Denpasar	89.27	96.76	85.26	90.43	87.00	103.96
9.	DKI Jakarta	93.44	97.93	82.35	91.24	88.00	103.68
10.	Gorontalo	94.80	98.68	73.33	88.94	87.34	101.83
11.	Jambi	88.42	90.82	75.30	84.85	82.00	103.47
12.	Jayapura	88.49	94.93	76.32	86.58	83.70	103.44
13.	Kendari	86.42	96.10	76.96	86.49	86.00	100.57
14.	Kupang	85.30	94.94	82.51	87.58	86.75	100.96
15.	Makassar	91.73	90.27	87.89	89.96	85.44	105.29
16.	Mamuju	69.64	90.28	54.11	71.34	63.96	111.54
17.	Manado	90.40	92.88	81.70	88.33	84.50	104.53
18.	Manokwari	90.17	92.76	70.81	84.58	85.00	99.51
19.	Mataram	96.62	98.87	91.74	95.74	95.00	100.78
20.	Medan	91.16	96.34	80.98	89.49	88.33	101.32
21.	Padang	89.13	97.57	84.06	90.26	89.43	100.93
22.	Palangkaraya	88.90	98.24	78.56	88.57	86.42	102.48
23.	Palembang	87.21	93.32	81.94	87.49	86.30	101.38
24.	Palu	90.65	96.03	76.62	87.77	86.00	102.05
25.	Pangkalpinang	94.64	88.27	75.11	86.01	83.00	103.62
26.	Pekanbaru	89.13	91.80	85.36	88.76	85.17	104.22
27.	Pontianak	90.35	96.59	77.48	88.14	87.23	101.04
28.	Samarinda	88.27	92.94	75.69	85.63	82.08	104.33
29.	Semarang	92.57	95.93	85.81	91.44	88.84	102.92
30.	Serang	95.99	97.23	88.30	93.84	93.17	100.72
31.	Sofifi	70.02	73.32	46.60	63.31	52.83	119.84
32.	Surabaya	89.69	92.70	85.30	89.23	88.74	100.55
33.	Yogyakarta	94.86	99.03	82.05	91.98	89.20	103.12
34.	Tarakan	40.78	61.04	29.17	43.66	41.57	105.04

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
	Rata-rata	88.33	92.73	76.67	85.91	83.60	102.76

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Besar/Balai POM dalam pemenuhan target SKL TW 4 Tahun 2024 seperti tercantum pada Lampiran berikut:

Lampiran 1. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Obat
Lampiran 2. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Pangan
Lampiran 3. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan
Lampiran 4. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Kosmetik
Lampiran 5. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Mikrobiologi
Lampiran 6. Kendala/permasalahan Baku Pembanding
Lampiran 7. Kendala/permasalahan Peralatan

V. PEMBAHASAN

Pemenuhan target SKL tahun 2024 yaitu **85.91** % meningkat dibandingkan dengan TW 1 tahun 2024 yaitu 83,33%, TW 2 sebesar 83,92% serta TW 3 sebesar 84.81%. Jika dihitung terhadap target sebesar 83.60% maka perolehan nilai 85.91% adalah sebesar 102.76% diatas target yang ditetapkan.

Peningkatan tersebut terjadi di ketiga aspek yang menjadi komponen SKL yaitu:

No.	Aspek SKL	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1.	SRL	84,33%	85,41%	86,76%	88.33%
2.	Standar Kompetensi	90,87%	91,20%	92,06%	92.73%
3.	Standar Peralatan	74,78%	75,14%	75,59%	76.67%

Persentase pemenuhan terhadap target tahun 2024 berada pada rentang 99,51% - 119,84%. Terdapat 4 (Empat) Balai Besar / Balai POM dengan persentase pemenuhan terhadap target tahun 2024 sebesar 105% atau lebih, yaitu Balai POM di Sofifi (119,84%) , Balai POM di Mamuju (111,54%), Balai Besar POM di Makassar (105,29%), POM di Tarakan (105,04%). Peningkatan terutama pada aspek ruang lingkup dan kompetensi. Peningkatan yang cukup tinggi untuk tiga Balai POM di atas dapat merupakan salah satu dari adanya kunjungan dari PPPOMN dalam rangka asesmen dan koordinasi fungsi pengujian yang salah satu tujuannya adalah meningkatnya pengelolaan laboratorium sesuai dengan sistem yang berlaku di laboratorium BPOM antara lain Standar Kemampuan Laboratorium.

Balai Besar/Balai POM juga melakukan identifikasi kendala/permasalahan dalam pemenuhan SKL dan secara mandiri merencanakan solusi untuk mengatasinya. PPPOMN selalu mendorong Balai Besar/Balai POM untuk meningkatkan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

kemandirian dalam mengatasi kendala/permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang telah dialokasikan serta memanfaatkan jejaring diantara laboratorium dalam 1 (satu) regional atau antar regional, namun demikian PPPOMN tetap akan memberikan masukan jika diperlukan.

Paralel dengan usaha balai dalam mengatasi kendala/permasalahan pengujian, PPPOMN juga melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka mendukung peningkatan pemenuhan SKL Balai Besar/Balai POM antara lain:

a. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan kemampuan pengujian bagi Balai Besar/Balai POM di PPPOMN.
b. Keikutsertaan staf PPPOMN sebagai narasumber/instruktur pada kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh Balai Besar/Balai POM.
c. Penyelenggaraan uji profisiensi dan uji kolaborasi
d. Assesmen dan Koordinasi Fungsi Pengujian antara BB/Balai POM yang bertujuan meningkatnya pengelolaan laboratorium sesuai dengan sistem yang berlaku di laboratorium BPOM antara lain Standar Kemampuan Laboratorium.

VI. KESIMPULAN

1. Pemenuhan nilai SKL Balai Besar/Balai POM Tahun 2024 sebesar **85.91 %** atau sebesar **102,76%** dari target yang ditetapkan tahun 2024 sebesar 83.60%.
2. Kegiatan yang diselenggarakan PPPOMN berkontribusi nyata dalam peningkatan pemenuhan nilai SKL seluruh BB/Balai POM.

VII. SARAN

Balai Besar/Balai POM diharapkan dapat selalu mengawal pemenuhan target SKL yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil pengujian.

Jakarta, 30 Desember 2024

Menyetujui, Kepala PPPOMN,	Penyusun Laporan, Ketua Tim SKL BB/Balai POM,
Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.	Atiek S.E.S., S.Si, Apt., MKM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Obat

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
1.	BBPOM di Samarinda	1. Peningkatan kompetensi Analisis secara Spektrofluorometri belum terlaksana di TW 3 karena pelatihan alat di di rencanakan di Tw 3 di undur menjadi di TW 4 2. Sediaan Mometasone Furoate Salep, Cefachlor untuk sediaan suspensi oral, Cefachlor kapsul yang menjadi target SRL sulit diperoleh	1.Pelatihan Spektrofluorometri di TW 4 2. Menambah List target peningkatan SRL dengan sediaan yang lain	1. Bimtek pengujian dengan Spektrofluorometri dilaksanakan TW4 di 21-25 Oktober 2. NA

Lampiran 2. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Pangan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
	Tidak ada informasi kendala / permasalahan			

Lampiran 3. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
	Tidak ada informasi kendala / permasalahan			

Lampiran 4. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Kosmetik

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
	Tidak ada informasi kendala / permasalahan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5. Kendala/permasalahan Pemenuhan SRL Mikrobiologi

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
	Tidak ada informasi kendala / permasalahan			

Lampiran 6. Kendala/permasalahan Pemenuhan Baku Pembanding

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
	Tidak ada informasi kendala / permasalahan			

Lampiran 7. Kendala/permasalahan Pemenuhan Peralatan

No.	BB/Balai POM	Kendala	Rencana tindak Lanjut	Tanggapan PPPOMN
	Tidak ada informasi kendala / permasalahan			

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Indikator Kinerja Utama 29 : Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

IV. HASIL MONITORING DAN EVALUASI SKL BALAI POM

Tabel 1 : Rekapitulasi Hasil Penilaian SKL BB/Balai POM Tahun 2024.

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
		Ruang Lingkup	Kompetensi	Peralatan			
1.	Banda Aceh	92.02	93.91	77.32	87.75	87.00	100.86
2.	Ambon	91.50	92.07	76.19	86.59	85.10	101.75
3.	Bandar Lampung	95.42	94.33	71.91	87.22	84.50	103.22
4.	Bandung	93.18	91.79	81.30	88.76	88.04	100.81
5.	Banjarmasin	87.45	89.97	72.76	83.39	81.32	102.55
6.	Batam	95.30	92.60	73.30	87.07	85.00	102.43
7.	Bengkulu	90.28	92.46	82.70	88.48	87.50	101.12

No.	BB/Balai POM	Pemenuhan Standar (%)			Nilai SKL (%)	Target Thn 2024 (%)	Pemenuhan thd target 2024 (%)
8.	Denpasar	89.27	96.76	85.26	90.43	87.30	103.62
9.	DKI Jakarta	93.44	97.93	82.35	91.24	88.00	103.68
10.	Gorontalo	94.80	98.68	73.33	88.94	87.34	101.83
11.	Jambi	88.42	90.82	75.30	84.85	82.00	103.47
12.	Jayapura	88.49	94.93	76.32	86.58	83.70	103.44
13.	Kendari	86.42	96.10	76.96	86.49	86.00	100.57
14.	Kupang	85.30	94.94	82.51	87.58	86.75	100.96
15.	Makassar	91.73	90.27	87.89	89.96	85.44	105.29
16.	Mamuju	69.64	90.28	54.11	71.34	63.96	111.54
17.	Manado	90.40	92.88	81.70	88.33	84.50	104.53
18.	Manokwari	90.17	92.76	70.81	84.58	85.00	99.51
19.	Mataram	96.62	98.87	91.74	95.74	95.00	100.78
20.	Medan	91.16	96.34	80.98	89.49	88.33	101.32
21.	Padang	89.13	97.57	84.06	90.26	89.43	100.93
22.	Palangkaraya	88.90	98.24	78.56	88.57	86.42	102.48
23.	Palembang	87.21	93.32	81.94	87.49	86.30	101.38
24.	Palu	90.65	96.03	76.62	87.77	86.00	102.05
25.	Pangkalpinang	94.64	88.27	75.11	86.01	83.00	103.62
26.	Pekanbaru	89.13	91.80	85.36	88.76	85.17	104.22
27.	Pontianak	90.35	96.59	77.48	88.14	87.23	101.04
28.	Samarinda	88.27	92.94	75.69	85.63	82.08	104.33
29.	Semarang	92.57	95.93	85.81	91.44	88.84	102.92
30.	Serang	95.99	97.23	88.30	93.84	93.17	100.72
31.	Sofifi	70.02	73.32	46.60	63.31	52.83	119.84
32.	Surabaya	89.69	92.70	85.30	89.23	88.74	100.55
33.	Yogyakarta	94.86	99.03	82.05	91.98	89.20	103.12
34.	Tarakan	40.78	61.04	29.17	43.66	41.57	105.04

IKU 30

Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Makassar yang optimal

REKAPITULASI
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi 2024

Indeks	Januari	Febuari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	KETERANGAN
Indeks Pemanfaatan	**3**	**3**	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**2,75**	**3**	**3**	**3**	**3**	Realisasi sudah mencapai nilai Maksimal Nilai = 3
Indeks Pemutakhiran	**1,4**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**2,2**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi	**2,2**	**2,6**	**2,48**	**2,48**	**2,48**	**2,48**	**2,88**	**2,88**	**3**	**3**	**3**	**3**	Realisasi sudah sesuai dengan Target

IKU 31

Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Makassar

Download Excel

Tampilkan 25 entri

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	432923	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN MAKASSAR	85,00	96,59	90,80

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Copyright © 2023 DSP DJA KEMENKEU. All rights reserved.

IKU 32

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOTA DINAS
Nomor: B- KP.09.01.25.01.25.37

Yth : Kepala Bagian Rumah Tangga
Tembusan : Kepala Biro Umum
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Perihal : Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Tanggal : 9 Januari 2025

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor B-KP.09.01.2.12.24.956 tanggal 16 Desember 2024 perihal Permintaan masukan terkait dengan Direktif Penugasan dan Inisiatif Strategis Tahun 2025, kami sampaikan Definisi Operasional sebagaimana terlampir untuk Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2025.

Selanjutnya, terkait dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2024, terutama indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, berikut disampaikan Hasil Pengukuran kedua indikator kinerja tersebut, untuk dapat dikompilasi dengan indikator kinerja lain.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Renggo Triwijoyo, S.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MANUAL IKU DIREKTIF PENUGASAN TAHUN ANGGARAN 2024

PERSENTASE REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

A. MANUAL IKU

Rencana Kinerja	:	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Definisi Operasional	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : 1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. 2. Realisasi Pe milihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
Formula Perhitungan	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah : - Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%). - Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%). - Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2024).
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis IKU	:	Output tingkat kendali rendah
Penanggungjawab IKU	:	(Unit Kerja masing-masing)
Pihak Penyedia Data	:	Hasil penilaian Biro Umum
Sumber Data	:	Tahunan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

B. KERTAS KERJA INDIKATOR

1. Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri.

2. Penilaian penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 terhadap seluruh satker di lingkungan BPOM.

3. Target tahun 2025 didasarkan pada Nilai IKU Tahun 2024 setelah dilakukan pembulatan secara matematis serta batas bawah target. Untuk Satker yang tidak memenuhi target, maka target tahun depan mengikuti batas bawah target, yaitu 65.

C. MATRIKS SANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI TARGET 2024

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	26,02	36,71	74,73	60	75
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	27,68	42,28	65,93	60	66
3	Balai Besar POM di Bandung	20,56	32,18	73,90	60	74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	82,30	61,22	76,09	60	76
5	Balai Besar POM di Denpasar	32,23	34,28	58,18	60	65
6	Balai Besar POM di Jakarta	40,96	42,13	68,68	60	69
7	Balai Besar POM di Jayapura	39,49	36,54	63,48	60	65
8	Balai Besar POM di Makasar	38,41	34,97	64,06	60	65
9	Balai Besar POM di Manado	32,86	67,19	88,65	60	89
10	Balai Besar POM di Mataram	25,11	34,83	76,51	60	77
11	Balai Besar POM di Medan	20,39	30,73	66,36	60	66
12	Balai Besar POM di Padang	24,27	37,22	71,43	60	71
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	7,60	30,20	60,43	60	65
14	Balai Besar POM di Palembang	32,23	41,27	79,30	60	79
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	26,01	47,34	44,13	60	65
16	Balai Besar POM di Pontianak	34,90	38,98	59,43	60	65
17	Balai Besar POM di Samarinda	30,98	21,17	54,89	60	65
18	Balai Besar POM di Semarang	22,83	39,52	58,49	60	65
19	Balai Besar POM di Serang	33,75	47,38	72,37	60	72
20	Balai Besar POM di Surabaya	38,40	40,05	78,29	60	78
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	38,19	37,66	69,06	60	69
22	Balai POM di Ambon	24,98	58,69	86,82	60	87
23	Balai POM di Batam	49,86	27,01	65,95	60	66
24	Balai POM di Bengkulu	32,33	41,63	71,37	60	71
25	Balai POM di Kabupaten Bogor	39,29	42,52	83,30	60	83
26	Balai POM di Gorontalo	27,14	23,61	52,75	60	65
27	Balai POM di Jambi	23,99	36,12	54,69	60	65
28	Balai POM di Kabupaten Jember	28,78	31,83	56,98	60	65
29	Balai POM di Kediri	19,57	41,28	73,79	60	74
30	Balai POM di Kendari	42,42	37,16	63,24	60	65
31	Balai POM di Tarakan	44,44	35,22	92,71	60	93
32	Balai POM di Kupang	31,17	27,70	72,33	60	72
33	Balai POM di Mamuju	41,28	33,01	75,10	60	75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
34	Balai POM di Manokwari	47,14	28,43	60,06	60	65
35	Balai POM di Kota Palopo	32,05	28,80	92,20	60	92
36	Balai POM di Palu	38,90	30,23	79,84	60	80
37	Balai POM di Pangkal Pinang	4,56	37,58	71,25	60	71
38	Balai POM di Kota Payakumbuh	51,08	33,07	95,63	60	96
39	Balai POM di Sofifi	9,97	75,57	60,51	75	75
40	Balai POM di Kota Surakarta	29,45	31,78	97,80	60	98
41	Balai POM di Kabupaten Tangerang	41,52	50,65	99,07	60	99
42	Balai POM di Kota Tasikmalaya	49,11	40,16	95,42	60	95
43	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	7,10	31,69	96,44	60	96
44	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	21,69	20,40	78,61	60	79
45	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	16,35	23,53	86,80	60	87
46	Deputi Bidang Penindakan	40,18	45,10	78,41	60	78
47	Inspektorat Utama	37,94	22,01	97,22	60	97
48	Loka POM di Bungo	45,46	33,95	95,90	60	96
49	Loka POM di Kab Banggai	46,79	35,91	97,44	60	97
50	Loka POM di Kab Bima	11,94	35,03	77,04	60	77
51	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	47,67	31,18	96,39	60	96
52	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	43,51	86,40	89,77	86	90
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	51,94	37,93	95,73	60	96
54	Loka POM di Kabupaten Belitung	60,47	39,61	99,82	60	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
55	Loka POM di Kabupaten Buleleng	53,34	31,43	96,53	60	97
56	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	36,66	37,55	96,27	60	92
57	Loka POM di Kabupaten Ende	6,68	22,86	50,83	60	65
58	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	25,45	21,38	93,40	60	93
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	37,25	24,43	99,66	60	100
60	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	53,73	90,10	94,80	90	95
61	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	44,68	44,63	86,32	60	86
62	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	32,63	36,45	93,07	60	93
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	1,69	29,69	77,90	60	78
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	41,12	23,48	96,64	60	97
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	45,38	49,95	86,79	60	87
66	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	49,09	89,54	97,20	60	97
67	Loka POM di Kabupaten Sanggau	32,93	35,40	94,93	60	95
68	Loka POM di Kabupaten Sorong	57,54	46,77	94,60	60	95
69	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	49,41	61,47	97,82	61	98
70	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	60,95	42,49	95,04	60	95
71	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	41,55	45,75	93,03	60	93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
72	Loka POM di Kota Balikpapan	42,61	30,93	76,07	60	76
73	Loka POM di Kota Baubau	19,31	35,64	99,62	60	100
74	Loka POM di Kota Dumai	63,78	66,26	93,72	66	94
75	Loka POM di Kota Lubuklinggau	51,98	34,69	96,70	60	97
76	Loka POM di Kota Tanjungbalai	22,56	35,59	95,43	60	95
77	Loka POM di Kota Tanjungpinang	45,40	30,87	102,70	60	100
78	Loka POM di Tabalong	39,44	27,97	88,89	60	89
79	Pusat Data dan Informasi	73,63	69,22	74,78	70	75
80	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	31,80	26,53	54,72	60	65
81	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	12,63	20,08	84,14	60	84
82	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	63,76	47,92	85,60	60	86
83	Sekretariat Utama	42,91	45,02	90,36	60	90

Keterangan :

1. Realisasi tahun 2023 yang digunakan sebagai dasar penetapan target 2024 adalah realisasi pada tw 3 (proses penetapan IKU dilakukan sepanjang tw 4 tahun 2023).
2. Warna merah adalah Satker yang tidak mencapai target.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. MANUAL IKU

Rencana Kinerja	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Definisi Operasional	:	Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu: • Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%); • Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%); • Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%); • Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%); • Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis IKU	:	Output tingkat kendali rendah
Penanggungjawab IKU	:	(Unit Kerja masing-masing)
Pihak Penyedia Data	:	Hasil penilaian Biro Umum
Sumber Data	:	Tahunan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

B. KERTAS KERJA INDIKATOR

Target tahun 2025 didasarkan pada tren realisasi 2022, realisasi 2023 dan realisasi tahun 2024, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2024; dan

b. untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2024 di bawah atau sama dengan 75, maka target kinerja ditetapkan pada angka 75.

C. MATRIKS SANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI TARGET 2024

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,53	95,00	100,00	87,53	94,18
3	Balai Besar POM di Bandung	63,81	95,00	95,00	70	84,60
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	91,58	100,00	100,00	91,58	97,19
5	Balai Besar POM di Denpasar	75,68	80,00	90,00	75,68	81,89
6	Balai Besar POM di Jakarta	75,09	100,00	100,00	75,09	91,70
7	Balai Besar POM di Jayapura	63,60	95,00	95,00	70	84,53
8	Balai Besar POM di Makasar	50,00	95,00	95,00	70	80,00
9	Balai Besar POM di Manado	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
10	Balai Besar POM di Mataram	92,84	100,00	100,00	92,84	97,61
11	Balai Besar POM di Medan	75,28	95,00	80,00	75,28	83,43
12	Balai Besar POM di Padang	70,83	95,00	95,00	74	86,94
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	50,00	100,00	100,00	70	83,33
14	Balai Besar POM di Palembang	94,35	100,00	100,00	94,35	98,12
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	76,87	90,00	100,00	76,87	88,96
16	Balai Besar POM di Pontianak	83,33	95,00	95,00	83,33	91,11
17	Balai Besar POM di Samarinda	95,55	100,00	100,00	95,55	98,52
18	Balai Besar POM di Semarang	89,28	90,00	95,00	89,28	91,43
19	Balai Besar POM di Serang	78,20	95,00	95,00	78,20	89,40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
20	Balai Besar POM di Surabaya	96,43	95,00	90,00	96,43	93,81
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	65,52	100,00	100,00	70	88,51
22	Balai POM di Ambon	65,17	70,00	95,00	70	76,72
23	Balai POM di Batam	78,28	95,00	95,00	78,28	89,43
24	Balai POM di Bengkulu	66,67	95,00	95,00	70	85,56
25	Balai POM di Kabupaten Bogor	61,11	100,00	100,00	70	87,04
26	Balai POM di Gorontalo	97,52	100,00	85,00	97,52	94,17
27	Balai POM di Jambi	50,00	100,00	100,00	70	83,33
28	Balai POM di Kabupaten Jember	65,68	100,00	95,00	70	86,89
29	Balai POM di Kediri	33,33	100,00	90,00	70	75,00
30	Balai POM di Kendari	50,00	100,00	100,00	60	83,33
31	Balai POM di Tarakan	66,67	90,00	95,00	60	83,89
32	Balai POM di Kupang	77,78	95,00	100,00	60	90,93
33	Balai POM di Mamuju	62,50	100,00	95,00	60	85,83
34	Balai POM di Manokwari	91,72	100,00	100,00	60	97,24
35	Balai POM di Kota Palopo	52,07	100,00	95,00	60	82,36
36	Balai POM di Palu	88,74	100,00	100,00	88,74	96,25
37	Balai POM di Pangkal Pinang	75,60	90,00	90,00	75,60	85,20
38	Balai POM di Kota Payakumbuh	41,67	95,00	95,00	70	77,22
39	Balai POM di Sofifi	77,78	95,00	95,00	77,78	89,26
40	Balai POM di Kota Surakarta	41,72	95,00	95,00	70	77,24
41	Balai POM di Kabupaten Tangerang	66,10	100,00	95,00	70	87,03
42	Balai POM di Kota Tasikmalaya	50,00	80,00	95,00	60	75,00
43	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	44,05	90,00	90,00	70	75,00
44	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	59,09	100,00	95,00	70	84,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
45	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	43,59	95,00	95,00	70	77,86
46	Deputi Bidang Penindakan	50,00	80,00	65,00	70	75
47	Inspektorat Utama	66,67	95,00	100	70	87,22
48	Loka POM di Bungo	100,00	100,00	100,00	100	100,00
49	Loka POM di Kab Banggai	50,00	100,00	100,00	70	83,33
50	Loka POM di Kab Bima	50,00	100,00	100,00	70	83,33
51	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	45,03	100,00	100,00	70	81,68
52	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	50,00	100,00	100,00	70	83,33
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	50,00	100,00	100,00	70	83,33
54	Loka POM di Kabupaten Belitung	28,08	90,00	95,00	70	75,00
55	Loka POM di Kabupaten Buleleng	69,32	70,00	95,00	70	78,11
56	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	61,99	100,00	100,00	70	87,33
57	Loka POM di Kabupaten Ende	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
58	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	33,33	100,00	95,00	70	76,11
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	45,83	100,00	100,00	70	81,94
60	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	79,17	100,00	100,00	79,17	93,06
61	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	66,67	100,00	100,00	70	88,89
62	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	33,33	95,00	95,00	70	75,00
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	33,33	100,00	100,00	70	77,78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	50,00	100,00	100,00	70	83,33
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	66,44	100,00	95,00	70	87,15
66	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	66,67	100,00	95,00	70	87,22
67	Loka POM di Kabupaten Sanggau	66,67	100,00	100,00	70	88,89
68	Loka POM di Kabupaten Sorong	66,67	95,00	100,00	70	87,22
69	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	66,67	100,00	100,00	70	88,89
70	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	60,77	90,00	90,00	70	80,26
71	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	47,48	100,00	100,00	70	82,49
72	Loka POM di Kota Balikpapan	50,00	90,00	95,00	70	78,33
73	Loka POM di Kota Baubau	33,33	80,00	100,00	70	75,00
74	Loka POM di Kota Dumai	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
75	Loka POM di Kota Lubuklinggau	46,34	100,00	100,00	70	82,11
76	Loka POM di Kota Tanjungbalai	33,33	100,00	100,00	70	77,78
77	Loka POM di Kota Tanjungpinang	66,67	90,00	95,00	70	83,89
78	Loka POM di Tabalong	66,67	100,00	100,00	70	88,89
79	Pusat Data dan Informasi	73,63	95,00	90,00	70	86,21
80	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	31,80	95,00	95,00	77,12	75,00
81	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	12,63	50,00	85,00	70	75,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
82	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	63,76	90,00	80,00	70	77,92
83	Sekretariat Utama	42,91	90,00	90,00	70	75,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU 33

Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

BADAN POM

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia
Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

Nomor	:	B-PL.03.01.25.01.25.12	Jakarta, 9 Januari 2025
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM	

Kepada Yth.
Terlampir

Sehubungan akan adanya penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Tahun 2025, Biro Umum sebagai Unit Kerja Pengampu di bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pengelolaan BMN yang dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Badan POM. Untuk itu dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Biro Umum adalah terhadap satuan kerja yang mampu mengelola BMN dengan baik, dengan parameter :
   a. Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMN;
   b. Ketepatan Waktu penyampaian Usulan RkBMN;
   c. Nilai PSP BMN dibandingkan total nilai aset;
   d. Nilai Penghapuan BMN Rusak Berat dibandingkan Total Nilai Aset Rusak Berat;
   e. Nilai Pemusnahan Persediaan usang/rusak dibandingkan Total Nilai Persediaan Usang/Rusak.
2. Bahwa penilaian yang kami lakukan telah merujuk kepada data ataupun laporan yang disampaikan oleh Satuan Kerja kepada Biro Umum serta sesuai data yang ada pada Aplikasi SIMAN BMN Versi 2 dan Aplikasi SiRoum.
3. Terlampir hasil penilaian satuan kerja yang mampu mengelola BMN dengan Baik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,



Dr. Ir. Antonius Tarigan, M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran I

1. Kepala Satker Sekretariat Utama
2. Kepala Satker Kedeputian I
3. Kepala Satker Kedeputian II
4. Kepala Satker Kedeputian III
5. Kepala Satker Kedeputian IV
6. Kepala Satker Inspektorat Utama
7. Kepala Satker Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan
8. Kepala Satker Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan
9. Kepala Satker Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional
10. Kepala Satker Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan
11. Kepala Satker Balai Besar POM di Jakarta
12. Kepala Satker Balai Besar POM di Yogyakarta
13. Kepala Satker Balai Besar POM di Banda Aceh
14. Kepala Satker Balai Besar POM di Semarang
15. Kepala Satker Balai Besar POM di Banjarmasin
16. Kepala Satker Balai Besar POM di Makassar
17. Kepala Satker Balai Besar POM di Palembang
18. Kepala Satker Balai Besar POM di Padang
19. Kepala Satker Balai Besar POM di Surabaya
20. Kepala Satker Balai Besar POM di Pekanbaru
21. Kepala Satker Balai Besar POM di Mataram
22. Kepala Satker Balai Besar POM di Palangkaraya
23. Kepala Satker Balai Besar POM di Pontianak
24. Kepala Satker Balai Besar POM di Jayapura
25. Kepala Satker Balai Besar POM di Bandung
26. Kepala Satker Balai Besar POM di Medan
27. Kepala Satker Balai Besar POM di Lampung
28. Kepala Satker Balai Besar POM di Denpasar
29. Kepala Satker Balai Besar POM di Samarinda
30. Kepala Satker Balai Besar POM di Serang
31. Kepala Satker Balai Besar POM di Manado
32. Kepala Satker Balai POM di Jambi
33. Kepala Satker Balai POM di Batam
34. Kepala Satker Balai POM di Ambon
35. Kepala Satker Balai POM di Sofifi
36. Kepala Satker Balai POM di Palu
37. Kepala Satker Balai POM di Kendari
38. Kepala Satker Balai POM di Gorontalo
39. Kepala Satker Balai POM di Pangkal Pinang
40. Kepala Satker Balai POM di Bengkulu
41. Kepala Satker Balai POM di Mamuju
42. Kepala Satker Balai POM di Kupang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

43. Kepala Satker Balai POM di Manokwari
44. Kepala Satker Balai POM di Surakarta
45. Kepala Satker Balai POM di Palopo
46. Kepala Satker Balai POM di Kediri
47. Kepala Satker Balai POM di Jember
48. Kepala Satker Balai POM di Bogor
49. Kepala Satker Balai POM di Tasikmalaya
50. Kepala Satker Balai POM di Tarakan
51. Kepala Satker Balai POM di Tangerang
52. Kepala Satker Balai POM di Payakumbuh
53. Kepala Satker Loka POM di Banyumas
54. Kepala Satker Loka POM di Lubuk Linggau
55. Kepala Satker Loka POM di Kepulauan Tanimbar
56. Kepala Satker Loka POM di Dumai
57. Kepala Satker Loka POM di Baubau
58. Kepala Satker Loka POM di Mimika
59. Kepala Satker Loka POM di Ende
60. Kepala Satker Loka POM di Aceh Tengah
61. Kepala Satker Loka POM di Aceh Selatan
62. Kepala Satker Loka POM di Sungai Penuh
63. Kepala Satker Loka POM di Tanjung Pinang
64. Kepala Satker Loka POM di Tabalong
65. Kepala Satker Loka POM di Tanah Bumbu
66. Kepala Satker Loka POM di Morotai
67. Kepala Satker Loka POM di Banggai
68. Kepala Satker Loka POM di Dharmasraya
69. Kepala Satker Loka POM di Indragiri Hulu
70. Kepala Satker Loka POM di Bima
71. Kepala Satker Loka POM di Kotawaringin Barat
72. Kepala Satker Loka POM di Sanggau
73. Kepala Satker Loka POM di Belitung
74. Kepala Satker Loka POM di Merauke
75. Kepala Satker Loka POM di Rejang Lebong
76. Kepala Satker Loka POM di Toba Samosir
77. Kepala Satker Loka POM di Tanjung Balai
78. Kepala Satker Loka POM di Tulang Bawang
79. Kepala Satker Loka POM di Buleleng
80. Kepala Satker Loka POM di Balikpapan
81. Kepala Satker Loka POM di Manggarai
82. Kepala Satker Loka POM di Sorong
83. Kepala Satker Loka POM di Sangihe

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
1	Sekretariat Utama	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik
2	BBPOM Semarang	25,00	70,75	28,73	10,00	19,98	20	20	98,71	sangat baik
3	BBPOM Yogyakarta	25,00	70,75	28,73	10,00	19,99	20	16	94,72	sangat baik
4	BPOM Surakarta	25,00	69,75	28,43	10,00	15,31	20	20	93,73	sangat baik
5	Loka POM Banyumas	25,00	69,75	28,43	10,00	20,00	20	16	94,43	sangat baik
6	BBPOM Pontianak	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	20	19	97,94	sangat baik
7	Loka POM Sanggau	16,67	69,75	25,93	7,50	8,36	20	16	77,79	baik
8	BBPOM Banjarmasin	25,00	70,50	28,65	10,00	19,97	20	20	98,62	sangat baik
9	BBPOM Palangkaraya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	20	98,56	sangat baik
10	Loka POM Tabalong	25,00	70,75	28,73	10,00	19,99	20	20	98,71	sangat baik
11	Loka POM Tanah Bumbu	25,00	71,00	28,80	10,00	20,00	20	16	94,80	sangat baik
12	Loka POM Kotawaringin Barat	25,00	70,50	28,65	10,00	19,80	20	16	94,45	sangat baik
13	BPOM Jambi	25,00	71,00	28,80	10,00	19,95	20	20	98,75	sangat baik
14	BPOM Bengkulu	22,92	70,50	28,03	10,00	20,00	20	20	98,02	sangat baik
15	Loka POM Rejang Lebong	22,92	70,50	28,03	10,00	19,53	20	16	93,56	sangat baik
16	Loka POM Bungo	20,83	70,00	27,25	10,00	17,29	20	16	90,54	sangat baik
17	BBPOM Makassar	25,00	69,75	28,43	7,50	19,66	20	20	95,59	sangat baik
18	BPOM Ambon	25,00	70,00	28,50	10,00	19,55	16	20	94,45	sangat baik
19	BPOM Mamuju	25,00	70,25	28,58	10,00	19,55	20	20	98,13	sangat baik
20	BPOM Palopo	25,00	70,50	28,65	10,00	11,00	20	16	85,65	sangat baik
21	Loka POM Tanimbar	25,00	70,00	28,50	7,50	19,11	20	16	91,11	sangat baik
22	BBPOM Padang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,98	20	20	98,63	sangat baik
23	BPOM Batam	25,00	70,50	28,65	10,00	19,85	20	20	98,50	sangat baik
24	BPOM Payakumbuh	25,00	70,25	28,58	10,00	14,22	20	16	88,80	sangat baik
25	Loka POM Dharmasraya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,69	20	16	94,34	sangat baik
26	Loka POM Tanjungpinang	25,00	70,25	28,58	10,00	13,73	20	16	88,31	sangat baik
27	Deputi 1	22,92	70,50	28,03	7,50	19,88	20	16	91,41	sangat baik
28	Deputi 3	25,00	70,50	28,65	10,00	19,87	20	20	98,52	sangat baik
29	Inspektorat Utama	25,00	70,50	28,65	10,00	19,76	20	20	98,41	sangat baik
30	Deputi II	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	16	94,56	sangat baik
31	PPPOMN	25,00	70,00	28,50	10,00	19,93	20	20	98,43	sangat baik
32	PUSDATIN	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik
33	BBPOM di Jayapura	25,00	70,50	28,65	10,00	19,54	20	20	98,19	sangat baik
34	BBPOM di Samarinda	25,00	70,50	28,65	10,00	19,93	20	20	98,58	sangat baik
35	BBPOM di Surabaya	25,00	70,50	28,65	10,00	19,79	20	20	98,44	sangat baik
36	BBPOM di Medan	25,00	70,50	28,65	7,50	19,51	20	20	95,66	sangat baik
37	BBPOM di Pekanbaru	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	18	97,00	sangat baik
38	BBPOM di Mataram	25,00	70,50	28,65	10,00	19,99	20	20	98,64	sangat baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
39	BPOM di Tarakan	25,00	70,00	28,50	7,50	19,88	20	20	95,88	sangat baik
40	BPOM di Palu	25,00	71,25	28,88	10,00	19,96	20	20	98,83	sangat baik
41	BPOM di Kediri	25,00	70,00	28,50	10,00	9,43	20	16	83,93	sangat baik
42	BPOM di Kendari	25,00	70,50	28,65	10,00	19,98	19	20	98,09	sangat baik
43	BPOM di Jember	25,00	70,00	28,50	10,00	7,89	20	20	86,39	sangat baik
44	BPOM di Manokwari	25,00	70,50	28,65	10,00	19,38	19	20	97,09	sangat baik
45	Loka POM di Dumai	25,00	70,50	28,65	10,00	19,86	20	16	94,51	sangat baik
46	Loka POM di Sorong	25,00	70,25	28,58	7,50	19,28	20	16	91,35	sangat baik
47	Loka POM di Balikpapan	25,00	70,00	28,50	10,00	19,66	20	16	94,16	sangat baik
48	Loka POM di Bima	25,00	69,75	28,43	10,00	19,23	20	16	93,65	sangat baik
49	Loka POM di Baubau	25,00	70,50	28,65	10,00	18,68	20	16	93,33	sangat baik
50	Loka POM di Banggai	25,00	70,50	28,65	10,00	18,54	20	16	93,19	sangat baik
51	Loka POM di Toba	18,75	69,75	26,55	10,00	19,60	20	16	92,15	sangat baik
52	Loka POM di Indragiri Hulu	25,00	70,50	28,65	10,00	19,75	20	16	94,40	sangat baik
53	Loka POM di Mimika	25,00	70,25	28,58	7,50	19,13	20	16	91,21	sangat baik
54	Loka POM di Tanjungbalai	18,75	70,25	26,70	10,00	19,92	20	16	92,62	sangat baik
55	Loka POM di Merauke	18,75	69,75	26,55	7,50	19,45	20	16	89,50	sangat baik
56	Deputi IV	20,83	69,75	27,18	10,00	19,93	20	16	93,10	sangat baik
57	PPSDMPOM	22,92	70,25	27,95	7,50	19,41	20	16	90,86	sangat baik
58	PAKOM	25,00	69,00	28,20	10,00	19,79	20	16	93,99	sangat baik
59	BBPOM di Denpasar	25,00	71,25	28,88	10,00	19,98	20	19	97,92	sangat baik
60	BPOM di Kupang	25,00	71,25	28,88	10,00	19,94	20	16	94,82	sangat baik
61	Loka POM di Ende	25,00	71,25	28,88	10,00	19,89	20	16	94,77	sangat baik
62	Loka Buleleng	16,67	71,25	26,38	7,50	20,00	20	16	89,87	sangat baik
63	Loka Manggarai	25,00	71,25	28,88	10,00	19,60	20	16	94,47	sangat baik
64	BBPOM di Banda Aceh	20,83	69,75	27,18	7,50	19,80	17	20	91,14	sangat baik
65	BBPOM di Jakarta	25,00	70,50	28,65	10,00	19,94	20	20	98,59	sangat baik
66	BBPOM di Serang	25,00	70,25	28,58	10,00	19,95	20	20	98,53	sangat baik
67	BBPOM di Manado	25,00	70,25	28,58	10,00	20,00	20	20	98,58	sangat baik
68	BPOM di Gorontalo	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	20	20	98,60	sangat baik
69	BPOM di Sofifi	25,00	70,50	28,65	10,00	20,00	20	16	94,65	sangat baik
70	BPOM di Tangerang	25,00	70,25	28,58	7,50	16,96	20	20	93,04	sangat baik
71	Loka Aceh Tengah	25,00	69,25	28,28	10,00	18,40	20	16	92,67	sangat baik
72	Loka Aceh Selatan	25,00	69,25	28,28	10,00	19,43	20	16	93,70	sangat baik
73	Loka Morotai	22,92	70,50	28,03	10,00	19,10	20	16	93,13	sangat baik
74	Loka Sangihe	25,00	70,25	28,58	10,00	14,45	20	16	89,03	sangat baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Ketepatan Waktu (25%)	Kualitas (75%)	Pelaporan yang Baik (30%)	RKBMN (10%)	PSP (20%)	Penghapusan (20%)	Pemusnahan (20%)	Total	Penilaian
75	BBPOM di Palembang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,95	19	20	97,82	sangat baik
76	BBPOM di Bandar Lampung	22,92	69,75	27,80	10,00	19,93	20	20	97,73	sangat baik
77	BBPOM di Bandung	25,00	69,75	28,43	7,50	19,64	20	20	95,57	sangat baik
78	BPOM di Pangkal Pinang	25,00	70,50	28,65	10,00	19,94	20	20	98,59	sangat baik
79	BPOM di Bogor	22,92	69,00	27,58	7,50	16,68	20	20	91,76	sangat baik
80	BPOM di Tasikmalaya	25,00	69,75	28,43	10,00	15,72	20	20	94,15	sangat baik
81	Loka POM di Lubuklinggau	25,00	70,50	28,65	10,00	19,91	20	16	94,56	sangat baik
82	Loka Belitung	25,00	70,50	28,65	10,00	18,53	20	16	93,18	sangat baik
83	Loka Tulang Bawang	25,00	70,50	28,65	10,00	20,00	20	16	94,65	sangat baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU 34

Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOTA DINAS
Nomor: B- KP.09.01.25.01.25.37

Yth : Kepala Bagian Rumah Tangga
Tembusan : Kepala Biro Umum
Dari : Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa
Perihal : Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Tanggal : 9 Januari 2025

Sehubungan dengan Surat Sekretaris Utama Nomor B-KP.09.01.2.12.24.956 tanggal 16 Desember 2024 perihal Permintaan masukan terkait dengan Direktif Penugasan dan Inisiatif Strategis Tahun 2025, kami sampaikan Definisi Operasional sebagaimana terlampir untuk Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2025.

Selanjutnya, terkait dengan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama/Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM Tahun 2024, terutama indikator Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, berikut disampaikan Hasil Pengukuran kedua indikator kinerja tersebut, untuk dapat dikompilasi dengan indikator kinerja lain.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Renggo Triwijoyo, S.Kom

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MANUAL IKU DIREKTIF PENUGASAN TAHUN ANGGARAN 2024

PERSENTASE REALISASI BELANJA PRODUK DALAM NEGERI

A. MANUAL IKU

Rencana Kinerja	:	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
Indikator Kinerja Utama	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri
Definisi Operasional	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan : 1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan. 2. Realisasi Pe milihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.
Formula Perhitungan	:	Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri pada tiap-tiap satuan kerja di lingkungan BPOM adalah : - Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan pada Satker tersebut (70%). - Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut (30%). - Persentase Realisasi Belanja PDN pada satuan kerja di lingkungan Badan POM pada tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

		minimal 60%. (Akan Direviu Kembali sambil melihat capaian 2024).
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis IKU	:	Output tingkat kendali rendah
Penanggungjawab IKU	:	(Unit Kerja masing-masing)
Pihak Penyedia Data	:	Hasil penilaian Biro Umum
Sumber Data	:	Tahunan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

B. KERTAS KERJA INDIKATOR

1. Mengacu pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka seluruh Kementerian/Lembaga diharapkan untuk meningkatkan belanja pengadaan barang/jasa dalam negeri.

2. Penilaian penggunaan produk dalam negeri telah dilakukan perhitungan sejak tahun 2022 terhadap seluruh satker di lingkungan BPOM.

3. Target tahun 2025 didasarkan pada Nilai IKU Tahun 2024 setelah dilakukan pembulatan secara matematis serta batas bawah target. Untuk Satker yang tidak memenuhi target, maka target tahun depan mengikuti batas bawah target, yaitu 65.

C. MATRIKS SANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI TARGET 2024

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	26,02	36,71	74,73	60	75
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	27,68	42,28	65,93	60	66
3	Balai Besar POM di Bandung	20,56	32,18	73,90	60	74

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	82,30	61,22	76,09	60	76
5	Balai Besar POM di Denpasar	32,23	34,28	58,18	60	65
6	Balai Besar POM di Jakarta	40,96	42,13	68,68	60	69
7	Balai Besar POM di Jayapura	39,49	36,54	63,48	60	65
8	Balai Besar POM di Makasar	38,41	34,97	64,06	60	65
9	Balai Besar POM di Manado	32,86	67,19	88,65	60	89
10	Balai Besar POM di Mataram	25,11	34,83	76,51	60	77
11	Balai Besar POM di Medan	20,39	30,73	66,36	60	66
12	Balai Besar POM di Padang	24,27	37,22	71,43	60	71
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	7,60	30,20	60,43	60	65
14	Balai Besar POM di Palembang	32,23	41,27	79,30	60	79
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	26,01	47,34	44,13	60	65
16	Balai Besar POM di Pontianak	34,90	38,98	59,43	60	65
17	Balai Besar POM di Samarinda	30,98	21,17	54,89	60	65
18	Balai Besar POM di Semarang	22,83	39,52	58,49	60	65
19	Balai Besar POM di Serang	33,75	47,38	72,37	60	72
20	Balai Besar POM di Surabaya	38,40	40,05	78,29	60	78
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	38,19	37,66	69,06	60	69
22	Balai POM di Ambon	24,98	58,69	86,82	60	87
23	Balai POM di Batam	49,86	27,01	65,95	60	66
24	Balai POM di Bengkulu	32,33	41,63	71,37	60	71
25	Balai POM di Kabupaten Bogor	39,29	42,52	83,30	60	83
26	Balai POM di Gorontalo	27,14	23,61	52,75	60	65
27	Balai POM di Jambi	23,99	36,12	54,69	60	65
28	Balai POM di Kabupaten Jember	28,78	31,83	56,98	60	65
29	Balai POM di Kediri	19,57	41,28	73,79	60	74
30	Balai POM di Kendari	42,42	37,16	63,24	60	65
31	Balai POM di Tarakan	44,44	35,22	92,71	60	93
32	Balai POM di Kupang	31,17	27,70	72,33	60	72
33	Balai POM di Mamuju	41,28	33,01	75,10	60	75

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
34	Balai POM di Manokwari	47,14	28,43	60,06	60	65
35	Balai POM di Kota Palopo	32,05	28,80	92,20	60	92
36	Balai POM di Palu	38,90	30,23	79,84	60	80
37	Balai POM di Pangkal Pinang	4,56	37,58	71,25	60	71
38	Balai POM di Kota Payakumbuh	51,08	33,07	95,63	60	96
39	Balai POM di Sofifi	9,97	75,57	60,51	75	75
40	Balai POM di Kota Surakarta	29,45	31,78	97,80	60	98
41	Balai POM di Kabupaten Tangerang	41,52	50,65	99,07	60	99
42	Balai POM di Kota Tasikmalaya	49,11	40,16	95,42	60	95
43	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	7,10	31,69	96,44	60	96
44	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	21,69	20,40	78,61	60	79
45	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	16,35	23,53	86,80	60	87
46	Deputi Bidang Penindakan	40,18	45,10	78,41	60	78
47	Inspektorat Utama	37,94	22,01	97,22	60	97
48	Loka POM di Bungo	45,46	33,95	95,90	60	96
49	Loka POM di Kab Banggai	46,79	35,91	97,44	60	97
50	Loka POM di Kab Bima	11,94	35,03	77,04	60	77
51	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	47,67	31,18	96,39	60	96
52	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	43,51	86,40	89,77	86	90
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	51,94	37,93	95,73	60	96
54	Loka POM di Kabupaten Belitung	60,47	39,61	99,82	60	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
55	Loka POM di Kabupaten Buleleng	53,34	31,43	96,53	60	97
56	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	36,66	37,55	96,27	60	92
57	Loka POM di Kabupaten Ende	6,68	22,86	50,83	60	65
58	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	25,45	21,38	93,40	60	93
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	37,25	24,43	99,66	60	100
60	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	53,73	90,10	94,80	90	95
61	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	44,68	44,63	86,32	60	86
62	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	32,63	36,45	93,07	60	93
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	1,69	29,69	77,90	60	78
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	41,12	23,48	96,64	60	97
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	45,38	49,95	86,79	60	87
66	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	49,09	89,54	97,20	60	97
67	Loka POM di Kabupaten Sanggau	32,93	35,40	94,93	60	95
68	Loka POM di Kabupaten Sorong	57,54	46,77	94,60	60	95
69	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	49,41	61,47	97,82	61	98
70	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	60,95	42,49	95,04	60	95
71	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	41,55	45,75	93,03	60	93

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023*)	2024		
72	Loka POM di Kota Balikpapan	42,61	30,93	76,07	60	76
73	Loka POM di Kota Baubau	19,31	35,64	99,62	60	100
74	Loka POM di Kota Dumai	63,78	66,26	93,72	66	94
75	Loka POM di Kota Lubuklinggau	51,98	34,69	96,70	60	97
76	Loka POM di Kota Tanjungbalai	22,56	35,59	95,43	60	95
77	Loka POM di Kota Tanjungpinang	45,40	30,87	102,70	60	100
78	Loka POM di Tabalong	39,44	27,97	88,89	60	89
79	Pusat Data dan Informasi	73,63	69,22	74,78	70	75
80	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	31,80	26,53	54,72	60	65
81	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	12,63	20,08	84,14	60	84
82	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	63,76	47,92	85,60	60	86
83	Sekretariat Utama	42,91	45,02	90,36	60	90

Keterangan :

1. Realisasi tahun 2023 yang digunakan sebagai dasar penetapan target 2024 adalah realisasi pada tw 3 (proses penetapan IKU dilakukan sepanjang tw 4 tahun 2023).
2. Warna merah adalah Satker yang tidak mencapai target.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

MENINGKATNYA KUALITAS PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

A. MANUAL IKU

Rencana Kinerja	:	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Indikator Kinerja Utama	:	Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
Definisi Operasional	:	Nilai pengelolan pengadaan barang dan jasa unit kerja dihitung berdasarkan Pemanfaatan Sistem Pengadaan dengan memperhatikan 5 indikator yaitu: • Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 10%); • Persentase penerapan proses E- Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 5%); • Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 5%); • Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 5%); • Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 5%). Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan dibulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.
Satuan Pengukuran	:	Nilai
Jenis IKU	:	Output tingkat kendali rendah
Penanggungjawab IKU	:	(Unit Kerja masing-masing)
Pihak Penyedia Data	:	Hasil penilaian Biro Umum
Sumber Data	:	Tahunan
Periode Pelaporan	:	Tahunan

B. KERTAS KERJA INDIKATOR

Target tahun 2025 didasarkan pada tren realisasi 2022, realisasi 2023 dan realisasi tahun 2024, dengan tetap mempertimbangkan batas bawah penetapan target, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

a. untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2024 di atas 75, maka target kinerja mengikuti baseline nilai tahun 2024; dan

b. untuk Satker Pusat/UPT yang memiliki nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa Tahun 2024 di bawah atau sama dengan 75, maka target kinerja ditetapkan pada angka 75.

C. MATRIKS SANDINGAN REALISASI DAN PROYEKSI TARGET 2024

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
1	Balai Besar POM di Banda Aceh	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
2	Balai Besar POM di Bandar Lampung	87,53	95,00	100,00	87,53	94,18
3	Balai Besar POM di Bandung	63,81	95,00	95,00	70	84,60
4	Balai Besar POM di Banjarmasin	91,58	100,00	100,00	91,58	97,19
5	Balai Besar POM di Denpasar	75,68	80,00	90,00	75,68	81,89
6	Balai Besar POM di Jakarta	75,09	100,00	100,00	75,09	91,70
7	Balai Besar POM di Jayapura	63,60	95,00	95,00	70	84,53
8	Balai Besar POM di Makasar	50,00	95,00	95,00	70	80,00
9	Balai Besar POM di Manado	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
10	Balai Besar POM di Mataram	92,84	100,00	100,00	92,84	97,61
11	Balai Besar POM di Medan	75,28	95,00	80,00	75,28	83,43
12	Balai Besar POM di Padang	70,83	95,00	95,00	74	86,94
13	Balai Besar POM di Palangkaraya	50,00	100,00	100,00	70	83,33
14	Balai Besar POM di Palembang	94,35	100,00	100,00	94,35	98,12
15	Balai Besar POM di Pekanbaru	76,87	90,00	100,00	76,87	88,96
16	Balai Besar POM di Pontianak	83,33	95,00	95,00	83,33	91,11
17	Balai Besar POM di Samarinda	95,55	100,00	100,00	95,55	98,52
18	Balai Besar POM di Semarang	89,28	90,00	95,00	89,28	91,43
19	Balai Besar POM di Serang	78,20	95,00	95,00	78,20	89,40

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
20	Balai Besar POM di Surabaya	96,43	95,00	90,00	96,43	93,81
21	Balai Besar POM di Yogyakarta	65,52	100,00	100,00	70	88,51
22	Balai POM di Ambon	65,17	70,00	95,00	70	76,72
23	Balai POM di Batam	78,28	95,00	95,00	78,28	89,43
24	Balai POM di Bengkulu	66,67	95,00	95,00	70	85,56
25	Balai POM di Kabupaten Bogor	61,11	100,00	100,00	70	87,04
26	Balai POM di Gorontalo	97,52	100,00	85,00	97,52	94,17
27	Balai POM di Jambi	50,00	100,00	100,00	70	83,33
28	Balai POM di Kabupaten Jember	65,68	100,00	95,00	70	86,89
29	Balai POM di Kediri	33,33	100,00	90,00	70	75,00
30	Balai POM di Kendari	50,00	100,00	100,00	60	83,33
31	Balai POM di Tarakan	66,67	90,00	95,00	60	83,89
32	Balai POM di Kupang	77,78	95,00	100,00	60	90,93
33	Balai POM di Mamuju	62,50	100,00	95,00	60	85,83
34	Balai POM di Manokwari	91,72	100,00	100,00	60	97,24
35	Balai POM di Kota Palopo	52,07	100,00	95,00	60	82,36
36	Balai POM di Palu	88,74	100,00	100,00	88,74	96,25
37	Balai POM di Pangkal Pinang	75,60	90,00	90,00	75,60	85,20
38	Balai POM di Kota Payakumbuh	41,67	95,00	95,00	70	77,22
39	Balai POM di Sofifi	77,78	95,00	95,00	77,78	89,26
40	Balai POM di Kota Surakarta	41,72	95,00	95,00	70	77,24
41	Balai POM di Kabupaten Tangerang	66,10	100,00	95,00	70	87,03
42	Balai POM di Kota Tasikmalaya	50,00	80,00	95,00	60	75,00
43	Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif	44,05	90,00	90,00	70	75,00
44	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	59,09	100,00	95,00	70	84,70

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
45	Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan	43,59	95,00	95,00	70	77,86
46	Deputi Bidang Penindakan	50,00	80,00	65,00	70	75
47	Inspektorat Utama	66,67	95,00	100	70	87,22
48	Loka POM di Bungo	100,00	100,00	100,00	100	100,00
49	Loka POM di Kab Banggai	50,00	100,00	100,00	70	83,33
50	Loka POM di Kab Bima	50,00	100,00	100,00	70	83,33
51	Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan	45,03	100,00	100,00	70	81,68
52	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	50,00	100,00	100,00	70	83,33
53	Loka POM di Kabupaten Banyumas	50,00	100,00	100,00	70	83,33
54	Loka POM di Kabupaten Belitung	28,08	90,00	95,00	70	75,00
55	Loka POM di Kabupaten Buleleng	69,32	70,00	95,00	70	78,11
56	Loka POM di Kabupaten Dharmasraya	61,99	100,00	100,00	70	87,33
57	Loka POM di Kabupaten Ende	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
58	Loka POM di Kabupaten Indragiri Hulu	33,33	100,00	95,00	70	76,11
59	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Sangihe	45,83	100,00	100,00	70	81,94
60	Loka POM di Kabupaten Kepulauan Tanimbar	79,17	100,00	100,00	79,17	93,06
61	Loka POM di Kabupaten Kotawaringin Barat	66,67	100,00	100,00	70	88,89
62	Loka POM di Kabupaten Manggarai Barat	33,33	95,00	95,00	70	75,00
63	Loka POM di Kabupaten Merauke	33,33	100,00	100,00	70	77,78

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
64	Loka POM di Kabupaten Mimika	50,00	100,00	100,00	70	83,33
65	Loka POM di Kabupaten Pulau Morotai	66,44	100,00	95,00	70	87,15
66	Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong	66,67	100,00	95,00	70	87,22
67	Loka POM di Kabupaten Sanggau	66,67	100,00	100,00	70	88,89
68	Loka POM di Kabupaten Sorong	66,67	95,00	100,00	70	87,22
69	Loka POM di Kabupaten Tanah Bumbu	66,67	100,00	100,00	70	88,89
70	Loka POM di Kabupaten Toba Samosir	60,77	90,00	90,00	70	80,26
71	Loka POM di Kabupaten Tulangbawang	47,48	100,00	100,00	70	82,49
72	Loka POM di Kota Balikpapan	50,00	90,00	95,00	70	78,33
73	Loka POM di Kota Baubau	33,33	80,00	100,00	70	75,00
74	Loka POM di Kota Dumai	83,33	100,00	100,00	83,33	94,44
75	Loka POM di Kota Lubuklinggau	46,34	100,00	100,00	70	82,11
76	Loka POM di Kota Tanjungbalai	33,33	100,00	100,00	70	77,78
77	Loka POM di Kota Tanjungpinang	66,67	90,00	95,00	70	83,89
78	Loka POM di Tabalong	66,67	100,00	100,00	70	88,89
79	Pusat Data dan Informasi	73,63	95,00	90,00	70	86,21
80	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	31,80	95,00	95,00	77,12	75,00
81	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	12,63	50,00	85,00	70	75,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Satuan Kerja	Realisasi			Target 2024	Usulan Target 2025
		2022	2023	2024		
82	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	63,76	90,00	80,00	70	77,92
83	Sekretariat Utama	42,91	90,00	90,00	70	75,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

